



BUPATI TANGERANG  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG  
NOMOR 16 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan berwawasan lingkungan dalam upaya peningkatan daya saing daerah melalui kolaborasi antarsektor, diperlukan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
  - b. bahwa agar pelaksanaan tujuan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berjalan dengan baik, tepat sasaran, serta berkelanjutan, diperlukan dokumen perencanaan pembangunan yang dituangkan ke dalam rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) minggu setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi ditetapkan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025;

Mengingat...

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan...

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten tangerang Tahun 2009 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025.

BABI  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tangerang.

5. Dewan...

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, Program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

Pasal 2

RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

BAB II  
RKPD

Pasal 3

RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025 berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

Pasal 4

- (1) Sistematika RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025 disusun sebagai berikut:
  - a. Bab I, Pendahuluan;
  - b. Bab II, Gambaran Umum Kondisi Daerah;
  - c. Bab III, Kerangka Ekonomi Dan Keuangan Daerah;
  - d. Bab IV, Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025;
  - e. Bab V, Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah;
  - f. Bab VI, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - g. Bab VII, Penutup.
- (2) RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025 menjadi:
  - a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2025; dan
  - b. dasar penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS Tahun 2025.
- (2) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijadikan sebagai landasan penyusunan rancangan APBD Tahun 2025.

Pasal 6

Program dan kegiatan yang sifatnya mendesak dan tidak tertuang dalam RKPD Tahun 2025, dapat dimasukkan dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 sepanjang mendapatkan persetujuan dari Bupati dan DPRD, serta dituangkan ke dalam Perubahan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7...

Pasal 7

- (1) Perubahan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
  - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi Daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program, serta kegiatan prioritas Daerah; dan/atau
  - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melakukan tahapan evaluasi dalam hal terjadi keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025 sebagaimana dimaksud ada ayat (1) menjadi pedoman perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (4) Perubahan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2025.

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran, kegiatan, dan Indikator Kinerja masing-masing program dan kegiatan.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala BAPPEDA paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya bulan bersangkutan.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 9

Kepala BAPPEDA menelaah kesesuaian antara RKA Perangkat Daerah dengan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025.

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala BAPPEDA.
- (3) Pengendalian dan evaluasi RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. pengendalian kebijakan, dilakukan untuk menjamin bahwa RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025 telah disusun sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, telah selaras, dengan sasaran, strategi, arah kebijakan, Program pembangunan Daerah, dan Program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, RKPD Tahun 2025 dan Program strategis nasional;
  - b. pengendalian pelaksanaan, dilakukan untuk menjamin prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah, serta Indikator Kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025; dan
  - c. evaluasi hasil, dilaksanakan untuk menilai daya serap, capaian target kinerja Program/kegiatan mencakup masukan, keluaran dan hasil yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025.
- (4) Pengendalian kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan bersamaan dengan penyusunan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025.
- (5) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025.

(6) Evaluasi..

- (6) Evaluasi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilaksanakan secara periodik setiap triwulan pada Tahun 2025.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa  
pada tanggal 4 Juli 2024

Pj. BUPATI TANGERANG,

ANDI ONY PRIHARTONO

Diundangkan di Tigaraksa  
pada tanggal 4 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANGERANG,

MOCHAMMAD MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2024 NOMOR 16

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TANGERANG  
NOMOR 16 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN TANGERANG  
TAHUN 2025

BABI  
PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025, merupakan dokumen perencanaan pemerintah daerah tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan merupakan tahun perencanaan transisi. Dokumen RKPD 2025 disusun dengan mempedomani RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026, dan juga memperhatikan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 Kabupaten Tangerang, dan Rancangan RPJPD Kab. Tangerang Tahun 2025-2045. Perencanaan tahunan dalam RKPD Tahun 2025 disusun sebagai fondasi awal untuk dapat menghubungkan transisi estafet pembangunan antar RPJPD (periode 2005-2025 ke 2025-2045) dan antar RPJMD/RPD (periode 2024-2026 ke 2025-2029) yang selanjutnya dikaitkan dengan perencanaan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam dokumen RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 sebagaimana yang telah dilegalisasi melalui Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2023, bahwasanya tujuan dan sasaran yang terkandung dalam dokumen RPD ini berpedoman pada visi dan misi RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025. Visi pembangunan Kabupaten Tangerang yaitu "Kabupaten Tangerang Berdaya Saing Menuju Masyarakat Madani." dengan 5 (lima) misi pembangunan meliputi:

- 1) Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia;
- 2) Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal;
- 3) Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional;
- 4) Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif; dan
- 5) Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

Sementara didalam dokumen Rancangan RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045, disebutkan terkait bahwa visi RPJPD Kabupaten Tangerang tahun 2025-2045 adalah:

**"TERWUJUDNYA KABUPATEN TANGERANG GEMILANG YANG MAJU,  
SEJAHTERA, BERDAYA SAING, DAN BERKELANJUTAN".**

Dari Visi tersebut, kemudian dirumuskan 8 Misi Kabupaten Tangerang tahun 2025-2045, yaitu :

- 1) Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi
- 2) Mewujudkan Perekonomian yang Kokoh melalui Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- 3) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien
- 4) Mewujudkan Keamanan dan Perekonomian Daerah yang Stabil
- 5) Mewujudkan Kelembagaan Masyarakat yang Tangguh untuk Mendukung Keberlanjutan Lingkungan Hidup
- 6) Mewujudkan Keterpaduan Penataan Ruang untuk Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan
- 7) Mewujudkan Pemenuhan Kapasitas dan Layanan Sarana Prasarana secara Menyeluruh
- 8) Mewujudkan Pembangunan yang Berkesinambungan Didukung Kolaborasi dan Manajemen Berbasis Risiko

Setelah dilakukan penyesuaian maka secara umum arah kebijakan RKPD Tahun 2025, difokuskan pada "PEMERATAAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN DALAM UPAYA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH MELALUI KOLABORASI ANTAR SEKTOR".

Dokumen RKPD Tahun 2025 ini disusun tidak hanya berpedoman terhadap dokumen yang disebutkan di awal saja, namun juga perlu mempertimbangkan terhadap kebijakan yang masih berlaku seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2024 tentang Rancangan Rencana kerja Pemerintah Tahun 2025 serta aturan-aturan lainnya yang masih berlaku.

Pada Tahun 2025 nanti selain Penetapan RKPD 2026 juga harus dilakukan bersamaan dengan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025 disusun dengan tahapan meliputi persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD. Prinsip-prinsip dalam penyusunan RKPD Tahun 2025 meliputi :

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah;

- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Pendekatan perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses dalam penyusunan RKPD Tahun 2025, menggunakan pendekatan :

- a. Teknokratik, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
- b. partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan relevansi, kesetaraan, adanya transparansi dan akuntabilitas, keterwakilan, terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah dan terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan dalam merumuskan masalah dan prioritas pembangunan daerah;
- c. politis, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD dengan memperhatikan pula pokok-pokok pikiran yang berasal dari DPRD;
- d. atas-bawah dan bawah-atas, merupakan hasil perencanaan yang diselenggarakan dalam musyawarah pembangunan. Pendekatan bottom-up (bawah-atas) dilakukan dengan memperhatikan usulan prioritas dari desa/kelurahan, kecamatan hasil dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, yang dibahas dalam Musrenbang tingkat kabupaten. Sedangkan pendekatan top-down (atas-bawah) dilakukan dengan mengacu pada agenda dan prioritas pembangunan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah dan juga arah kebijakan dan prioritas pembangunan provinsi Banten.

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, dalam penyusunan RKPD Tahun 2025, menggunakan pendekatan :

- a. holistik-tematik, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;
- b. integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah; dan
- c. spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan, terkait pengembangan kawasan berbasis kewilayahan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Tangerang sesuai dengan permasalahan dan potensi setiap desa/kelurahan dan kecamatan.

Sesuai pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Seiring diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah, maka penyusunan RKPD Tahun 2025 dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kemendagri.

Dengan seluruh pendekatan perencanaan yang ditunjang penerapan sistem informasi perencanaan dan penganggaran terpadu melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), maka RKPD Tahun 2025 diharapkan menjadi dokumen perencanaan yang memenuhi prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian daerah, sehingga dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas seluruh proses perencanaan dan penganggaran daerah.

RKPD Tahun 2025 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025. Sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah dirumuskan dalam penyusunan RKPD berdasarkan Renstra Perangkat Daerah, Program Pembangunan Daerah, serta perkembangan permasalahan pembangunan daerah lainnya.

Dokumen RKPD memiliki substansi rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaan indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, bahwa RKPD merupakan pedoman untuk penyusunan Rancangan APBD, sehingga memiliki konsekuensi bahwa rencana kerja program, dan kegiatan dalam RKPD harus benar-benar terukur dan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran.

Keterbatasan sumberdaya yang dimiliki Kabupaten Tangerang untuk pengembangan dan pembangunan menuntut dilakukannya proses penyatuan persepsi dan aspirasi tentang prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah yang berorientasi secara optimal kepada kebutuhan nyata masyarakat, sehingga diharapkan dapat diidentifikasi isu-isu strategis, masalah-masalah mendasar, prioritas program dan kegiatan, serta fokus pembangunan yang perlu dilakukan secara bertahap dalam upaya pencapaian visi daerah.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, RKPD diharapkan tidak lagi memuat daftar panjang usulan kegiatan Perangkat Daerah, akan tetapi dapat lebih bersifat Spesifik (Specific), Terukur (Measurable), dapat dicapai (Achievable), memperhatikan ketersediaan sumber daya (Resources Availability), dan tepat waktu (Time). Disamping itu, nilai keberlanjutan dalam pelaksanaan pembangunan penting untuk diwujudkan, agar dapat mencapai dan mempertemukan kebutuhan antar ruang dan waktu sekaligus menuntaskan upaya pemecahan masalah secara integral dan komprehensif. RKPD Tahun 2025 juga disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Sehingga, RKPD diharapkan dapat memberikan arah yang tepat, akurat dan benar-benar menopang kebutuhan pembangunan ditengah terbatasnya kemampuan anggaran Daerah.

## 2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum yang dipergunakan dalam penyusunan RKPD 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 01 tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180)
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

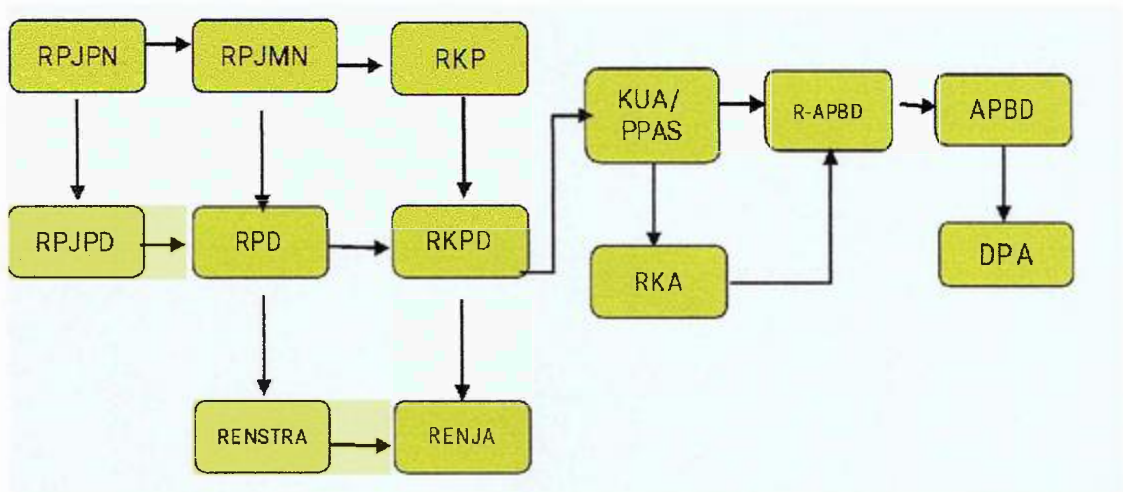
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bapenas Nomor 2 Tahun 2024 tentang RKP Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2023-2043 (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2023);
21. Peraturan Gubernur Banten 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 3);
22. Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 11).
23. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 9);
26. Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 39);

### 3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RKPD mempedomani dokumen perencanaan daerah lainnya seperti RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025, Revisi RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 dan dokumen perencanaan lainnya yang bersifat mengikat. Lebih lanjut hubungan RKPD dengan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah yaitu RKPD memuat program, kegiatan dan sub kegiatan PD, penjabaran Renstra PD dan dokumen RKPD merupakan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan Renja PD untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Hubungan antara RKPD Tahun 2025 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

- a. RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025 disusun seiring dengan penyusunan RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045 yaitu melalui penyalarsan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program perangkat Daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJPD.
- b. RKPD Tahun 2025 disusun berpedoman pada RKP Tahun 2025, RKPD Provinsi Banten Tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026, yang dilakukan melalui penyalarsan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi serta program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi.
- c. RKPD Tahun 2025 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2023-2043 dan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011- 2031.
- d. RKPD Tahun 2025 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Gambar 1.1  
Hubungan Antar Dokumen



#### 4. Maksud dan Tujuan

RKPD Tahun 2025 disusun dengan maksud menentukan arah kebijakan Pembangunan dan prioritas Pembangunan daerah Kab. Tangerang Tahun 2025. Selain itu juga sebagai acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. RKPD merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026.

Adapun tujuan dari penyusunan RKPD Tahun 2025 adalah :

- a. Memberikan landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan Pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Tangerang yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025
- b. Menjadi pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025
- c. Menjadi acuan penyelarasan prioritas Pembangunan Kabupaten dengan Provinsi Banten dan nasional.

#### 5. Sistematika Dokumen RKPD

Penyajian RKPD disusun menurut sistematika sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 sebagaimana dibawah ini :

##### BABI PENDAHULUAN

Menggambarkan mengenai Latar Belakang Penyusunan Dokumen RKPD, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Dokumen RKPD Tahun 2024.

##### BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan mengenai Gambaran Umum Kondisi Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai dengan Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD serta Permasalahan Pembangunan.

##### BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah yang mengemukakan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

##### BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Menjelaskan mengenai Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah yang didalamnya terkait dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan serta prioritas Pembangunan Daerah pada tahun anggaran 2025 yang akan datang.

##### BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

## BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Menjelaskan mengenai Sistem Pengukuran Kinerja yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Dan Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

## BAB VII PENUTUP

Memuat hal-hal penting dan perlu dilakukan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun 2025.

## BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

### 2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

#### 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi geografis daerah Kabupaten Tangerang yang mencakup karakteristik dan potensi pengembangan wilayah, luas wilayah menurut batas administrasi pemerintahan kabupaten/kota/ kecamatan/desa.

Kabupaten Tangerang merupakan salah satu kabupaten di wilayah bagian Timur Provinsi Banten. Berdasarkan posisi geografisnya Kabupaten Tangerang berdekatan dengan Daerah Khusus Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat yang strategis bagi perkembangan wilayah. Dengan posisinya yang berbatasan dengan Daerah Khusus Jakarta menjadi salah satu potensi Kabupaten Tangerang untuk berkembang menjadi perkotaan. Sementara itu, ditinjau dari segi transportasi, Kabupaten Tangerang dilalui oleh Jalan Raya Serang-Jakarta dan Jalan Tol Merak-Jakarta. Double Track Kereta Api Jakarta-Rangkas Bitung serta akses alternatif Terminal I, Terminal II dan Terminal III ke Bandara Internasional Soekarno - Hatta.

Kebutuhan akses yang sangat cepat bagi industri dan perdagangan membutuhkan kawasan pergudangan dan industri untuk mendistribusikan produk industri dan perdagangan, sehingga kemudahan akses terhadap pelabuhan dan bandara menjadi kebutuhan utama. Selain itu, perkembangan sektor properti semakin meningkat terutama di daerah sekitar Bandara Soekarno-Hatta, seperti daerah Cisauk, Pagedangan, dan Kosambi sehingga membutuhkan lahan yang sangat luas bagi Kawasan pemukiman warga commuter Jakarta - Tangerang.

Kondisi geografis dan demografi Kabupaten Tangerang menjadi tantangan pembangunan Kabupaten Tangerang terutama untuk mengatasi dampak dari beban wilayah yang sangat besar kedepannya. Perluasan Runway Bandara Soekarno - Hatta, pembangunan Tol Serpong - Balaraja, Tol Bandara - Balaraja, Tol Kamal-Teluknaga- Rajeg-Balaraja. Rencana Pembangunan MRT Kalideres - Balaraja. Penataan Stasiun Kereta Api Cisauk, Stasiun Tigaraksa, Pembangunan Stasiun KA Jatake serta pertumbuhan penduduk yang tinggi berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti kemacetan, banjir, kawasan kumuh, serta pengangguran.

Secara geografis Kabupaten Tangerang berada di antara Provinsi Banten dengan Provinsi Daerah Khusus Jakarta, sehingga Kabupaten Tangerang merupakan pintu gerbang di perbatasan Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta. Sebagaimana telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, pada Pasal 51 ayat 2 Kawasan Aglomerasi sebagaimana dimaksud Daerah Khusus Jakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, dan sesuai dokumen rencana induk pengembangan kawasan aglomerasi bahwa provinsi daerah khusus jakarta sebagai kota global. Posisi ini menimbulkan interaksi yang menumbuhkan saling ketergantungan yang kemudian berdampak pada timbulnya pertumbuhan pada suatu wilayah melalui proses trickle down effect dan backwash effect. Kabupaten Tangerang merupakan daerah dengan wilayah terluas di Provinsi Banten yang perkembangan pembangunannya tergolong cepat dengan tersedianya infrastruktur, pusat perbelanjaan, pertokoan dan pasar, serta pembangunan perumahan di kawasan baru dan prasarana lainnya sebagai pendukung.

### 2.1.1.1 Karakteristik lokasi dan Wilayah

#### a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Tangerang terletak di bagian Timur Provinsi Banten pada koordinat 106°20'-106°44' Bujur Timur dan 5°58'-6°21' Lintang Selatan. Kabupaten Tangerang termasuk salah satu daerah yang menjadi bagian dari wilayah Provinsi Banten. Terletak pada posisi geografis cukup strategis dengan batas-batas.

- Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah timur berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan DKI Jakarta
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Lebak
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Lebak

Luas Kabupaten Tangerang 1.034,54 Km<sup>2</sup>, atau sekitar 103.454 Ha. Jarak antara Kabupaten Tangerang dengan pusat pemerintahan Republik Indonesia (DKI Jakarta) sekitar 30 km, keduanya dihubungkan dengan lajur lalu lintas darat bebas hambatan Jakarta-Merak yang menjadi jalur utama lalu lintas perekonomian antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera.

Kedudukan geografis yang berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu potensi Kabupaten Tangerang akan menjadi Kota Ekonomi sebagai kawasan aglomerasi. Secara geografis menjadi pintu gerbang untuk hubungan Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta. Kedekatan dengan Ibukota dan sebagai pintu gerbang antara Banten dan DKI Jakarta maka akan menimbulkan interaksi yang menimbulkan fenomena interdependensi yang kemudian berdampak pada timbulnya pertumbuhan pada suatu wilayah. Sebagai bentuk efek pertumbuhan wilayah, trickling down dan backwash effect, sehingga terjadi bentuk hubungan yang sinergis.

Kabupaten Tangerang merupakan daerah dengan wilayah terluas di Provinsi Banten yang perkembangan pembangunannya tergolong cepat dengan tersedianya infrastruktur, pusat perbelanjaan, pertokoan, pasar, serta pembangunan perumahan di kawasan baru dan prasarana lainnya sebagai pendukung. Dalam era otonomi daerah, pembangunan diarahkan kepada tercapainya tatanan kehidupan masyarakat yang sejahtera.

#### b. Topografi

Kondisi topografi sebagian besar wilayah Kabupaten Tangerang merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0-25 meter diatas permukaan laut yang meliputi Kecamatan Teluknaga, Mauk, Kemiri, Sukadiri, Kresek, Kronjo, Pakuhaji dan Sepatan. Sedangkan dataran tinggi dengan ketinggian lebih dari 25 meter diatas permukaan laut terletak di bagian tengah ke arah selatan. Kemiringan tanah rata-rata 0-3% menurun ke utara sedangkan daerah pesisir pantainya sepanjang kurang lebih 50 km.

#### c. Geologi /Jenis Tanah

Jenis tanah Kabupaten Tangerang secara keseluruhan terdiri dari aluvial kelabu, aluvial kelabu tua, asosiasi aluvial kelabu tua dan glei humus rendah, asosiasi glei humus dan planosol, regosol coklat, asosiasi latosol merah dan latosol merah kecoklatan, padsolic kuning, asosiasi padsolic kuning, asosiasi podsolik kuning dan hidromorf kelabu. Dengan jenis tanah demikian memungkinkan untuk pengembangan pertanian dan budidaya. Proses terjadinya tanah aluvial ini berlangsung karena adanya endapan sungai dan danau di daerah dataran dan daerah cekungan. Di wilayah dataran rendah dijumpai pula jenis tanah glei regosol dan sedikit podsolik yaitu asosiasinya.

Efektif tanah adalah tebalnya lapisan tanah dari permukaan tanah atau suatu lapisan di mana perakaran tanaman dapat menerobosnya. Kedalaman efektif tanah berpengaruh terhadap erosi dan pemilihan jenis tanaman yang cocok di suatu wilayah. Kabupaten Tangerang terbagi atas 3 kelas kedalaman efektif tanah, meliputi :

1. Kedalaman 30-60 cm seluas 33 Ha (0,03 %)
2. Kedalaman 60-90 cm seluas 2.598 Ha (2,34 %)
3. Kedalaman > 90 cm seluas 101.777 Ha (91,66 %)

d. Klimatologi

Kabupaten Tangerang merupakan wilayah dengan suhu yang relatif panas dengan kelembaban yang tinggi. Suhu udara berdasarkan penelitian di Stasiun Meteorologi Budiarto Curug rata-rata berkisar antara 26,20 – 28,600C, suhu maksimum tertinggi pada tahun 2021 bulan April yaitu 34,90C, sedangkan suhu maksimum pada bulan April 2022 sekitar 35,00C. dan pada tahun 2021 suhu minimum terendah pada bulan Juli yaitu 20,10C, sedangkan pada tahun 2022 suhu minimum terjadi pada bulan Juni sekitar 20,00C, suhu minimum bulan September 2023 sekitar 19,40 OC, dengan suhu maksimum bulan Oktober yaitu 38,40 OC. Rata-rata kelembaban udara, pada tahun 2021 minimum di bulan Agustus sebesar 37%, dan maksimum di bulan Mei, September dan Desember sebesar 100%, sedangkan pada tahun 2022 kondisi Kelembaban Udara rata-rata antara 990C - 1000C dengan minimum di bulan Februari-Mei sebesar 99%, dan maksimum di bulan Januari, Juni-Desember sebesar 100%, tahun 2023 keadaan kelembaban udara rata-rata 69,60-88,80%, dengan minimum di bulan September sekitar 69,60% dengan maksimum bulan Februari yaitu 88,80%. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 2.1.

Tabel 2.1  
Data Iklim Kabupaten Tangerang Tahun 2023, hasil Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Curug

Bulan	Suhu (°C)			Kelembaban (%)		
	Min	Rata-Rata	Maks	Min	Rata-Rata	Maks
Januari	22,20	26,70	35,30	44,00	84,60	100
Februari	22,80	26,20	32,80	47,00	88,80	100
Maret	22,20	26,70	34,40	51,00	86,90	100
April	21,30	27,30	35,00	39,00	82,60	100
Mei	22,20	27,70	34,70	45,00	82,70	100
Juni	21,70	27,10	34,70	44,00	83,90	100
Juli	20,80	27,10	34,30	36,00	78,90	99,00
Agustus	21,00	27,30	34,80	37,00	74,80	99,00
September	19,40	27,70	35,70	23,00	69,60	97,00
Oktober	21,80	28,60	38,40	30,00	71,00	98,00
November	22,60	27,60	37,60	43,00	82,50	100,00
Desember	20,30	27,70	35,80	32,00	79,40	99,00

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2024

Tabel 2.2  
Kecepatan dan Tekanan Angin di Kabupaten Tangerang Tahun 2023

Bulan	Kecepatan Angin			Tekanan (mbar)		
	Min	Rata-rata	Maks	Min	Rata-rata	Maks
Januari	0	5,10	18,00	999,40	1.004,00	1.008,80
Februar	0	4,90	18,00	1.000,50	1.004,60	1.008,70
Maret	0	3,50	19,00	1.000,30	1.005,30	1.010,40
April	0	4,10	17,00	999,10	1.004,10	1.008,30
Mei	0	2,60	18,00	999,00	1.005,30	1.009,20
Juni	0	2,70	17,00	1.001,50	1.005,20	1.008,20
Juli	0	2,50	12,00	1,001,80	1.006,00	1.009,50
Agustus	0	2,90	14,00	1.002,40	1.006,70	1.010,90
September	0	3,40	20,00	1.000,80	1.006,00	1.013,60
Oktober	0	3,60	18,00	1.001,30	1.006,40	1.009,80
November	0	3,00	20,00	1.000,70	1.004,80	1.008,10
Desember	0	3,20	18,00	1.000,40	1.004,90	1.008,70

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2024

Keadaan curah hujan pada tahun 2023, tertinggi terjadi pada bulan September sebesar 8.888,00 mm/tahun, dengan jumlah hari hujan sebanyak 4 hari, curah hujan pada tahun 2023, terendah pada bulan Oktober sebanyak 12,90 mm/tahun, dengan Jumlah hari paling lama 4 hari, dengan lama penyinaran selama 7,4 jam dibulan September.

Tabel 2.3  
Curah Hujan dan Hari Hujan di Kabupaten Tangerang Tahun 2023

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)
Januari	129,90	18
Februari	246,70	24
Maret	234,70	21
April	124,90	20
Mei	78,60	13
Juni	223,90	15
Juli	171,40	11
Agustus	78,70	3
September	8.888,00	4
Oktober	12,90	4
November	308,60	23
Desember	156,30	14

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang 2024

#### e. Hidrogeologi

Potensi sumber daya air di wilayah Kabupaten Tangerang digambarkan melalui kondisi sumber air permukaan dan air tanah. Kuantitas air sungai relatif cukup tinggi meskipun terjadi fluktuasi debit aliran yang cukup besar antara musim hujan dan musim kemarau, sedangkan kualitasnya menunjukkan adanya indikasi pencemaran di beberapa sungai. Kebutuhan air akan meningkat seiring pertumbuhan kegiatan dan jumlah penduduk Kabupaten Tangerang. Kebutuhan air ini harus tetap bisa dipenuhi dari sumber-sumber air yang ada, sehingga diperlukan tindakan pelestarian sumberdaya air, baik air permukaan maupun air tanah.

Air tanah secara umum memiliki potensi yang cukup tinggi, meskipun di beberapa Kecamatan (Kecamatan Mauk, Sukadiri, Kemiri, Kronjo, Pakuhaji, Teluk Naga dan Kecamatan Kosambi) terindikasi intrusi air laut dan terjadinya eksploitasi air tanah yang cukup tinggi untuk kebutuhan industri karena terbatasnya sumber air permukaan.

Berdasarkan hasil penelitian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang dengan Puskom dan IT FMIPA UI (2003) diketahui bahwa di sebagian wilayah Kabupaten Tangerang (meliputi enam kecamatan yaitu : Mauk, Rajeg, Pasar Kemis, Cikupa, Curug dan Legok) terdapat tiga lapisan akifer meliputi :

1. Akifer dangkal dengan kedalaman < 20 m yang didominasi oleh lapisan pasir;
2. Akifer menengah dengan kedalaman 20 – 70 m yang merupakan lapisan lempung formasi Bantam Atas;
3. Akifer dalam dengan kedalaman > 70 m yang merupakan bagian dari formasi Genteng dan formasi Bojongmanik;
4. Recharge akifer dangkal dan menengah berasal dari air hujan dan sungai/danau, sedang recharge akifer dalam melalui batuan formasi Bojongmanik di sebelah selatan yang tersingkap (outcropped) dengan elevasi yang lebih tinggi dibanding lokasi penelitian.

#### f. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Tangerang pada umumnya digunakan untuk keperluan areal perkampungan dan pemukiman penduduk, areal perkebunan, sawah, ladang tegalan, areal budidaya perikanan darat, semak belukar dan hutan.

Perkembangan penduduk yang cepat serta melimpahnya kegiatan industri dan permukiman di Wilayah Kabupaten Tangerang mengakibatkan banyak terjadi pergeseran lahan. Kecenderungan yang terjadi adalah beralihnya fungsi lahan, untuk itu perlu mendapatkan perhatian mengenai keseimbangan antara fungsi kawasan lindung dan kawasan budidaya serta aspek kesesuaian lahan.

Penggunaan lahan di Kabupaten Tangerang saat ini meliputi penggunaan untuk kawasan lindung dan penggunaan lahan untuk kawasan budidaya. Penggunaan lahan untuk kegiatan lindung meliputi sempadan pantai, danau/situ dan sempadan sungai. Sedangkan penggunaan lahan untuk kegiatan budidaya meliputi perumahan perkotaan, perumahan perdesaan, perdagangan dan jasa, zona industri, kawasan industri, pertanian irigasi teknis, pertanian tadah hujan, kebun campuran, tegalan, perikanan (tambak), hutan dan lain-lain.

Karakter perkembangan kawasan terbangun Kabupaten Tangerang tidak lepas dari keberadaan Kabupaten Tangerang yang berada pada perlintasan pergerakan antar wilayah serta jaringan jalan regional yang menghubungkan

kota-kota utama di Provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Sebagai konsekuensinya kawasan terbangun yang mencakup permukiman perkotaan, permukiman perdesaan, perdagangan dan jasa, zona industri, kawasan industri industri dan fasilitas umum cenderung berkembang mengikuti pola jaringan jalan utama (linier).

Sejalan kondisi tersebut maka perkembangan Kabupaten Tangerang terjadi secara linier dengan titik orientasi perkembangan pada simpul poros jalur Lintas Tengah (poros Serang – Grogol) (terkonsentrasi pada pusat kota), sehingga distribusi kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan tidak merata. Hal ini menyebabkan tidak optimalnya pelayanan kota (kesenjangan perkembangan kegiatan di bagian Tengah (pusat kabupaten) dan selatan dengan bagian utara. terjadi konflik pemanfaatan ruang terbangun dan sebagainya.

Pola pengembangan fisik/tata guna lahan saat ini berupa pola ekstensifikasi dan intensifikasi. Pola intensifikasi lebih banyak dijumpai pada daerah terbangun di pusat-pusat kegiatan/pusat kota, sedangkan pola ekstensifikasi dijumpai pada daerah-daerah pinggiran kota atau daerah transisi.

Melihat progresivitas pembangunan Kabupaten Tangerang serta fungsi yang berkembang saat ini yang menekankan kepada kegiatan industri akan menimbulkan konsekuensi meningkatnya aktivitas penduduk di Kabupaten Tangerang. Peningkatan kegiatan tanpa diimbangi dengan pelayanan sarana dan prasarana yang memadai akan menimbulkan berbagai permasalahan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, seperti misalnya permasalahan transportasi. Hal ini perlu diantisipasi dalam proses revisi RTRW Kabupaten Tangerang.

Perkembangan penduduk yang cepat serta melimpahnya kegiatan industri dan permukiman di wilayah Kabupaten Tangerang mengakibatkan banyak terjadi pergeseran lahan. Kecenderungan yang terjadi adalah beralihnya fungsi lahan, untuk itu perlu mendapatkan perhatian mengenai keseimbangan antara fungsi kawasan lindung dan kawasan budi daya serta aspek kesesuaian lahan.

Penggunaan lahan di Kabupaten Tangerang saat ini meliputi penggunaan untuk kawasan lindung dan penggunaan lahan untuk kawasan budidaya. Penggunaan lahan untuk kegiatan lindung meliputi sempadan pantai, danau/situ dan sempadan sungai. Sedangkan penggunaan lahan untuk kegiatan budidaya meliputi perumahan perkotaan, perumahan perdesaan, perdagangan dan jasa, zona industri, kawasan industri, pertanian irigasi teknis, pertanian tadah hujan, kebun campuran, tegalan, perikanan (tambak), hutan dan lain-lain.

Penggunaan tanah eksisting di Wilayah Kabupaten Tangerang tahun 2016 menurut hasil Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) yang saat ini merupakan data dasar yang digunakan untuk pemetaan Rupabumi Indonesia (RBI) skala 1:5.000 dan digunakan sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan Perubahan RTRW Kabupaten Tangerang 2011-2031. terdiri dari:

Tabel 2.4  
Luas Tutupan Lahan Kabupaten Tangerang

NO	TUTUPAN LAHAN	GUNALAHAN	LUAS (HA)
1	Fasilitas Umum	Hotel/Motel/Hostel/Losmen	9.336
		Kantor Pos Besar	0,382
		Pusat Perdagangan Tradisional	3.614
		Stasiun Pompa Bahan Bakar Gas	0,926

NO	TUTUPAN LAHAN	GUNALAHAN	LUAS (HA)
		Tempat Hiburan	147
1	Fasilitas Umum	Terminal Bus/Angkutan Kendaraan Lainnya	0,697
		Pelabuhan Udara Non Reguler	559.005
		Pariwisata/Seni/Budaya/Olah Raga Lainnya	18.401
		Pusat Pergudangan/Terminal Peti Kemas/Cargo	27.112
		Pusat Perdagangan dan Niaga Kota (Mal/Toserba)	251.919
		Stasiun Kereta Api	0,464
2	Industri	Industri Bahan Dasar Kimia	1.001
		Industri Maritim	2.743
		Industri Bahan Dasar Bangunan	5.609
		Industri Elektronik	60.456
		Industri Manufaktur Lainnya	3,744.921
		Pengolahan Air Minum	4.931
		Industri	38.733
3	Kebun/Perkebunan	Kebun/ Perkebunan	12,752.221
4	Kesehatan	Rumah Sakit Umum	13.991
5	Pasir	Pasir/Bukit Pasir Darat	17.939
		Pasir/Bukit Pasir Laut	2.488
6	Pemukiman	Pemukiman dan Tempat Kegiatan	19,071.920
		Rumah Komplek/Properti Real Estate	2,245.332
7	Pendidikan	Pendidikan Agama Islam	4.263
		Pendidikan Dasar	10.731
		Pendidikan Menengah Pertama	13.869
		Pendidikan Menengah Umum	52.198
		Pendidikan Tinggi	51.612
8	Perairan	Air Danau/Situ	708.909
		AirEmpang	217.529
		Air Laut	452.451
		AirRawa	101.991
		Air Tawar Sungai	5,835.362
9	Perkantoran/ Pemerintahan	Lembaga Pemasyarakatan	2.039
		Kantor Camat	1.229
		Kantor Lembaga Negara	174.868
		Pusat Bisnis Lainnya	574.267

NO	TUTUPAN LAHAN	GUNALAHAN	LUAS (HA)
		Pusat Perkantoran Bisnis/Komersial Terpadu	49.252
10	Peternakan/ Penangkaran	Peternakan/ Penangkaran	28.548
11	Pusat Listrik	Instalasi TNI (AD/AL/AU)	14.928
		Gardu Induk Listrik Tegangan Tinggi	13.835
		Pembangkit Listrik Tenaga Uap	41.298
12	Rumput/ Tanah Kosong	Tanah Kosong/ Gundul	5,437.083
13	Sawah	Sawah	46,386.978
14	Semak Belukar	Semak Belukar	45.983
		Semak Belukar/Alang-alang	269.826
15	Tegalan/ Ladang	Tegalan/ Ladang	3,589.746
	TOTAL		103,453.711

Sumber: Dokumen KLHS Kabupaten Tangerang, Tahun 2019-2023

#### 2.1.1.2 Wilayah Rawan Bencana

Jika dilihat dari kondisi fisik wilayah Kabupaten Tangerang, masih terdapat beberapa jenis bencana yang berpotensi memberikan ancaman diseluruh wilayah Kabupaten Tangerang. Potensi bencana dilihat berdasarkan bencana yang pernah terjadi dan belum terjadi. Untuk bencana yang pernah terjadi berpedoman pada DIBI, sedangkan bencana yang belum terjadi berpedoman pada metodologi pengkajian risiko bencana yaitu berdasarkan Perka BNPB Nomor 2 Tahun 2012 dan referensi pedoman lainnya yang ada di kementerian/lembaga di tingkat nasional.

Berdasarkan pedoman tersebut, maka dapat ditentukan potensi bencana yang mengancam di Kabupaten Tangerang. Dari DIBI tercatat 4 (empat) jenis bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Tangerang. Bencana yang pernah terjadi tersebut tidak tertutup kemungkinan akan terjadi lagi. Adapun potensi bencana di Kabupaten Tangerang secara keseluruhan berdasarkan DIBI, metodologi pengkajian risiko bencana dan telah disepakati daerah.

Menurut hasil Review Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tangerang Tahun 2022-2027 pengkajian risiko bencana dilaksanakan dengan mengkaji dan memetakan tingkat bahaya, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas berdasarkan indeks bahaya, indeks penduduk terpapar, indeks kerugian dan indeks kapasitas. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang melanda. Potensi dampak negatif yang timbul dihitung berdasarkan tingkat kerentanan dan kapasitas kawasan tersebut. Potensi dampak negatif ini dilihat dari potensi luas paparan bahaya, jumlah jiwa yang terpapar, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan.

Tabel 2.5

Potensi Bencana Kabupaten Tangerang Tahun 2022-2027

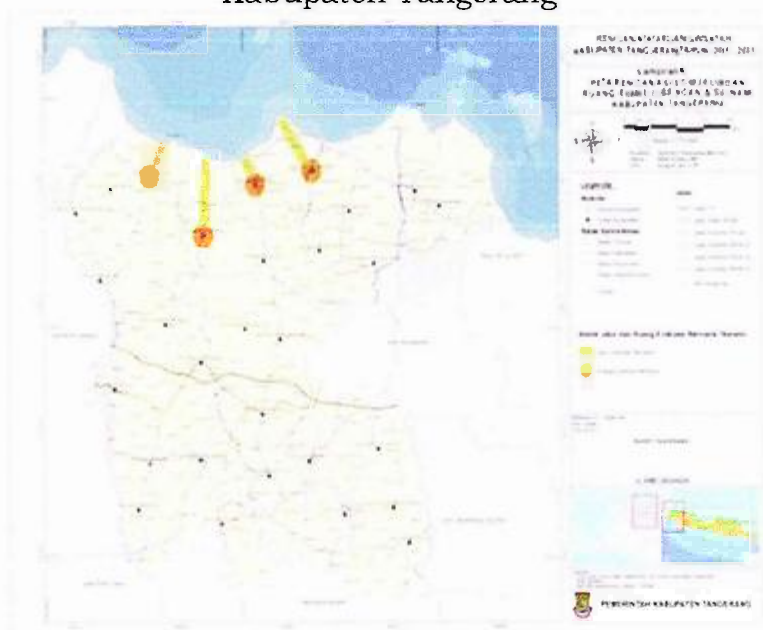
POTENSI BENCANA DALAM REVIEW KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN TANGERANG	
1. CUACA EKSTRIM	5. BANJIR BANDANG
2. GELOMBANG EKTRIM DAN ABRASI	6. GEMPA BUMI
3. KEKERINGAN	7. KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
4. BANJIR	8. TSUNAMI

Sumber ; BPBD Kabupaten Tangerang Tahun 2023

Pengkajian risiko bencana di Kabupaten Tangerang meliputi 8 (delapan) jenis bencana yang teridentifikasi memiliki potensi terjadi. Bencana tersebut meliputi bencana cuaca ekstrim, banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi, gempabumi, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, banjir dan tsunami.

Gambar 2.1

Peta Rencana Sistem Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana Tsunami Kabupaten Tangerang



Sumber : Perubahan RTRW Kab. Tangerang Tahun 2011-2031

Tabel 2.6

Tabel Kajian Pra Bencana Kabupaten Tangerang

Jenis Bencana	Potensi							
	Bahaya		Kerentanan		Kapasitas		Risiko	
	Tingkat	Jumlah	Tingkat	Jumlah	Tingkat	Jumlah	Tingkat	Luas
Banjir	Sedang-Tinggi	63.526 Ha	Sedang	99.780 Ha	Sedang	29 Kecamatan	Sedang-Tinggi	89.379

Jenis Bencana	Potensi							
	Bahaya		Kerentanan		Kapasitas		Risiko	
	Tingkat	Jumlah	Tingkat	Jumlah	Tingkat	Jumlah	Tingkat	Luas
Gempa Bumi	Sedang-Tinggi	42.025	Sedang	11.923	Sedang	29 Kecamatan	Sedang-Tinggi	94.349
			Tinggi	88.429				
Kekeringan	Sedang-Tinggi	0	Tinggi	708	Sedang	29 Kecamatan	Sedang-Tinggi	0
Tsunami	Sedang-Tinggi	4.461	Sedang	5722	Sedang	8 Kecamatan	Sedang-Tinggi	3.389
Multi bahaya	Sedang-Tinggi	104.061	Sedang	99.780	Sedang	29 Kecamatan	Sedang-Tinggi	104.042
	Sedang-Tinggi		Tinggi	100.072				

Sumber : inarisk.go.id

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang ada. Potensi dampak negatif tersebut dihitung juga dengan mempertimbangkan tingkat kerentanan dan kapasitas Kawasan tersebut. Potensi dari dampak ini menggambarkan potensi Jumlah jiwa, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan yang terpapar oleh potensi bencana. Dalam kajian tersebut menggunakan pendekatan tiga parameter risiko bencana yaitu ancaman, kerentanan dan kapasitas terkait bencana.

Kajian yang dilakukan oleh BNPB terhadap risiko bencana di Kabupaten Tangerang diperoleh potensi bencana meliputi meliputi bencana dengan hasil kajian diperoleh bahwa total potensi jiwa yang terpapar (Sedang-Tinggi) sebanyak 3.105.042 jiwa, nilai aset terpapar lebih dari Rp. 28.138.521 juta rupiah. dengan nilai ekonomi terpapar sebanyak Rp. 9.495.283 juta rupiah. Potensi Bencana yang dikaji meliputi potensi jiwa yang terpapar sebanyak 3.105.042 jiwa, dengan kerugian aset senilai Rp. 4.209.798 juta rupiah. dengan nilai ekonomi yang terpapar sebesar Rp. 3.453.588 juta rupiah. Potensi banjir yang terpapar sebanyak 1.946.838 jiwa. dengan nilai aset yang terpapar sebesar Rp. 7.881.809 juta rupiah. dengan nilai ekonomi yang terpapar Rp.6.885.114 juta rupiah. Potensi tsunami di Kabupaten Tangerang cukup rendah dengan banyaknya jiwa yang terpapar sebanyak 7.018 jiwa. Potensi kekeringan di Kabupaten Tangerang yang terpapar sebanyak 3.105.042 jiwa, dengan nilai ekonomi yang terpapar sebesar Rp.4.768.500 juta rupiah. Potensi bencana dari Cuaca Ekstrim sebanyak 3.105.043 jiwa yang terpapar, dengan kerugian nilai aset sebesar Rp. 28.131.896 juta rupiah, dengan nilai ekonomi sebesar Rp. 9.489.535 juta rupiah. Potensi gelombang ekstrim di Kabupaten Tangerang yang terpapar sebanyak 7.460 jiwa, sedangkan nilai ekonomi yang terpapar sebesar Rp. 26.014 juta rupiah. Potensi bencana untuk banjir bandang dengan banyaknya jiwa yang terpapar sebanyak 10.340 jiwa, dengan nilai aset sebesar Rp.57.571 juta rupiah, dengan nilai ekonomi yang terpapar

sebesar Rp.17.984 juta rupiah. Potensi bencana untuk Likuefaksi atau pencairan tanah sebanyak 4.467.563 jiwa yang terpapar dengan nilai aset sebesar Rp. 30.510.193 juta rupiah, dengan nilai ekonomi yang terpapar sebesar Rp.12.006.444 juta rupiah. Untuk lebih jelasnya lihat Tabel Matriks kajian risiko bencana Kabupaten Tangerang.

Tabel 2.7  
Matriks Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tangerang

Bencana	Rendah	Sedang	Tinggi
1. Multi Bencana			
Sosial (Jiwa)	-	8.198	3.096.844
Fisik (Juta Rupiah )	-	15.644	28.122.877
Ekonomi (Juta Rupiah)	-	41.717	9.453.566
Lingkungan (Ha)	-	-	-
2. Gempa Bumi			
Sosial (Jiwa)	876.437	2.217.164	11.441
Fisik (Juta Rupiah )	-	4.108.789	101.009
Ekonomi (Juta Rupiah)	-	3.371.638	81.950
Lingkungan (Ha)	-	-	-
3. Banjir			
Sosial (Jiwa)	73.691	1.194.513	678.634
Fisik (Juta Rupiah )	-	2.113.524	5.768.285
Ekonomi (Juta Rupiah)	-	1.129.689	5.755.425
Lingkungan (Ha)	-	-	-
4. Tsunami			
Sosial (Jiwa)	7.018	-	-
Fisik (Juta Rupiah )	-	-	-
Ekonomi (Juta Rupiah)	-	-	-
Lingkungan (Ha)	-	-	-
5. Kekeringan			
Sosial (Jiwa)	-	3.105.042	-
Fisik (Juta Rupiah )	-	-	-
Ekonomi (Juta Rupiah)	-	4.768.500	-
Lingkungan (Ha)	-	-	-
6. Cuaca Ekstrim			
Sosial (Jiwa)	-	9.217	3.095.826
Fisik (Juta Rupiah )	-	16.663	28.115.233
Ekonomi (Juta Rupiah)	-	47.464	9.442.071
Lingkungan (Ha)	-	-	-
7. Gelombang Ekstrim			
Sosial (Jiwa)	3.329	966	3.165

Bencana	Rendah	Sedang	Tinggi
Fisik (Juta Rupiah )	-	1.967	24.047
Ekonomi (Juta Rupiah)	-	-	-
Lingkungan (Ha)	-	-	-
8. Banjir Bandang			
Sosial (Jiwa)	1.022	3.617	5.701
Fisik (Juta Rupiah )	-	9.618	47.953
Ekonomi (Juta Rupiah)	-	2.039	15.945
Lingkungan (Ha)	-	-	-
9. Likuefaksi			
Sosial (Jiwa)	517	1.360.690	3.106.356
Fisik (Juta Rupiah )	-	2.311.972	28.198.221
Ekonomi (Juta Rupiah)	-	2.550.653	9.455.791
Lingkungan (Ha)	-	-	-

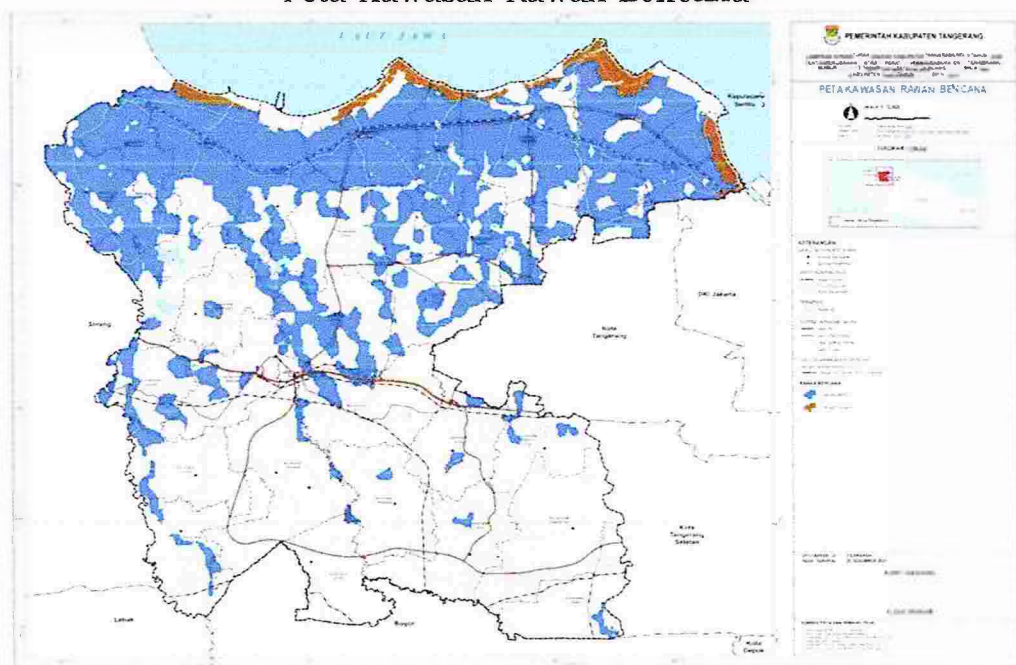
Sumber : inarisk.bnpb.go.id/BUKU-RBI-2022

### 2.1.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah

Arahan pemanfaatan ruang sesuai Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031, arahan potensi di Kabupaten Tangerang meliputi kawasan peruntuan lindung dan kawasan budidaya.

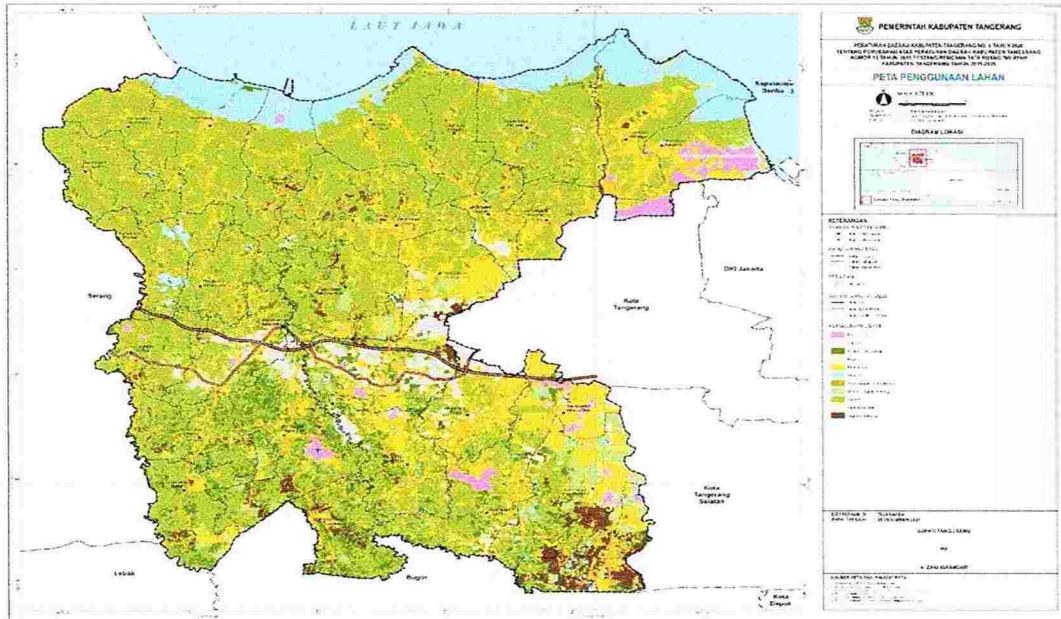
Guna melindungi dan melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan tetap melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan, maka dalam Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 diatur pola ruang dalam Kabupaten Tangerang sebagaimana tertera pada gambar berikut:

Gambar 2.2  
Peta Kawasan Rawan Bencana



Sumber: Perubahan RTRW Kab. Tangerang Tahun 2011-2031

Gambar 2.3  
Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Tangerang



Sumber : Dokumen KLHS Kabupaten Tangerang. Tahun 2019-2023

Karakter perkembangan kawasan terbangun Kabupaten Tangerang tidak lepas dari keberadaan Kabupaten Tangerang yang berada pada perlintasan pergerakan antar wilayah serta jaringan jalan regional yang menghubungkan kota-kota utama di Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Sebagai konsekuensinya kawasan terbangun yang mencakup permukiman perkotaan, permukiman perdesaan, perdagangan dan jasa, zona industri, kawasan industri dan fasilitas umum cenderung berkembang mengikuti pola jaringan jalan utama (linear).

Sejalan kondisi tersebut maka perkembangan Kabupaten Tangerang terjadi secara linear dengan titik orientasi perkembangan pada simpul poros jalur Lintas Tengah (poros Serang-Grogol) yang terkonsentrasi pada pusat kota, sehingga distribusi kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan tidak merata. Hal ini menyebabkan tidak optimalnya pelayanan kota (kesenjangan perkembangan kegiatan di bagian Tengah (pusat kabupaten) dan selatan dengan bagian utara, terjadi konflik pemanfaatan ruang terbangun dan sebagainya.

Pola pengembangan fisik/tata guna lahan saat ini berupa pola ekstensifikasi dan intensifikasi. Pola intensifikasi lebih banyak dijumpai pada daerah terbangun di pusat-pusat kegiatan/pusat kota, sedangkan pola ekstensifikasi dijumpai pada daerah-daerah pinggiran kota atau daerah transisi.

Melihat progresivitas pembangunan Kabupaten Tangerang serta fungsi yang berkembang saat ini yang menekankan kepada kegiatan industri akan menimbulkan konsekuensi meningkatnya aktivitas penduduk di Kabupaten Tangerang. Peningkatan kegiatan tanpa diimbangi dengan pelayanan sarana dan prasarana yang memadai akan menimbulkan berbagai permasalahan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, seperti misalnya permasalahan transportasi. Hal ini perlu diantisipasi dalam proses revisi RTRW Kabupaten Tangerang.

#### 2.1.1.4 Demografi

Memberikan deskripsi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Menurut BPS Provinsi Banten salah satu sumber data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak tujuh kali sejak Indonesia merdeka, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010 dan 2020.

Keenam sensus penduduk sebelumnya dilaksanakan dengan menggunakan metode tradisional, yaitu mencatat setiap penduduk dari rumah ke rumah. Pertama kalinya dalam sejarah sensus penduduk di Indonesia, Sensus Penduduk 2020 (SP2020) menggunakan metode kombinasi yaitu dengan memanfaatkan data Administrasi Kependudukan (Admindex) dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai data dasar pelaksanaan SP2020. Hal ini dirancang dan dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan "Satu Data Kependudukan Indonesia".

SP 2020 mencakup seluruh penduduk yang tinggal di wilayah teritorial Indonesia, mencakup Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang telah menetap atau berencana menetap di wilayah Indonesia selama minimal satu tahun yang tadinya ditentukan 6 bulan. Untuk tahun yang tidak dilaksanakan sensus penduduk, data kependudukan diperoleh dari hasil proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk merupakan suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen perubahan penduduk yaitu kelahiran, kematian dan migrasi (migrasi internasional dan migrasi risen antar provinsi). Proyeksi penduduk interim 2020-2023 dihitung menggunakan data dasar penduduk hasil perapihan umur dari data Administrasi Kependudukan dan SP 2020 dengan menggunakan asumsi Angka Kelahiran total sejak tahun 2020 konstan 2.1 (sesuai Proyeksi Survei Penduduk antar Sensus (SUPAS) 2015-2045). Angka Kematian Bayi (AKB) meneruskan hasil Proyeksi SUPAS 2015-2045. dan pola migrasi 2020 sama dengan pola migrasi hasil SUPAS 2015. Dalam publikasi ini, data yang disajikan merupakan hasil SP 2020 (September), dan hasil proyeksi penduduk interim 2020-2023 (pertengahan tahun/Juni). Memberikan deskripsi ukuran, struktur dan distribusi penduduk bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan.

Kabupaten Tangerang merupakan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten yang paling tinggi jumlah penduduknya, proporsinya mencapai 27 persen dari seluruh penduduk di Provinsi Banten. Hal ini dipengaruhi oleh daya tarik Kabupaten Tangerang yang merupakan daerah industri, sehingga selain pertumbuhan penduduk dari kelahiran alami, kenaikan jumlah penduduk juga dipengaruhi oleh faktor migrasi penduduk yang datang untuk mencari kerja, untuk itu Kabupaten Tangerang harus berupaya untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat tingginya jumlah penduduk, antara lain dengan menyiapkan SDM yang berkualitas, kondisi iklim investasi yang kondusif dan pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat.

Berdasarkan data proyeksi Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang, penduduk Kabupaten Tangerang pada tahun 2023 berjumlah 3.362.610 jiwa yang terdiri dari 1.716.760 jiwa penduduk laki-laki dan 1.645.840 jiwa penduduk perempuan. Kepadatan penduduknya sebesar 3.272 orang per km<sup>2</sup>.

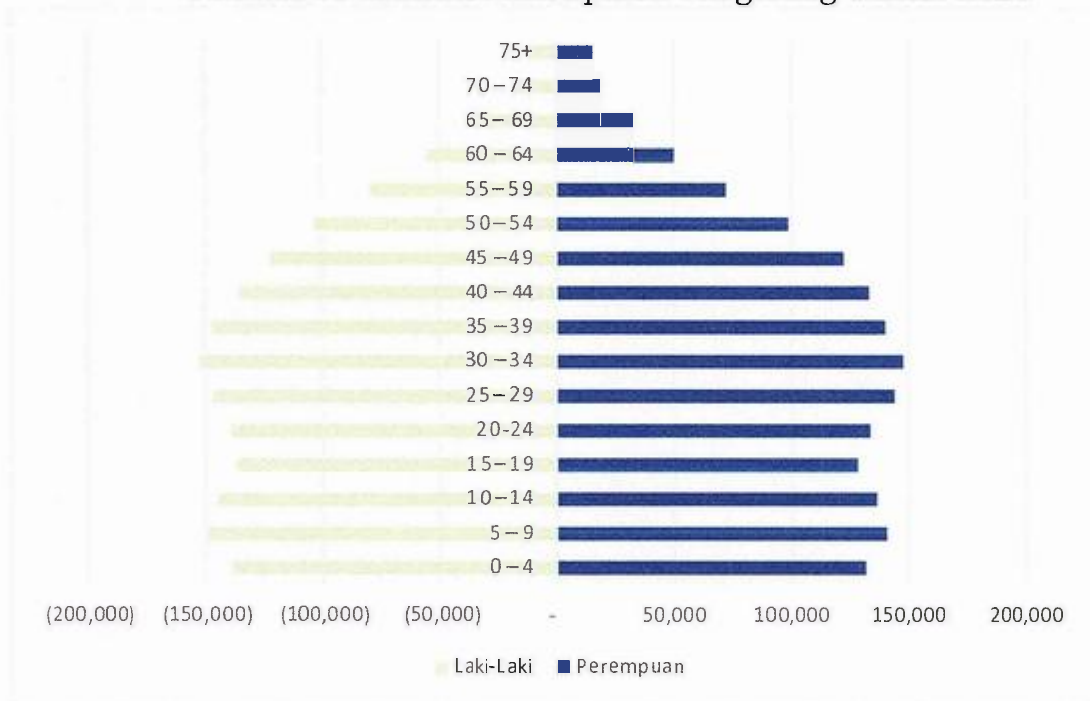
Tabel 2.8  
Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di  
Kabupaten Tangerang Tahun 2023

No.	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0 – 4	138,030	131,380	269,410
2	5 – 9	148,730	140,620	289,350
3	10 – 14	144,310	136,300	280,610
4	15 – 19	136,450	128,060	264,510
5	20 – 24	138,590	133,470	272,060
6	25 – 29	146,280	144,030	290,310
7	30 – 34	152,440	147,760	300,200
8	35 – 39	147,010	140,150	287,160
9	40 – 44	135,510	133,020	268,530
10	45 – 49	122,370	122,320	244,690
11	50 – 54	103,560	98,850	202,410
12	55 – 59	79,920	72,200	152,120
13	60 – 64	55,430	50,100	105,530
14	65 – 69	36,090	32,930	69,020
15	70 – 74	19,570	19,000	38,570
16	75+	12,490	15,670	28,160
	Jumlah	1,716,760	1,645,840	3,362,610

Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Banten 2020–2035, BPS Provinsi Banten, 2023

Berdasarkan kelompok umur tahun 2023 jumlah penduduk terbanyak pada kisaran umur 30-34 tahun sebanyak 300.200 jiwa, tahun 2022 kelompok umur yang terbesar pada usia 25-29 tahun yaitu sebesar 300,200 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terkecil berdasarkan kelompok umur terdapat pada kisaran umur 75 tahun keatas yaitu sebanyak 28.160 jiwa, sebelumnya pada tahun 2022 sebesar 26.919 jiwa bertambah dibandingkan tahun 2022. Perbedaan jumlah pada tiap kelompok umur menggambarkan bahwa pada kelompok usia 20 tahun keatas dan dibawah usia 75 tahun merupakan kelompok umur yang produktif. Adapun jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Tangerang pada tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 2.4.

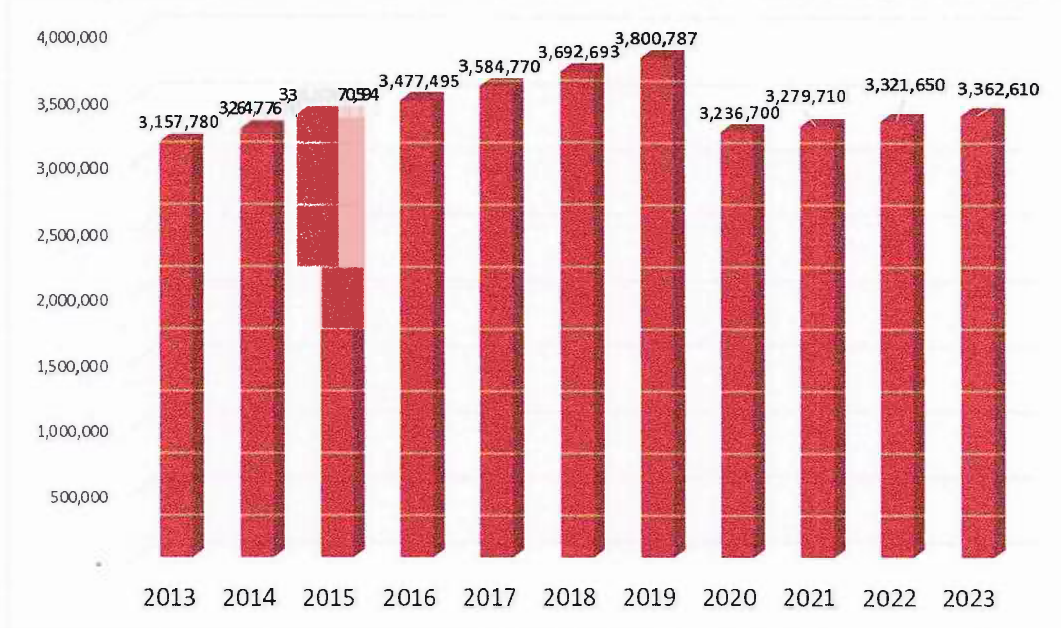
Gambar 2.4  
Piramida Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2023



Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Banten 2020–2035, BPS Provinsi Banten, 2023, diolah.

Menurut data BPS, jumlah penduduk Kabupaten Tangerang terus mengalami peningkatan. Jumlah penduduk Kabupaten Tangerang tahun 2023 mengalami penambahan dari tahun 2022 sekitar 40.960 jiwa, dengan jumlah 3.321.650 jiwa pada tahun 2022, ada perbedaan jumlah penduduk dari tahun 2019 ke tahun 2020, secara gambar terlihat ada penurunan jumlah penduduk dari tahun 2019 ke tahun 2020, perbedaan ini dikarenakan adanya perbedaan metode Sensus Penduduk (SP) dari tahun 2010-2019, dengan Sensus Penduduk yang dilaksanakan pada tahun 2020, sehingga jumlah penduduk menurut BPS dari tahun 2020 dan seterusnya berlaku SP2020, sehingga jumlah penduduk tahun 2021 dan seterusnya menggunakan proyeksi hasil sensus penduduk tahun 2020. Proyeksi penduduk merupakan sebuah perkiraan yang didasari oleh perhitungan ilmiah. Hasil perhitungan proyeksi ini dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti kelahiran, kematian, hingga perpindahan penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2014-2019 merupakan proyeksi dari perhitungan BPS dari hasil Sensus Penduduk Tahun 2010. Sementara pada tahun 2020 dilaksanakan Sensus Penduduk (SP) sehingga jumlah penduduk tahun 2021-2022 merupakan proyeksi dari Sensus Penduduk 2020. Pelaksanaan sensus penduduk oleh BPS di Indonesia hanya dilakukan sepuluh tahun sekali, pada tahun yang berakhiran angka nol. Di Indonesia saat ini, data penduduk yang dapat disebut paling mendekati kondisi sebenarnya hanyalah data penduduk hasil sensus dan ternyata proyeksi tahun 2019 berdasarkan SP 2010 hasilnya lebih tinggi daripada jumlah penduduk tahun 2020 berdasarkan SP tahun 2020, sehingga jumlah penduduk tahun 2020 terlihat lebih sedikit dari tahun 2019. Hal ini juga disebabkan karena terdapat perbedaan ketentuan dalam pelaksanaan Sensus Penduduk, pada Sensus Penduduk 2020 sudah berbasis NIK sehingga lebih mendekati kondisi sebenarnya.

Gambar 2.5  
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2023



Sumber: BPS Kabupaten Tangerang 2013-2024, diolah

Jumlah penduduk berdasarkan data DKB (Data Konsolidasi Bersih) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil semester II tahun 2023, jumlah penduduk sesuai data kependudukan Kabupaten Tangerang berjumlah 3.309.365 jiwa, dengan yang wajib KTP Kabupaten Tangerang berjumlah Rp.2.389.596 jiwa, dengan jumlah penduduk yang mempunyai KTP sebanyak 2.351.024 jiwa.

Tabel 2.9  
Jumlah Penduduk Wajib KTP di Kabupaten Tangerang Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Wajib KTP	Persentase Wajib KTP
1	Balaraja	124,129	89,769	72
2	Jayanti	70,728	50,836	72
3	Tigaraksa	163,531	115,645	71
4	Jambe	55,650	38,827	70
5	Cisoka	97,591	69,166	71
6	Kresiek	71,795	51,988	72
7	Kronjo	65,599	47,047	72
8	Mauk	91,382	65,539	72
9	Kemiri	50,977	35,998	71
10	Sukadiri	66,679	47,767	72
11	Rajeg	188,209	133,470	71
12	Pasar Kemis	255,345	190,413	75
13	Teluknaga	167,977	120,883	72
14	Kosambi	111,705	82,171	74
15	Pakuhaji	127,330	91,761	72

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Wajib KTP	Persentase Wajib KTP
16	Sepatan	112,289	79,804	71
17	Curug	176,617	129,603	73
18	Cikupa	209,140	151,464	72
19	Panongan	129,996	92,405	71
20	Legok	124,324	87,995	71
21	Pagedangan	111,222	81,089	73
22	Cisauk	91,438	65,739	72
23	Sukamulya	74,309	53,793	72
24	Kelapa Dua	167,553	128,021	76
25	Sindang Jaya	95,575	67,444	71
26	Sepatan Timur	105,994	75,755	71
27	Solear	101,969	72,960	72
28	Gunung Kaler	56,160	40,690	72
29	Mekar Baru	44,152	31,554	71
Total		3,309,365	2,389,596	72

Sumber : Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil semester II Tahun 2023.  
Disdukcapil Kabupaten Tangerang

Tabel 2.10  
Tabel Rasio Kelamin dan Kepadatan Penduduk berdasarkan Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Rasio Jenis Kelamin	Kepadatan
1	Cisoka	124,129	105.21	3,126.43
2	Solear	70,728	105.64	2,992.66
3	Tigaraksa	163,531	102.58	2,956.91
4	Jambe	55,650	104.39	1,969.80
5	Cikupa	97,591	104.23	4,546.97
6	Panongan	71,795	103.42	3,596.37
7	Curug	65,599	102.35	5,728.25
8	Kelapa Dua	91,382	99.32	6,390.51
9	Legok	50,977	104.41	3,335.09
10	Pagedangan	66,679	102.8	2,191.49
11	Cisauk	188,209	103.03	3,043.14
12	Pasar Kemis	255,345	102.76	8,308.34
13	Sindang Jaya	167,977	103.55	2,308.88
14	Balaraja	111,705	103.85	3,843.46

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Rasio Kelamin	Jenis	Kepadatan
15	Jayanti	127,330	103.77		2,842.82
16	Sukamulya	112,289	101.94		2,921.01
17	Kresek	176,617	103.22		2,393.99
18	Gunung Kaler	209,140	102.26		1,713.82
19	Kronjo	129,996	100.84		141.03
20	Mekar Baru	124,324	102.58		1,712.34
21	Mauk	111,222	104.6		2,033.21
22	Kemiri	91,438	103.4		1,524.00
23	Sukadiri	74,309	104.52		266.77
24	Rajeg	167,553	104.82		3,531.07
25	Sepatan	95,575	105.3		5,841.31
26	Sepatan Timur	105,994	106.39		5,390.78
27	Paku haji	101,969	105.84		2,334.29
28	Teluknaga	56,160	104.13		3,204.78
29	Kosambi	44,152	103.79		3,095.05
Jumlah/Total		3.309.365	103.59		3198.86

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dikutip dari Dokumen Kabupaten Tangerang Dalam Angka Tahun 2024, BPS Kabupaten Tangerang tahun 2024

Sex Ratio penduduk Kabupaten Tangerang tahun 2023 adalah sebesar 103,59 dengan kepadatan penduduk 3.198,86, rasio jenis kelamin menurun jika dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 104.55 sedangkan tahun 2021 adalah 105. Sex ratio 104.55 yang artinya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan, atau setiap 100 perempuan terdapat 104 laki-laki. Sex Ratio terbesar terdapat di Kecamatan Sepatan Timur yakni sebesar 106.39 dan yang terkecil terdapat di Kecamatan Kelapa Dua yakni sebesar 99.32.

Tabel 2.11  
Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tangerang Tahun 2023

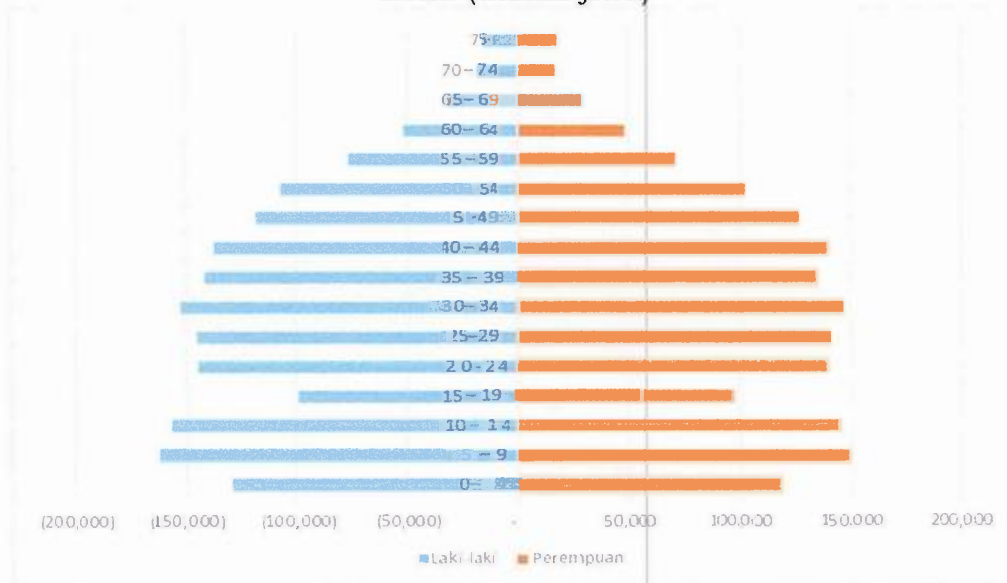
No.	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0 – 4	128,715	113,538	247,253
2	5 – 9	161,588	149,909	311,497
3	10 – 14	156,204	145,527	301,731
4	15 – 19	99,302	97,164	196,466
5	20 – 24	144,228	139,862	284,090
6	25 – 29	144,568	140,722	285,290
7	30 – 34	152,183	146,657	298,840
8	35 – 39	141,590	135,122	276,712
9	40 – 44	137,169	139,910	277,079

No.	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
10	45-49	118,067	126,550	244,617
11	50-54	107,374	102,314	209,688
12	55-59	76,279	71,063	147,342
13	60-64	51,477	47,900	99,377
14	65-69	31,830	29,048	60,878
15	70-74	18,183	16,988	35,171
16	75+	15,084	18,250	33,334
	Jumlah	1,683,841	1,625,524	3,309,365

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tangerang pada Dokumen Kabupaten Tangerang Dalam Angka Tahun 2024

Berdasarkan Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menurut kelompok umur, jumlah penduduk terbanyak pada kisaran umur 30-34 tahun yaitu sebesar 298.840 jiwa, usia tersebut terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 152.183 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 146.657 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terkecil berdasarkan kelompok umur terdapat pada kisaran umur 75 tahun keatas yaitu sebanyak 33.334 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 15.084 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 18.250 jiwa. Adapun jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Tangerang pada tahun 2023 menurut data dari Dinas Kependudukan dan Pencaattan Sipil dapat dilihat pada gambar 2.6.

Gambar 2.6  
Piramida Penduduk berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2023 (dalam jiwa)

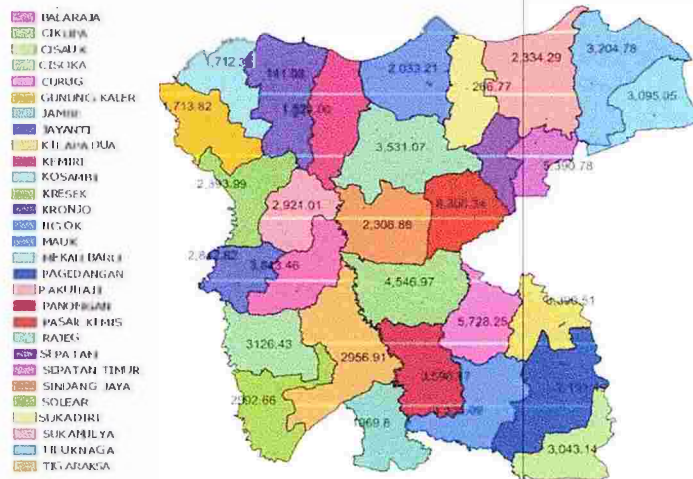


Sumber Data :Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tangerang pada Dokumen Kabupaten Tangerang Dalam Angka Tahun 2024, diolah.

Piramida penduduk Kabupaten Tangerang menurut data tahun 2023 berbentuk piramida ekspansif. Piramida ekspansif memiliki bentuk yang besar pada bagian bawah dan semakin kecil ke bagian puncak. Piramida ini dikenal juga dengan istilah piramida segitiga, kerucut, limas atau piramida penduduk muda. Kondisi ini menunjukkan penduduk di Kabupaten Tangerang berada dalam keadaan tumbuh. Piramida seperti ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia muda lebih besar daripada kelompok usia lain. Berarti angka

kelahiran tinggi, dan tingkat kematian bayi rendah. Selain itu, kondisi ini menunjukkan bahwa penduduk di usia produktif, yaitu golongan usia remaja hingga dewasa mendominasi komposisi penduduk di Kabupaten Tangerang. Komposisi seperti ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Sebagai kelebihan, kondisi ini dapat menjadi keuntungan bagi Kabupaten Tangerang karena memiliki SDM usia produktif yang melimpah sebagai bonus demografi. Apabila ditinjau dari kecamatan yang tersebar di Kabupaten Tangerang, berikut adalah peta kepadatan penduduk Kabupaten Tangerang.

Gambar 2.7.  
Peta Sebaran Kepadatan Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2023



Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2024, diolah dengan QGIS

Dari gambar di atas terlihat bahwa kecamatan dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi ada di Kecamatan Pasar Kemis, Kecamatan Curug, Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Sepatan dan Kecamatan Sepatan Timur. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk rendah adalah Kecamatan Kronjo, Kecamatan Mauk dan Kecamatan Kemiri.

### 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Terpenuhinya kesejahteraan masyarakat di segala bidang terutama di bidang pendidikan, kesehatan, serta terpenuhinya kebutuhan fasilitas publik menjadi salah satu tolak ukur terwujudnya keberhasilan pembangunan. Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

#### 2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

##### 1. Pertumbuhan PDRB

Di bidang pembangunan ekonomi, salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibedakan dalam dua jenis penilaian yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). Penyajian PDRB ADHK mengalami perubahan mendasar sebagai konsekuensi logis berubahnya tahun dasar yang digunakan.

Di bidang pembangunan ekonomi, salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibedakan dalam dua jenis penilaian yaitu atas dasar

harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). Penyajian PDRB ADHK mengalami perubahan mendasar sebagai konsekuensi logis berubahnya tahun dasar yang digunakan.

Ekonomi Kabupaten Tangerang tahun 2023 tumbuh sebesar 5,18 persen, tumbuh melambat dibandingkan tahun 2022 yang tumbuh 5,47 persen. Melambatnya ekonomi Kabupaten Tangerang karena disebabkan adanya dua (2) sektor PDRB yang mengalami penurunan dari tahun 2022 di tahun 2023 yaitu meliputi sektor :

1. Pengadaan Listrik dan Gas
2. Jasa Keuangan dan Asuransi

Menurut data PDRB Kabupaten Tangerang Menurut lapangan usaha tahun 2019-2023, kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberi kontribusi terhadap PDRB atas harga berlaku sebesar 6,30 persen, kondisi ini menurun dibanding tahun 2022 yang mencapai kontribusi 6,33 persen. Pada tahun 2023 kategori ini mengalami pertumbuhan sebesar 1,72 persen lebih rendah bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2022 yang dapat tumbuh sebesar 2,28 persen. Pada kategori lapangan usaha Pertambangan dan penggalian, di Kabupaten Tangerang hanya ada sub lapangan usaha penggalian. Kontribusi ini cukup kecil kisaran angka 0,04 persen sampai 0,05 persen. Pada tahun 2023 kategori ini tumbuh sebesar 0,08 persen dibanding tahun 2022 yang mengalami kontraksi mencapai -12,20 persen. Kategori lapangan usaha Industri Pengolahan pada tahun 2019 berkontribusi sangat signifikan yaitu sebesar 35,10 persen, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan kontribusi sebesar 33,30 persen pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan sebesar 33,21 persen, akan tetapi selama dua tahun terakhir kembali mengalami peningkatan yaitu sebesar 30,20 persen pada tahun 2022 dan 33,65 persen tahun 2023 dengan nominal mencapai 58,32 triliun rupiah. Pertumbuhan kategori lapangan usaha Industri Pengolahan pada tahun 2023 sebesar 7,01 persen, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan 5,44 persen. Lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas berkontribusi sebesar 2,82 persen terhadap perekonomian Kabupaten Tangerang tahun 2023, kontribusi ini mengalami penurunan dibanding tahun 2022 yaitu sebesar 3,08 persen. Lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang berperan kepada perekonomian Kabupaten Tangerang sebesar 0,06 persen, laju pertumbuhan sangat fluktuatif yaitu sebesar 5,81 persen, 1,36 persen, 5,68 persen berturut-turut untuk tahun 2021-2023. Lapangan usaha Konstruksi pada tahun 2023 masih menyumbang cukup tinggi yaitu sebesar 16,35 persen terhadap total perekonomian Kabupaten Tangerang, kondisi ini mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2019 yang hanya berkontribusi 14,85 persen. Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun 2023 kontribusi 11,15 persen, pada tahun 2023 lapangan usaha ini mengalami pertumbuhan 4,83 persen, yang semakin jauh lebih baik selama empat tahun terakhir saat pandemi covid-19, dimana pada masa pandemi mengalami kontraksi sebesar -3,70 persen. Lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan kategori ini tumbuh 7,86 persen pada tahun 2022, tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 9,90 persen. Namun lebih baik dibanding tahun 2020 yang tumbuh negative -5,32 persen, adanya pandemi covid-19 membatasi perjalanan Masyarakat. Pada tahun 2023 sektor lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mencatat laju positif sebesar 5,87 persen pada tahun 2023, walau tumbuh positif dibanding tahun 2022 tetapi kategori ini mengalami penurunan pertumbuhan yang menyentuh angka 7,86 persen. Lapangan usaha Informasi dan Komunikasi berperan terhadap perekonomian Kabupaten Tangerang pada tahun 2023 sebesar 3,47 persen dan

selama lima tahun terakhir mengalami kontribusi hamper sama kisaran 3,33 persen sampai dengan 3,61 persen, dengan laju pertumbuhan positif untuk tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 9,34 persen. Sektor lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi, pertumbuhan pada kategori ini pada tahun 2023 mengalami kontraksi =0,48 persen mengalami jauh penurunan dibandingkan tahun 2022 sebesar 6,81 persen, dari tahun 2019 hingga 2021 pertumbuhannya sangat fluktuatif berturut-turut sebesar 0,72 persen, 1,56 persen, dan 6,07 persen. Pertumbuhan sektor lapangan usaha Real Estat selama 4 tahun terakhir mengalami trend naik dimana pada tahun 2023 mencapai 5,19 persen. Angka laju pertumbuhan pada kategori Jasa Perusahaan mengalami kenaikan yang cukup tinggi di tahun 2023 sebesar 8,52 persen. Sektor lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan sebesar 3,17 persen dibanding tahun 2022 sebesar -0,02 persen. Laju pertumbuhan jasa Pendidikan Kabupaten Tangerang tahun 2023 tumbuh sebesar 6,75 persen, tumbuh jauh lebih tinggi, jika dibanding tahun 2022 yang mengalami kontraksi sebesar -0,02 persen. Laju pertumbuhan sektor lapangan usaha dari Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mengalami pertumbuhan pada tahun 2023 sebesar 8,92 persen dibanding tahun 2022 yang hanya sebesar 2,94 persen. Sektor lapangan usaha Jasa Lainnya tumbuh paling tinggi pada tahun 2023 sebesar 10,98 persen dibanding tahun 2022 yang hanya sebesar 7,77 persen, rata-rata pertumbuhan sangat fluktuatif yaitu 9,36 persen, -6,11 persen dan 1,39 persen.

Tabel 2.12

Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Kategori Lapangan Usaha (persen). Tahun 2018-2023

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,98	2,25	2,84	(0,84)	2,28	1,72
B Pertambangan dan Penggalian	5,72	2,30	(5,90)	(9,45)	-12,2	0,08
C Industri Pengolahan	2,66	3,20	(8,74)	4,26	5,44	7,01
D Pengadaan Listrik dan Gas	5,82	(4,23)	(12,35)	11,69	5,59	-0,45
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	5,19	6,71	8,60	5,81	1,36	5,68
F Konstruksi	8,18	9,44	(3,29)	11,96	8,25	1,74
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,69	6,22	(3,70)	1,82	3,27	4,83
H Transportasi dan Pergudangan	9,60	9,55	(5,32)	9,90	7,86	5,87
I Penyediaan Akomodasi dan MakanMinum	8,62	7,86	(5,63)	4,45	8,34	8,92

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021	2022	2023
J	Informasi dan Komunikasi	8,35	9,69	9,12	5,17	6.85	9.34
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,16	0,72	1,56	6,07	6.81	-0.48
L	Real Estat	9,44	9,49	1,96	3,07	5.19	5.19
M,N	Jasa Perusahaan	6,02	9,20	(6,00)	(2,25)	4.46	8.52
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	6,48	8,75	(0,38)	(0,76)	1.09	3.17
P	Jasa Pendidikan	8,25	8,30	0,69	(1,10)	0.02	6.75
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,68	11,13	4,41	9,14	2.94	8.92
R,S,T,U	Jasa Lainnya	8,69	9,36	(6,11)	1,39	7.77	10.98
Produk Domestik Regional Bruto		5,80	5,56	(8,76)	4,70	5,47	5,18

\*Angka Sementara

\*\*Angka Sangat Sementara

Sumber : Kabupaten Tangerang Dalam Angka, 2024

Selain laju pertumbuhan PDRB yang mengalami penurunan di Kabupaten Tangerang, disisi lain ada sekitar 11 (sebelas) sektor PDRB yang mengalami pertumbuhan dari tahun 2022-2023 yaitu sektor:

1. Pertambangan dan Penggalian
2. Industri Pengolahan
3. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang
4. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
5. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
6. Informasi dan Komunikasi
7. Jasa Perusahaan
8. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib
9. Jasa Pendidikan
10. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
11. Jasa Lainnya

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang yang lambat di tahun 2023, karena kondisi iklim investasi, dan menurunnya pengangguran di Kabupaten Tangerang, sektor industri pengolahan tetap menjadi pilihan bagi investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Tangerang, dengan ekonomi tumbuh positif sektor industri pengolahan akan menyerap banyak tenaga kerja di Kabupaten Tangerang.

Apabila dibandingkan dengan Provinsi Banten dan nasional, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang tahun 2016-2023, nilainya berkisar di atas angka 5,00% dan relatif masih berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten dan nasional dari tahun 2016-2023. Wabah covid-19, pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang menurun hingga angka yang lebih rendah daripada laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten maupun

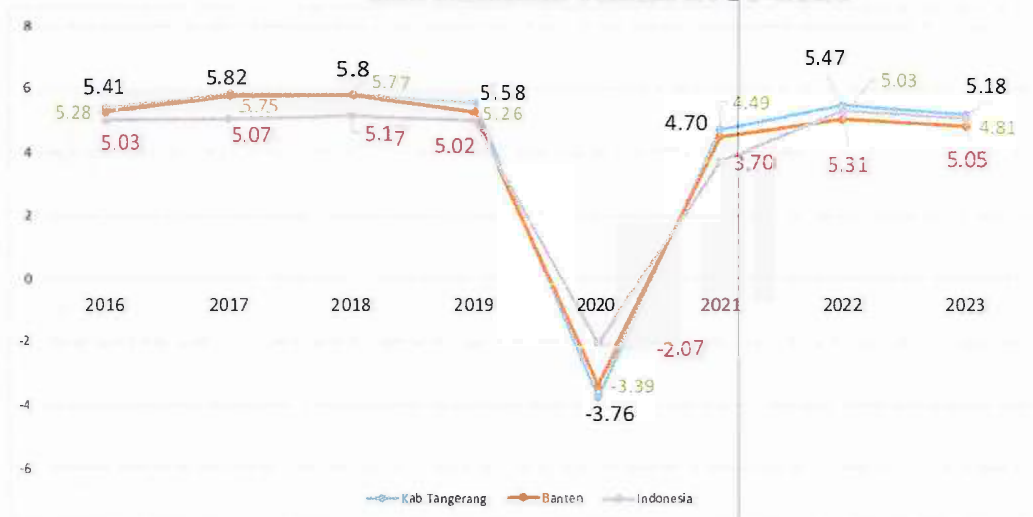
Nasional. Laju pertumbuhan ekonomi nasional, Banten dan Kabupaten Tangerang mulai pulih dengan ditunjukkan dengan mulai tumbuh positif, pada tahun 2021-2022 Laju Pertumbuhan Ekonomi meningkat di angka 4,70% di tahun 2021, dan meningkat di tahun 2022 diangka 5,47%, dan tahun 2023 sebesar 5,18 persen begitu juga dengan Provinsi Banten yang mulai tumbuh sekitar 5,03%

Gambar 2.8  
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Tangerang  
Tahun 2013-2023



Sumber : BPS Provinsi Banten, 2024, diolah.

Gambar 2.9  
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten,  
dan Nasional Tahun 2016-2023



Sumber: BPS Nasional, Provinsi Banten, dan Kabupaten Tangerang, 2024

Di tahun 2023, PDRB Kabupaten Tangerang atas dasar harga berlaku (nominal) sebesar 173.302,66 miliar Rupiah meningkat dari tahun 2022 sebesar 160.168,18 miliar rupiah, sedangkan pada tahun yang sama, PDRB atas dasar harga konstan (PDB riil) adalah sebesar 108.570,43 miliar rupiah meningkat dari tahun 2022 sebesar 103.221,02 miliar rupiah. Apabila dilihat berdasarkan distribusi PDRB Kabupaten Tangerang atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha, pada tahun 2023, distribusi terbesar pada tahun 2023 dicapai oleh lapangan usaha industri pengolahan sebesar 58.319,19

miliar rupiah atau sekitar 33,65% dari PDRB, sector lapangan usaha Konstruksi sebesar 28.337,35 miliar rupiah atau sekitar 16,35% dari PDRB, sector lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 19.324,82 miliar rupiah atau sekitar 11,15% dari PDRB, sector lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 10.921,46 miliar rupiah atau sekitar 6,30% dari share PDRB.

Menurut PDRB Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha pada tahun 2023 kontribusi sector lapangan usaha yang paling besar dari sector lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 38.528,02 miliar rupiah, sector lapangan usaha Konstruksi sebesar 15.402,35 miliar rupiah, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12.395,24 miliarrupiah.

Tabel 2.13  
 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tangerang  
 (miliar rupiah) Tahun 2017–2023

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	5,339.40	5,498.45	5,622.08	5,780.75	5,732.64	5,863.37	5,964.17
B	Pertambangan dan Penggalia	35.87	37.92	38.79	36.50	33.05	29.02	29.04
C	Industri Pengolahan	33,877.15	34,778.08	35,890.71	32,752.30	34,147.21	36,003.68	38,528.02
D	Pengadaan Listrik dan Gas/	1,408.41	1,490.37	1,427.30	1,251.07	1,397.36	1,475.50	1,468.83
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	70.53	74.19	79.17	85.98	90.97	92.21	97.45
F	Konstruksi	10,909.63	11,802.04	12,916.15	12,491.21	13,985.16	15,139.01	15,402.35
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,113.12	10,991.87	11,675.61	11,244.17	11,449.34	11,823.97	12,395.24
H	Transportasi dan Pergudangan	2,461.27	2,697.43	2,955.03	2,797.73	3,074.77	3,316.51	3,511.11
I	Penyediaan Akomodasi dan MakanMinum	1,302.58	1,414.83	1,525.99	1,440.15	1,504.19	1,629.58	1,775.02

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023**
J	Informasi dan Komunikasi	4,436.55	4,807.00	5,272.80	5,753.68	6,051.14	6,465.40	7,069.44
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,347.71	4,659.19	4,692.76	4,766.98	5,055.38	5,399.42	5,373.70
L	Real Estat	7,019.03	7,681.62	8,410.61	8,575.46	8,838.72	9,297.45	9,780.36
M N	Jasa Perusahaan	823.60	873.19	953.52	896.31	876.14	915.25	993.21
O	Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	1,251.11	1,332.18	1,448.75	1,443.24	1,432.30	1,447.94	1,493.84
P	Jasa Pendidikan	1,982.45	2,146.00	2,324.12	2,340.16	2,312.76	2,312.25	2,468.24
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	365.41	400.78	445.38	465.03	507.53	522.45	569.05
R S T U	Jasa Lainnya	1,220.22	1,326.26	1,450.39	1,361.78	1,380.70	1,487.98	1,651.37
Produk Domestik Regional Bruto		86,964.03	92,011.41	97,129.17	93,482.49	97,869.36	103,220.99	108,570.44

\*Angka Sementara

\*\*) Angka Sangat Sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang, Tahun 2022

Tabel 2.14

PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2023 (miliar Rupiah)

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,151.59	8,678.39	9,045.55	9,434.71	9,473.10	10,135.980	10,921.460
B	Pertambangan dan Penggalian	51.56	56.53	58.54	55.54	50.93	45.880	47.240
C	Industri Pengolahan	43,841.07	46,552.10	49,164.34	45,198.21	48,117.52	53,176.120	58,319.190
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,769.27	4,947.79	4,693.53	4,096.17	4,630.76	4,936.400	4,893.850
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	74.50	79.67	85.48	93.49	100.24	102.870	110.410
F	Konstruksi	16,202.51	18,448.09	20,797.30	20,163.35	23,459.65	26,926.030	28,337.350
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,138.61	14,742.54	16,234.31	15,934.12	16,403.33	17,698.470	19,324.820
H	Transportasi dan Pergudangan	3,449.70	3,865.87	4,320.45	4,145.89	4,651.38	5,330.790	6,083.520
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,786.71	1,960.20	2,133.60	2,023.94	2,123.07	2,342.570	2,586.710
J	Informasi dan Komunikasi	3,907.54	4 136.44	4,505.50	4,898.70	5,144.75	5,553.030	6,132.020
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,344.54	7,081.15	7,290.26	7,413.70	8,239.97	9,597.070	9,774.500
L	Real Estat	8,688.00	9,698.31	10,957.41	11,392.27	11,859.43	12,706.970	13,852.180
M,N	Jasa Perusahaan	1,240.18	1,357.31	1,537.09	1,470.01	1,454.75	1,569.840	1,769.910

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023**
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2,027.46	2,200.72	2,469.16	2,571.45	2,618.05	2,742.840	2,941.080
P	Jasa Pendidikan	3,011.68	3,444.99	3,899.57	3,983.80	3,957.24	4,030.360	4,404.830
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	496.31	570.59	656.87	695.57	774.48	811.760	917.250
R,S,T, U	Jasa Lainnya	1,812.85	2,005.27	2,240.33	2,166.13	2,225.00	2,461.190	2,886.340
	Produk Domestik Regional Bruto	118,994.08	129,825.98	140,089.29	135,737.06	145,283.65	160,168.17	173,302.66

\*Angka Sementara

\*\*) Angka Sangat Sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang. Tahun 2022

Tabel 2.15

Distribusi PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2023

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,85	6,68	6,46	6,95	6.52	6.33	6.3
B	Pertambangan dan Penggalian	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0.03	0.03
C	Industri Pengolahan	36,84	35,86	35,10	33,30	33.12	33.2	33.65
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,01	3,81	3,35	3,02	3,19	3.08	2.82
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0.06	0.06
F	Konstruksi	13,62	14,21	14,85	14,85	16.15	16.81	16.35
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,04	11,36	11,59	11,74	11.29	11.05	11.15
H	Transportasi dan Pergudangan	2,90	2,98	3,08	3,05	3,20	3.33	3.51
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,50	1,51	1,52	1,49	1,46	1.46	1.49
J	Informasi dan Komunikasi	3,28	3,19	3,22	3,61	3,54	3.47	3.54
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,33	5,45	5,20	5,46	5.67	5.99	5.64
L	Real Estat	7,30	7,47	7,82	8,39	8.16	7.93	7.99

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023**
M,N	Jasa Perusahaan	1,04	1,05	1,10	1,08	1,00	0,98	1,02
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1,70	1,70	1,76	1,89	1,80	1,71	1,7
P	Jasa Pendidikan	2,53	2,65	2,78	2,93	2,72	2,52	2,54
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,42	0,44	0,47	0,51	0,53	0,51	0,53
R,S, T,U	Jasa Lainnya	1,52	1,54	1,60	1,60	1,53	1,54	1,67
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan :\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang, 2024

Tabel 2.16  
Penentuan Sektor Basis dan Non Basis Sektor Unggulan di Kabupaten  
Tangerang Tahun 2015-2023

No.	URAIAN	Rata-Rata	Keterangan
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.07482	BASIS
2	Pertambangan dan Penggalian	0.0617	Non Basis
3	Industri Pengolahan	1.0772	BASIS
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1.5706	BASIS
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.8504	Non Basis
6	Konstruksi	1.3204	BASIS
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0.8727	Non Basis
8	Transportasi dan Pergudangan	0.5136	Non Basis
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.6241	Non Basis
10	Informasi dan Komunikasi	0.9068	Non Basis
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.6880	BASIS
12	Real Estate	0.9700	Non Basis
13	Jasa Perusahaan	0.9188	Non Basis
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.8340	Non Basis
15	Jasa Pendidikan	0.7710	Non Basis
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.3560	Non Basis
17	Jasa lainnya	0.6825	Non Basis

Sumber : Hasil Analisis LQ PDRB Kabupaten Tangerang, 2016-2023

Analisis PDRB dalam penentuan sektor basis maupun non basis berdasarkan PDRB Menurut Harga Konstan tahun 2015-2023 diperoleh bahwa sektor lapangan usaha PDRB yang menjadi sektor basis dengan nilai lebih besar dari angka 1 (satu) dengan kata lain sektor tersebut merupakan sektor basis yang menjadi kekuatan daerah untuk mengeksport produknya keluar daerah bersangkutan, sedangkan nilai kurang dari 1 (satu) sektor tersebut menjadi pengimpor atau sektor non basis, jika sama dengan 1 artinya kecenderungan sektor tersebut bersifat tertutup karena tidak melakukan transaksi ke dan dari luar wilayah, namun kondisi seperti ini jarang ditemukan dalam sebuah perekonomian wilayah, sektor basis di Kabupaten Tangerang meliputi :

1. Jasa Keuangan dan Asuransi
2. Pengadaan Listrik dan Gas
3. Konstruksi
4. Industri Pengolahan
5. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Kelima (5) sektor tersebut mampu melayani kebutuhan masyarakat Kabupaten Tangerang dan juga mampu melayani masyarakat di luar Kabupaten Tangerang.

Sedangkan sektor non basis dengan nilai kurang dari 1 meliputi :

1. Pertambangan dan Penggalian
2. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
3. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
4. Transportasi dan Pergudangan
5. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
6. Informasi dan Komunikasi
7. Real Estate
8. Jasa Perusahaan
9. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
10. Jasa Pendidikan
11. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
12. Jasa lainnya

Analisis Shift Share PDRB Kabupaten Tangerang tahun 2015-2022 diperoleh hasil analisis terhadap lapangan usaha sebanyak 17 sektor yaitu bahwa :

- a. Sektor lapangan usaha yang ada di Kabupaten Tangerang seluruh sektor (17) tumbuh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan rata-rata Provinsi Banten.
- b. Sektor yang tumbuh secara lambat. meliputi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.
- c. Sektor yang maju dan sektor tersebut tumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan meliputi sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Konstruksi, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Jasa Perusahaan, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan Jasa lainnya.
- d. Sektor tidak memiliki daya saing di Kabupaten Tangerang. sektor ini meliputi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Keuangan dan Asuransi, Jasa Perusahaan dan Jasa Pendidikan.

## 2. Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Berdasarkan pemantauan Badan Pusat Statistik terhadap 416 jenis barang dan jasa serta hasil Survei Biaya Hidup (SBH) di Kota Serang, Tangerang dan Cilegon baik secara mingguan, dua mingguan maupun bulanan.

Kota Tangerang mengalami inflasi year on year (yoy) kedua tertinggi diantara 3 kota IHK di Provinsi Banten, sebesar 3,17 persen. Komoditas yang memberikan andil inflasi di Kota Tangerang adalah cabai merah sebesar 0,51 persen, beras sebesar 0,42 persen, sewa rumah sebesar 0,29 persen, emas perhiasan sebesar 0,20 persen, angkutan antar kota dan daging ayam ras masing-masing sebesar 0,15 persen, upah asisten rumah tangga sebesar 0,13

persen, bawang putih sebesar 0,11 persen, rokok kretek filter sebesar 0,10 persen, dan rokok putih sebesar 0,07 persen.

Sementara komoditas yang memberikan andil deflasi, yaitu telur ayam ras sebesar 0,07 persen, bensin sebesar 0,04 persen, sepatu anak, pepaya, dan udang basah masing-masing sebesar 0,03 persen.

Tabel 2.17

Perkembangan Inflasi di Kota Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon, Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2016-2023 (yoy)

inflasi YoY (%)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Tangerang	2,65	3,50	3,46	3,31	1,17	1,81	4,56	3,17
Kota Serang	3,26	5,17	3,78	3,06	1,89	2,23	7,22	2,11
Kota Cilegon	4,22	5,24	2,73	3,54	2,59	2,19	5,86	3,50
Provinsi Banten	2,94	3,98	3,42	3,30	1,45	1,51	5,08	3,06
Nasional	3,02	3,61	3,13	3,13	1,68	1,87	5,51	2,61

‘ Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 2.10

Perkembangan Inflasi di Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2016-2023 (yoy)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023,  
Ket. \* Desember 2023

Perkembangan tingkat inflasi Tangerang, Kota Serang, dan Kota Cilegon dari tahun 2015-2023 relatif berfluktuasi. Inflasi Kabupaten Tangerang sampai saat ini masih mengacu pada Inflasi Kota Tangerang, hal tersebut karena Kabupaten Tangerang belum dipilih oleh BPS RI sebagai acuan penghitungan inflasi pada kota-kota di Indonesia. Pada periode tahun 2015-2023. Nilai inflasi Kota Tangerang adalah pada tahun 2023, yaitu sebesar 3,17%, sementara nilai inflasi pada tahun 2020 adalah yang terendah, yaitu sebesar 1,17%.

Sedangkan apabila dibandingkan dengan dengan nilai inflasi Provinsi Banten, nilai inflasi di Kota Tangerang pada tahun 2019 adalah sebesar 3,31% sama jika dibandingkan Provinsi Banten yang juga sebesar 3,30%, memasuki

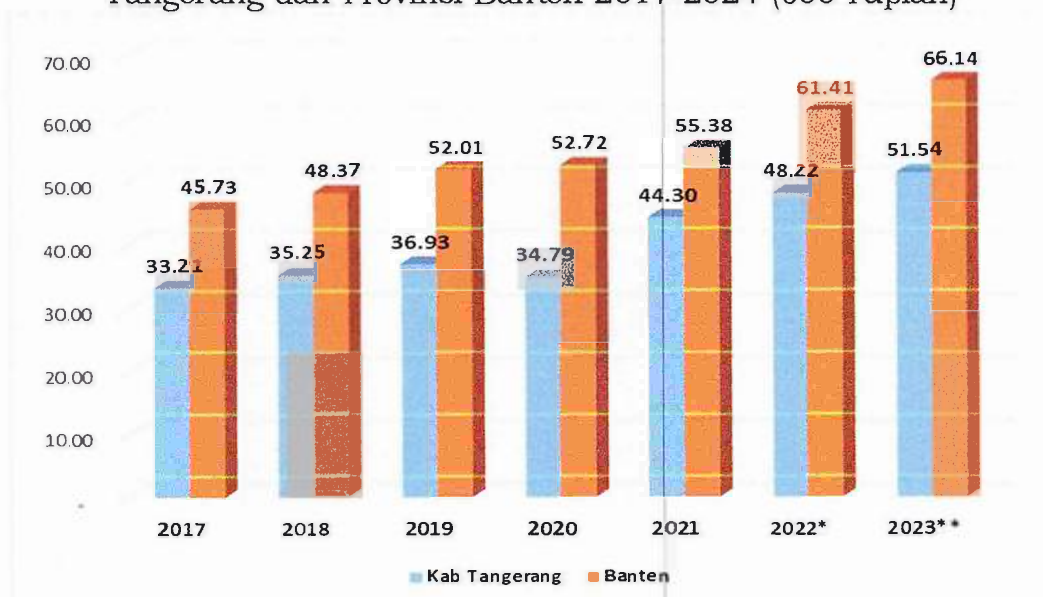
tahun 2023 inflasi kota Tangerang turun menjadi mencapai nilai 3,17% yang nilainya lebih tinggi dari inflasi Kota Cilegon sebesar 3,50%. Sementara itu, jika dibandingkan dengan tingkat inflasi nasional pada tahun 2019-2023, inflasi Kota Tangerang pada tahun 2019 mencatat nilai yang lebih tinggi yaitu 3,30% dibandingkan inflasi Nasional sebesar 2,72% dan tahun 2022 inflasi Kota Tangerang sebesar 4,56% tercatat lebih rendah daripada inflasi nasional tahun 2022 sebesar 5,51%.

### 3. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita adalah kemampuan suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan setiap penduduk rata-rata, sehingga bisa dijadikan salah satu indikator bagi keberhasilan pembangunan terutama pembangunan terutama pembangunan bidang ekonomi. Meskipun demikian PDRB per kapita belum dapat menggambarkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebenarnya. Indikator tersebut hanya dapat dipakai untuk menggambarkan apakah ada peningkatan produktivitas pembangunan setiap orangnya. PDRB per kapita sebagai salah satu indikator produktivitas penduduk dapat dihitung dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk. Untuk memacu peningkatan PDRB per kapita, maka laju pertumbuhan ekonomi harus jauh lebih besar daripada laju pertumbuhan penduduk.

Seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini, PDRB per kapita menurut harga berlaku mengalami peningkatan dari tahun 2017-2023. PDRB per kapita mencapai titik tertinggi di tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 51,54 (000 rupiah). PDRB per kapita Kabupaten Tangerang menurut Harga Konstan tahun 2023 sebesar Rp. 32,28 (000 rupiah).

Gambar 2.11  
Perkembangan PDRB Per Kapita Menurut Harga Berlaku di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten 2017-2024 (000 rupiah)



Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024

\*\* Angka Sementara

\*\* Angka sangat sementara

Gambar 2.12  
Perkembangan PDRB Per Kapita Menurut Harga Konstan di Kabupaten  
Tangerang dan Provinsi Banten 2017-2024 (000 rupiah)



Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024

\* Angka Sementara

\*\* Angka sangat sementara

#### 4. Indeks Gini

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Adanya penurunan tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat yang diukur oleh Gini Ratio. Gini Ratio dibagi atas tiga level. Level pertama, menunjukkan tingkat ketimpangan yang rendah, yaitu berada pada kisaran 0 sampai 0,3. Level kedua ketimpangan menengah yaitu antara 0,3 hingga 0,5. Level ketiga ketimpangan tinggi yaitu berada di atas 0,5. Gini Rasio Kabupaten Tangerang tahun 2023 sebesar 0,286 naik dibandingkan tahun 2022 sebesar 0,282, tahun 2022 kembali turun jika dibandingkan dengan Gini Ratio 2021 yang sebesar 0,294. Gini rasio tahun 2023 mengalami kenaikan tetapi ketimpangan Pendapatan penduduk di Kabupaten Tangerang masih tergolong pada level rendah.

Gambar 2.13  
Gini Rasio Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2023

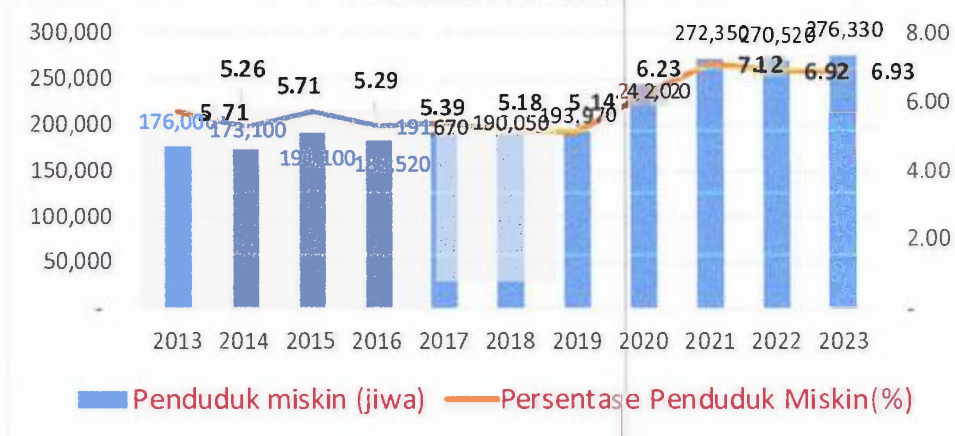


Sumber: BPS Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2023, diolah.

### 5. Penduduk Dibawah Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan. baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. Masalah kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar yang menjadi pusat perhatian Pemerintah Daerah. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kabupaten Tangerang Tahun 2016- 2022 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.14  
Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Tangerang  
Tahun 2013-2023



Sumber: BPS RI. diolah.

Dari data diatas menunjukkan bahwa persentase penduduk diatas garis kemiskinan Kabupaten Tangerang berfluktuasi nilainya. pada tahun 2018 mencapai nilai sebesar 5.18% kemudian persentase penduduk miskin tahun 2019 kembali menurun hingga mencapai 5.14%. Untuk di tahun 2020 mengalami kenaikan, persentase penduduk diatas garis kemiskinan sebesar 6.23%. tahun 2021 kembali naik menjadi 7.12%. serta tahun 2022 turun menjadi sekitar 6.92%, kembali naik tahun 2023 sebesar 6,93%.

### 7. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak.

Gambar 2.15  
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tangerang Tahun 2014-2023



Sumber : BPS Provinsi Banten, 2024

Dari data dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tangerang relatif mengalami peningkatan.

Tabel 2.18  
Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2023

Komponen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Umur Harapan Hidup Saat lahir (UHH.Tahun)	69,37	69,47	69,61	69,79	74,56	74,59	74,91	75,18
Harapan Lama Sekolah (HLS, Tahun)	12,11	12,51	12,8	12,81	12,82	12,84	12,85	12,87
Rata-rata Lama Sekolah (RLS, Tahun)	8,23	8,27	8,27	8,28	8,39	8,61	8,92	8,93
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PKP, Ribuan Rupiah)	11,863	11,914	12,179	12,476	12,203	12,273	12,427	12,749
IPM	70,44	70,97	71,59	71,93	74,09	74,47	75,15	75,56

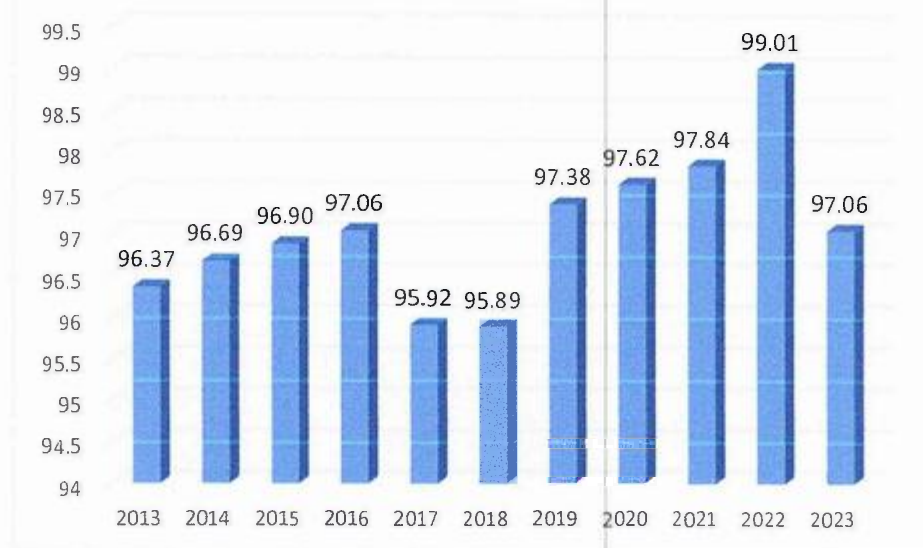
Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2024

### 2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

#### 1. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf merupakan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya. tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Kemampuan membaca dan menulis tercermin dari indikator angka melek huruf. Angka Melek Huruf (AMH) merupakan salah satu indikator pencapaian program pendidikan di Indonesia.

Gambar 2.16  
Angka Melek Huruf Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2023



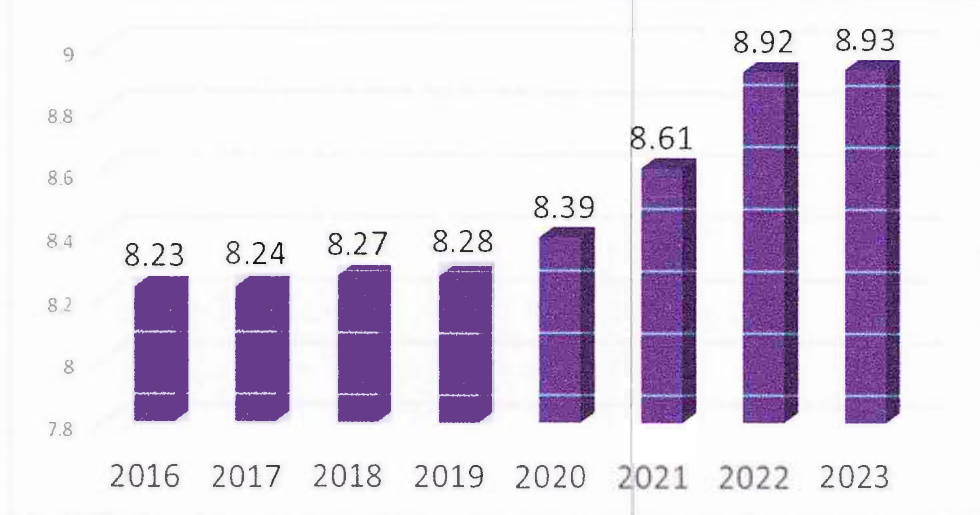
Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024 diolah.

Pendidikan merupakan salah satu penentu kualitas penduduk. Indikator atau ukuran yang bisa digunakan untuk melihat tingkat kemajuan pendidikan di suatu daerah antara lain adalah dengan melihat persentase harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Kualitas sumber daya manusia sangatlah bergantung dari pembangunan di bidang pendidikan. Data diatas menunjukkan bahwa terdapat penurunan persentase Angka Melek huruf mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, tahun 2022 angka melek huruf sangat tinggi tetapi tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 97,06 persen, hal ini disebabkan penduduk yang berusia 15 tahun keatas makin banyak yang belum mengenyam pendidikan dasar, dikarenakan belum terakses secara optimal pendidikan kesetaraan untuk masyarakat yang berumur lebih dari 15 tahun keatas yang belum mengikuti wajib belajar pendidikan dasar.

## 2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah merupakan Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Tangerang meningkat dalam kurun waktu 5 tahun. Pada tahun 2021. Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Tangerang mencapai 8,61 tahun. Sedangkan di tahun 2022 angka rata-rata lama sekolah mencapai 8,92 tahun. Walaupun meningkat setiap tahun akan tetapi belum memenuhi Wajardikdas 9 tahun yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Terdapat beberapa akar masalah yang perlu menjadi perhatian dalam peningkatan rata-rata lama sekolah, antara lain belum maksimalnya pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Tangerang sehingga masih terdapat masyarakat yang putus sekolah sebelum menamatkan jenjang pendidikan menengah pertama, demikian pula dengan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana pendidikan belum optimal.

Gambar 2.17  
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2023

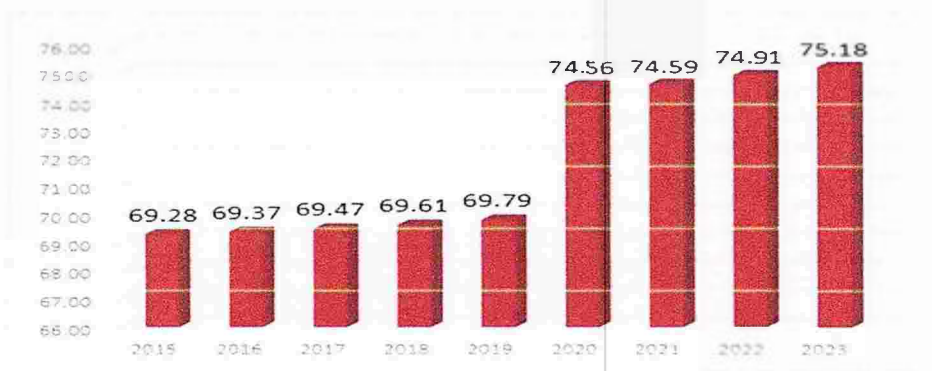


Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2024 diolah.

### 3. Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia Harapan Hidup (UHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka harapan hidup digunakan untuk mengukur indeks kesehatan, sementara indeks kesehatan merupakan salah satu komponen dasar dalam pengukuran IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Tangerang pada tahun 2023 adalah 75,18 tahun. Sedangkan dari data tahun 2022 menunjukkan bahwa Usia Harapan Hidup di Kabupaten Tangerang sekitar 74,91 tahun. Perbedaan Usia Harapan Hidup dari tahun 2019 dengan 2020, dikarenakan adanya sensus penduduk ditahun 2020 dan data jumlah penduduk menggunakan proyeksi hasil sensus penduduk (SP) 2020 dan mempengaruhi angka usia harapan hidup.

Gambar 2.18  
Angka Harapan Hidup Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2023

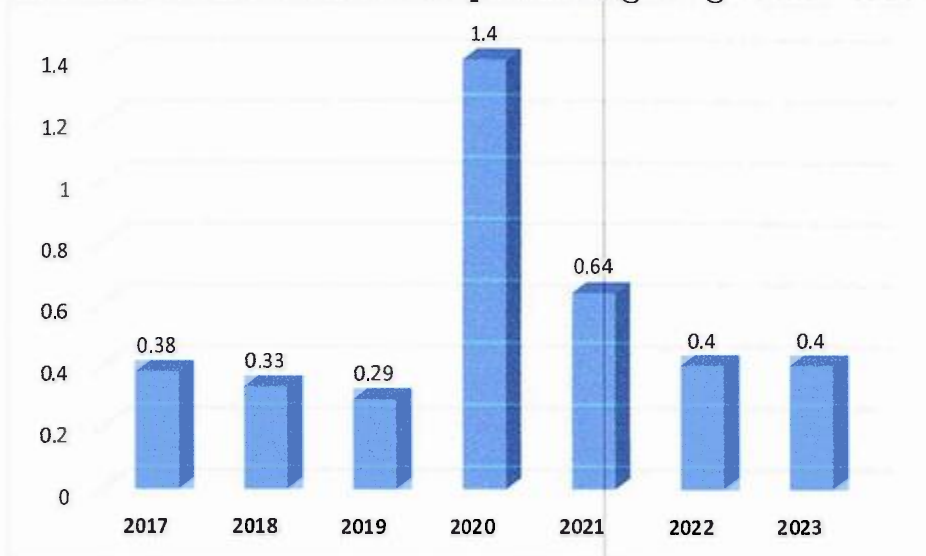


Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024. diolah.

### 4. Persentase balita gizi buruk

Gizi buruk pada balita merupakan kondisi ketika berat badan balita terlalu rendah bila dibandingkan dengan tinggi badannya. Anak dengan gizi buruk atau severe wasting biasanya memiliki daya tahan tubuh yang sangat lemah sehingga berisiko terkena penyakit parah, bahkan berisiko meninggal.

Gambar 2.19  
 Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2023



Sumber: Profil Dinkes 2023. diolah

Data persentase balita gizi buruk menunjukkan bahwa persentase balita gizi buruk tertinggi pada pada tahun 2020 sebesar 1,4 persen, hal ini menunjukkan bahwa pandemi covid-19 berdampak pada kondisi kesehatan karena terhalangnya akses pada sarana kesehatan dan juga dipengaruhi kondisi perekonomian masyarakat, akan tetapi seiring dengan keadaan yang makin kondusif, kondisi kesehatan pun terlihat makin membaik. Data yg digunakan hingga 2019 adalah data BPB dengan interpretasi gizi buruk menggunakan indikator BB/U. Data 2020 saat ini menggunakan data EPPGBM dengan interpretasi gizi buruk menggunakan indikator BB/TB sesuai dengan Permenkes No 2 Tahun 2020 terkait standar antropometri.

Diperlukan adanya komitmen secara menyeluruh dari lintas sektor dalam menanggulangi masalah gizi di Kabupaten Tangerang melalui advokasi dan kegiatan gizi bersumberdaya masyarakat melalui Pos Gizi, KP ASI dan KERAMAS, karena sektor kesehatan saja tidak akan dapat secara maksimal menurunkan angka gizi buruk. Agar terus dapat meningkatkan kinerja daerah dalam penanggulangan masalah gizi, perlu adanya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal bagi masyarakat. Gambaran status gizi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.19  
 Status Gizi Pada Balita Di Kabupaten Tangerang Tahun 2014-2023

Tahun	Gizi Buruk		Gizi Kurang		Gizi Baik		Gizi Lebih	
	N	%	N	%	N	%	N	%
2014	1,172	0.45	8,583	3.28	249,877.00	95.55	1,892.00	0.72
2015	1,091	0.39	8,099	2.86	271,407.00	95.89	2,227.00	0.79
2016	1,164	0.41	8,935	3.17	268,339.00	95.32	2,880.00	1.03
2017	1,161	0.38	9,644	3.14	294,027.00	95.68	2,479.00	0.81
2018	1,040	0.33	7,863	2.51	296,092.00	94.66	2,134.00	0.68
2019	932	0.29	7,234	2.28	305,893.00	96.22	2,131.00	0.67
2020	2,553	1.40	6,375	3.52	154,325.00	85.20	17,857.00	9.86
2021	1,368	0.64	4,992	2.34	187,040.00	87.59	20,136.00	9.43

Tahun	Gizi Buruk		Gizi Kurang		Gizi Baik		Gizi Lebih	
	N	%	N	%	N	%	N	%
2022	907	0.40	6,047	2.50	222,478.00	93.30	3,074.00	1.20
2023	760	0.40	4,933	2.50	178.745	89,3	2.696	1,3

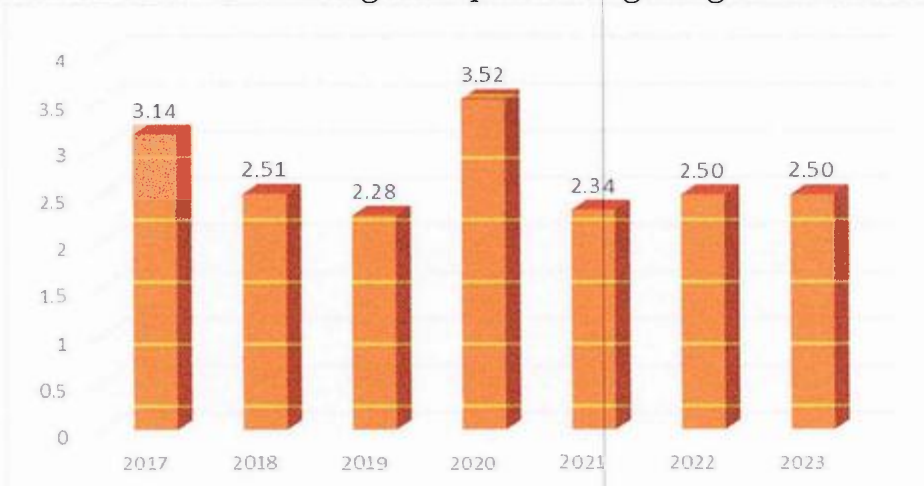
Sumber: Dinas Kesehatan Kab Tangerang, 2022

### 5. Prevalensi Balita Gizi Kurang

Pada gambar dibawah ini menunjukkan bahwa prevalensi gizi kurang mengalami penurunan dari tahun 2020 yaitu sebesar 3,52% menjadi 2,34% di tahun 2021, akan tetapi pada tahun 2022 terjadi kenaikan kembali prevalensi balita gizi kurang.

Data yang digunakan hingga 2019 adalah data Bulan Penimbangan Bayi (BPB) dengan interpreatsi gizi kurang menggunakan indikator BB/U. Sedangkan data 2020 saat ini menggunakan data ePPGBM dengan interpretasi gizi kurang menggunakan indikator BB/TB sesuai dengan Permenkes No 2 Tahun 2020 terkait Standar Antropometri. Peningkatan prevalensi gizi kurang di tahun 2022 karena balita dengan gizi buruk kondisinya membaik menjadi gizi kurang.

Gambar 2.20  
Prevalensi Balita Gizi Kurang Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2023



Sumber: Profil Dinkes, 2024

Tabel 2.20  
Persentase Balita Stunting Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2023

No	Metode Perhitungan	2019	2020	2021	2022	2023
1	E-PPGM	12	8,5	7,6	3,7	3,7
2	SSGI	18,4	N/A	23,3	21,1	26,7

Sumber: Dinkes, 2022

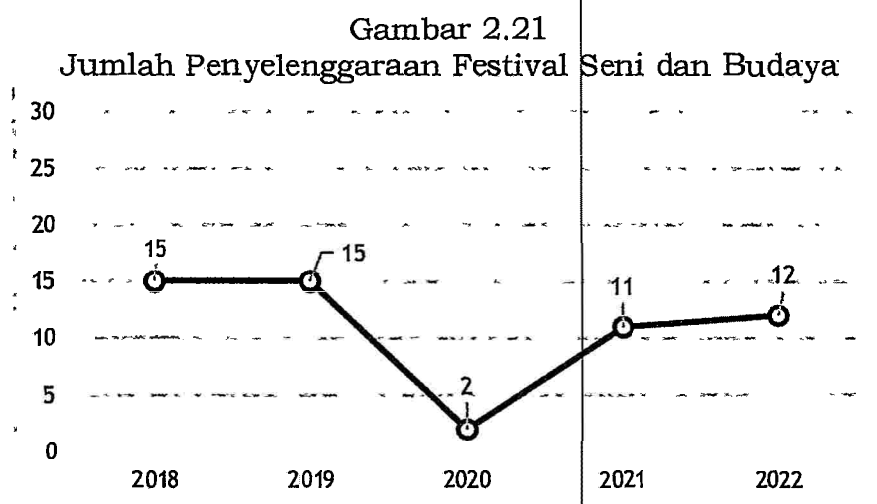
Perhitungan Balita Stunting dengan menggunakan metode Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGM) dilakukan setiap bulan oleh petugas gizi Puskesmas kepada seluruh balita di Posyandu sedangkan dengan metode dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dilakukan setiap tahun oleh Balitbangdes dengan sampel rumah tangga dengan balita. Secara nasional target stunting 2024 adakah 14 persen (SSGI) untuk itu dibutuhkan berbagai upaya untuk pencapaian tersebut karena hingga saat ini Kabupaten Tangerang masih pada angka 21,1 persen.

### 2.1.2.3 Fokus Seni dan Budaya

Seni budaya masyarakat dapat berjalan melalui langkah pembangunan yang tepat. Fasilitas fisik dan kelembagaan perlu diperhatikan untuk mendukung hal tersebut. Berdasarkan renstra Dinas Pemuda Olahraga, Budaya, dan Pariwisata Kabupaten Tangerang tahun 2018-2023, disebutkan bahwa Kabupaten Tangerang belum memiliki Gedung Kesenian. Sementara itu Gedung Kesenian dapat menjadi pusat urusan seni budaya yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, pengelolaan kelembagaan seni budaya yang tepat dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap seni budaya. Minat masyarakat pada seni budaya dapat dilihat pada persentase kelompok kesenian yang berjalan aktif. Semakin besar persentase tersebut, maka kesejahteraan masyarakat pada seni budaya dapat dikatakan semakin baik.

Festival seni budaya merupakan wujud apresiasi pada kebudayaan. Dengan mengapresiasi seni dan budaya, maka aktor-aktor yang ada di dalamnya dapat berperan dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat.



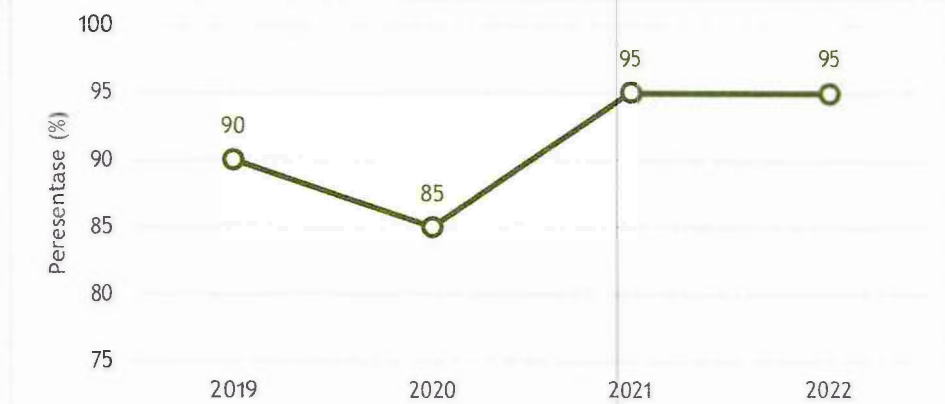
Sumber: RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026

Festival seni dan budaya di Kabupaten Tangerang selalu diselenggarakan setiap tahun. Walaupun masih berjumlah belasan, penyelenggaraan dengan skala besar seperti festival dapat dinilai cukup banyak dalam satu tahun. Tahun 2020 dengan penyelenggaraan festival seni dan budaya yang hanya berjumlah 2 disebabkan oleh adanya anomali kehidupan bermasyarakat, yaitu pandemi Covid-19.

Fasilitas dan aktivitas Olahraga dapat dilihat sebagai indikator kesejahteraan masyarakat pada bagian Olahraga. Fasilitas Olahraga dapat berupa lapangan dan gedung. Pada tahun 2023, di setiap kecamatan di Kabupaten Tangerang memiliki 1 stadion mini (28 stadion mini dan 1 sport center).

Masyarakat Kabupaten Tangerang memiliki minat yang cukup tinggi terhadap aktivitas Olahraga. Persentase kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam berolahraga pada tahun 2019 sampai tahun 2022 berada di atas 85%. Pada tahun 2021 dan 2022, persentasenya mencapai 95%.

Gambar 2.22  
Persentase Kelompok Masyarakat yang Berperan Aktif dalam Berolahraga



Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2022

### 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan konkuren yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

#### 2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Terkait Pelayanan Dasar

##### 1. Bidang Urusan Pendidikan

###### a. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Secara umum nilai APM akan lebih rendah dari APK, karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang tertentu. APM mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu yang dibagi dalam dua kelompok jenjang pendidikan yaitu SD untuk penduduk usia 7-12 tahun dan SMP untuk penduduk usia 13-15 tahun.

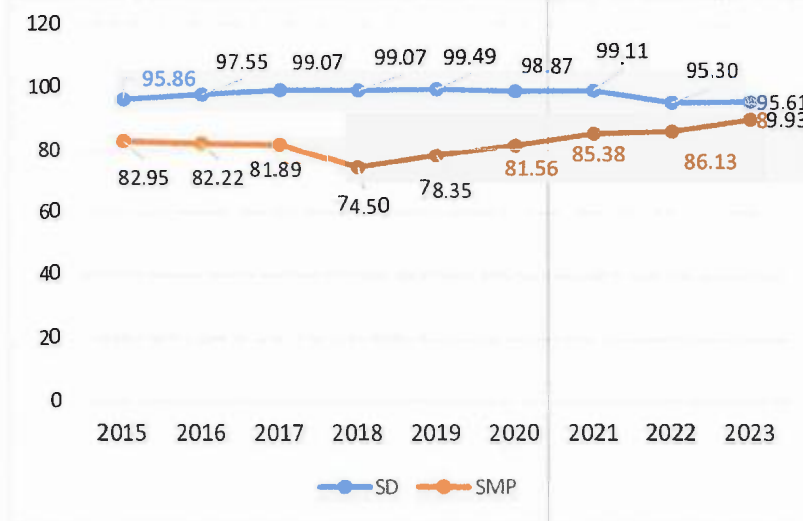
Tabel 2.21  
Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2023

Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
SD/Sederajat	95.86	97.55	99.07	99.49	98.87	99.11	95.30	95.61	95.86
SMP/Sederajat	82.95	82.22	74.50	78.35	81.56	85.38	86.13	89.93	82.95

Sumber: BPS Provinsi Banten, Kab Tangerang 2015-2023

APM SD mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan demikian pula APM SMP yang sejak tahun 2015 sampai dengan 2016 mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi jumlah anak yang bersekolah sesuai dengan kelompok usianya semakin menurun. Hal ini kemungkinan disebabkan makin banyaknya anak berusia diluar kelompok usianya yang bersekolah pada jenjang SD dan SMP karena bersekolah lebih dini dibandingkan usia yang semestinya.

Gambar 2.23  
Perkembangan APM SD-SMP Tahun 2015-2023 di Kabupaten Tangerang



Sumber: BPS Provinsi Banten, BPS Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2023

b. Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Pada tahun 2023 APK di Kabupaten Tangerang untuk tingkat SD/MI sebesar 104,47 naik bila dibandingkan tahun 2022 sebesar 104,12. APK tingkat SMP/MTs sebesar 107,33 meningkat dari tahun 2022 sebesar 106,92. APK setiap tahunnya menunjukkan fluktuasi akan tetapi selalu di atas 100, hal ini menunjukkan bahwa jumlah anak yang bersekolah dijenjang SD dan SMP lebih banyak daripada kelompok usia yang seharusnya ini menunjukkan bahwa terdapat siswa yang belum memasuki usia sekolah tapi sudah sekolah lebih awal. Secara lebih lengkap data Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Tangerang Tahun 2015 – 2023 dapat dilihat pada tabel 2.22.

Tabel 2.22  
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Tangerang  
Tahun 2015 – 2023

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	PAUD/Sederajat	54.48	56.57	60.28	19.54	15.15	20.55	21.07	30.04	34.45
2	SD/Sederajat	109.64	110.92	111.02	107.87	103.3	104.79	103.69	104.12	104.47
3	SMP/Sederajat	104.6	105.09	105.29	103.14	102.33	103.55	102.57	106.92	107.33

Sumber: <https://apkapm.data.kemdikbud.go.id>

Gambar 2.24  
Perkembangan APK PAUD, SD, SMP Tahun 2015-2023 di Kabupaten Tangerang



Sumber: <https://apkapm.data.kemdikbud.go.id>, diolah.

c. Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT)

Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan. Indikator pendidikan ini bermanfaat untuk menunjukkan capaian hasil pembangunan pendidikan di suatu daerah selain itu berguna pula untuk menyusun perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk mengetahui kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah. Pendidikan yang ditamatkan untuk Tingkat Pendidikan SD tahun 2023 sekitar 45,06 persen, meningkat dari tahun 2022 yang sebesar 44,61 persen.

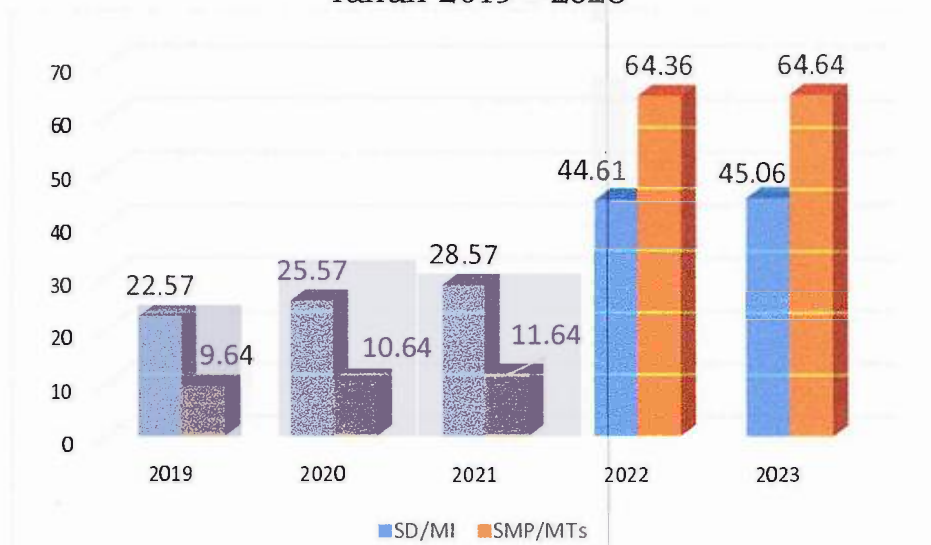
Tabel 2.23  
Perkembangan Angka Partisipasi ditamatkan (APT) Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2023

No.	Angka Partisipasi ditamatkan (APT)	2019	2020	2021	2022	2023
1	SD/MI	22,57	25,57	28,57	44,61	45,06
2	SMP/MTs	9,64	10,64	11,64	64,36	64,64

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang,2023

Dari data diatas menunjukkan bahwa tingkat APT di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun baik tingkat SD/MI maupun SMP/MTs.

Gambar 2.25  
Perkembangan Angka Partisipasi ditamatkan (APT) Kabupaten Tangerang  
Tahun 2019 – 2023



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, 2023, diolah.

d. Angka Putus Sekolah

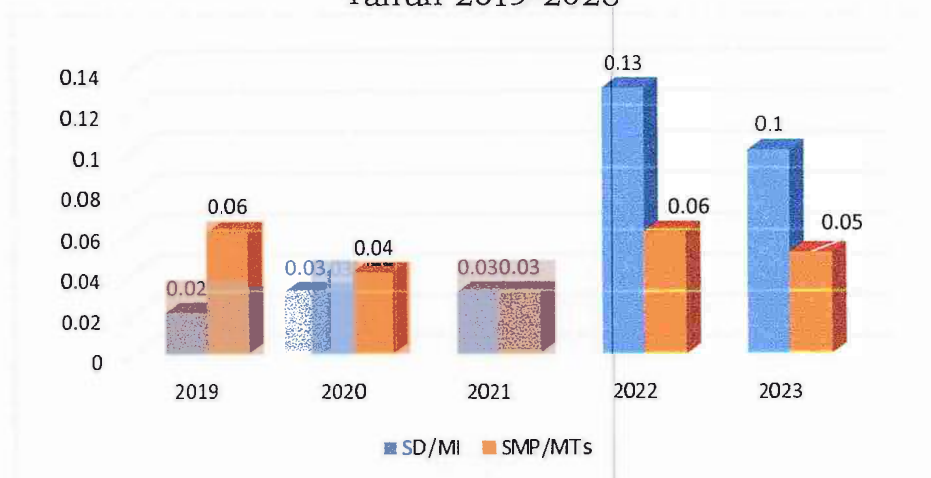
Angka putus sekolah menunjukkan tingkat putus sekolah di suatu jenjang pendidikan, misalnya angka putus sekolah SD menunjukkan persentase anak yang berhenti sekolah sebelum tamat SD yang dinyatakan dalam persen. Berikut merupakan data Angka Putus Sekolah (APS) di tingkat SD/MI dan Angka Putus Sekolah (APS).

Gambar 2.26  
Perkembangan Angka Putus Sekolah Kabupaten Tangerang  
Tahun 2019 – 2023

No.	Angka Putus Sekolah (APS)	2019	2020	2021	2022	2023
1	SD/MI	0,02	0,03	0,03	0,13	0,10
2	SMP/MTs	0,06	0,04	0,03	0,06	0,05

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, 2023

Gambar 2.26  
Angka Putus Sekolah (APS) tingkat SD/MI dan SMP/Mts  
Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Pendidikan 2023

Dari data diatas menunjukkan bahwa untuk Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI dari tahun 2021 ke 2022 mengalami kenaikan sebesar 0.13%. Sedangkan untuk Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs mengalami penurunan selama tahun 2019-2021, dan mengalami kenaikan pada tahun 2021-2022.

e. Sarana dan Prasarana

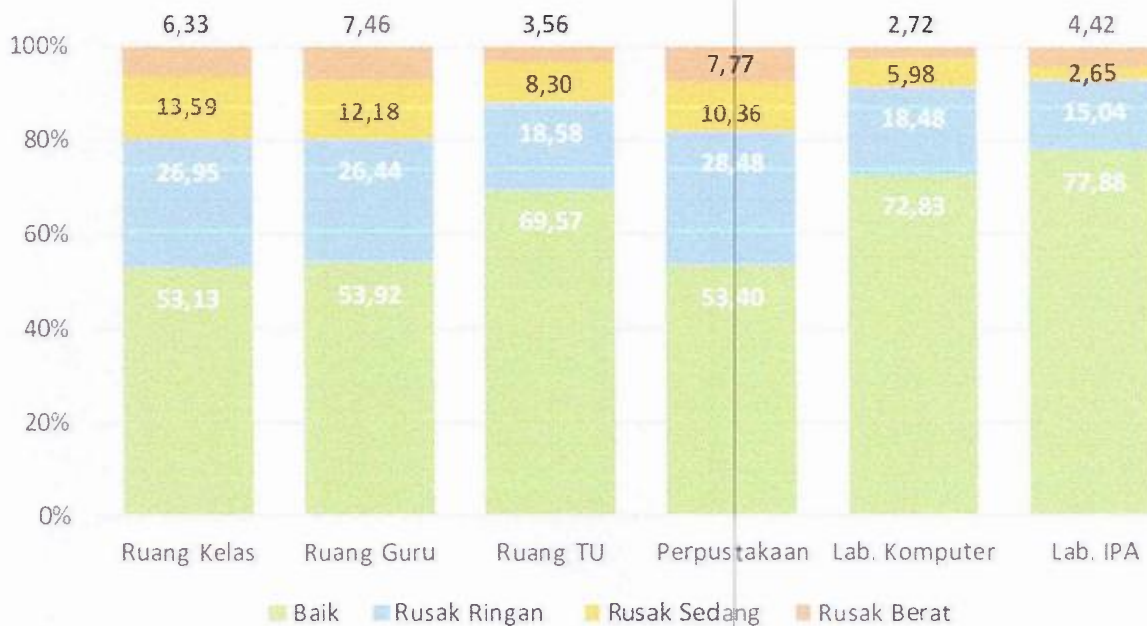
Ketersediaan sarana dan prasarana sekolah ditingkat SD dan SMP baik secara kualitas dan kuantitas sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan di Kabupaten Tangerang. Rincian tingkat kerusakan ruang kelas SD dan SMP dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 2.24  
Tingkat Kerusakan Sarana dan Prasarana SD Kabupaten Tangerang Tahun 2023

No	Sarana Prasarana SD	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
1	Ruang Kelas	5,420	2,749	1,386	646
2	Ruang Guru	571	280	129	79
3	RuangTU	176	47	21	9
4	Perpustakaan	330	176	64	48
5	Lab Komputer	134	34	11	5
6	Lab IPA	88	17	3	5
Total		6,719	3,303	1,614	792

Sumber: Profil Dinas Pendidikan Tahun 2023

Gambar 2.27  
Persentase Kondisi Sarana dan Prasarana SD di Kabupaten Tangerang Tahun 2023



Kebutuhan ruang kelas dapat dihitung berdasarkan jumlah rombongan belajar. Pada tingkat SD, rombongan belajar berjumlah 11.527 dan ruang kelas berjumlah 10.201, yang berarti masih ada kekurangan sebesar 1.326 kelas atau baru 88,50 persen ruang kelas yang terpenuhi. Sedangkan pada tingkat SMP, jumlah ruang kelas lebih banyak daripada rombongan belajar, yaitu tersedia 4.575 ruang kelas untuk 4.086 rombongan belajar.

Kebutuhan ruang guru, ruang TU, perpustakaan, laboratorium komputer, dan laboratorium IPA dihitung berdasarkan asumsi bahwa setiap sekolah minimal memiliki satu ruang guru, ruang TU, perpustakaan, Laboratorium komputer dan Laboratorium IPA, sesuai dengan yang tertera pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007.

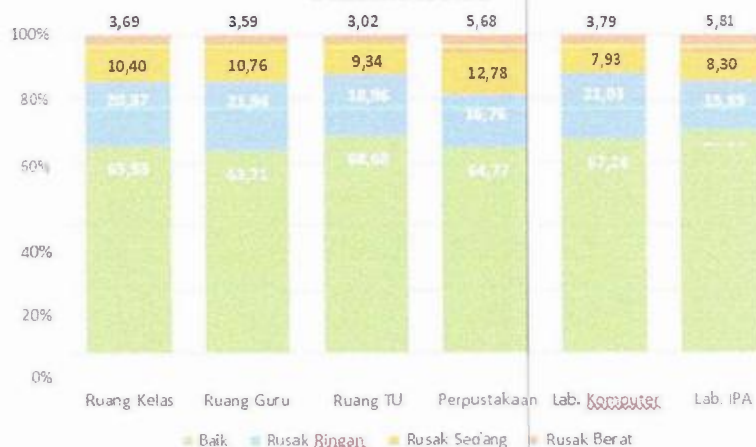
Ketersediaan ruang guru baik pada SD maupun SMP sudah di atas 90% yang artinya sudah cukup banyak sekolah yang memiliki ruang guru, namun untuk ruang TU, hanya 24,14% SD dan 74,45% SMP yang memiliki ruang TU. Kemudian, ketersediaan perpustakaan pada tingkat SD masih sebesar 58,06% sedangkan SMP sudah cukup tinggi yaitu 73,14% sekolah yang sudah memiliki perpustakaan. Untuk laboratorium, pada tingkat SD ketersediaannya masih cukup rendah yaitu 16,91% untuk Lab. Komputer dan 10,56% untuk Lab. IPA. Lalu untuk tingkat SMP, ketersediaan Lab. Komputer sudah lebih dari setengah yang memiliki yaitu 58,52% sekolah dan 46,51% sekolah yang memiliki Lab. IPA.

Tabel 2.25  
Tingkat Kerusakan Sarana dan Prasarana SMP Kabupaten Tangerang Tahun 2023

No	Sarana Prasarana SMP	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
1	Ruang Kelas	2,998	932	476	169
2	Ruang Guru	302	104	51	17
3	Ruang TU	250	69	34	11
4	Perpustakaan	228	59	45	20
5	Lab Komputer	195	61	23	11
6	Lab IPA	170	37	20	14
	Total	4,143	1,262	649	242

Sumber : Profil Dinas Pendidikan Tahun 2023

Gambar 2.28  
Persentase Kondisi Sarana dan Prasarana SD di Kabupaten Tangerang Tahun 2023

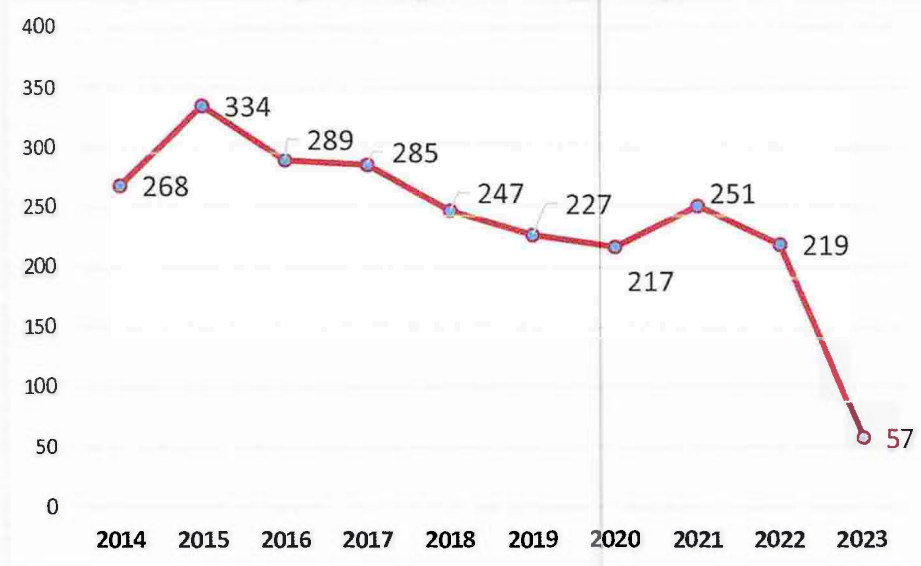


Secara keseluruhan, kondisi sarana prasarana di tingkat SMP lebih baik dibandingkan SD. Pada semua kategori, ruangan dengan kondisi baik sudah di atas 60%, meskipun juga masih ada kondisi rusak sedang dan rusak berat pada semua kategori.

2. Bidang Urusan Kesehatan  
a. Angka Kematian Bayi (AKB)

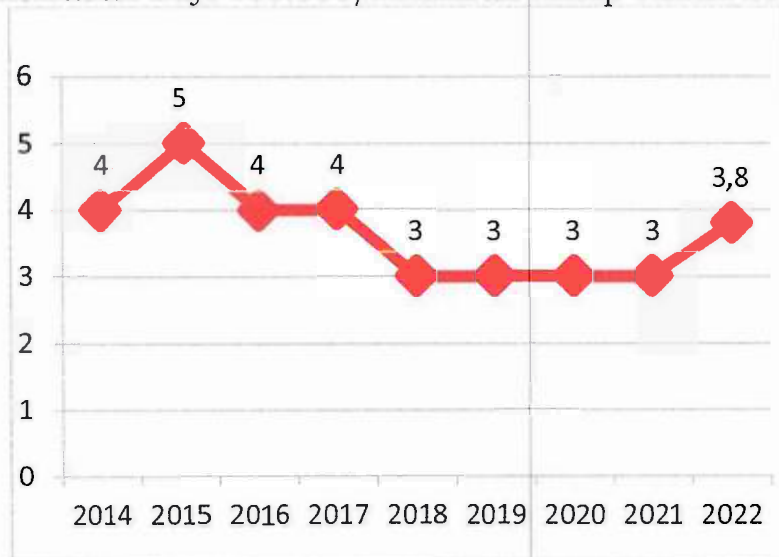
Angka Kematian Bayi atau Infant Mortality Rate (IMR) merupakan jumlah kematian bayi dibawah satu tahun. Pada gambar 2.25 terlihat angka kematian bayi di Kabupaten Tangerang menurun sejak Tahun 2018 sebesar 247 orang menjadi 227 orang pada tahun 2019 dan terus menurun pada tahun 2020 sebesar 217 orang akan tetapi pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 251 orang akan tetapi dengan berbagai upaya penanganan maka tahun 2022 menurun menjadi 219 orang, sampai tahun 2023 menurun drastis sekitar 57.

Gambar 2.29  
Jumlah Kematian Bayi Kabupaten Tangerang Tahun 2014-2023



Sumber: Dinkes. 2023. diolah

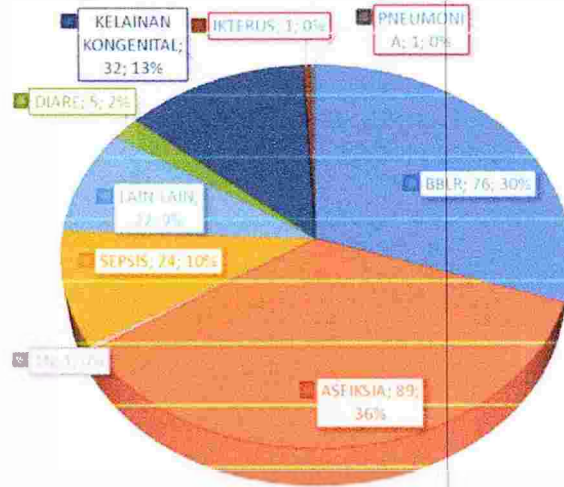
Gambar 2.30  
Angka Kematian Bayi 100.000/Kelahiran Hidup Tahun 2014-2022



Sumber: Dinkes. 2022. diolah

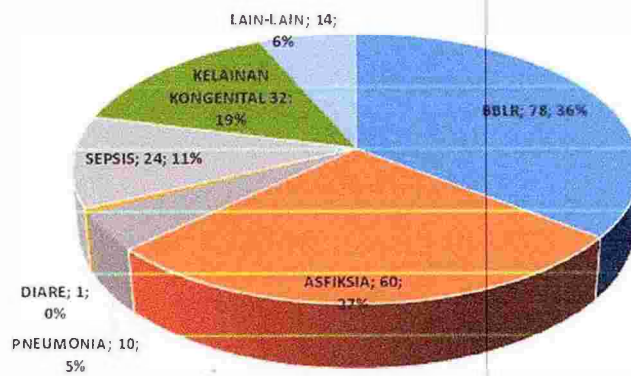
Penyebab kematian bayi pada usia 0-11 bulan disebabkan beberapa hal. Pada tahun 2021 kematian bayi didominasi oleh afiksia sebesar 36 persen dan tahun 2022 didominasi oleh Berat Badan Lahir Rendah sebesar 36 persen, tahun 2023 penyebab kematian bayi adalah Berat Badan Lahir Rendah dan prematuritas yang mencapai 48,83%, pendampingan terhadap ibu hamil masih sangat perlu menjadi perhatian untuk menurunkan Angka Kematian Bayi.

Gambar 2.31  
Penyebab Kematian Bayi Tahun 2021



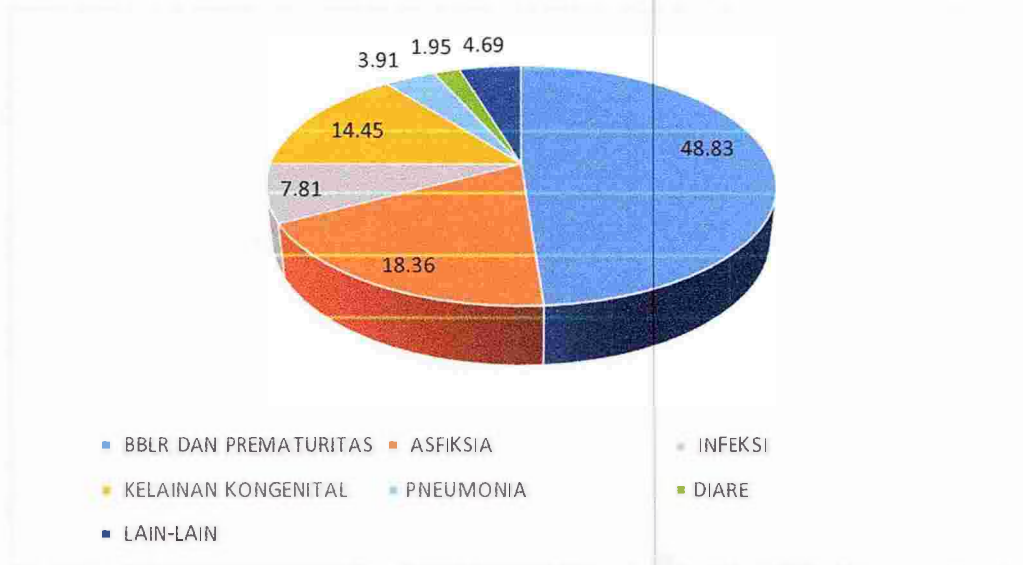
Sumber: Dinkes. 2022. diolah

Gambar 2.32  
Penyebab Kematian Bayi Tahun 2022



Sumber: Dinkes. 2022. diolah

Gambar 2.33  
Penyebab Kematian Bayi Tahun 2023



Sumber: Dinkes, 2023. Diolah.

b. Angka Kematian Ibu

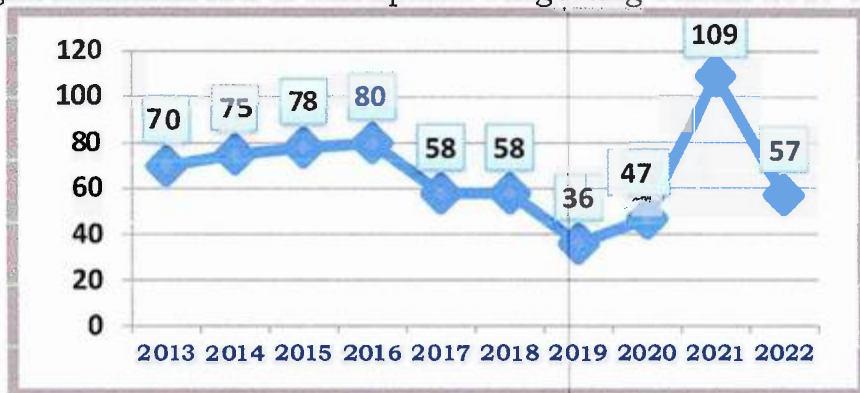
Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan). Angka Kematian Ibu (AKI) dihitung berdasarkan 100.000/Kelahiran Hidup. jumlah Kematian Ibu dan Angka Kematian Ibu paling tinggi pada tahun 2023, disebabkan hipertensi dan pendarahan.

Gambar 2.34  
Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Tangerang Tahun 2014-2023



Sumber: Dinkes, 2023. diolah

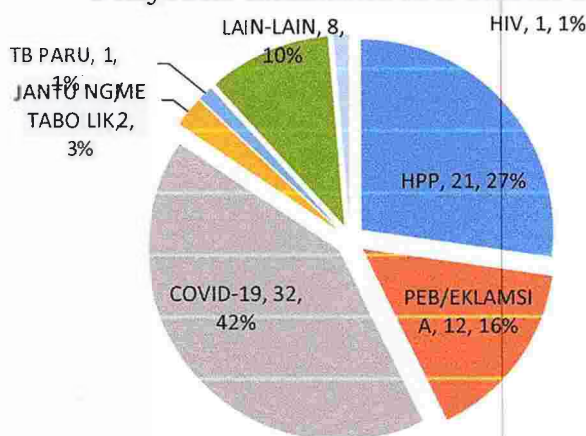
Gambar 2.35  
 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2022



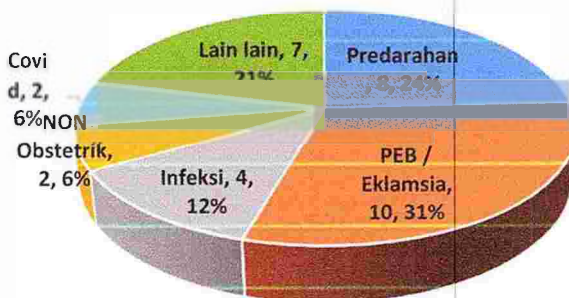
Sumber: Dinkes. 2022. diolah

Tingginya kematian ibu ini disebabkan oleh berbagai faktor risiko yang terjadi mulai dari fase sebelum hamil yaitu kondisi wanita usia subur yang anemia, kurang energi kalori, obesitas, mempunyai penyakit penyerta seperti tuberculosis dan lain-lain. Penyebab kematian ibu pada tahun 2021 didominasi Covid-19 sebesar 42 persen dan 2022 didominasi oleh PEB/Eklamsia sebesar 31 persen.

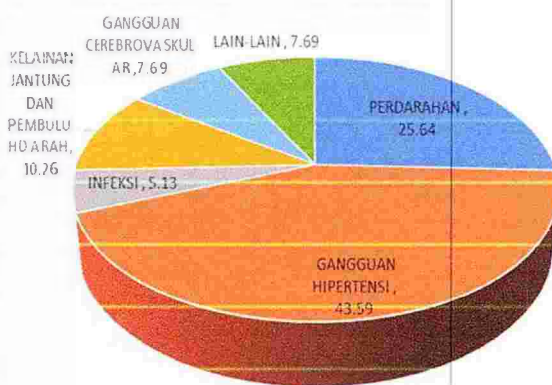
Gambar 2.36  
 Penyebab Kematian Ibu Tahun 2021



Gambar 2.37  
 Penyebab Kematian Ibu Tahun 2022



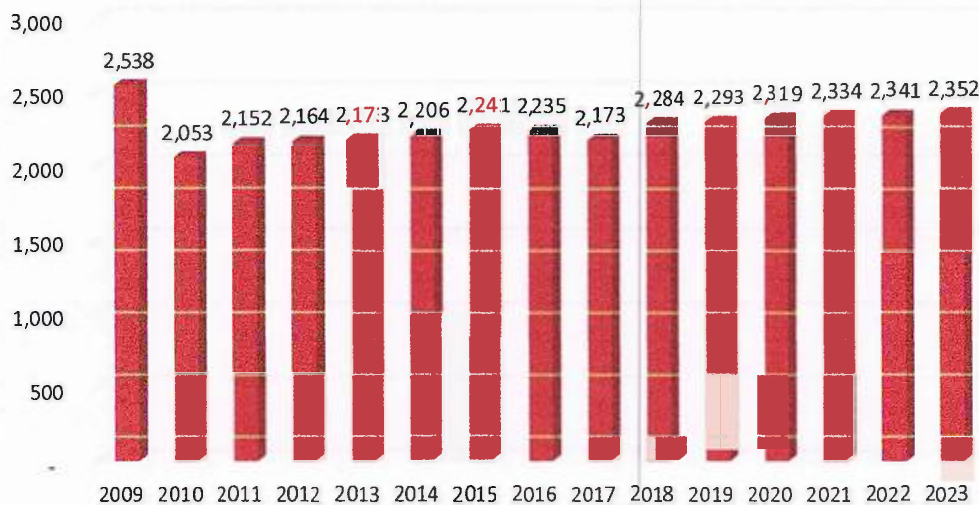
Gambar 2.38  
Penyebab Kematian Ibu Tahun 2023



c. Rasio posyandu per satuan balita (per 100 balita)

Salah satu bentuk pembinaan UKBM adalah pembinaan pada posyandu. Pada Tahun 2023 di Kabupaten Tangerang sudah terbentuk sebanyak 2352 posyandu, bertambah 11 unit posyandu. Tingkat perkembangan posyandu di Kabupaten Tangerang hingga Tahun 2022-2023 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Gambar 2.39  
Perkembangan Posyandu di Kabupaten Tangerang  
Tahun 2009-2023



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tangerang Tahun 2023

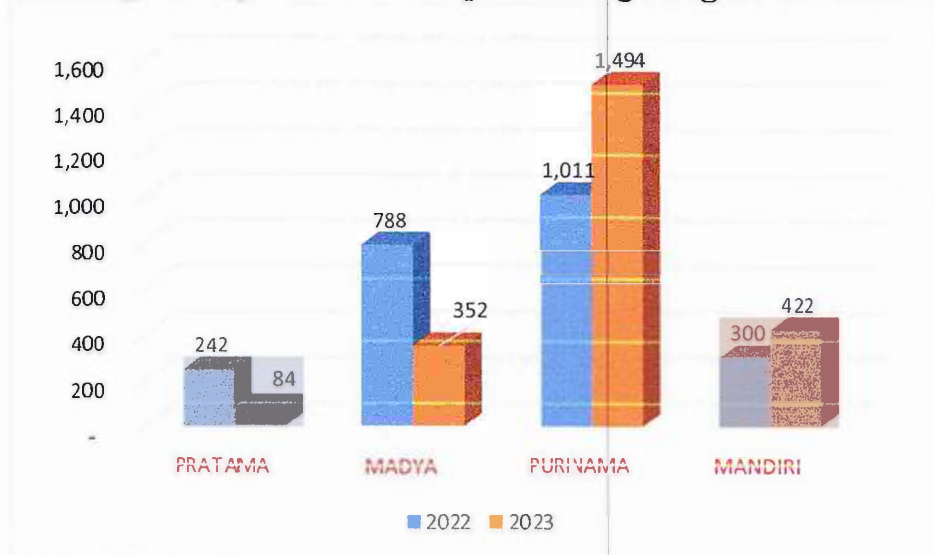
Target pembinaan posyandu adalah tercapainya Posyandu Aktif atau posyandu yang berada pada strata Purnama dan Mandiri. Pada Tahun 2023 Posyandu Purnama tercapai 1.494 unit, dan Mandiri capaiannya adalah 422 unit posyandu. Ada beberapa latar belakang capaian posyandu dari posyandu mandiri dan purnama karena :

- a. masih adanya posyandu yang memiliki kader kurang dari 5 org,
- b. masih banyak petugas yang menjadikan adanya gedung posyandu sebagai syarat strata

c. masih adanya posyandu yang memiliki sarana prasarana posyandu yang tidak lengkap.

Pada grafik dibawah ini dapat dilihat tingkat strata posyandu di Kabupaten Tangerang pada Tahun 2023.

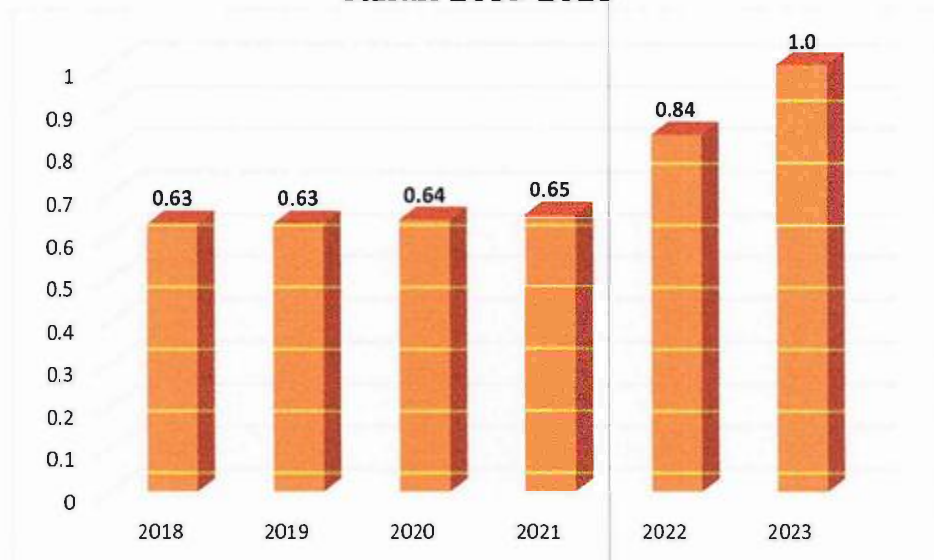
Gambar 2.40  
Perkembangan Posyandu di Kabupaten Tangerang Tahun 2022-2023



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tangerang Tahun 2023

Rasio posyandu per satuan balita merupakan jumlah posyandu untuk setiap 100 orang balita.

Gambar 2.41  
Rasio posyandu per satuan balita (per 100 balita) di Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2023



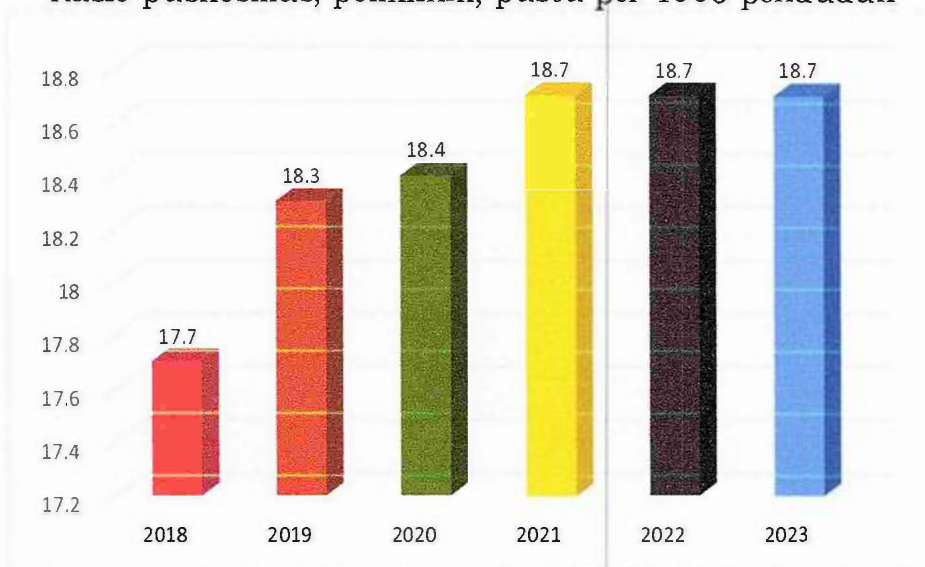
Sumber: Dinkes, 2023. diolah

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa terdapat peningkatan rasio pelayanan posyandu di tahun 2022 sebesar 0,84, naik di tahun 2023 menjadi 1,0 yang menunjukkan bahwa pelayanan posyandu berjalan dengan baik dari tahun ke tahun. Ditunjukkan oleh kenaikan rasio posyandu dalam kurun waktu 6 tahun.

d. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 1000 penduduk

Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Tangerang saat ini sudah semakin meningkat terutama fasilitas pelayanan kesehatan dasar (puskesmas, polindes dan puskesmas pembantu/pustu). Seluruh kecamatan di Kabupaten Tangerang sudah memiliki puskesmas. bahkan di beberapa kecamatan memiliki 2 puskesmas dengan total sebanyak 44 unit. Jumlah ini terdiri dari puskesmas rawat inap 37 unit dan non rawat inap 46.

Gambar 2.42  
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1000 penduduk



Sumber: Dinkes, 2023. diolah

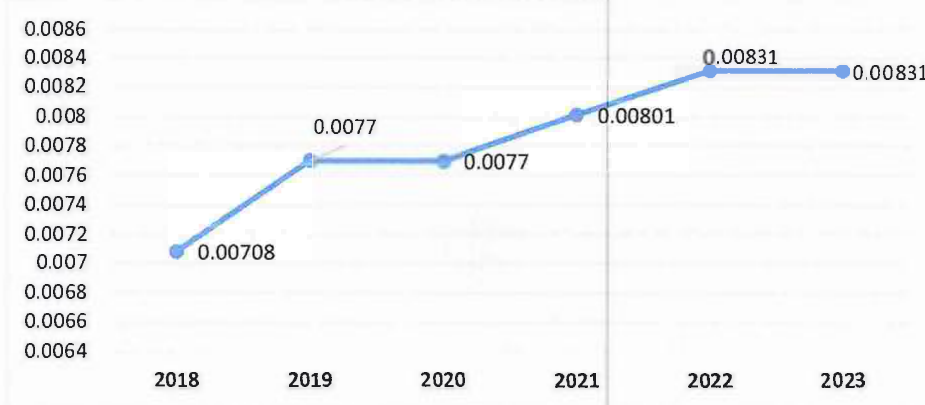
Angka rasio jumlah puskesmas, poliklinik dan puskesmas pembantu (pustu) per jumlah penduduk mengalami perubahan seiring dengan jumlah penduduk. hal ini ditunjukkan oleh data diatas dimana rasio jumlah puskesmas, poliklinik dan puskesmas pembantu (pustu) di Kabupaten Tangerang naik di tahun 2021, 2022, 2023 sebesar 18,7%, pada tahun 2023 jumlah puskesmas, poliklinik dan pustu sebanyak 570 unit.

e. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (per 100.000 penduduk)

Rumah Sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan. diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Rasio Rumah sakit per satuan penduduk adalah perbandingan antara jumlah rumah sakit dengan jumlah penduduk untuk 100.000 penduduk. Angka rasio Rumah Sakit mencapai 0,00831 di tahun 2022. Dalam penyelenggaraan fungsi rumah sakit perlu dilakukan upaya peningkatan peran rumah sakit dalam pelaksanaan program prioritas.

Gambar 2.43

Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (per 100.000 penduduk)  
Tahun 2017-2023



Sumber: Dinkes, 2023. Diolah

f. Rasio dokter per satuan penduduk (per 1000 penduduk)

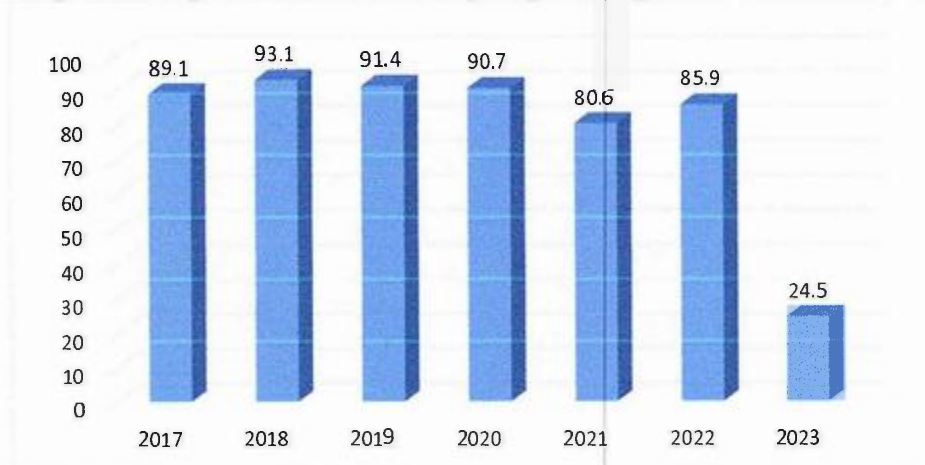
Rasio Dokter per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan Dokter baik dokter umum ataupun spesialis dan cakupan pelayanan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk. Pada tahun 2023 jumlah dokter baik spesialis mencapai 2.114 orang dengan rincian dokter umum sebanyak 1.115 dan dokter spesialis sebanyak 999 orang, dengan rasio dokter per 1000 penduduk adalah 63,9 artinya satu dokter menangani 63 orang penduduk Kabupaten Tangerang, rasio ini dirasakan masih sangat jauh dari kecukupan.

g. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani dapat didefinisikan sebagai ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan. Cakupan penanganan komplikasi kebidanan di wilayah Kabupaten Tangerang pada tahun 2017-2023 digambarkan pada grafik dibawah ini:

Gambar 2.44

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Tahun 2017-2023



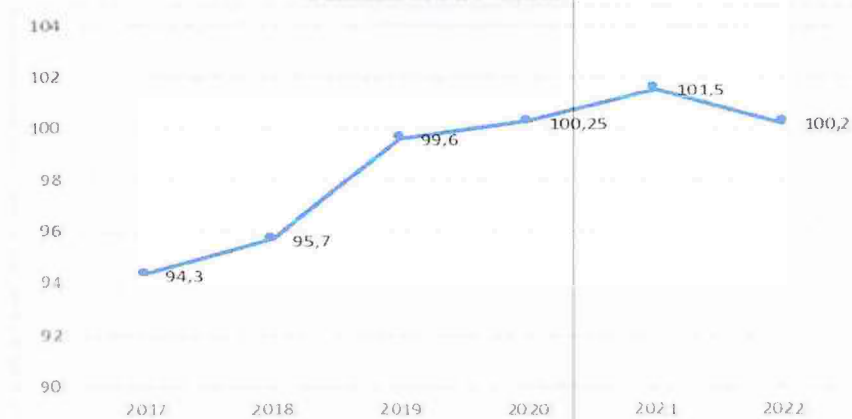
Sumber: Dinkes, 2023. diolah

Dari data diatas menunjukkan bahwa persentase cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari diagram diatas yang menunjukkan penurunan dari tahun 2021 yang awalnya sebesar 90,7% pada tahun 2020 dan turun menjadi 80,6% di tahun 2021 dan mengalami kenaikan tahun 2022 sebesar 85,9 persen, tahun 2023 mengalami penurunan sekitar 24,5 persen dengan rincian jumlah ibu hamil sebanyak 61.571 sedangkan ibu hamil dengan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani sebanyak 15.063. Sehubungan dengan hal tersebut puskesmas harus meningkatkan tindakan promotif dan preventif terhadap komplikasi kebidanan, sehingga akan lebih cepat dalam penanganannya.

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Meningkatnya cakupan pertolongan ibu bersalin dengan bantuan tenaga kesehatan yang kompeten merupakan salah satu upaya untuk menurunkan AKI dan AKB. Dari data dibawah ini menunjukkan bahwa cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Tangerang mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Gambar 2.45  
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Tahun 2017-2022



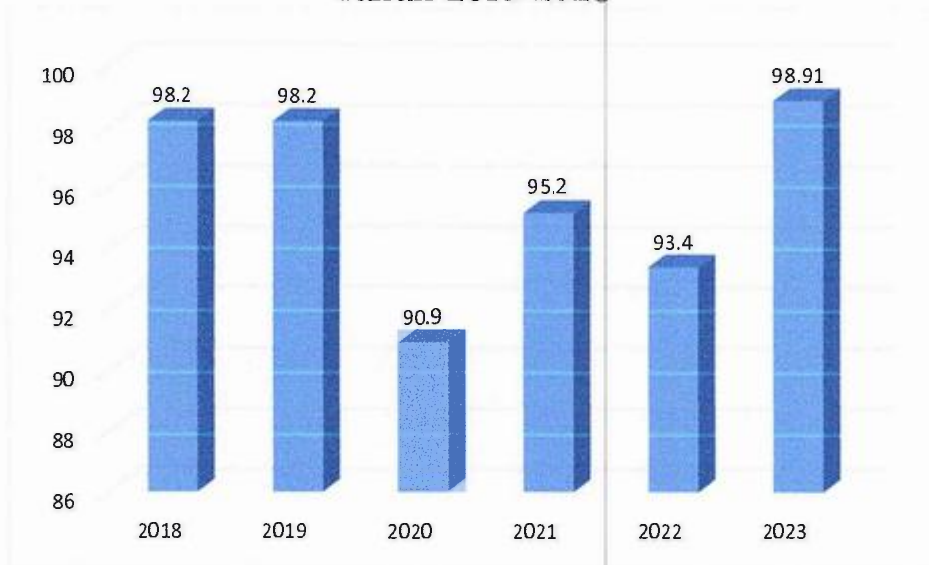
Sumber: Dinkes. 2022. diolah

Dimana persentase di tahun 2018 sebesar 95,7%. Kemudian naik menjadi 99,6% di tahun 2019 dan terus naik sampai dengan tahun 2021 dan kembali menurun pada tahun 2022 sebesar 100,2% Hal ini harus segera ditindaklanjuti melihat tren penurunan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.

h. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

UCI (Universal Child Immunization) adalah indikator lain, selain dari imunisasi dasar lengkap, untuk mengukur keberhasilan pemberian imunisasi. UCI desa/kelurahan adalah gambaran suatu desa/kelurahan dimana  $\geq 80\%$  dari jumlah bayi yang ada di desa/kelurahan tersebut telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap.

Gambar 2.46  
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)  
Tahun 2018-2023



Sumber: Dinkes, 2023

Upaya imunisasi perlu terus ditingkatkan untuk mencapai tingkat kekebalan masyarakat yang tinggi (herd immunity) sehingga Penyakit-penyakit yang dapat di imunisasi (PD3I) dapat dibasmi, dieliminasi atau dikendalikan dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan upaya imunisasi dapat semakin efektif bermutu dan efisien.

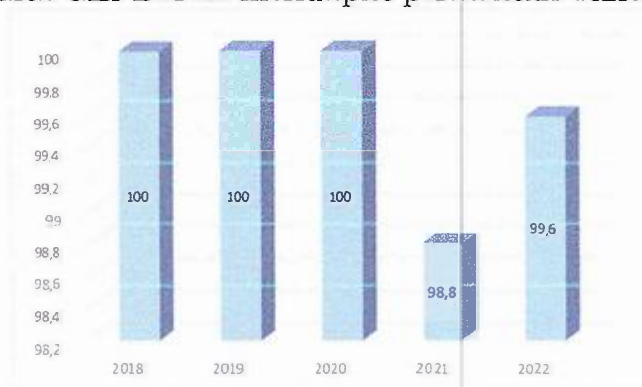
Universal Child Immunization (UCI) sudah tidak dipakai sejak tahun 2020 berdasarkan Permenkes Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan.

Tahun 2020-2024. Indikator yang dipakai saat ini adalah persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (IDL), sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.

i. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

Dari data dibawah ini dapat diketahui bahwa di tahun 2018-2020 cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan sebesar 100%. Kemudian di tahun 2021 mengalami penurunan 98,8 persen dan tahun 2022 mencapai 99,6 persen.

Gambar 2.47  
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Tahun 2018-2022



Sumber: Dinkes, 2022. Diolah

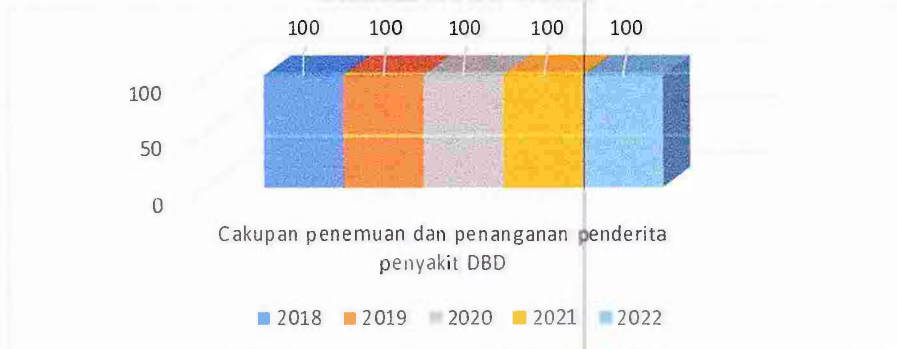
Untuk meningkatkan cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan perlunya komitmen dari Kabupaten Tangerang melalui instansi terkait untuk melakukan upaya seperti upaya penyuluhan gizi, peningkatan cakupan penimbangan balita, pemberian makanan tambahan (PMT) pemulihan bagi balita dengan gizi kurang, peningkatan kapasitas petugas dalam tata laksana balita gizi buruk, pembentukan Therapeutic Feeding Centre (TFC) dan Community Feeding Centre (CFC) sebagai pusat-pusat pemulihan gizi di faskes serta upaya lain untuk mendukung peningkatan balita gizi buruk yang mendapat perawatan.

Penanganan balita gizi buruk dilakukan pada balita gizi buruk yang dilaporkan pada bulan sebelumnya. Pada tahun 2021 terdapat 6 balita dan tahun 2022 terdapat 2 balita yang sesuai hasil pengukuran, ditemukan gizi buruk, namun balita ini pindah domisili keluar Kabupaten Tangerang sebelum sempat dilakukan intervensi/ditangani.

j. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Pada gambar 2.40 menunjukkan bahwa cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD mencapai 100% di tahun 2018 hingga 2022. Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui instansi terkait telah melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit DBD dititik beratkan pada kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di semua wilayah dan pemantauan jentik berkala untuk mencapai angka bebas jentik sesuai target >95%), kegiatannya dilakukan dengan melakukan Sosialisasi dan Pembinaan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik khususnya di wilayah-wilayah endemis DBD, melakukan Penyelidikan Epidemiologi (PE) dan melaksanakan Fogging Fokus sesuai kriteria dari hasil penyelidikan Epidemiologi sebagai upaya untuk memutus rantai penularan DBD yang didahului dengan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat.

Gambar 2.48  
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD  
Tahun 2018-2022



Sumber: Dinkes, 2022, diolah

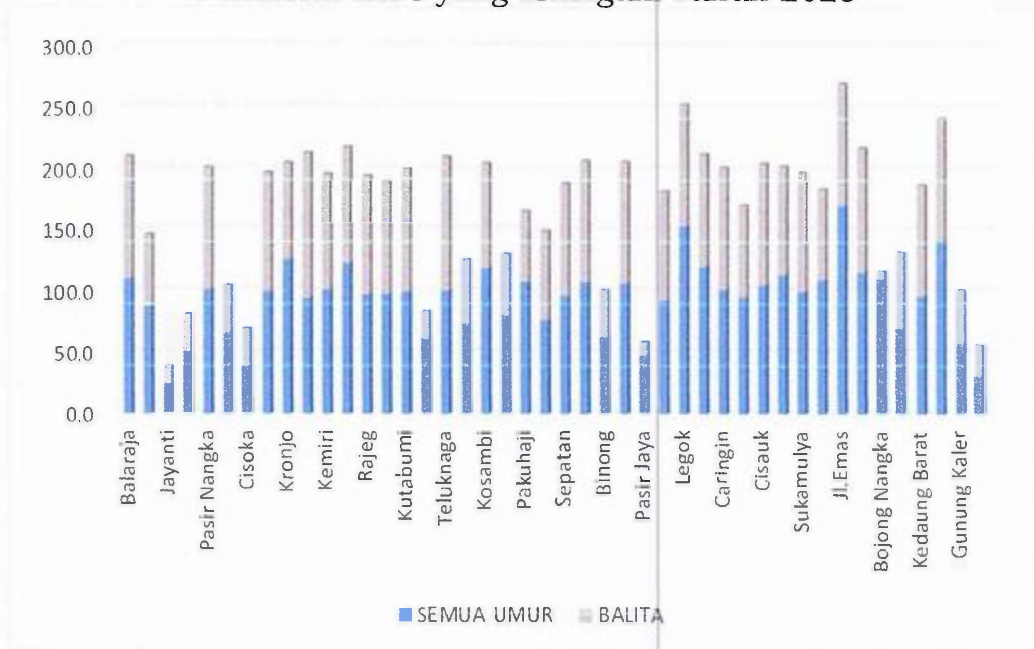
Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), Larvasidasi (pemberian abate untuk membunuh jentik nyamuk pada tempat-tempat penampungan air) dan dilanjutkan fogging fokus dengan radius 200 m.

k. Penderita diare yang ditangani

Berdasarkan hasil kegiatan Rapid Survei Diare yang dilaksanakan pada tahun 2015, diketahui bahwa angka kesakitan diare pada semua umur adalah

270 per 1000 penduduk. angka kesakitan diare pada balita adalah 843 per 1000 penduduk. Selain itu diare juga merupakan penyakit yang berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) sehingga perlu dilakukan upaya untuk penanganan penyakit diare. Persentase penderita diare yang ditangani di Kabupaten Tangerang relatif mengalami kenaikan dan penurunan selama kurun waktu 5 tahun . Hal ini terlihat dari grafik di bawah:

Gambar 2.49  
Penderita diare yang ditangani Tahun 2023



Sumber: Dinkes, 2023. diolah

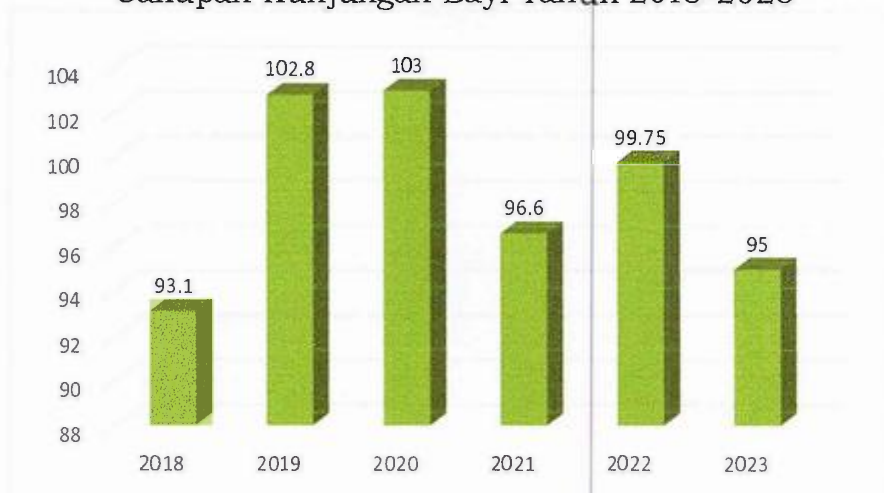
1. Angka kejadian Malaria

Penyakit Malaria merupakan penyakit infeksi menular yang menyebar melalui gigitan nyamuk. Berdasarkan data diagram di bawah dapat diketahui bahwa dalam kurun lima tahun terakhir di Kabupaten Tangerang tidak memiliki kasus penyakit malaria.

m. Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh dokter, bidan dan perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan. paling sedikit 4 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Kunjungan bayi tersebut dapat pelayanan kesehatan rutin mulai dari pelayanan kesehatan neonatal dasar yang meliputi tindakan resusitasi, pencegahan hipotermia, pemberian ASI dini dan eksklusif, pencegahan infeksi berupa perawatan mata, tali pusat, kulit dan pemberian imunisasi.

Gambar 2.50  
Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2018-2023



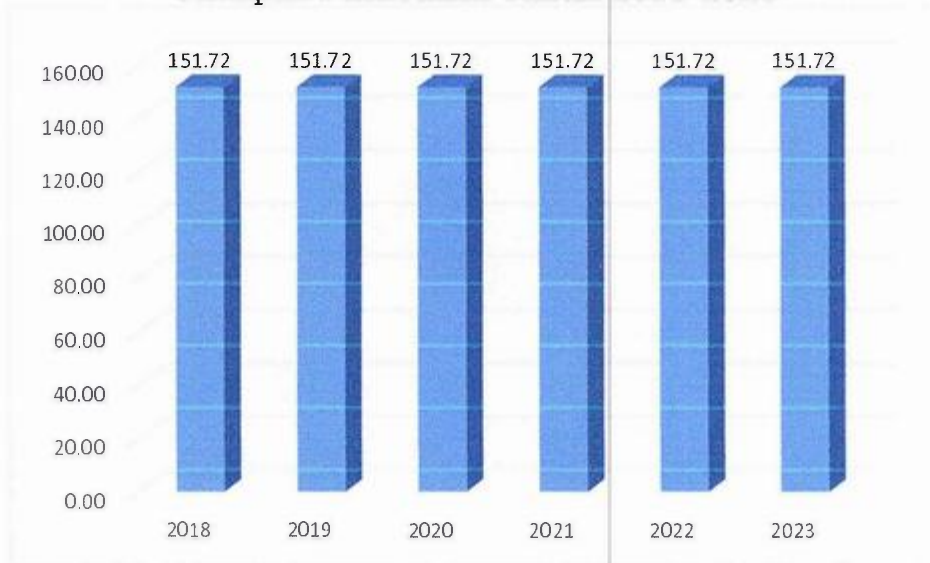
Sumber: Dinkes, 2023. diolah

Cakupan kunjungan bayi adalah Cakupan kunjungan bayi umur 29 hari-11 bulan di sarana pelayanan kesehatan (polindes, pustu, puskesmas, rumah bersalin dan rumah sakit) maupun di rumah, posyandu, tempat penitipan anak, panti asuhan dan sebagainya melalui kunjungan petugas. Cakupan kunjungan bayi pada tahun 2018 sebesar 93.1% menurun dibandingkan tahun 2017 sebesar 94.7%, namun cakupan tersebut sudah mencapai target Renstra tahun 2018 sebesar 90%. Kemudian pada tahun 2020 cakupan kunjungan Bayi mulai meningkat yaitu 99.9%. Berdasarkan data diatas dapat terlihat bahwasanya capaian kunjungan bayi di kabupaten Tangerang bersifat fluktuatif. Pada tahun Angka ini mengalami penurunan menjadi 96.6% pada tahun 2021 dan kembali meningkat menjadi 99.75% pada tahun 2022, 95 persen ditahun 2023.

n. Cakupan Puskesmas

Cakupan puskesmas adalah jumlah puskesmas dibandingkan dengan jumlah seluruh kecamatan dikalikan dengan 100%. Standar puskesmas idelanya 1 unit puskesmas melayani 30.000 penduduk, kondisi ketersediaan puskesmas dibandingkan jumlah penduduk Kabupaten Tangerang tahun 2023 yang sebanyak 3.309.365 jiwa belum ideal untuk 1 puskesmas melayani 30.000 penduduk di Kabupaten Tangerang, jika dibandingkan jumlah kecamatan yang 29 dengan 44 puskesmas cukup ideal tapi jika dibandingkan dengan jumlah penduduk belum ideal. Jumlah puskesmas yang ada di Kabupaten Tangerang sebanyak 44 unit dengan jumlah kecamatan sebanyak 29 kecamatan, puskesmas yang ada di Kabupaten Tangerang dengan rawat inap sebanyak 7 puskesmas, dan 42 puskesmas pembantu (Pustu) sampai dengan tahun 2023 belum ada penambahan unit baru puskesmas, beberapa puskesmas hanya mengalami perpindahan lokasi Bangunan dikarenakan lokasi tidak layak untuk puskesmas. Berikut grafik yang menggambarkan ketercapaian tersebut:

Gambar 2.51  
Cakupan Puskesmas Tahun 2018-2023



Sumber: Dinkes, 2023. diolah

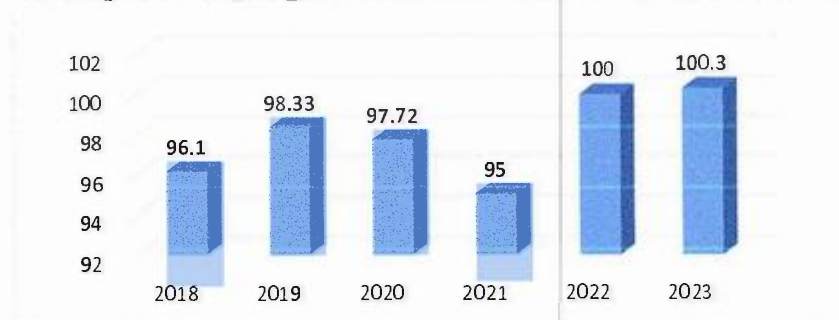
o. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 adalah persentase atau proporsi ibu hamil yang melakukan kunjungan ke dokter atau tenaga kesehatan sebanyak 4 kali atau lebih selama masa kehamilannya. Kunjungan ibu hamil K4 adalah bagian dari program perawatan ibu hamil yang berfokus pada peningkatan kesehatan ibu dan janin selama masa kehamilan. Tujuan dari kunjungan ibu hamil K4 adalah untuk memastikan bahwa ibu hamil menerima perawatan yang tepat dan dapat mengatasi masalah kesehatan yang muncul selama masa kehamilan. Ini juga membantu dalam memantau perkembangan janin dan memastikan bahwa ibu dan janin menerima nutrisi dan vitamin yang dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.

Persentase kunjungan ibu hamil K4 mengalami peningkatan dari 99% pada tahun 2021 menjadi 100% pada tahun 2022, 100,3% ditahun 2023. Capaian ini sudah mencapai target SPM pelayanan kesehatan pada ibu hamil sebesar 100%.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan cakupan K1 dan K4 antara lain pendataan ibu hamil, kunjungan rumah bagi ibu hamil yang tidak mematuhi jadwal ANC, optimalisasi Kelas ibu hamil, optimalisasi MOM (Mobile Obstetri Monitoring), Penyuluhan P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) dan peningkatan kualitas pelayanan ANC serta peran aktif dari MKIA (Motivator Kesehatan Ibu dan Anak).

Gambar 2.52  
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Tahun 2018-2023



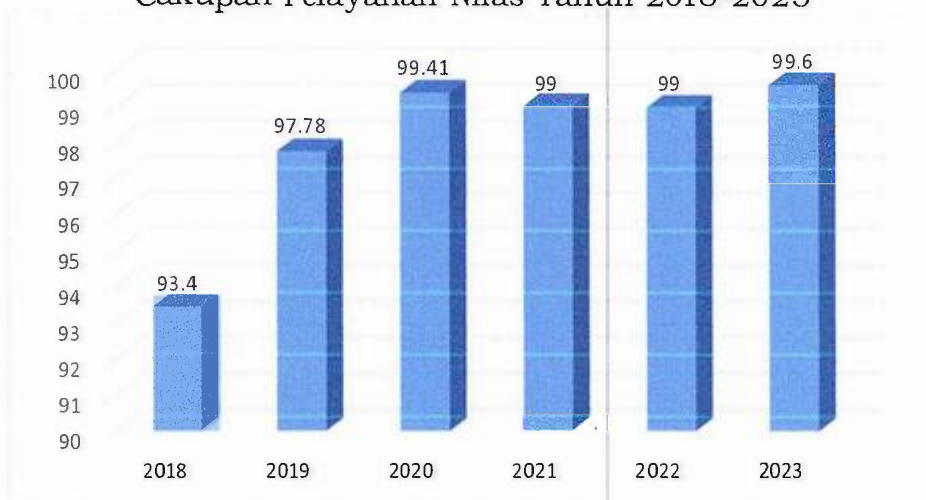
Sumber: Dinkes, 2023. diolah

p. Cakupan Pelayanan Nifas

Cakupan pelayanan nifas adalah persentase atau proporsi ibu bersalin yang menerima pelayanan nifas setelah melahirkan. Pelayanan nifas adalah pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk ibu bersalin selama masa pasca melahirkan. Tujuan dari pelayanan nifas adalah untuk memastikan bahwa ibu bersalin memiliki akses yang cukup terhadap pelayanan kesehatan yang tepat dan efektif setelah melahirkan. Ini juga membantu dalam memantau perkembangan ibu dan memastikan bahwa ibu menerima perawatan yang dibutuhkan untuk memulihkan kondisi kesehatannya setelah melahirkan.

Capaian Pelayanan di Kabupaten Tangerang selama periode 2018-2022 mengalami tren peningkatan yang cukup positif. Tahun 2018 cakupan pelayanan ini mencapai 93.4% dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 97.78%. capaian ini kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 99.41% kemudian pada tahun 2021 dan 2022 capaian ini menurun menjadi 99%, tahun 2023 pelayanan terhadap ibu bersalin dan nifas lengkap mencapai 99,6%. Berikut grafik yang menggambarkan capaian tersebut:

Gambar 2.53  
Cakupan Pelayanan Nifas Tahun 2018-2023



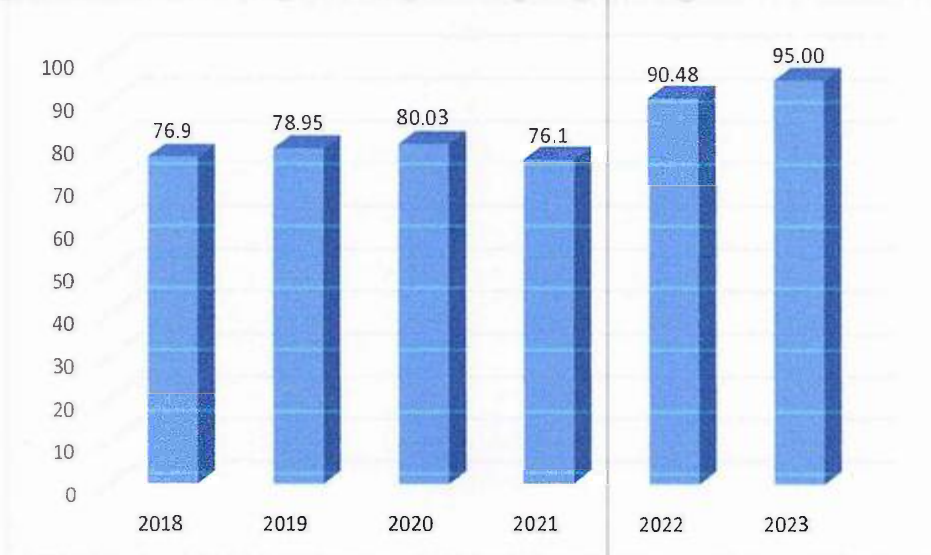
Sumber: Dinkes, 2023. diolah.

q. Cakupan Neonatus Komplikasi

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani adalah persentase atau proporsi neonatus yang menderita komplikasi kesehatan dan menerima perawatan yang tepat dan efektif. Komplikasi kesehatan pada neonatus dapat berupa masalah pernapasan, masalah pada jantung, infeksi, dan lain-lain. Tujuan dari perawatan neonatus dengan komplikasi adalah untuk memastikan bahwa neonatus memiliki akses yang cukup terhadap pelayanan kesehatan yang tepat dan efektif untuk mengatasi masalah kesehatannya. Ini juga membantu dalam memastikan bahwa neonatus memperoleh perawatan yang dibutuhkan untuk memulihkan kondisi kesehatannya dan menghindari komplikasi yang lebih serius.

Cakupan Neonatus ini mengalami tren peningkatan yang cukup baik. Capaian pada tahun 2018 adalah 76.9%. kemudian meningkat menjadi 78.95% pada tahun 2019. Pada tahun 2020 capaian ini kembali meningkat menjadi 80.03%. Kemudian tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 76.1% dan kembali meningkat menjadi 90.48%, tahun 2023 kunjungan Neonatal 3 Kali (Kn Lengkap) mencapai 95%. Untuk lebih jelasnya lihat gambar 2.48 berikut.

Gambar 2.54  
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Tahun 2018-2023



Sumber: Dinkes, 2023 diolah.

r. Cakupan Pelayanan Anak Balita

Cakupan anak balita adalah persentase atau proporsi anak usia 1 sampai 5 tahun yang menerima pelayanan kesehatan yang dibutuhkan, termasuk imunisasi, skrining kesehatan, dan perawatan untuk masalah kesehatan. Anak balita membutuhkan perawatan kesehatan yang konsisten dan tepat waktu untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang sehat dan untuk mencegah masalah kesehatan di masa depan. Tujuan dari cakupan anak balita adalah untuk memastikan bahwa anak balita memiliki akses yang cukup terhadap pelayanan kesehatan yang tepat dan efektif dan membantu dalam memantau pertumbuhan dan perkembangan anak balita. Ini juga membantu dalam menentukan kebutuhan untuk tenaga kesehatan dan sumber daya lain yang dibutuhkan untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang tepat dan efektif bagi anak balita.

Gambar 2.55  
Cakupan Pelayanan Anak Balita Tahun 2018-2023



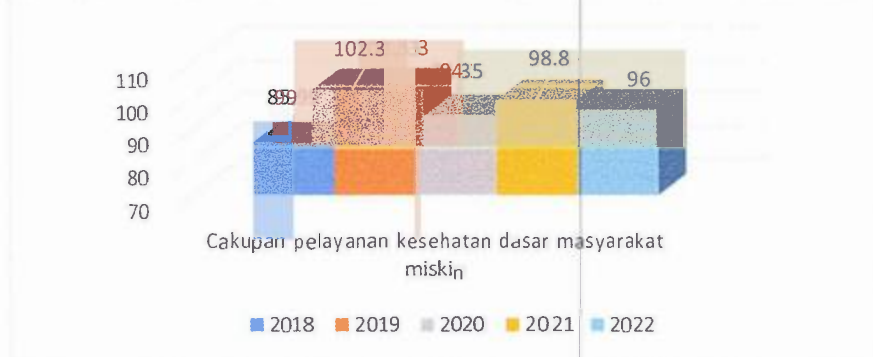
Sumber: Dinkes, 2023 diolah.

Capaian Pelayanan Anak Balita di Kabupaten Tangerang termasuk kategori tinggi dan memuaskan. hal ini dilihat dari capaian yang terlihat dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Pada tahun 2018 angka capaian ini adalah 98.2%. kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 100%. Pada tahun 2020 capaian ini mengalami penurunan menjadi 94.3% dan pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi 98.2% dan kembali mengalami peningkatan menjadi 99.35% pada tahun 2022, dan tahun 2023 mencapai 127,28%.

s. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin adalah persentase atau proporsi masyarakat miskin yang memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang tepat dan efektif. Pelayanan kesehatan dasar meliputi perawatan dasar untuk masalah kesehatan seperti penyakit menular, masalah gizi, dan masalah kesehatan reproduksi. Tujuan dari cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin adalah untuk memastikan bahwa masyarakat miskin memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan dasar yang dibutuhkan. Ini juga membantu dalam mengatasi masalah kesehatan yang berkembang dan memastikan bahwa masyarakat miskin memperoleh perawatan yang dibutuhkan untuk memulihkan dan memelihara kondisi kesehatannya.

Gambar 2.56  
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Tahun 2018-2022



Sumber: Sumber Dinkes 2022. Diolah.

Capaian dari cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin di Kabupaten Tangerang terbilang cukup tinggi dan memuaskan. hal ini terlihat dari capaian sejak tahun 2018 hingga tahun 2022. Pada tahun 2018 cakupan pelayanan ini mencapai angka 85.99% kemudian meningkat drastis pada tahun 2019 menjadi 102,33%. Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 94,35% dan kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 98.8% dan pada tahun 2022 menjadi 96%.

t. Pencapaian Universal Health Coverage (UHC)

Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten, seluruh penduduk Kabupaten Tangerang harus memiliki Jaminan Kesehatan Nasional JKN-KIS yang dilakukan secara bertahap. Sesuai Peraturan Bupati Nomor 38 tahun 2016 tentang Integrasi program Kartu Sehat Kabupaten Tangerang Kedalam Jaminan Kesehatan Nasional, sejak tahun 2016 secara bertahap peserta program Kartu Sehat Pada Jamkesda Kabupaten Tangerang diintegrasikan ke BPJS Kesehatan. Dengan jumlah peserta sebagai berikut :

Tabel 2.26  
Jumlah Peserta JKN Terintegrasi

NO	TAHUN	SKBUPATI	JUMLAH PESERTAJKN TERINTEGRAS I
1.	2016	Nomor : 440/Kep.414-HUK/2016, tentang Nama-Nama Peserta Program Kartu Sehat Kabupaten Tangerang yang diintegrasikan ke dalam JKN BPJS Kesehatan Tahun Anggaran 2016	37.076
2.	2017	Nomor : 440/KEP.325-HUK/2017, tentang Nama-Nama Peserta Program Kartu Sehat Kabupaten Tangerang yang diintegrasikan ke dalam JKN BPJS Kesehatan Tahun Anggaran 2017	49.699
3.	2018	Nomor: 440/Kep. 159-Huk/2018, Nama-Nama Peserta Program Kartu Sehat Kabupaten Tangerang yang diintegrasikan ke dalam JKN BPJS Kesehatan Tahun Anggaran 2018	80.000
4.	2019	Nomor: 440/Kep. 771-Huk/2019 tentang Penetapan Nama-Nama Peserta Program Kartu Sehat Kabupaten Tangerang yang diintegrasikan ke dalam JKN BPJS Kesehatan Tahun Anggaran 2019	90.000
5.	2020	Nomor: 440/Kep. 771-Huk/2019 tentang Penetapan Nama-Nama Peserta Program Kartu Sehat Kabupaten Tangerang yang diintegrasikan ke dalam JKN BPJS Kesehatan Tahun Anggaran 2019	90.000
6	2021	Nomor: 440/Kep. 771-Huk/2019 tentang Penetapan Nama-Nama Peserta Program Kartu Sehat Kabupaten Tangerang yang diintegrasikan ke dalam JKN BPJS Kesehatan Tahun Anggaran 2019	90.000
7	2022	Telah tercapainya UHC maka mekanisme pengaktifan BPJS PBI APBD Kabupaten Tangerang adalah langsung aktif tanpa harus menunggu 14 hari	322.454
8	2023	-	307.867

Sumber Data : UPTD.PJK Dinas Kesehatan Kab. Tangerang 2023

Berdasarkan data dari BPJS Kesehatan sampai dengan bulan Desember 2022 dari jumlah penduduk Kabupaten tangerang 3.216.456 sebanyak 97,44% atau 3.133.947 jiwa telah menjadi peserta JKN KIS/BPJS Kesehatan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.27

## Jumlah Peserta JKN Kabupaten Tangerang Tahun 2022-2023

N O	JENIS KEPESERTAAN	PESERTA JAMINAN KESEHATAN			
		2022		2023	
		JUMLAH	%	JUMLAH	%
	PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI)				
1	PBIAPBN	1.076.845	33,48	1,086,178	0,3
2	PBIAPBD	322.459	10,03	506,006	0,2
	SUBJUMLAH	1.399.299	43,50	1,592,184	0,5
	NON PBI				
1	Pekerja Penerima Upah (PPU)	1.169.221	36,35	1,129,835	0.3
2	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)	544.277	16,92	544,795	0.2
3	Bukan Pekerja (BP)	21.177	0,66	28,380	0.0
	SUB JUMLAH NON PBI	1.734.675	53,93	1,703,010	0.5
	JUMLAH PESERTA JKN KABUPATEN TANGERANG	3.133.974		3,295,194	
	JUMLAH PENDUDUK (DUKCAPIL SM 2 TH 2022-2023)	3.216.465		3,309,365	
	PERSENTASE	97,44		99,57	

Sumber : BPJS Kesehatan tahun 2023

Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Tangerang mengalokasikan anggaran jamkesda yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin/tidak mampu yang tidak memiliki jaminan kesehatan dan yang tidak dijamin oleh JKN/BPJS kesehatan. Jumlah pasien jamkesda yang dilayani baik di Rumah Sakit maupun Puskesmas sebanyak 7.359 orang dengan rincian sesuai tabel dibawah ini :

Tabel 2.28

## Rekapitulasi Pasien Jamkesda Per Rumah Sakit dan Puskesmas Tahun 2023

NO	RUMAH SAKIT	JUMLAH PASIEN
1	RSUPN Dr. Cipto Mangun Kusumo	53
2	RSU Tangerang	2.160
3	RSUD Balaraja	2.718
4	RSUD Pakuhaji	1.369
5	RSUP Dr. Sitanala	661
6	RS Jiwa Dr. Marzoeki Mahdi	22

NO	RUMAH SAKIT	JUMLAH PASIEN
7	RS Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan	90
8	RS Hermina Bitung	1
9	Puskesmas	285
TOTAL		7.359

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, 2022

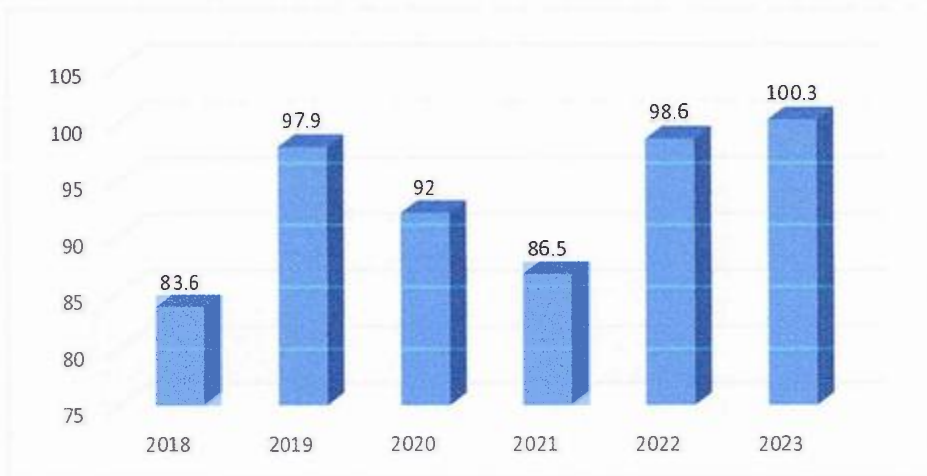
u. Kasus anemia ibu hamil

Anemia pada ibu hamil dapat meningkatkan resiko kelahiran premature, kematian ibu dan anak serta penyakit infeksi. Anemia defisiensi besi pada ibu dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin/bayi saat kehamilan maupun setelahnya. Hasil Riskesdas 2018 menyatakan bahwa di Indonesia sebanyak 48,9% ibu hamil mengalami anemia. Sebanyak 84,6% anemia pada ibu hamil terjadi pada kelompok umur 15-24 tahun. Untuk mencegah anemia setiap ibu hamil diharapkan mendapat tablet tambah darah (TTD) minimal 90 tablet selama kehamilan.

Cakupan pemberian TTD pada ibu hamil di Kabupaten Tangerang tahun 2023 adalah 100.3 % meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 98,6 %.

Gambar 2.57

Cakupan Pemberian TTD pada Ibu Hamil Tahun 2018-2023

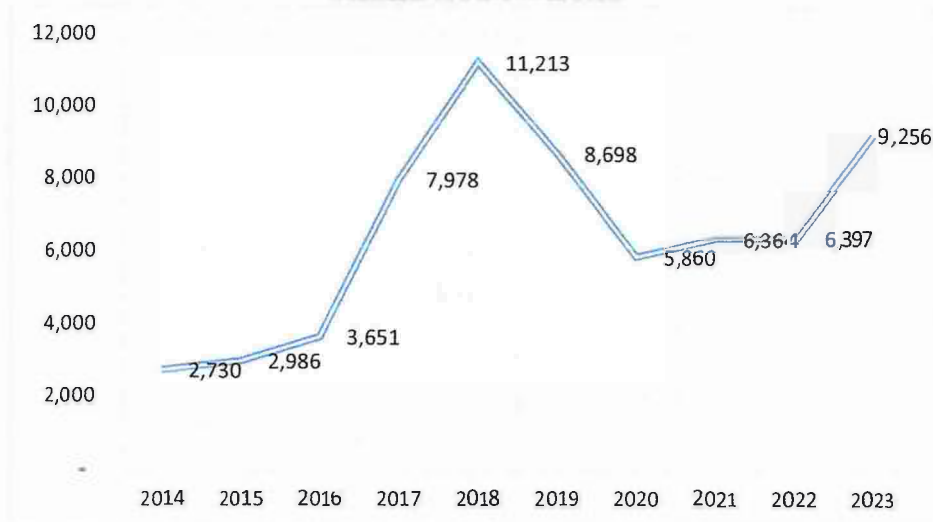


Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab.Tangerang 2023

v. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis

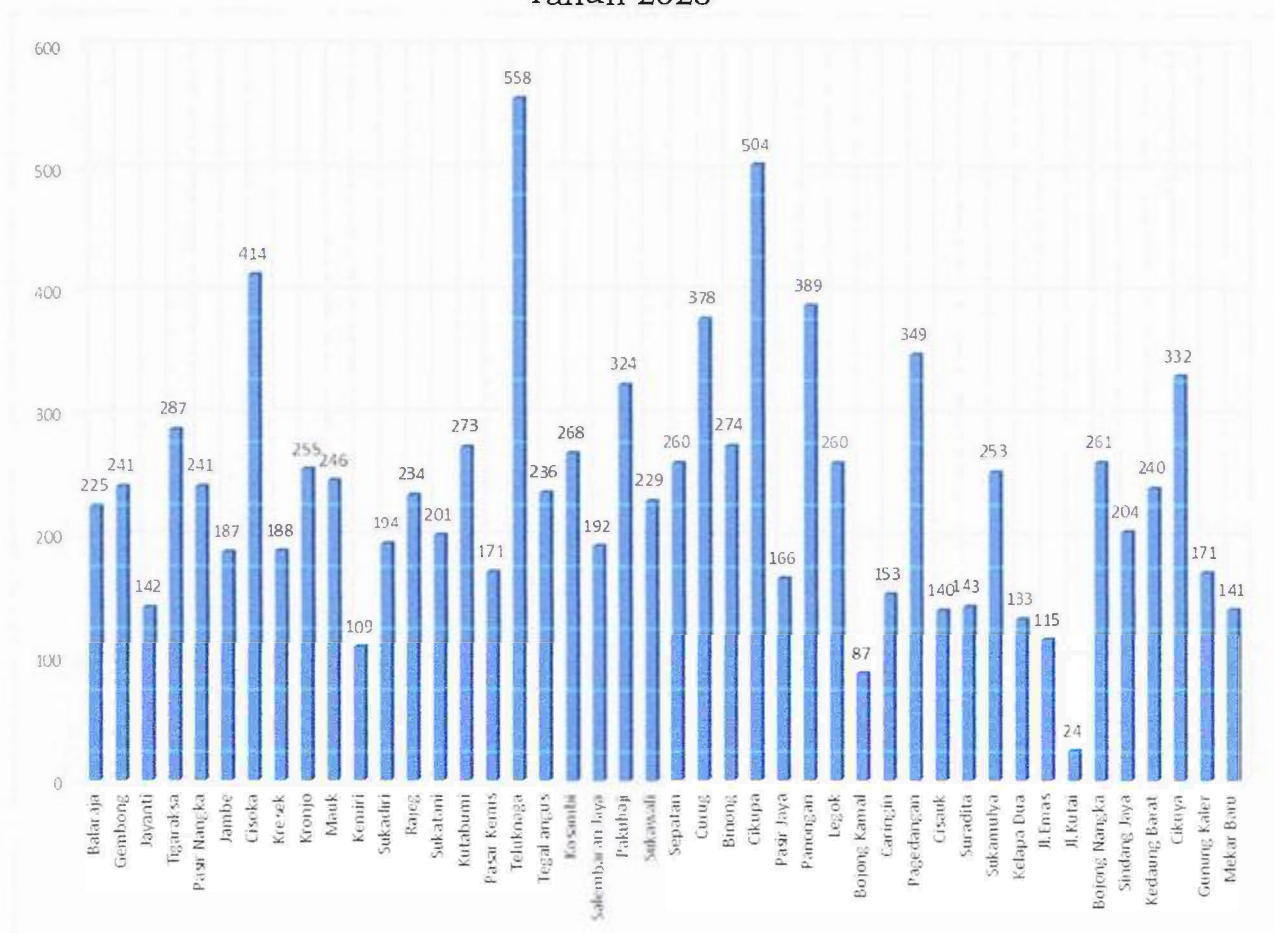
Jumlah semua kasus tuberkulosis yang ditemukan dan diobati tahun 2023 di Kabupaten Tangerang mencapai 9.256 kasus, dengan jumlah laki-laki yang terkena Penyakit Tb sebanyak 5.328 kasus, dan Perempuan 3.928 kasus, sejumlah kasus yang ditemukan tersebut sudah ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan angka kesembuhan (cure rate) tuberkulosis paru terkonfirmasi bakteriologis mencapai 49,2%.

Gambar 2.58  
Jumlah Kasus Tuberkulosis Tercatat dan Diobati di Kabupaten Tangerang  
Tahun 2014 – 2023



Sumber : Dinas Kesehatan Kab.Tangerang 2023

Gambar 2.59  
Angka Penemuan Kasus TBC di Puskesmas (CDR) Kabupaten Tangerang  
Tahun 2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Tangerang 2023

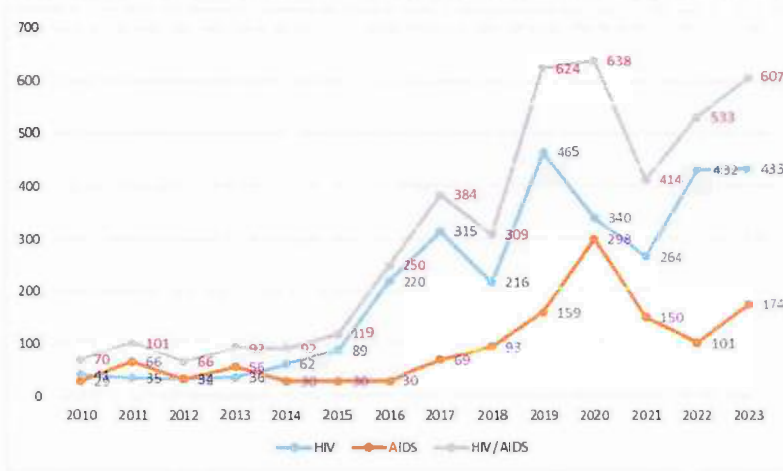
Dari gambar di atas terlihat cakupan penemuan kasus tertinggi di luar wilayah Kabupaten Tangerang kemudian puskesmas Cikupa sebanyak 504 kasus, dan puskesmas Teluknaga sebanyak 558 kasus yang ditemukan.

w. HIV dan AIDS

Pemerintah bersama masyarakat memiliki komitmen yang kuat dalam upaya pengendalian HIV AIDS untuk mencapai eliminasi HIV AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS) pada tahun 2030. Pemerintah bersama masyarakat mendukung upaya pencapaian eliminasi HIV AIDS yang telah disepakati di tingkat global bahwa pada tahun 2030 kita dapat mencapai 95-95-95 untuk pengobatan, dimana 95 persen ODHIV mengetahui status, 95 persen dari ODHIV yang mengetahui status mendapatkan pengobatan, dan 95 persen dari ODHIV yang diobati virusnya tersupresi. Pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi menular seksual merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pengendalian HIV AIDS.

Gambar 2.60

Distribusi Kasus HIV/AIDS di Kabupaten Tangerang Tahun 2010-2023



Berdasarkan grafik diatas, pada tahun 2022 ditemukan 533 kasus pada orang dengan HIV positif (ODHIV), tahun 2023 dengan temuan pada HIV/AIDS sebanyak 607 dengan rincian kasus AIDS sebanyak 174 kasus, dan HIV sebanyak 433 kasus, penyebaran HIV/AIDS di Kabupaten Tangerang karena perilaku seks yang salah satunya diakibatkan oleh seks antar sejenis, dengan kecenderungan lebih banyak pada jenis kelamin laki-laki.

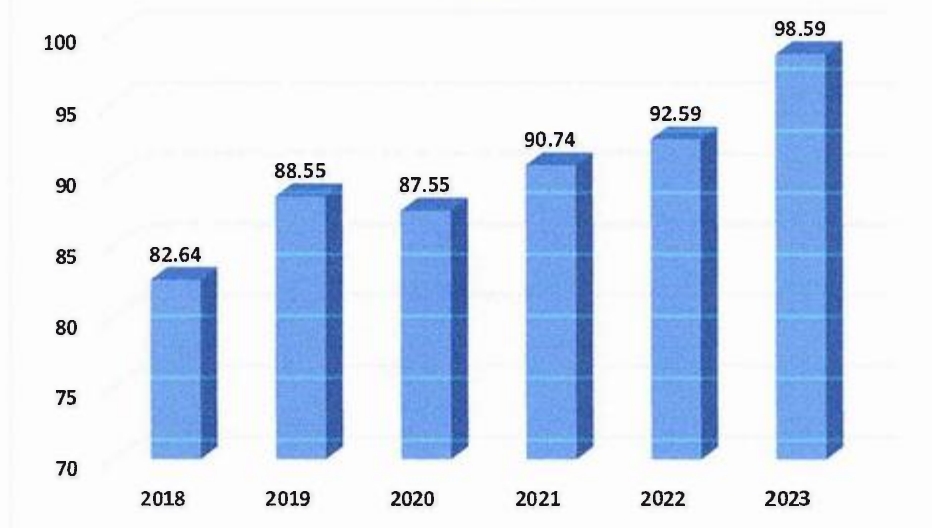
3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Kondisi mantap jalan (%) merupakan proporsi dari panjang jalan yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan. Kategori kondisi baik dan sedang yaitu kondisi jalan yang memiliki kerataan permukaan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman. dengan dimana angka Roughness Index (IRI). di bawah 4 untuk kondisi baik dan di bawah 8 untuk kondisi sedang. Pengukuran kondisi jalan ini menggunakan alat roughometer dengan satuan Internasional Roughness Indeks (IRI) yang menyatakan akumulasi naik turunnya mukajalan sepanjang 1 kilometer jalan (m/km).

Gambar 2.61

### Proporsi Panjang jaringan jalan dalam Kondisi Baik Tahun 2018-2023



Sumber: Dinas Bina Marga dan SDA. diolah.

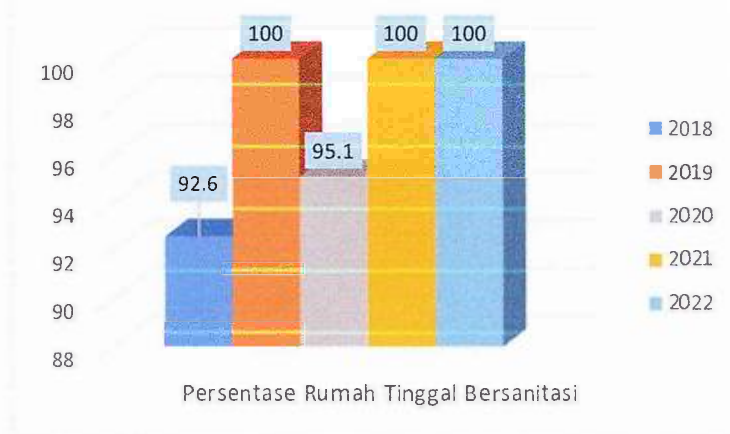
Proporsi Panjang jaringan jalan dalam Kondisi Baik pada tahun 2018 sebesar 82.64% dan pada tahun 2019 menjadi 88.55% dan pada tahun 2020 menjadi 87.55% dan pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi 90.74% dan tahun 2022 menjadi 92.59 persen, tahun 2023 kondisi jalan baik di Kabupaten Tangerang mencapai 98,59 persen atau sepanjang 978.61 Km. Hal ini menunjukkan peningkatan kualitas jaringan jalan yang ada di Kabupaten Tangerang.

#### b. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Rumah Tinggal Bersanitasi adalah rumah yang memiliki fasilitas air bersih, buang air dan fasilitas pembuangan sampah yang baik. Rumah ini memenuhi standar kebersihan dan kesehatan, sehingga membantu untuk mencegah penyebaran penyakit dan memastikan kualitas hidup yang baik bagi penghuninya. Fasilitas air bersih harus memenuhi standar kualitas air minum dan terjamin keamanannya. Fasilitas buang air harus memiliki sistem pembuangan yang baik dan tidak menimbulkan masalah lingkungan. Fasilitas pembuangan sampah harus memiliki sistem yang efisien dan tidak membahayakan lingkungan. Dengan memiliki rumah tinggal bersanitasi, penghuni akan merasa lebih nyaman dan aman, serta memiliki akses yang mudah dan terjamin untuk fasilitas-fasilitas yang penting bagi kesehatan dan kebersihan. Oleh karena itu, upaya untuk memperluas akses terhadap rumah tinggal bersanitasi harus menjadi prioritas bagi pemerintah dan pihak terkait.

Cakupan rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Tangerang memiliki capaian yang cukup memuaskan. Hal ini terlihat dari capaian yang ada. Pada tahun 2018 persentase rumah tangga di Kabupaten Tangerang yang bersanitasi adalah 92.6% dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 100%. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 95.1% dan kembali meningkat menjadi 100% pada tahun 2021.

Gambar 2.62  
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2018-2023



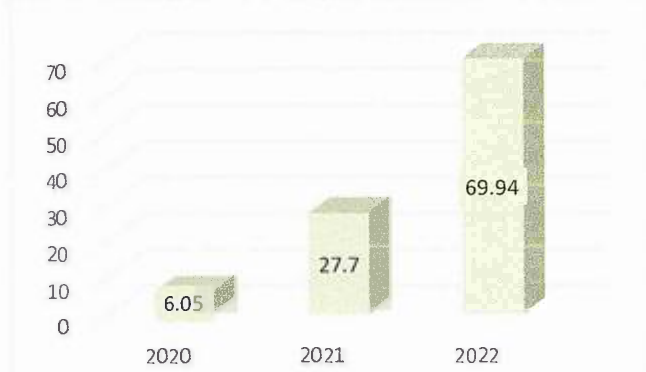
Sumber: Dinas Perkim. Diolah.

c. Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik

Irigasi dalam kondisi baik adalah sistem irigasi yang berfungsi dengan baik dan memenuhi standar kualitas air dan teknis. Irigasi yang baik akan memastikan bahwa tanaman memiliki cukup air untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga membantu untuk meningkatkan hasil pertanian dan produktivitas lahan. Sistem irigasi yang baik harus memenuhi berbagai kriteria, seperti: Aliran air yang stabil dan cukup Sumber air yang terjamin dan memenuhi standar kualitas air Sistem pengendalian air yang efisien dan akurat Infrastruktur irigasi yang terawat dan dalam kondisi baik Ketersediaan irigasi yang baik sangat penting bagi pertanian dan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kualitas sistem irigasi harus menjadi prioritas bagi pemerintah.

Capaian Persentase irigasi di Kabupaten Tangerang memiliki capaian yang perlu ditingkatkan dari tahun ke tahun. Capaian pada tahun 2020 adalah 6,05% dan meningkat menjadi 27,7%. Angka ini kemudian kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 69,94%. Berikut grafik penggambarannya:

Gambar 2.63  
Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik



Sumber: Dinas Bina Marga dan SDA. Diolah

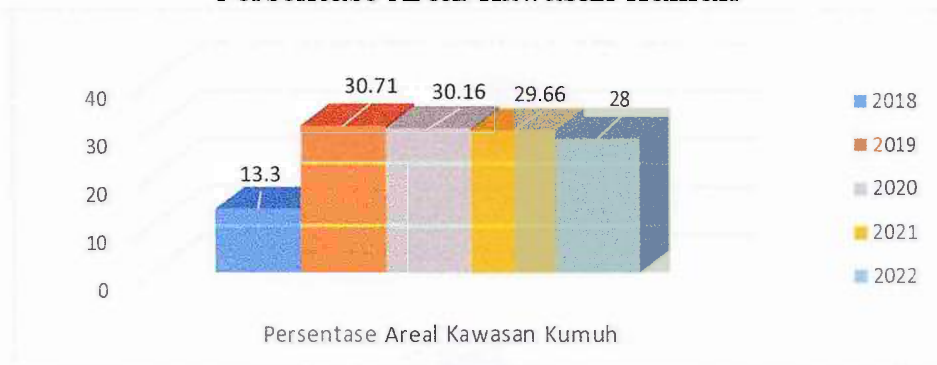
d. Persentase Areal Kawasan Kumuh

Area Kawasan Kumuh adalah daerah atau wilayah yang memiliki tingkat pembangunan rendah dan kualitas lingkungan yang buruk. Kawasan ini biasanya ditandai dengan tingginya tingkat kepadatan penduduk, kekurangan fasilitas umum, sanitasi yang buruk dan lingkungan yang tidak sehat. Kawasan

kumuh sering menjadi fokus perhatian pemerintah dan masyarakat karena memiliki berbagai masalah sosial dan lingkungan. Penduduk kawasan kumuh sering memiliki akses yang terbatas terhadap fasilitas umum dan layanan kesehatan, serta rentan terhadap masalah kesehatan dan lingkungan.

Capaian Persentase areal kawasan kumuh di Kabupaten Tangerang pada tahun 2018 adalah 13,3% dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 30,71% dan menurun pada tahun 2020 menjadi 30,16%. Angka ini kemudian mengalami penurunan kembali pada tahun 2021 menjadi 29,66% dan tahun 2022 menjadi 28%. Berikut gambaran grafik capaian tersebut:

Gambar 2.64  
Persentase Areal Kawasan Kumuh



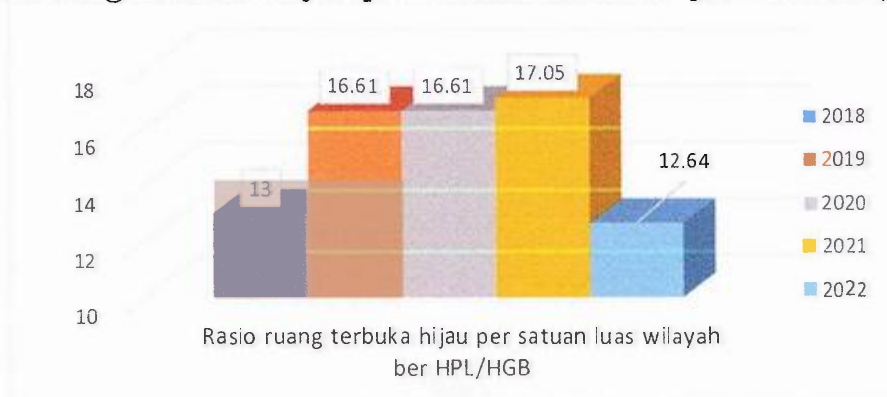
Sumber: Dinas Perkim. diolah

e. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau kota merupakan kawasan perlindungan, yang ditetapkan dengan kriteria diantaranya adalah lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi, berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur dan terakhir adalah Didominasi komunitas tumbuhan.

Capaian Ruang terbuka hijau di Kabupaten Tangerang selama periode 2018-2022 mengalami tren peningkatan yang cukup positif. Tahun 2018 cakupan pelayanan ini mencapai 13 % dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 dan 2020 menjadi 16,61% kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi 17,05%, namun di tahun 2022 ini turun menjadi 12,64%. Untuk lebih jelasnya lihat gambar 2.65.

Gambar 2.65  
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB



Sumber: Dinas Tata Ruang dan Bangunan. diolah.

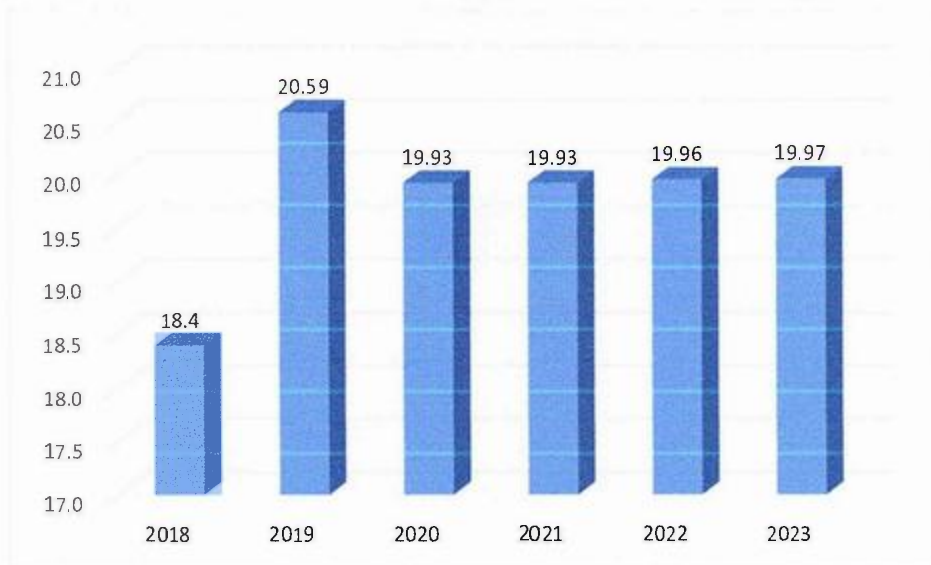
- f. Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan salah satu fungsi yang wajib ada di Rencana Tata Ruang Wilayah terutama di perkotaan. Dalam amanat UU No.26/2007 disebutkan bahwa luasan RTH minimum 30 persen, meliputi 20 persen RTH publik dan 10 persen RTH privat. Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas RTH. Pertama, konsisten dalam mengkonservasi alam di perkotaan. RTH sebagai bagian dari kawasan lindung memiliki kontribusi besar untuk mensuplai ketahanan dan keseimbangan lingkungan perkotaan. Kegiatan menanam pohon pun bisa menjadi salah satu bagian kecil mewujudkan RTH.

Capaian Ruang terbuka hijau di Kabupaten Tangerang selama periode 2018-2023 mengalami tren peningkatan yang cukup positif. Tahun 2018 cakupan pelayanan ini mencapai 18.4 % dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 20,59%. capaian ini kembali bertahan hingga tahun 2020-2021 menjadi 19,93%, kemudian pada tahun 2022 naik menjadi 19,96%, tahun 2023 naik menjadi 19,97%. Berikut grafik yang menggambarkan capaian tersebut:

Gambar 2.66

Luasan RTH Publik dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan



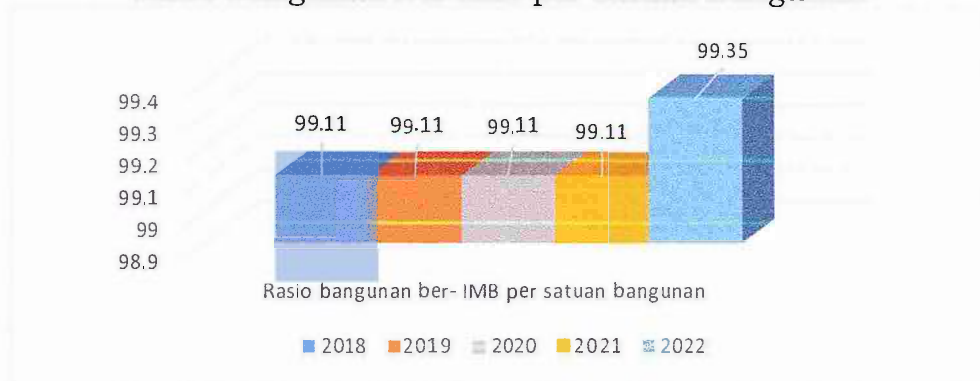
Sumber: Dinas LH, diolah

- g. Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan

Bangunan Ber IMB (Izin Mendirikan Bangunan) adalah bangunan yang memiliki izin resmi untuk dibangun dan ditempati. IMB adalah suatu bukti bahwa bangunan tersebut sudah memenuhi persyaratan teknis dan administratif yang ditetapkan oleh pemerintah.

Capaian Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan di Kabupaten Tangerang termasuk kategori tinggi dan memuaskan. hal ini dilihat dari capaian yang terlihat dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Pada tahun 2018 angka capaian ini adalah 99,11% kemudian angka ini bertahan hingga tahun 2021, dan naik menjadi 99,35% pada tahun 2022. Berikut grafik penggambarannya:

Gambar 2.67  
Rasio Bangunan Ber-IMB per satuan Bangunan



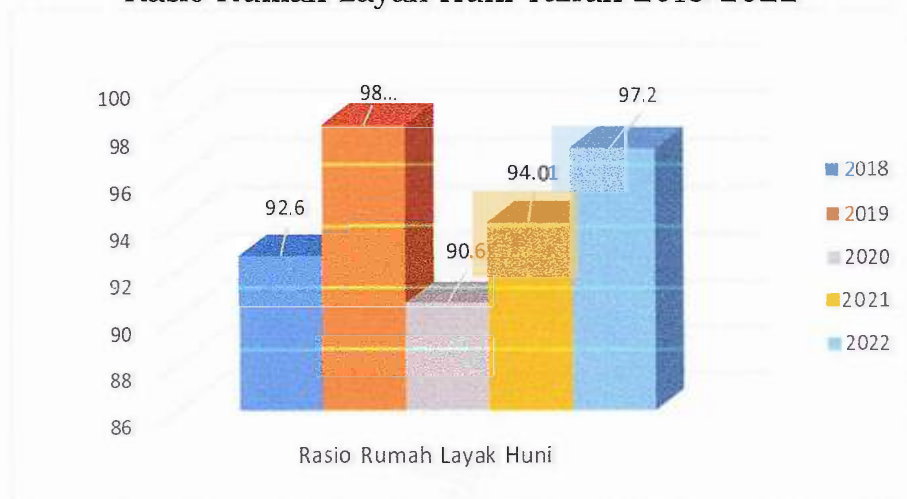
Sumber: Dinas Tata Ruang dan Bangunan. diolah.

h. Rasio rumah layak huni

Rasio rumah layak huni adalah perbandingan antara jumlah rumah yang layak huni dengan jumlah rumah yang ada dalam suatu wilayah. Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi standar kualitas dan kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti: Struktur bangunan yang kuat dan stabil Ventilasi dan pencahayaan yang memadai Akses air bersih dan sanitasi yang memenuhi standar Ketersediaan fasilitas umum seperti listrik dan jalan akses Rasio rumah layak huni yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat memiliki akses yang baik terhadap rumah yang layak huni dan memenuhi standar kesehatan dan kualitas hidup yang baik. Peningkatan rasio rumah layak huni dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pembangunan rumah baru yang layak huni, perbaikan rumah yang tidak layak huni, dan peningkatan akses terhadap fasilitas umum seperti air bersih, sanitasi, dan listrik. Upaya ini harus dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait untuk memastikan bahwa setiap warga memiliki akses yang baik terhadap rumah layak huni.

Capaian dari Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Tangerang terbilang cukup tinggi dan memuaskan, hal ini terlihat dari capaian sejak tahun 2018 hingga tahun 2022. Pada tahun 2018 cakupan rasio ini mencapai angka 92.6% kemudian meningkat drastis pada tahun 2019 menjadi 98%, angka ini mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 90.6% dan kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 94.1% kemudian naik lagi di tahun 2022 menjadi 97,2%. Untuk lebih jelasnya lihat gambar 2.68.

Gambar 2.68  
Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Perkim. diolah.

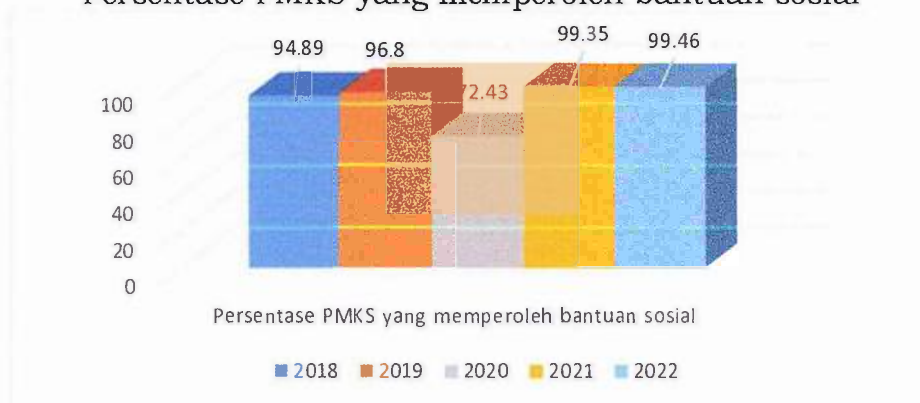
#### 4. Sosial

##### Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Persentase PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang memperoleh bantuan sosial adalah persentase dari total jumlah PMKS yang menerima bantuan sosial dari pemerintah atau lembaga swasta. Bantuan sosial adalah bantuan finansial atau non-finansial yang diberikan kepada PMKS untuk membantu mereka mengatasi kesulitan ekonomi dan memperbaiki kualitas hidup mereka.

Capaian dari Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial di Kabupaten Tangerang terbilang cukup tinggi dan memuaskan, hal ini terlihat dari capaian sejak tahun 2018 hingga tahun 2022. Pada tahun 2018 cakupan rasio ini mencapai angka 94,89% kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi 96,8%. Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 72,43% dan kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 99,35% dan kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 99,46%. Untuk lebih jelasnya lihat gambar 2.69.

Gambar 2.69  
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial



Sumber: Dinsos, diolah.

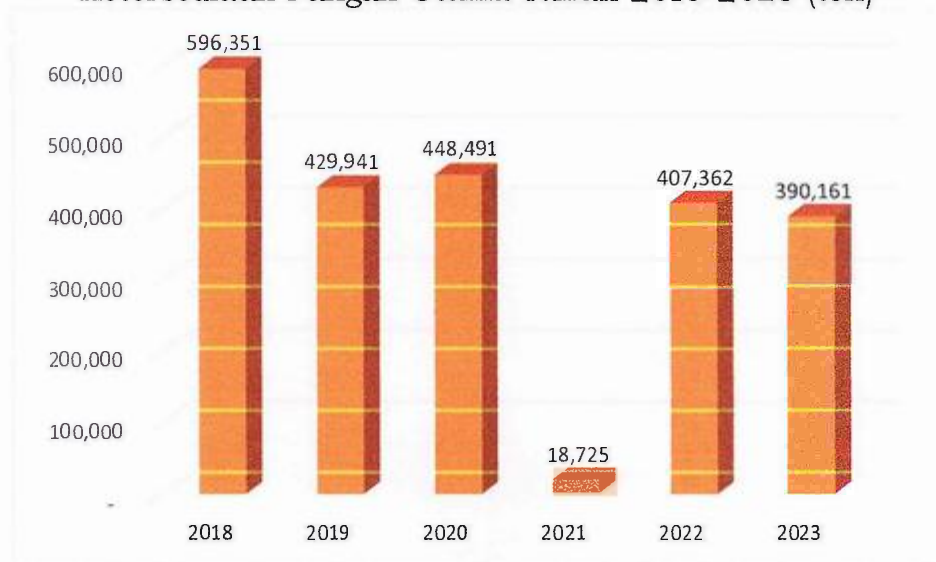
#### 2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

##### 1. Pangan

##### a. Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Kabupaten Tangerang telah memastikan ketersediaan pangan daerah dalam kondisi yang optimal, sehingga setiap masyarakat dapat menikmati pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam kehidupannya.

Gambar 2.70  
Ketersediaan Pangan Utama Tahun 2018-2023 (ton)



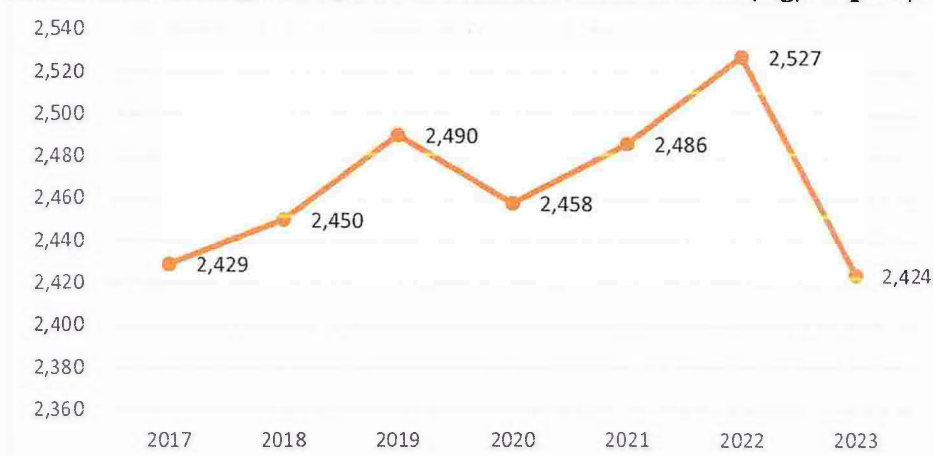
Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2022

Berdasarkan grafik diatas ketersediaan pangan utama Kabupaten Tangerang mengalami penurunan yang sangat drastis pada tahun 2021 sebesar 18.725 ton dimana pada tahun 2018 kondisi pangan di Kabupaten Tangerang mencapai 596.351 ton, tahun 2023 mengalami penurunan ketersediaan pangan sekitar 390.161 ton dibandingkan tahun 2022. Hal tersebut disebabkan karena anomali musim yang berubah-ubah mengakibatkan menurunnya produktivitas pangan di Kabupaten Tangerang. harga bahan baku pakan yang tidak stabil untuk produksi unggas. skala pemeliharaan ternak rakyat masih rendah, belum optimalnya sistem pengelolaan cadangan pangan. Masih rendahnya tata kelola, pendampingan pengelolaan dan jumlah Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang aktif. Belum berkembangnya kelembagaan dan jaringan distribusi pangan. Masih rendahnya penanganan daerah dan efisiensi serta efektivitas rentan rawan pangan yang terprogram melalui penumbuhan dan pengembangan desa mandiri pangan. Berbagai hal diatas mengakibatkan penurunan produktivitas pangan di Kabupaten Tangerang. dimana penurunan produktivitas merupakan angka yang paling berkontribusi besar dalam menurunnya ketersediaan pangan utama di Kabupaten Tangerang.

#### b. Ketersediaan Energi dan Protein

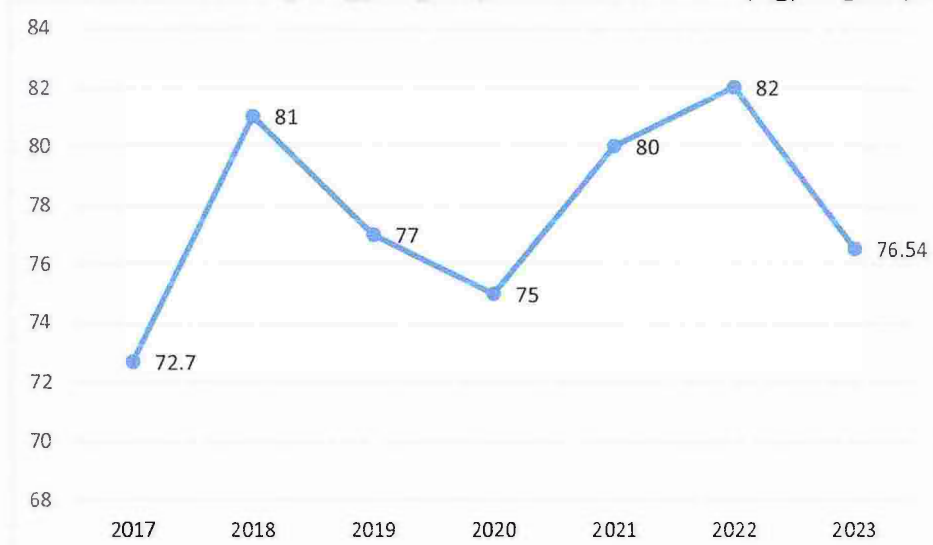
Ketersediaan energi dan protein merupakan jumlah pangan yang tersedia di pasar untuk dikonsumsi pada kurun waktu tertentu dalam bentuk energi per kg/kapita/hari, protein per g/kapita/hari dan lemak per g/kapita/hari. Ketersediaan energi dan protein menggambarkan konsumsi energi dan protein oleh masyarakat.

Gambar 2.71  
Ketersediaan Energi Masyarakat Tahun 2018-2023 (kg/kapita/hari)



Sumber: DPKP Kab. Tangerang, 2023, <https://opendata.tangerangkab.go.id>

Gambar 2.72  
Ketersediaan Protein per g/kapita/hari 2018-2023 (kg/kapita/hari)



Sumber: DPKP Kab. Tangerang, 2023, <https://opendata.tangerangkab.go.id>

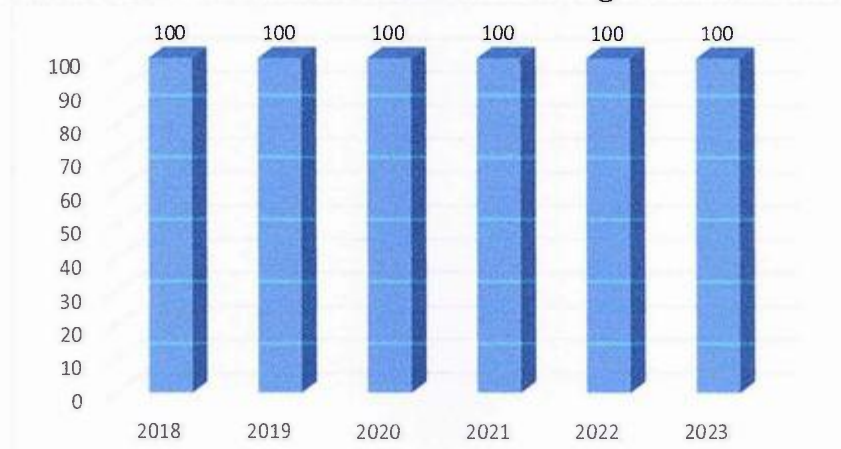
Berdasarkan grafik diatas konsumsi energi dan protein mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Peningkatan terjadi tidak lain karena akses masyarakat terhadap pangan dapat dipastikan mudah atau terjangkau. Kemudahan akses merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong peningkatan konsumsi di suatu daerah. Selain akses, peningkatan tersebut juga dipengaruhi oleh produksi pertaniannya. utamanya tanaman pangan dan ternak.

### c. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan ditujukan untuk menjamin tersedianya pangan segar yang aman untuk dikonsumsi agar masyarakat terhindar dari bahaya, baik karena cemaran kimia maupun mikroba yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi dan mendukung terjaminnya pertumbuhan/perkembangan kesehatan dan kecerdasan manusia. Pengawasan keamanan pangan dilakukan

secara insidental, apabila ada informasi kasus keamanan pangan yang perlu ditindak lanjuti. Kegiatan ini dapat dilakukan dalam bentuk inspeksi ke tempat kejadian, penelusuran terhadap asal produk. pengambilan contoh dan pengujian keamanan pangan.

Gambar 2.73  
Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Tahun 2018-2023



Sumber: DPKP Kab. Tangerang, 2023, <https://opendata.tangerangkab.go.id>

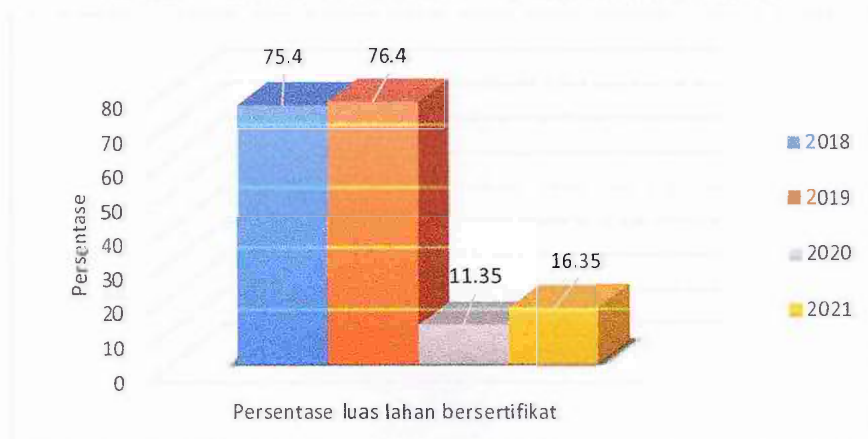
Berdasarkan grafik diatas. kegiatan pengawasan dan pembinaan keamanan mencapai 100% dalam setiap tahunnya. Hal tersebut menggambarkan bahwa pengawasan dan pembinaan keamanan pangan telah dilakukan secara optimal untuk menjaga kualitas dari bahan pangan yang telah dihasilkan. serta mencegah tercemarnya bahan pangan dari campuran kimia yang mengganggu. berbahaya dan merugikan. Sehingga tercapainya sumberdaya manusia yang sehat dan berkualitas secara berkelanjutan.

## 2. Pertanian

### a. Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Luas lahan bersertifikat adalah luas lahan yang sudah disahkan dengan ditandai surat bukti yang sudah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Sertifikat yang dimaksud adalah surat tanda bukti hak untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Pengukuran luas lahan bersertifikat ditujukan untuk melihat luas lahan yang sudah di legalisasi secara hukum oleh BPN.

Gambar 2.74  
Luas Lahan Bersertifikat Tahun 2018-2021

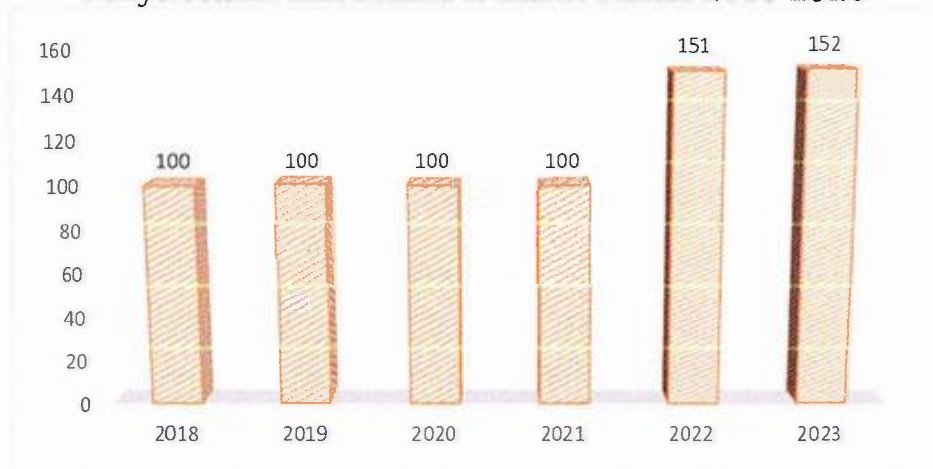


Berdasarkan grafik diatas, persentase luas lahan yang bersertifikat pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga 11,35%. Capaian dua tahun sebelumnya yaitu 2018 dan 2019 mencapai 75%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 merupakan masa puncak pandemic covid-19, sehingga untuk mendapatkan data pada tahun tersebut sangatlah terbatas. Pada tahun 2020 menunjukkan bahwa hanya 11,35% dari keseluruhan sampling luas lahan yang sudah disahkan dengan ditandai surat bukti yang sudah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Hal tersebut menunjukkan masih belum optimalnya pelaksanaan luas lahan bersertifikat di Kabupaten Tangerang.

b. Penyelesaian Izin Lokasi

Izin lokasi merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam hal suatu perusahaan akan memperoleh tanah dalam rangka penanaman modal. Pemberian izin lokasi mempertimbangkan agar terciptanya Rencana Tata Ruang Wilayah yang serasi, harmonis dan berkelanjutan. Dalam hal ini fungsi pemberian izin lokasi bermaksud untuk mengarahkan dan mengendalikan badan usaha dalam memperoleh tanah, mengingat pemberian izin lokasi juga harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Penyelesaian izin lokasi adalah berapa banyak izin lokasi yang diajukan yang kemudian diterbitkan izinnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Gambar 2.75  
Penyelesaian Izin Lokasi & KKPR Tahun 2018-2023



Sumber : DPMPTSP 2023

Berdasarkan grafik diatas, tingkat penyelesaian izin lokasi mencapai 100% setiap tahun nya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa seluruh izin lokasi yang diajukan telah diberikan izin atas lokasi yang dikehendaki. Dalam artian lain Kabupaten Tangerang telah mengalokasikan izin lokasi diberikan untuk kepentingan masyarakat banyak. dibuktikan dengan izin lokasi yang telah diselesaikan yang diberikan atas dasar kebermanfaatan bagi orang banyak yang diharapkan mampu meningkatkan derajat hidup dan masyarakat yang ada disekitarnya.

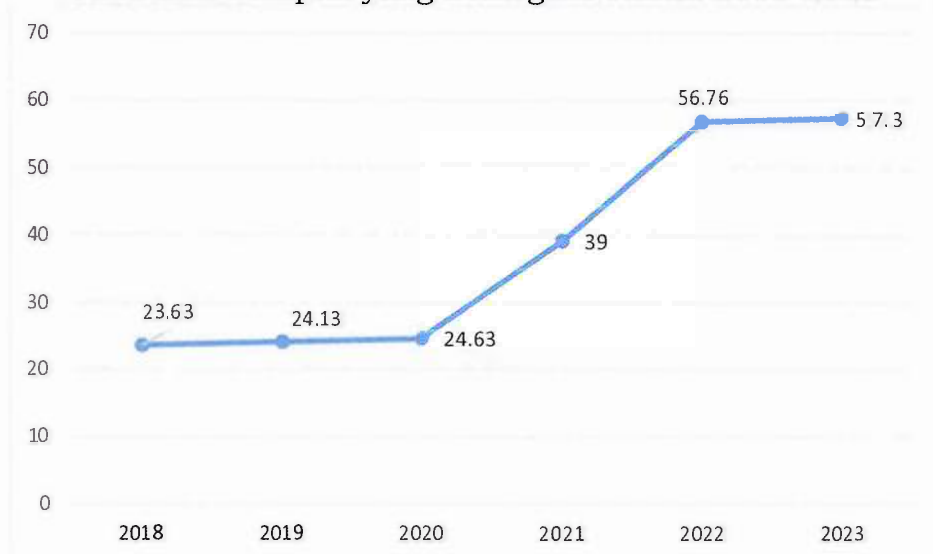
Untuk tahun 2022, berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya maka Izin Lokasi berubah menjadi KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) tahun 2023 sebanyak 152.

3. Lingkungan Hidup

a. Timbulan Sampah yang Ditangani

Timbulan sampah merupakan tempat penumpukan sampah yang ditangani oleh pemerintah atau perusahaan swasta. Timbunan sampah ini dapat terdiri dari beberapa tipe seperti timbunan sampah terbuka atau tertutup. Pengelolaan timbunan sampah harus memenuhi standar lingkungan yang ketat untuk memastikan bahwa sampah tidak membahayakan lingkungan dan kesehatan. Pemerintah Kabupaten Tangerang telah berupaya optimal untuk menangani masalah sampah agar dapat tertangani dengan baik dan berdampak baik bagi lingkungan secara berkelanjutan.

Gambar 2.76  
Timbulan Sampah yang Ditangani Tahun 2018-2023



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, 2022

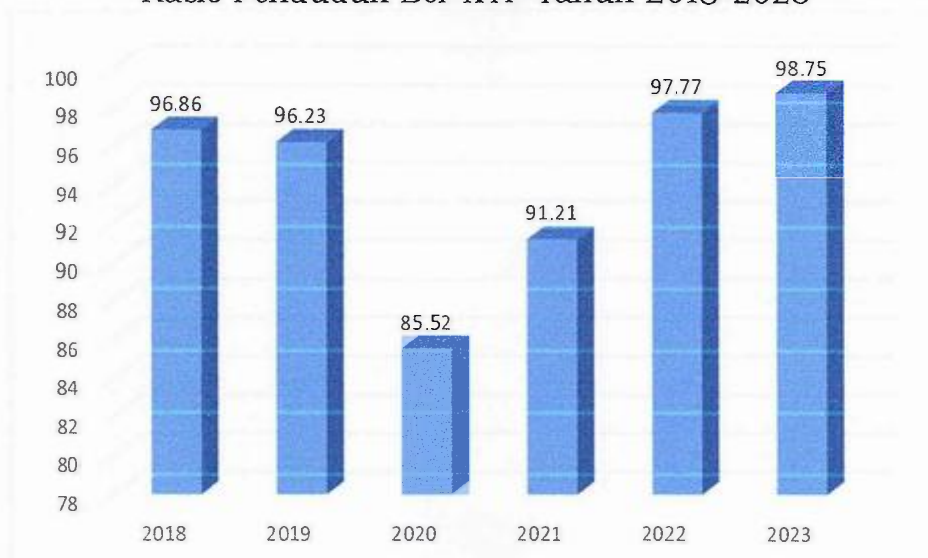
Grafik diatas menunjukkan capaian timbunan sampah yang ditangani. Berdasarkan data tersebut pada tahun 2023 persentase timbunan sampah yang dapat ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang mencapai 57,3%. terdapat peningkatan sekitar 0,54% dari tahun sebelumnya. Hal tersebut mengindikasikan adanya keseriusan pemerintah dalam menangani timbunan sampah. Sehingga lingkungan dapat dikondisikan tetap asri dan nyaman dihuni oleh masyarakatserta perlunya dukungan dari masyarakat untuk terus meningkatkan kesadarannya akan pengelolaan sampah dan akan didukung oleh pemerintah melalui pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memadai.

4. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk

Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk adalah rasio antara jumlah penduduk yang memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) terhadap jumlah penduduk total dalam suatu wilayah. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat penetrasi KTP di suatu wilayah. Tingkat penetrasi yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah sukses dalam memfasilitasi penerbitan KTP dan memastikan bahwa masyarakat memilikinya.

Gambar 2.77  
Rasio Penduduk Ber-KTP Tahun 2018-2023



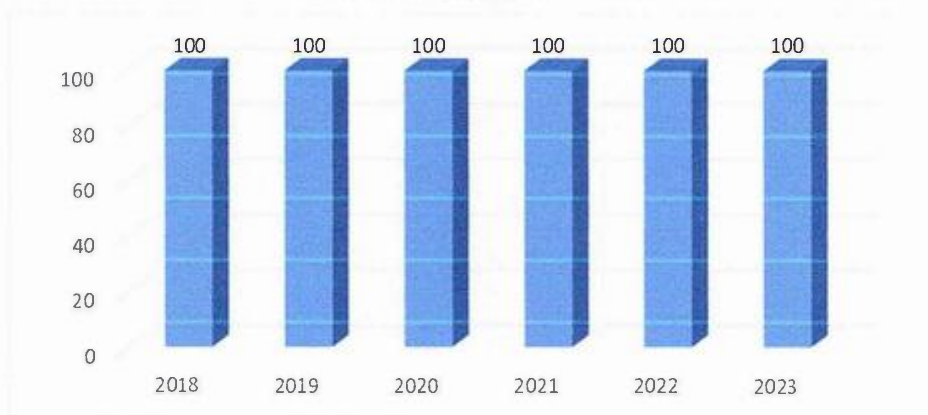
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

Grafik diatas menunjukkan tingkat penetrasi KTP di suatu wilayah yang diambil dari rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk. Dapat dilihat dari grafik diatas, capaian Kabupaten Tangerang dalam memfasilitasi penerbitan KTP dan memastikan bahwa masyarakat dapat memiliki KTP sangat tinggi, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat besar kemungkinan dipengaruhi oleh pandemic covid-19. Namun pada tahun 2022, dan 2023 angka penetrasi kembali membaik diangka 97,77% dan 98,75% yang mengindikasikan lebih banyak penduduk yang dapat difasilitasi untuk membuat KTP. Dalam hal ini. Kabupaten Tangerang akan mengoptimalkan inovasi pada pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil agar menjamin setiap warganya agar bisa mendapatkan dan memiliki akses membuat KTP dengan mudah dan terjangkau.

5. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - a. Persentase PKK Aktif

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. Persentase PKK aktif mengukur efektivitas program PKK. Angka yang tinggi menunjukkan bahwa program PKK efektif dan masyarakat memanfaatkan PKK sebagai suatu organisasi yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan agar turut serta dalam pembangunan. sedangkan angka yang rendah menunjukkan bahwa ada hambatan dalam program atau kendala yang menghalangi masyarakat dari memanfaatkan layanannya.

Gambar 2.78  
Persentase PKK Aktif



Sumber: DPMPD, 2023

Dari grafik diatas menunjukkan capaian PKK aktif yang ada di Kabupaten Tangerang adalah 100% dari tahun ke tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh organisasi PKK yang ada seluruhnya aktif dan melaksanakan program dan kegiatan yang ada dan turut serta dalam program pembangunan. Melihat angka tersebut partisipasi masyarakat terhadap program PKK juga sangat tinggi dan bisa dikatakan bahwa masyarakat memiliki kesadaran akan berkontribusi dalam pembangunan melalui program PKK yang kemudian mendekatkan pada tercapainya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

b. Persentase Posyandu Aktif

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah pusat pelayanan kesehatan primer yang berfokus pada upaya promosi kesehatan, pencegahan penyakit, dan pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat terkhusus bagi ibu, anak dan lansia. Persentase posyandu aktif mengukur efektivitas program posyandu dalam melayani masyarakat. Angka yang tinggi menunjukkan bahwa posyandu efektif dan masyarakat memanfaatkan layanan didalamnya, sedangkan angka yang rendah menunjukkan bahwa ada hambatan dalam program atau kendala lain yang dihadapi dalam pelaksanaan posyandu dalam memberikan layanan Kesehatan bagi masyarakat.

Gambar 2.79  
Persentase Posyandu Aktif



Sumber: Profil Dinas Kesehatan, 2023

Grafik diatas menunjukkan tingkat persentase Posyandu yang aktif dibandingkan dengan seluruh Posyandu yang ada. Berdasarkan data diatas, persentase posyandu yang aktif berada pada angka yang tinggi. Pada tahun 2018 dan 2019 mencapai angka 100%. sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan di angka 91,86% dan 93,11%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pada tahun 2020 dan 2021 terdapat kendala dalam melaksanakan kegiatan posyandu atau ada beberapa posyandu yang kemudian tidak aktif yang diakibatkan juga oleh adanya pandemic covid-19. Tahun 2023 menurun sekitar 81,46%. Dilain sisi pemerintah telah menunjukkan keseriusan dalam hal memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui program posyandu yang dikhususkan bagi ibu, anak dan lansia. Capaian tersebut juga memastikan bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang dapat menikmati dan mendapatkan akses fasilitas kesehatan.

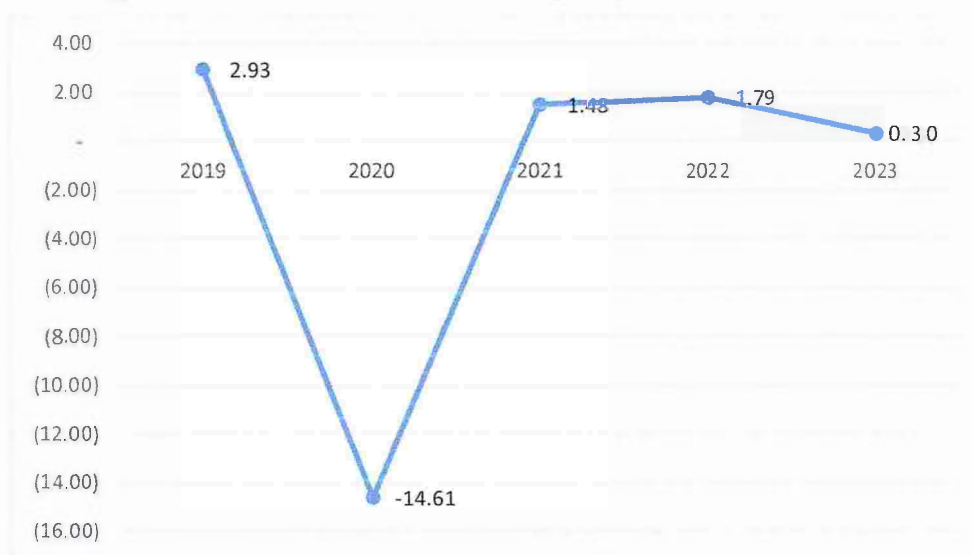
## 6. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

### a. Laju pertumbuhan penduduk (LPP)

Laju pertumbuhan penduduk adalah tingkat perubahan jumlah penduduk suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Ini diukur sebagai persentase perubahan jumlah penduduk dari periode sebelumnya. Laju pertumbuhan penduduk memainkan peran penting dalam menentukan kebijakan pemerintah dan memahami dinamika populasi. Laju pertumbuhan penduduk bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan tingkat migrasi. Jika tingkat kelahiran lebih tinggi daripada tingkat kematian, maka laju pertumbuhan penduduk akan meningkat. Sebaliknya, jika tingkat kematian lebih tinggi daripada tingkat kelahiran, maka laju pertumbuhan penduduk akan menurun.

Gambar 2.80

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Tahun 2018-2023



Sumber : BPS Provinsi Banten, 2023

Grafik diatas menunjukkan tingkat laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tangerang. Berdasarkan data diatas, pertumbuhan laju penduduk selalu mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2010 mencapai angka 2,93%, kemudian menurun pada tahun 2020, menurunnya LPP ini

karena terdapat perbedaan perhitungan jumlah penduduk yang sebelum tahun 2020 menggunakan hasil Sensus Penduduk Tahun 2010, sedangkan jumlah penduduk tahun 2020 sampai dengan 2022 menggunakan hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 dimana dalam perhitungan jumlah penduduk telah memperhatikan penduduk ber-NIK. Pertumbuhan penduduk yang relatif stabil menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk tidak begitu menjadi isu yang serius karena masih dapat dikondisikan dan dapat ditangani dengan kebijakan yang ada.

b. Total Fertility Rate (TFR)

Total fertility rate (TFR) adalah jumlah rata-rata anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita selama masa produktifnya (umumnya didefinisikan sebagai usia antara 15-49 tahun) jika tingkat kelahiran dan kematian tetap stabil. Total fertility rate (TFR) adalah jumlah rata-rata anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita selama masa produktifnya (umumnya didefinisikan sebagai usia antara 15-49 tahun) jika tingkat kelahiran dan kematian tetap stabil. Ini adalah ukuran kunci dari tingkat reproduksi suatu populasi.

TFR digunakan untuk mengukur tingkat kelahiran dalam suatu populasi dan membantu memahami dinamika populasi dan proyeksi pertumbuhan penduduk. Nilai TFR yang tinggi menunjukkan tingkat reproduksi yang tinggi dan pertumbuhan penduduk yang cepat, sementara nilai TFR yang rendah menunjukkan tingkat reproduksi yang rendah dan pertumbuhan penduduk yang lambat.

Gambar 2.81  
Total Fertility Rate (TFR) Tahun 2018-2023



Sumber : DPPKB, 2023

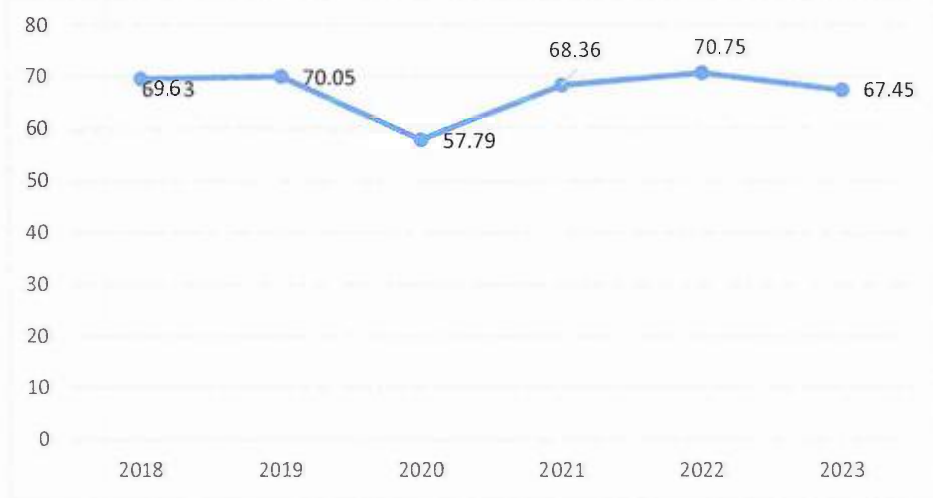
Grafik diatas menunjukkan jumlah rata-rata anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita selama masa produktifnya. Berdasarkan data diatas, angka pertumbuhan penduduk berada pada kondisi yang stabil, tidak terjadi peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2023 angka TFR mencapai 2,1%, terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut disebabkan oleh tingginya usia perkawinan masyarakat Kabupaten Tangerang yang berada dalam masa produktifnya, sehingga dapat mempengaruhi jumlah rata-rata kelahiran.

c. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15–49

Angka pemakaian kontrasepsi adalah persentase perempuan menikah yang menggunakan metode kontrasepsi untuk membatasi atau memperlambat kehamilan. Angka ini berguna untuk mengukur tingkat kesadaran dan akses masyarakat terhadap layanan keluarga berencana. Di Indonesia, angka pemakaian kontrasepsi bagi perempuan menikah pada tahun 2020 sekitar 56%. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan menikah di Indonesia sudah memiliki akses dan memahami pentingnya layanan keluarga berencana. Namun, masih ada beberapa faktor seperti keterbatasan akses, stigma, dan kendala ekonomi yang mempengaruhi pemakaian kontrasepsi bagi sebagian kecil dari masyarakat.

Gambar 2.82

Angka Pemakaian Kontrasepsi bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun



Sumber : DPPKB, 2023

Grafik diatas menunjukkan tingkat angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49. Berdasarkan data diatas, angka pemakaian kontrasepsi bagi perempuan menikah usia 15-49 pada tahun 2020 mencapai 57,59% dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan mencapai angka 70,75%, tahun 2023 mengalami penurunan diangka 67,45%. Angka tersebut menunjukkan bahwa perempuan menikah di Kabupaten Tangerang makin menaruh perhatian terhadap pemakaian kontrasepsi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perempuan menikah telah memiliki akses dan kesadaran akan pentingnya keluarga berencana.

d. Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)

Angka Kelahiran menurut Kelompok Umur Ibu (Age Spesific Fertility Rate/ASFR), sedangkan ASFR 15-19 adalah bayi yang dilahirkan oleh wanita berusia 15-19 tahun. Angka ini menjadi salah satu indikator penting kesehatan reproduksi dan memberikan informasi tentang tingkat pemahaman dan akses layanan kesehatan reproduksi bagi remaja. Di Indonesia, angka kelahiran remaja masih cukup tinggi. Menurut data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), pada tahun 2020 sekitar 27% dari total kelahiran adalah pada remaja. Angka ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa kendala seperti keterbatasan akses layanan kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan, dan stigma yang mempengaruhi tingkat kehamilan pada remaja.

Gambar 2.83  
Angka Kelahiran Remaja Tahun 2018-2023



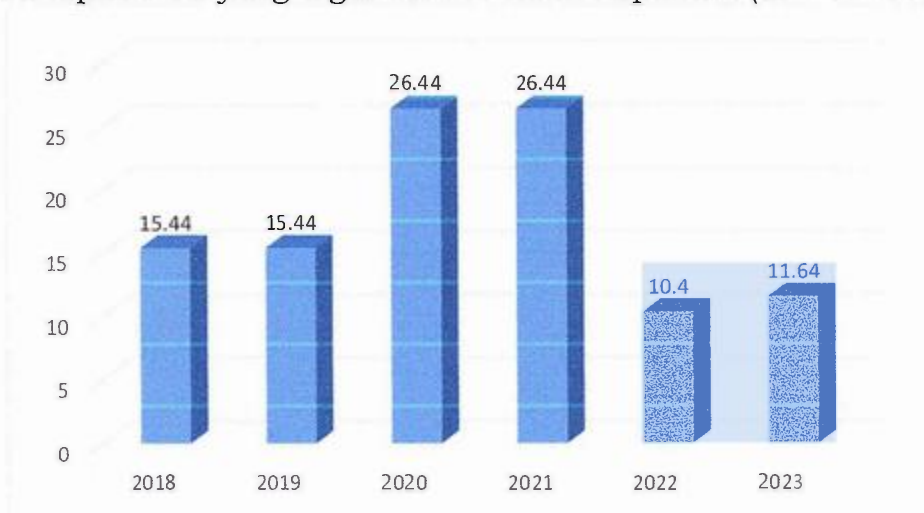
Sumber : DPPKB, 2023

Grafik diatas menunjukkan angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun. Berdasarkan data diatas, persentase kelahiran pada usia remaja 15-19 tahun masih tergolong tinggi pada tahun 2023 yang mencapai 16 tahun, akan tetapi mengalami penurunan menjadi 16 tahun pada tahun 2022, dan 14 tahun di tahun 2023. Dalam pelaksanaan masih ada kendala seperti keterbatasan akses layanan kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan, dan stigma yang mempengaruhi tingkat kehamilan pada remaja. Kurangnya optimalnya promosi akan keluarga berencana yang mampu diterima dan dipahami oleh perempuan remaja juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk mengurangi dan mengatasi permasalahan tingginya angka kelahiran remaja.

e. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)

Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) adalah persentase pasangan usia subur (wanita dan pria berusia 15-49 tahun) yang ingin membatasi atau memutuskan kehamilan, tetapi belum memiliki akses atau belum menggunakan layanan keluarga berencana. Unmet need merupakan indikator penting untuk mengukur keterbatasan akses layanan keluarga berencana dan memahami kebutuhan dan permintaan masyarakat. Di Indonesia, unmet need pada tahun 2020 sekitar 10%. Ini berarti masih ada sekitar 10% dari pasangan usia subur yang ingin membatasi kehamilan, tetapi belum memiliki akses atau belum menggunakan layanan keluarga berencana. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan akses layanan, stigma, dan kendala ekonomi.

Gambar 2.84  
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)



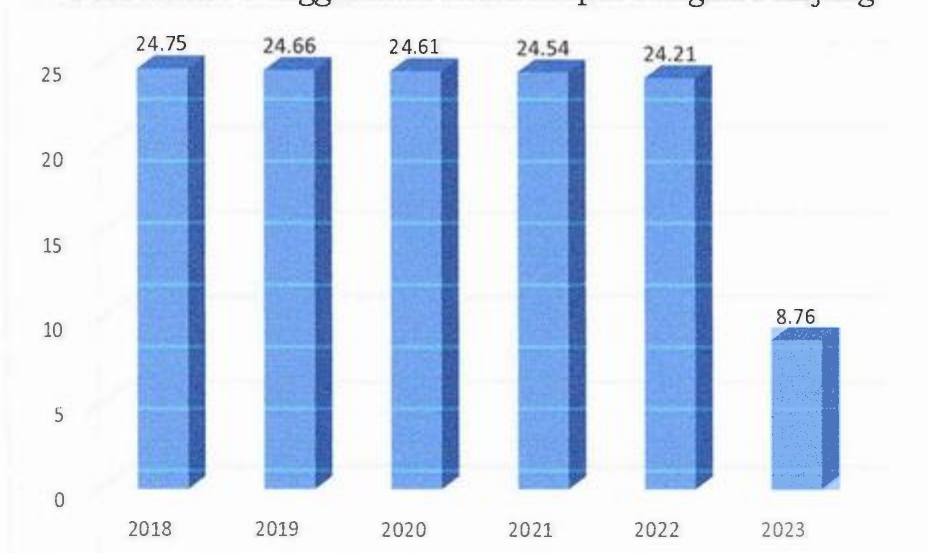
Sumber : DPPKB, 2023

Grafik diatas menunjukkan angka cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need). Berdasarkan data diatas, persentase PUS yang ingin ber-KB pada tahun 2023 mencapai 11,64%. Angka tersebut menunjukkan bahwa masih ada sekitar 11,64% PUS yang ingin ber-KB namun tidak terpenuhi karena keterbatasan akan akses layanan Kesehatan reproduksi. Angka tersebut menjadikan indicator bahwa program keluarga berencana belum sepenuhnya menyentuh seluruh lini masyarakat, diharapkan pemerintah dapat memfasilitasi kebutuhan pasangan usia subur yang ingin membatasi kehamilan di Kabupaten Tangerang.

f. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) adalah pemakaian alat kontrasepsi yang bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama, seperti suntik, implan, dan IUD (Intra Uterine Device). MKJP memiliki tingkat efektivitas yang tinggi dan memerlukan pemasangan yang hanya dilakukan sekali saja, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi pasangan usia subur untuk membatasi kehamilan tanpa harus khawatir dan memikirkan penggunaan setiap hari. Di Indonesia, pemakaian MKJP masih terbilang rendah, sekitar 20% dari seluruh pengguna kontrasepsi. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya informasi, keterbatasan akses, dan stigma yang terkait dengan pemakaian kontrasepsi jangka panjang.

Gambar 2.85  
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang



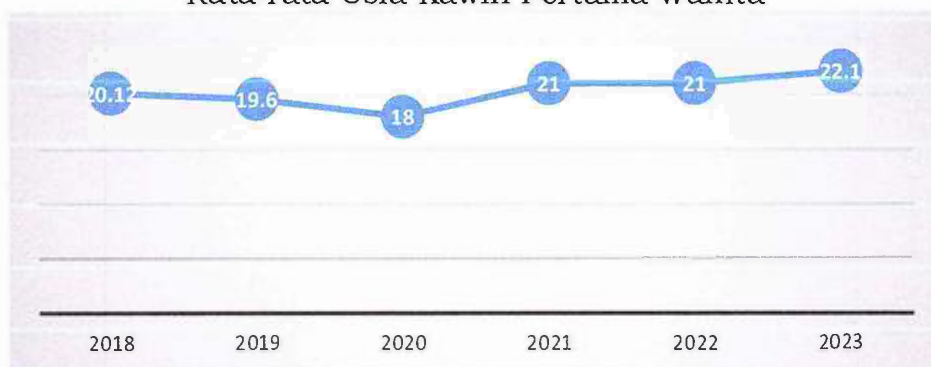
Sumber : DPPKB, 2023

Grafik diatas menunjukkan persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan data diatas, persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) di Kabupaten Tangerang berada pada angka yang stabil yaitu sepanjang 2018 hingga 2021 berkutat pada angka 24%, tetapi tahun 2023 mengalami penurunan samoai 8,76%. Angka tersebut menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat akan penggunaan kontrasepsi jangka panjang. Tantangan yang muncul dari hal ini adalah upaya pemerintah dalam mempromosikan kontrasepsi jangka panjang melalui program keluarga berencana. Sehingga dapat meningkatkan persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang di Kabupaten Tangerang.

g. Rata-rata usia kawin pertama Wanita

Berdasarkan data World Bank pada tahun 2020, rata-rata usia kawin pertama wanita di Indonesia adalah 22.7 tahun. Namun, perlu dicatat bahwa data ini dapat berubah dari waktu ke waktu dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, dan ekonomi di suatu negara atau wilayah.

Gambar 2.86  
Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita



Sumber : DPPKB, 2023

Grafik diatas menunjukkan rata-rata usia kawin pertama wanita di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan data diatas, rata-rata usia kawin pertama wanita di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 rata-rata usia kawin pertama wanita berada pada usia 22 tahun. Hal ini disebabkan oleh beberapa factor diantaranya, semakin banyak wanita yang mengejar Pendidikan tinggi, yang memungkinkan semakin tinggi keinginan mereka untuk menunda pernikahan. Banyak wanita yang ingin membangun karir mereka sebelum menikah dan perubahan nilai social yang membuat mereka mengambil keputusan untuk tidak menikah hingga usia yang matang. Factor lain adalah ketidakpastian kondisi ekonomi sehingga mereka lebih aman memilih menunda atau tidak menikah ditengah kondisi ekonomi yang tidak stabil.

7. Perhubungan

Data kendaraan umum yang melakukan uji KIR di Kabupaten Tangerang melalui Dinas Perhubungan pada tahun 2022 mencapai 58.304 unit kendaraan umum dengan jenis kendaraan meliputi mobil penumpang sebanyak 1.752 unit, mobil barang sebanyak 56.103 unit, kondisi uji KIR di Kabupaten Tangerang meningkat dari tahun 2019, 2021, 2022, dan 2023, kondisi ini menggambarkan bahwa tingkat keselamatan berkendara bagi kendaraan umum menjadi prioritas utama dalam keselamatan transportasi.

Tabel 2.29  
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Kendaraan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Mobil Barang:	51,505	27,562	48,956	54,154	56,103	81,049
-Truck	6,732	25,661	22,302	23,464	23,960	6,954
-Pick Up	27,112	1,129	19,065	23,485	25,020	21,813
-Light Truck	17,661	772	7,426	7,018	7,107	23,515
-TR. HEAD			163	187	16	0
Mobil Penumpang:	3,346	206	1,916	1,612	1,752	1,548
-Angkutan Kota			1,113	913	102	94
-Bis	266	86	536	103	216	198

Kendaraan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-Micro	554	87	209	562	788	804
-Mini	2,379	32				0
-Taxi	147	1	58	34	646	452
Tempelan	202	12	261	371	431	0
Kendaraan Khusus			6	11	18	0
Total	55,053	27,780	51,139	56,148	58,304	82,597

Sumber : Dinas Perhubungan, Kabupaten Tangerang, Tahun 2023

Rasio Rasio Panjang jalan per Jumlah kendaraan di Kabupaten Tangerang menghitung pelayanan panjang jalan dengan Jumlah kendaraan yang ada di Kabupaten Tangerang. Panjang Jalan yang diperhitungkan adalah jalan nasional (belum termasuk jalan tol), jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan kota. Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan diperoleh dengan membagi jumlah kendaraan (unit) dengan panjang jalan (km). Nilai ini berarti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah kendaraan. Kendaraan yang diperhitungkan di sini terdiri dari mobil penumpang, bus, truk dan sepeda motor. Nilai rasio panjang jalan dengan kendaraan menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun belum mencerminkan kepadatan jalannya dikarenakan belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan.

Tabel 2.30  
Jumlah Kendaraan dan Panjang Jalan di Kabupaten Tangerang

Kendaraan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Mobil Penumpang	168,626	192,302	189,087	189,647	199,489	217,751
Bus	245	400	310	1,648	1,623	1,736
Truk	50,043	55,246	53,669	52,844	54,044	57,595
Sepeda Motor	1,216,558	1,339,870	1,253,300	1,203,050	1,199,905	1,306,093
Jumlah	1,435,472	1,587,818	1,496,366	1,447,189	1,455,061	1,583,175
Panjang Jalan	1,128	1,128	1,129	1,129	1,129	1,129
Rasio (unit/Km)	1,272	1,407	1,326	1,282	1,326	1,403

Sumber : BPS Provinsi Banten, diolah.

Pada tahun 2022 di Kabupaten Tangerang per 1 km Panjang jalan melayani sekitar 1.325 unit kendaraan bermotor, tahun 2022 per 1 Km Panjang jalan melayani sekitar 1.282 unit kendaraan, meningkat seiring bertambahnya kepemilikan kendaraan yang berjumlah 1.583.175 unit ditahun 2023 sehingga rasio meningkat menjadi 1.403 kendaraan per 1 Km panjang jalan.

Kepemilikan KIR di Kabupaten Tangerang pada tahun 2023 mencapai 30 persen dari 277.082 unit kendaraan yang ada di Kabupaten Tangerang.

Tabel 2.31  
Kepemilikan KIR di Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2023

Kendaraan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Mobil Penumpang	168,626	192,302	189,087	189,647	199,489	217,751
Bus	245	400	310	1,648	1,623	1,736
Truk	50,043	55,246	53,669	52,844	54,044	57,595
Kendaraan	218,914	247,948	243,066	244,139	255,156	277,082
Uji KIR	55,053	27,780	51,139	56,148	58,304	82,597
Persentase Kepemilikan KIR	25	11	21	23	23	30

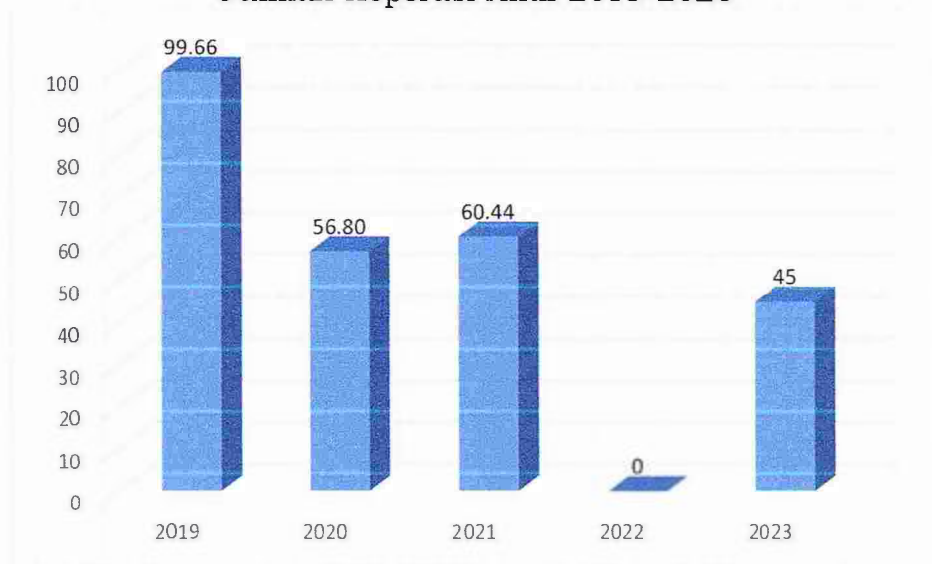
Sumber : Dinas Perhubungan, 2024, dan BPS Provinsi Banten Tahun 2024

### 8. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

#### a. Koperasi

Peran koperasi dalam pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat di sekitarnya melalui partisipasi aktif dalam ekonomi. Koperasi dapat menjadi alat yang efektif dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Gambar 2.87  
Jumlah Koperasi Aktif 2018-2023



Sumber : DKUM, 2023

Jumlah koperasi yang aktif di Kabupaten Tangerang, setiap tahun mengalami peningkatan. Hal ini memperlihatkan bahwa peran Pemerintah Daerah bukan hanya meningkatkan jumlah koperasi akan tetapi juga koperasi yang senantiasa diupayakan untuk ditingkatkan kapasitasnya. Dibawah ini disajikan data koperasi yang meningkat kualitasnya

Tabel 2.32  
Jumlah Koperasi yang Meningkatkan Kualitasnya

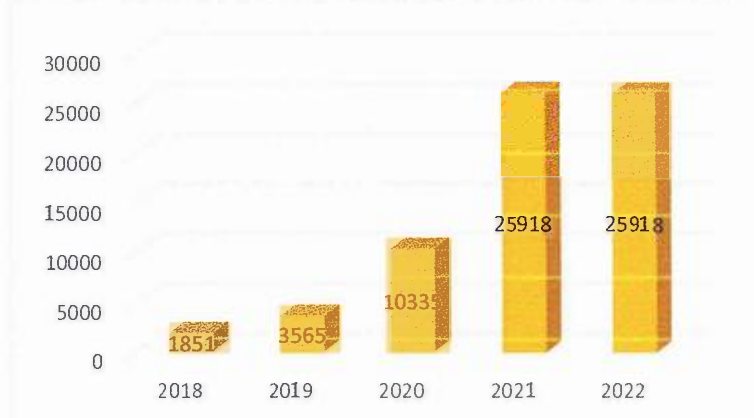
Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022
Jumlah koperasi yang meningkatkan kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset	Koperasi	60	82	120	159

Sumber: Dinas Koperasi dan UM, 2022

b. Usaha Mikro Kecil

Usaha Mikro Kecil (UMK) adalah bentuk usaha skala kecil yang dimiliki oleh individu atau kelompok kecil yang memiliki aset atau modal terbatas, UMK dapat bergerak di berbagai sektor ekonomi, seperti pertanian, perdagangan, jasa atau manufaktur. UMK memiliki peran penting dalam perekonomian, karena dapat membantu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, UMK juga dapat mempromosikan kemandirian dan kewirausahaan dalam masyarakat.

Gambar 2.88  
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2018-2022



Sumber : DKUM, 2022

Dari grafik tersebut menggambarkan bagaimana geliat perekonomian di Kabupaten Tangerang sangatlah dinamis. Banyaknya UMK yang ada adalah representasi dari sehatnya kegiatan ekonomi di Kabupaten Tangerang.

Tabel 2.33  
Jumlah Produk UM yang Dipasarkan

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022
Jumlah produk usaha mikro yang dipasarkan	Produk	231	250	300	336

Sumber : DKUM. 2022

Tabel 2.34  
Fasilitasi UPDB pada Koperasi dan UM

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Dana bergulir yang telah disalurkan	RP.	10.380.000.000	39.840.000.000	29.790.000.000	25.940.000.000	18.780.000.000
Dana bergulir yang ada	RP.	39.093.740.348	26.969.527.671	14.008.834.135	19.954.901.883	35.395.123.101

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah umkm yang mendapatkan pembiayaan UPDB	Usaha Mikro	5303	5067	4655	3275	1698
Jumlah koperasi yang mendapatkan pembiayaan UPDB	Koperasi	13	17	11	14	13

Sumber : DKUM. 2022

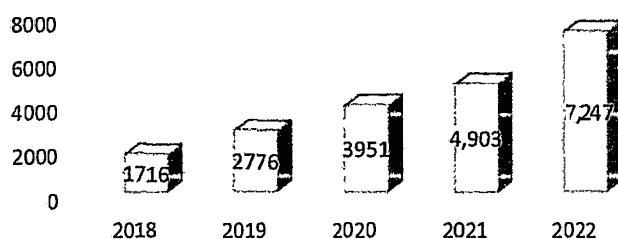
## 9. Penanaman Modal

### a. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Investor berskala nasional adalah investor yang beroperasi dalam skala yang cukup besar di tingkat nasional, yaitu investor yang melakukan investasi di berbagai wilayah atau sektor ekonomi dalam suatu negara. Investor berskala nasional biasanya mencakup institusi keuangan seperti bank, perusahaan asuransi dan dana pensiun, serta perusahaan investasi swasta. Investor berskala nasional memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi suatu negara. karena mereka dapat memberikan sumber daya keuangan yang signifikan untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan proyek-proyek infrastruktur.

Gambar 2.89 menunjukkan jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan grafik diatas. terjadi peningkatan jumlah investor pada tahun 2022 mencapai angka 7.247 investor. Angka tersebut menunjukkan Kabupaten Tangerang sebagai daerah dengan lingkungan investasi yang aman dan kondusif, sehingga para investor mau untuk berinvestasi di Kabupaten Tangerang.

Gambar 2.89  
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)



Sumber : DPMPTSP. 2022

### c. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Investasi berskala nasional adalah investasi yang dilakukan dalam skala besar di tingkat nasional, yang melibatkan dana yang cukup besar dan memiliki dampak yang signifikan pada ekonomi suatu negara. Investasi berskala nasional dapat dilakukan oleh berbagai jenis investor, termasuk perusahaan, lembaga keuangan, dan pemerintah. Investasi berskala nasional memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Namun, investasi semacam itu juga memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah dan sektor swasta. serta regulasi dan pengawasan yang memadai untuk memastikan investasi tersebut dilakukan dengan transparan, adil dan

bertanggung jawab. Berdasarkan gambar 2.90 menunjukkan jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan grafik diatas jumlah nilai investasi mencapai angka yang cukup tinggi pada tahun 2023 mencapai angka 29.689.561(juta Rupiah).



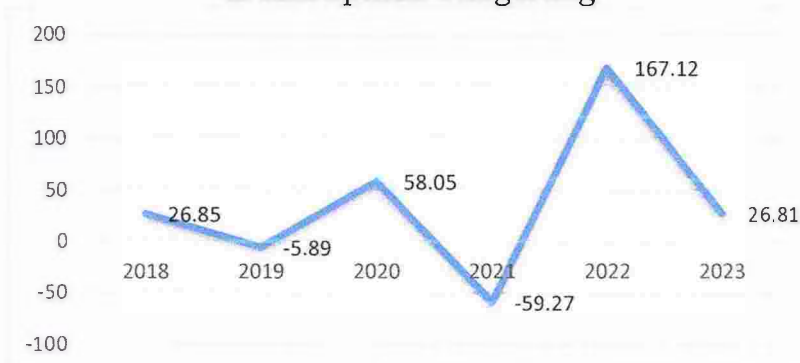
Sumber : DPMPTSP, 2023

Angka tersebut menunjukkan pada tahun 2023 banyak investor yang mulai berinvestasi di Kabupaten Tangerang. Hal tersebut tidak lepas dari kondisi iklim investasi yang baik dan kondusif di Kabupaten Tangerang itu sendiri .

d. Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)

Nilai Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mengacu pada total nilai investasi yang diinvestasikan oleh perusahaan domestik di dalam negeri dalam bentuk modal dan aset. Jika terjadi kenaikan nilai realisasi PMDN, artinya terdapat peningkatan jumlah investasi yang dilakukan oleh perusahaan domestik. yang dapat diindikasikan sebagai peningkatan minat investasi dalam negeri. Sebaliknya, jika terjadi penurunan nilai realisasi PMDN, artinya terdapat penurunan jumlah investasi yang dilakukan oleh perusahaan domestik. Kenaikan atau penurunan nilai realisasi PMDN dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi makro, perubahan kebijakan pemerintah, stabilitas politik dan iklim investasi.

Gambar 2.91  
Laju Pertumbuhan Investasi PMDN (Juta Rp.) Tahun 2018-2023  
di Kabupaten Tangerang



Sumber : DPMPTSP, 2023

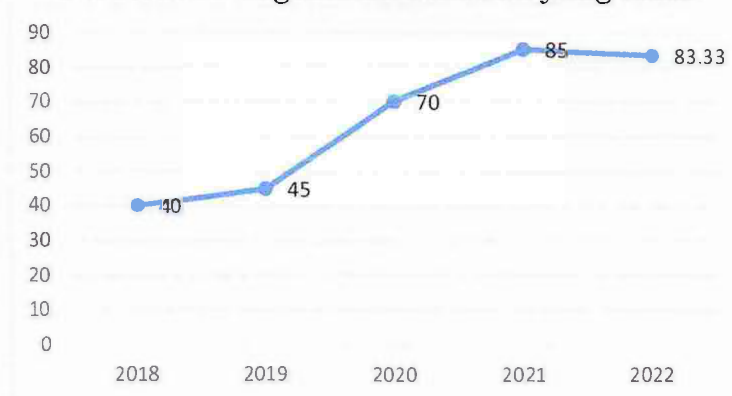
Grafik diatas menunjukkan kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah). Terlihat bahwa nilai realisasi PMDN sempat mengalami penurunan hingga minus. Pada tahun 2020 nilai realisasi mencapai 12,101,112 (juta Rp.) dan tahun 2022 laju investasi meningkat menjadi 167,12% atau sekitar 13,162,827 (Juta Rp.). Tahun 2023 nilai investasi PMDN mencapai 16,692,318 (Juta Rp.) dengan laju pertumbuhan investasi sekitar 26,81%. Angka tersebut menunjukkan adanya minat investasi yang cukup baik di Kabupaten Tangerang. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan iklim investasi agar realisasi investasi daerah dapat meningkat.

## 10. Kepemudaan dan Olahraga

### a. Persentase organisasi pemuda yang aktif

Indikator organisasi pemuda yang aktif penting untuk mengevaluasi kinerja dan dampak dari organisasi pemuda tersebut dalam mencapai tujuannya. Indikator-indikator tersebut dapat memberikan gambaran tentang seberapa aktif organisasi pemuda tersebut dalam melakukan kegiatan, seberapa besar dampak yang telah dicapai, serta seberapa besar kontribusinya terhadap pengembangan dan kesejahteraan masyarakat. Indikator organisasi pemuda yang aktif juga dapat menjadi dasar untuk mengidentifikasi kekurangan atau potensi perbaikan dalam kinerja organisasi pemuda tersebut dan membantu mengembangkan rencana strategis untuk meningkatkan kinerja dan dampaknya.

Gambar 2.92  
Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif



Sumber : Disporabudpar. 2022

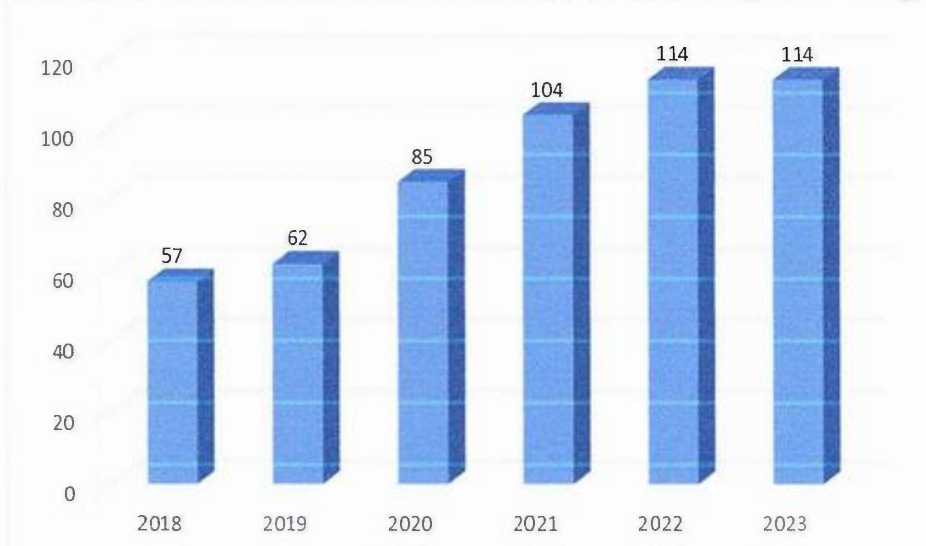
Grafik diatas menunjukkan persentase organisasi pemuda yang aktif di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan grafik diatas angka persentase selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 mencapai angka 85% organisasi pemuda yang aktif di Kabupaten Tangerang. Angka tersebut menunjukkan keaktifan pemuda di Kabupaten Tangerang yang juga turut serta berkontribusi dalam pembangunan kepemudaan melalui tujuan masing-masing organisasi pemuda yang ada. Pada tahun 2022 persentase organisasi pemuda yang aktif sedikit menurun menjadi 83,33 persen. hal ini disebabkan pertumbuhan organisasi pemuda baru senantiasa bertambah sehingga dibutuhkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

### b. Jumlah Wirausaha Muda

Wirausaha muda adalah satu bentuk representasi kesehatan ekonomi di suatu daerah. Dalam hal ini Kabupaten Tangerang menganalisis melalui

pertumbuhan wirausaha muda yang turut berperan aktif dalam pembangunan ekonomi. Indikator ini digunakan untuk berbagai tujuan seperti, menilai kesehatan ekonomi suatu negara atau wilayah dengan melihat seberapa besar kontribusi dari sektor usaha kecil dan menengah yang banyak dijalankan oleh wirausaha muda dan Melihat tingkat partisipasi generasi muda dalam perekonomian dan membantu memotivasi lebih banyak orang muda untuk menjadi wirausaha.

Gambar 2.93  
Jumlah Wirausaha Muda Tahun 2018-2023 di Kabupaten Tangerang



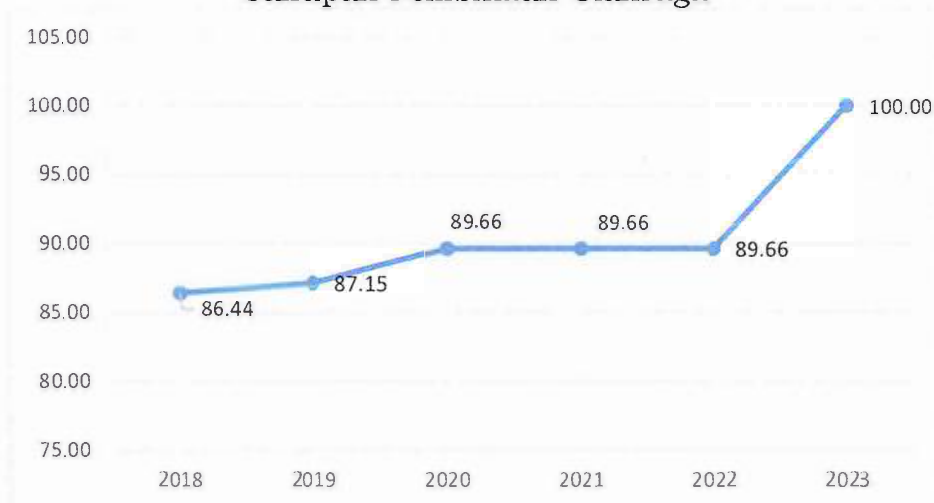
Sumber : <https://opendata.tangerangkab.go.id>

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan persentase wirausaha muda yang ada di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan grafik diatas angka persentase wirausaha muda selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2022 angka persentase wirausaha muda mencapai 87.7%. Angka tersebut menunjukkan Kesehatan ekonomi Kabupaten Tangerang masih dalam kondisi sehat, dilihat dari banyaknya wirausaha muda yang mulai menjalankan usaha kecil dan menengah yang dijalankan oleh pemuda di Kabupaten Tangerang.

c. Cakupan pembinaan olahraga

Cakupan pembinaan olahraga mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk mengembangkan bakat dan potensi atlet muda, serta mendukung peningkatan prestasi olahraga di tingkat nasional. Dalam pengembangan olahraga, cakupan pembinaan olahraga ini penting untuk mengembangkan atlet muda yang berprestasi dan menciptakan iklim yang sehat bagi pengembangan olahraga di tingkat nasional. Cakupan pembinaan olahraga mencakup beberapa aspek seperti pelatihan atlet muda, pengembangan program pelatihan fisik, hingga pemberian fasilitas olahraga yang memadai dan dukungan finansial.

Gambar 2.94  
Cakupan Pembinaan Olahraga



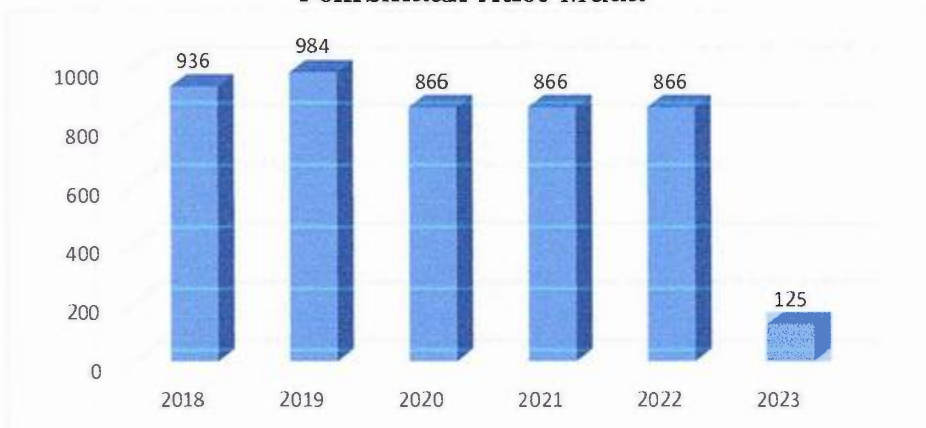
Sumber: Disporabudpar

Grafik diatas menunjukkan cakupan pembinaan olahraga di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan grafik diatas cakupan pembinaan olahraga mengalami peningkatan drastis pada tahun 2023 yang mencapai angka 100%. Angka tersebut dikarenakan beberapa faktor seperti mulai dilaksanakannya berbagai pelatihan pembentukan atlet, penyediaan sarana dan prasarana serta pelaksanaan berbagai kompetisi lokal. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mulai serius menangani permasalahan pembinaan olahraga di Kabupaten Tangerang agar terciptanya masyarakat yang bugar dan sehat jasmaninya.

d. Pembinaan Atlet Muda

Cakupan pembinaan atlet muda meliputi berbagai hal yang bertujuan untuk mengembangkan bakat dan potensi atlet muda serta mendukung peningkatan prestasi olahraga di tingkat daerah. Dalam pengembangan olahraga, cakupan pembinaan atlet muda ini sangat penting untuk menciptakan iklim yang sehat bagi pengembangan olahraga di tingkat daerah serta mencetak atlet muda yang berprestasi.

Gambar 2.95  
Pembinaan Atlet Muda



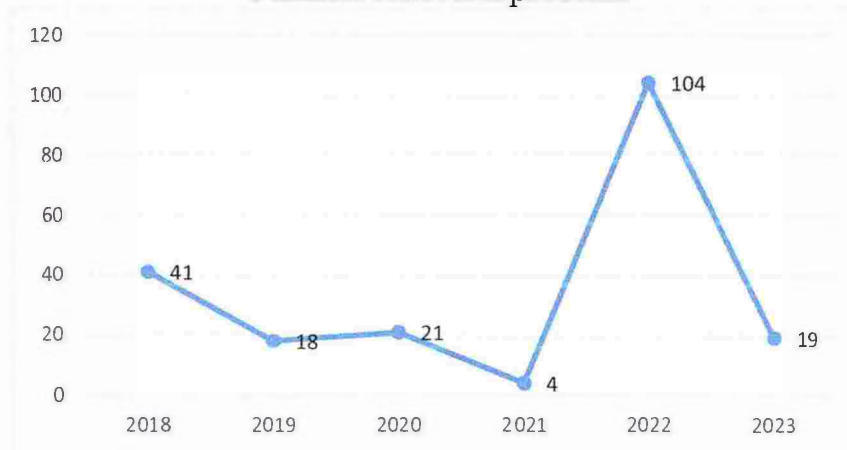
Sumber: Disporabudpar

Grafik diatas menunjukkan angka cakupan pembinaan atlet muda di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan data diatas cakupan pembinaan atlet muda mengalami peningkatan pada tahun 2022. Pada tahun 2022 jumlah pembinaan atlet muda mencapai 125 atlet menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 866 atlet, angka tersebut menunjukkan bahwa pembinaan atlet muda disesuaikan dengan cabang olahraga yang dipertandingkan. Pembinaan atlet muda yang bermuara pada terciptanya atlet berbakat daerah yang berprestasi.

e. Jumlah Atlet Berprestasi

Atlet berprestasi diciptakan dari iklim keolahragaan yang baik serta dukungan dari berbagai pihak. Kabupaten Tangerang telah melakukan berbagai upaya dalam hal pembentukan atlet berprestasi salah satunya melalui berbagai program kepemudaan dan olah raga yang diampu oleh Dinas pemuda dan olahraga. Atlet berprestasi menunjukkan keberhasilan program pembinaan olahraga di Kabupaten Tangerang.

Gambar 2.96  
Jumlah Atlet Berprestasi



Sumber: Disporabudpar, 2023

Grafik diatas menunjukkan jumlah atlet berprestasi di Kabupaten Tangerang. Jumlah atlet yang berprestasi menurut grafik diatas mengalami penurunan pada tahun 2021 capaian jumlah atlet berprestasi menurun drastis hanya pada angka 4 orang saja. Hal tersebut dikarenakan banyak kegiatan pembinaan olahraga yang mulai dirintis kembali setelah terjadinya pandemi Covid-19 yang lalu. Pada tahun 2022 telah banyak prestasi yang diraih seiring dengan mulai normalnya berbagai kompetisi olahraga yaitu 104 atlet berprestasi, tahun 2023 atlet yang prestasi sebanyak 19 atlet. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan pembinaan olahraga sehingga tercipta atlet-atlet berprestasi yang mampu membawa nama harum daerah di kancah nasional hingga internasional.

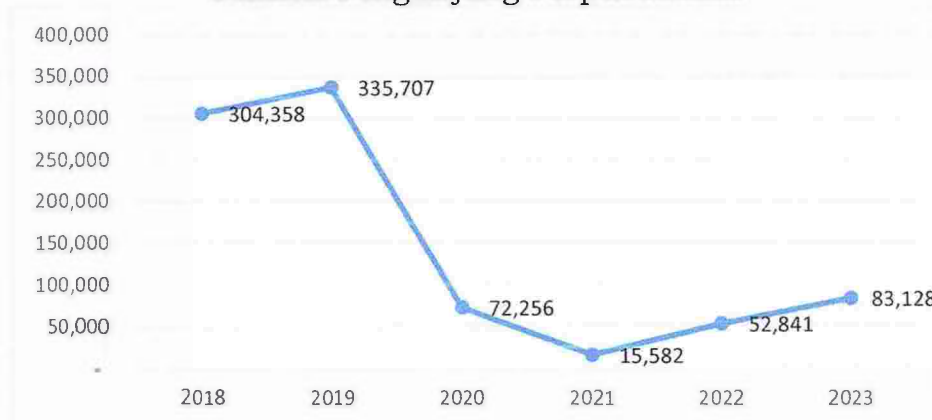
## 11. Perpustakaan

a. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

Kunjungan ke perpustakaan bisa menjadi salah satu indikator untuk mengevaluasi kinerja perpustakaan, namun tidak satu-satunya indikator untuk menilai kualitas perpustakaan. Beberapa faktor lain yang perlu dipertimbangkan untuk menilai kualitas perpustakaan antara lain koleksi buku dan materi lainnya, ketersediaan dan kemudahan akses ke sumber daya digital, kualitas layanan dan program yang ditawarkan. kecukupan dan keterampilan

staf, ketersediaan dan kualitas fasilitas dan lingkungan perpustakaan, serta sejauh mana perpustakaan dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan penggunaannya. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi yang holistik untuk menilai kualitas perpustakaan yang mencakup beberapa aspek tersebut.

Gambar 2.97  
Jumlah Pengunjung Perpustakaan



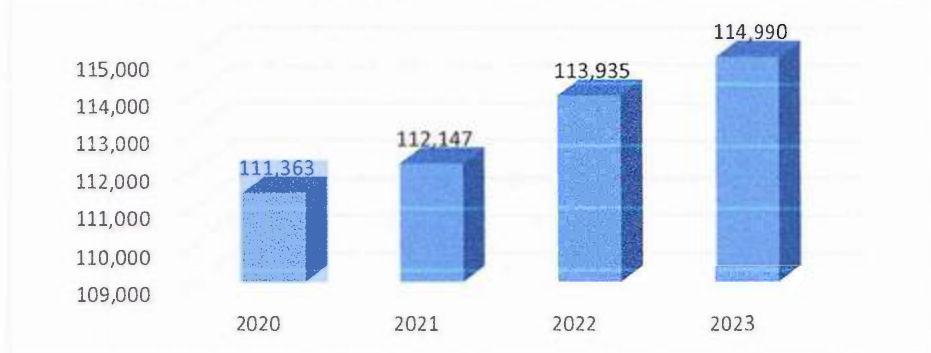
Sumber : Disperpusip, 2023

Grafik diatas menunjukkan jumlah pengunjung ke perpustakaan daerah Kabupaten Tangerang setiap tahunnya. Berdasarkan grafik diatas, terjadi penurunan jumlah pengunjung perpustakaan. Pada tahun 2021 mencapai angka 15.582 orang, sedangkan pada tahun 2019 angka kunjungan perpustakaan sangat tinggi berada pada angka 335.707 orang. Angka tersebut memperlihatkan penurunan minat masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan, dimungkinkan perkembangan teknologi yang sangat cepat mempengaruhi jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan, karena informasi telah dapat diakses dengan mudah melalui media digital diperlukan upaya promosi lebih lanjut untuk meningkatkan jumlah kunjungan ke perpustakaan daerah Kabupaten Tangerang. Walaupun pada tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah kunjungan sebanyak 52.841 kunjungan, dan tahun 2023 sebanyak 83.128 kunjungan, tetapi jumlah kunjungan belum bisa melewati capaian tahun 2019. Selain itu terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan kunjungan di perpustakaan relatif menurun seperti sarana dan prasarana belum optimal sesuai standar, Kompetensi SDM Perpustakaan masih terbatas serta Promosi layanan perpustakaan masih belum masif.

b. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah bisa menjadi salah satu indikator untuk mengevaluasi kinerja perpustakaan. Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah semakin meningkat, kondisi ini harus diimbangi dengan promosi terhadap layanan Perpustakaan sehingga bisa dimanfaatkan secara lebih luas oleh masyarakat.

Gambar 2.98  
Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah (Eksemplar)



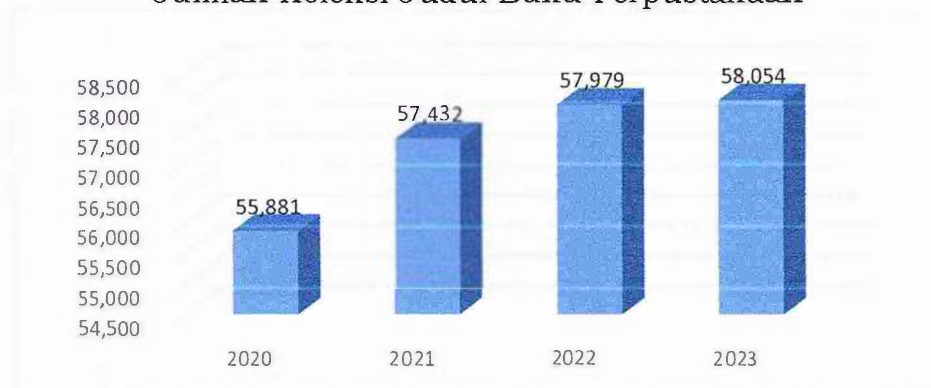
Sumber : Disperpusip, 2023

Grafik diatas menunjukkan jumlah koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah Kabupaten Tangerang setiap tahunnya. Berdasarkan grafik diatas, koleksi buku di perpustakaan daerah cukup mumpuni untuk perpustakaan sekelas perpustakaan daerah. Angka tersebut memperlihatkan kuantitas buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah. Dilihat dari jumlah yang tidak sedikit, perpustakaan daerah juga menyediakan berbagai macam buku sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Tangerang untuk bisa memanfaatkan layanan perpustakaan tersebut.

c. Jumlah koleksi judul buku perpustakaan

Jumlah koleksi judul buku yang tersedia diperpustakaan daerah Kabupaten Tangerang setiap tahunnya, grafik dibawah ini menunjukkan koleksi judul buku di perpustakaan daerah cukup mumpuni untuk perpustakaan sekelas perpustakaan daerah.

Gambar 2.99  
Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan



Sumber : Disperpusip, 2023

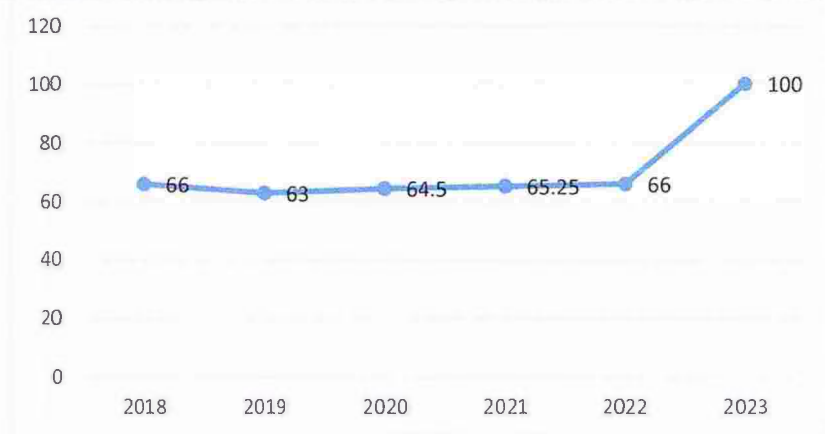
Data diatas menunjukkan jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah Kabupaten Tangerang setiap tahunnya. Angka tersebut memperlihatkan kuantitas judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah. Dilihat dari jumlah koleksi judul yang tidak sedikit, memperlihatkan perpustakaan daerah juga menyediakan berbagai macam judul buku sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Tangerang untuk bisa memanfaatkan layanan perpustakaan tersebut. Meskipun apabila dilihat dari data yang tersedia, terdapat penurunan jumlah judul buku dari 112.147 judul pada tahun 2021 menjadi 57.979 buku di Tahun 2022.

## 12. Kearsipan

### a. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku

Pengelolaan arsip secara baku merujuk pada proses atau sistematisasi yang konsisten dalam pengumpulan, penyimpanan, pengolahan dan pemeliharaan arsip dengan mengikuti standar atau pedoman yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan integritas, keamanan dan aksesibilitas arsip dalam jangka waktu yang lama. Standar-standar tersebut dapat bervariasi tergantung pada jenis arsip dan kebutuhan organisasi atau instansi yang melakukan pengelolaan arsip.

Gambar 2.100  
Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku



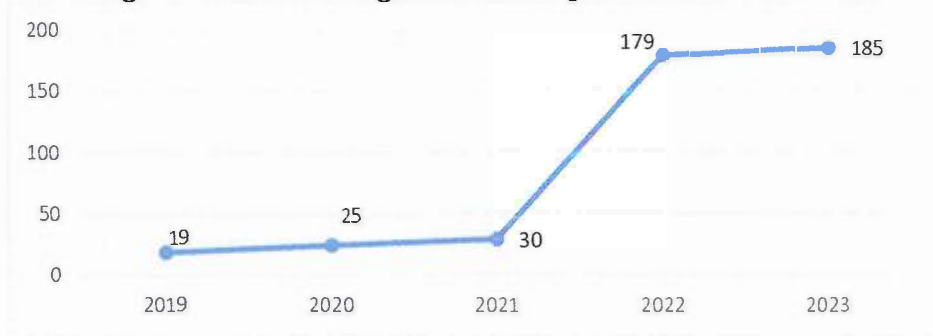
Sumber : Dinas Perpupisip, 2023

Grafik diatas menunjukkan persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku. Berdasarkan grafik diatas, angka persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku pada tahun 2023 mencapai angka 100% yang artinya sebanyak 63 perangkat daerah telah mengelola arsip sesuai dengan standar pengelolaan arsip. Namun masih terdapat beberapa permasalahan sehingga pengelolaan kearsipan di tingkat perangkat daerah masih belum optimal yaitu Pelaksanaan akuisisi dan penyerahan arsip statis masih belum maksimal dan belum terkelolanya arsip sesuai NSPK.

### b. Peningkatan SDM pengelola kearsipan

Sumber Daya manusia pengelola kearsipan perlu untuk ditingkatkan agar menunjang dan meningkatkan kualitas kinerja. Tidak tersedianya sumber daya Arsiparis yang kompeten menjadi salah satu permasalahan yang ada di di bidang urusan kearsipan Kabupaten Tangerang. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan kualitas SDM dilaksanakan melalui program pelatihan SDM pengelola kearsipan agar mampu mengelola arsip sesuai standar dan berkualitas.

Gambar 2.101  
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Tahun 2019-2023



Sumber : Disperpusip, 2023

Grafik diatas menunjukkan kegiatan yang diikuti oleh SDM pengelola kearsipan, peningkatan kapasitas unit kearsipan meliputi dinas/badan, Kecamatan, Kelurahan dan Desa. Berdasarkan grafik diatas kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan selalu diadakan minimal sekali dalam satu tahun untuk meningkatkan kualitas SDM pengelola kearsipan. Hal tersebut dilakukan guna menunjang pengelolaan kearsipan yang berkualitas dilingkungan pemerintah Kabupaten Tangerang.

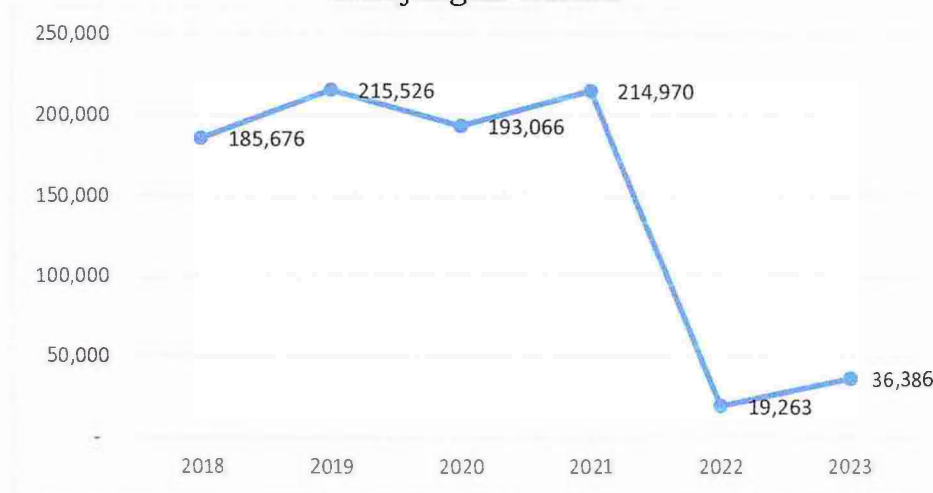
### 2.1.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

#### 1. Pariwisata

##### a. Kunjungan Wisata

Kunjungan wisata adalah suatu kegiatan untuk mengunjungi tempat-tempat wisata atau destinasi wisata baik di dalam maupun di luar negeri. Tujuan utama dari kunjungan wisata adalah untuk berlibur dan menikmati berbagai keindahan alam, budaya, sejarah atau kegiatan rekreasi lainnya.

Gambar 2.102  
Kunjungan Wisata



Sumber: [opendata.tangerangkab.go.id](https://opendata.tangerangkab.go.id)

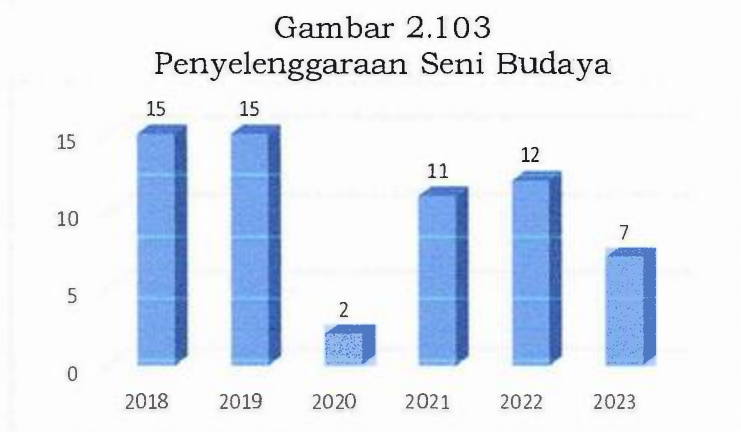
Berdasarkan grafik diatas kunjungan wisata di Kabupaten Tangerang pada tahun 2018 hingga 2022 capaian fluktuatif, dimana pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 meningkat, akan tetapi pada tahun 2020 karena pandemi covid-19 maka kunjungan wisata menurun drastis karena pembatasan aktivitas ekonomi. Mulai Tahun 2021 kembali meningkat di angka 214.970 pengunjung

dan di tahun 2022 menurun menjadi 19.263 pengunjung, tahun 2023 kembali naik menjadi 36.386 kunjungan.

b. Penyelenggara Festival Seni dan Budaya

Penyelenggaraan festival seni dan budaya merupakan salah satu cara untuk mempromosikan dan mengapresiasi kebudayaan dan tradisi suatu daerah Festival budaya yang dimaksudkan di sini adalah festival yang mengangkat tradisi sebagai bagian dari kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Festival dalam kategori ini adalah peristiwa yang dikelola baik oleh komunitasnya, atau dengan peran Pemerintah yang telah memasukkannya ke dalam program kerjanya.

Berdasarkan grafik diatas Penyelenggara Festival Seni dan Budaya di Kabupaten Tangerang pada tahun 2018 hingga 2022 capaian fluktuatif. dimana pada tahun 2018 Penyelenggara Festival Seni dan Budaya sebanyak 15 kali, lalu tahun 2019 tetap di angka 15, kemudian di tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan dikarenakan kondisi pandemic Covid-19, tahun 2023 telah terselenggara sebanyak 7 kali.



Sumber: Disporabudpar, 2023

Lalu di tahun 2021 mengalami kenaikan sebanyak 11 kali dan tahun 2022 sebanyak 12 kali. Selain itu terdapat beberapa hal yang menyebabkan penurunan tingkat penyelenggaraan budaya apabila dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2019 yaitu:

Minimnya pelaku seni tradisional untuk melestarikan dan mengembangkan seni budaya;

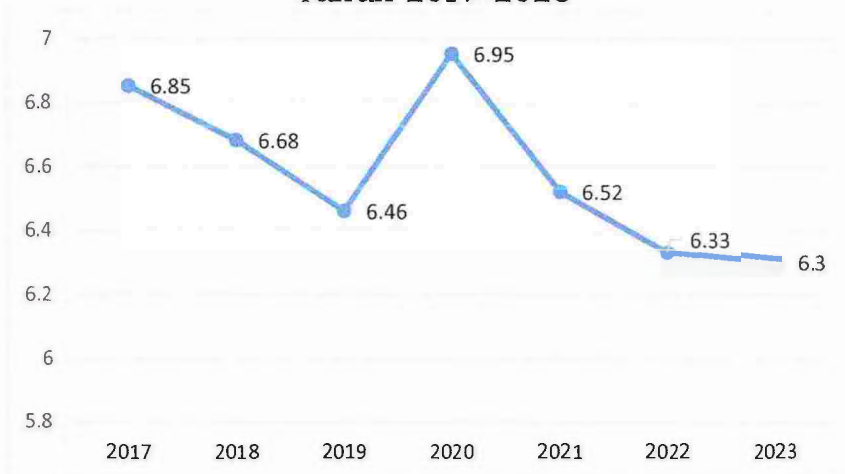
- a) Minimnya sarana prasarana kesenian tradisional yang dimiliki oleh sanggar seni;
- b) Rendahnya antusiasme masyarakat terhadap penyelenggaraan kesenian dan kebudayaan;
- c) Kurangnya kontribusi pemerintah akan penghargaan terhadap pelaku seni budaya.

## 2. Pertanian

### a. Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

Sektor pertanian dan perkebunan memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara. termasuk dalam menentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu negara. Berikut adalah beberapa kontribusi sektor pertanian dan perkebunan terhadap PDRB:

Gambar 2.104  
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB  
Tahun 2017-2023



Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2024

Berdasarkan grafik diatas Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB di Kabupaten Tangerang pada tahun 2018 hingga 2023 capaian fluktuatif, dimana pada tahun 2018 sebesar 6,68 persen. lalu tahun 2019 mengalami penurunan menjadi sebesar 6,46 persen. kemudian di tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 6,95 persen. lalu di tahun 2021 mengalami penurunan kembali menjadi 6,52 persen dan kembali turun pada tahun 2022-2023 menjadi 6.33 persen.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi di sektor pertanian yang terjadi di Kabupaten Tangerang:

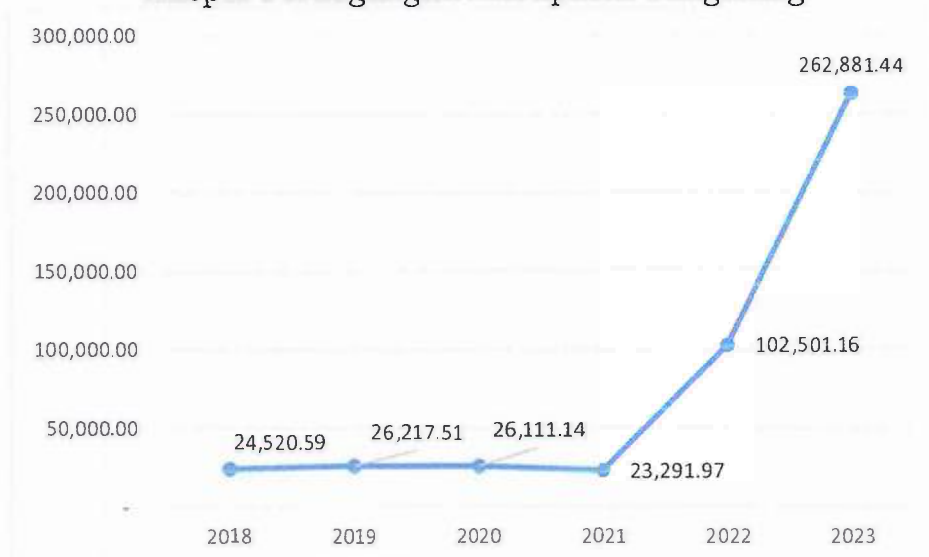
- 1) Masih rendahnya sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat tentang pengolahan pangan berbahan baku palawija serta tepung umbi-umbian lokal;
- 2) Masih rendahnya kesediaan benih unggul;
- 3) Masih rendahnya ketersediaan sarana produksi pertanian dan peternakan;
- 4) Kurangnya ketersediaan air dan lahan pertanian;
- 5) Masih tingginya risiko serangan hama dan penyakit tanaman;
- 6) Masih rendahnya kualitas serta daya saing produk pertanian;
- 7) Masih rendahnya surveilans penyakit hewan. jumlah medik veteriner dan paramedik veteriner. serta pelayanan kesehatan hewan;
- 8) Masih rendahnya kualitas produk hewan;
- 9) Masih rendahnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha sektor pertanian;
- 10) Masih rendahnya manajemen pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian.

### 3. Perdagangan

#### a. Ekspor Bersih Perdagangan

Ekspor Bersih Perdagangan dalam bahasa Indonesia adalah selisih antara nilai ekspor dan nilai impor suatu negara. Ekspor bersih perdagangan mengukur seberapa banyak barang dan jasa yang diekspor oleh negara tersebut ke negara lain dan seberapa sedikit barang dan jasa yang diimpor dari negara lain.

Gambar 2.105  
Ekspor Perdagangan Kabupaten Tangerang



Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2023

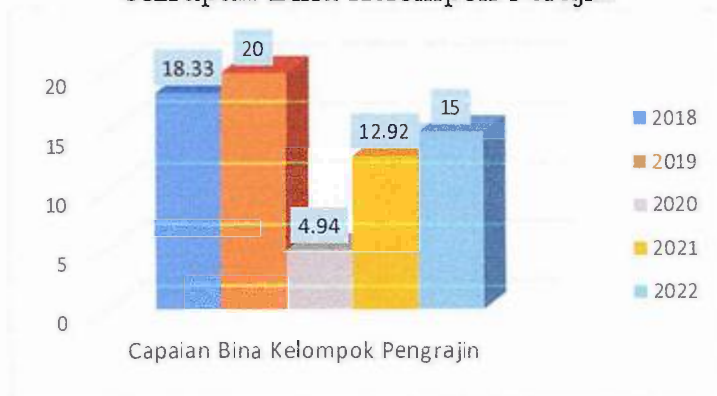
Berdasarkan grafik diatas Ekspor Bersih Perdagangan di Kabupaten Tangerang pada tahun 2018 hingga 2021 capaian fluktuatif. dimana pada tahun 2018 sebesar Rp. 24.520.59 Miliar lalu meningkat tahun 2019 Rp.26.217.5 Miliar dan meningkat kembali tahun 2020, akan tetapi tahun 2021 sedikit menurun disebabkan kondisi perekonomian global yang tidak menentu. Tahun 2023 kembali naik menjadi Rp. 262.881,42 Miliar. Selain itu, menurunnya tingkat ekspor juga disebabkan oleh kurang optimalnya promosi dan informasi potensi produk IKM dan masih minimnya penggunaan Gerai Tangerang Gemilang yang ditujukan sebagai sarana promosi produk UMKM lokal.

#### 4. Perindustrian

##### a. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Bina kelompok pengrajin atau "artisan group building" dalam bahasa Indonesia merupakan suatu upaya untuk membentuk atau membina kelompok pengrajin atau pekerja seni untuk bekerja sama dan meningkatkan keterampilan dan produktivitas mereka. Secara umum, cakupan dari bina kelompok pengrajin adalah untuk membantu para anggotanya dalam meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan pendapatan mereka melalui kerjasama dan akses ke berbagai sumber daya yang berkualitas.

Gambar 2.106  
Cakupan Bina Kelompok Perajin



Sumber: Disperindag, 2022 ( diolah)

Berdasarkan grafik diatas Cakupan Bina Kelompok Pengrajin di Kabupaten Tangerang pada tahun 2018 hingga 2021 capaian fluktuatif. dimana pada tahun 2018 sebesar 18.33. lalu tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 20. kemudian di tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan sebesar 4.94. Lalu di tahun 2021 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 12,92 dan di tahun 2022 menjadi 15. Namun pembinaan pelaku Kelompok Pengrajin ini juga harus masih dikembangkan sehingga dapat mendorong tingkat cakupan bina kelompok Pengrajin

## 5. Kelautan dan Perikanan

### a. Produksi Perikanan

Produksi perikanan merupakan segmen industri yang memperoleh dan memproses hasil laut dan air tawar. termasuk ikan. udang. kerang. dan makanan laut lainnya. Produksi perikanan meliputi aktivitas penangkapan ikan dan budidaya perikanan. Produksi perikanan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan protein hewani bagi masyarakat dunia. Selain itu. sektor ini juga memberikan lapangan pekerjaan bagi ribuan orang di seluruh dunia dan membantu perekonomian negara-negara yang bergantung pada sektor perikanan.

Apabila produksi perikanan yang dihasilkan oleh para nelayan dan pembudidaya ikan meningkat, diikuti dengan daya beli masyarakat untuk mengkonsumsi ikan meningkat maka diharapkan pendapatan nelayan/pembudidaya ikan pun akan meningkat. Dikarenakan ikan merupakan produk yang mudah sekali mengalami penurunan mutu dan kualitas akibat proses pembusukan maka perlu disiasati dengan meningkatkan nilai tambah produk perikanan agar harga ikan tidak turun.

Tabel 2.35  
Produksi Perikanan Tahun 2018-2023

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Produksi perikanan	Ton	90.03	207.9850	209.0221	210.3067	21,148.44	21,920.57

Sumber : Dinas Perikanan, 2023

Berdasarkan tabel 2.35 diatas Produksi Perikanan di Kabupaten Tangerang pada tahun 2018 hingga 2021 selalu mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2018 sebanyak 90.03 ton, lalu tahun 2019 mengalami kenaikan yang signifikan sebanyak 20.799 ton kemudian di tahun 2020 mengalami kenaikan kembali sebanyak 209,02. Lalu di tahun 2021 sebesar 210,306 ton dan tahun 2022 sebanyak 21.148,44 ton, tahun 2023 produksi ikan mencapai 21.920,57 ton dengan rincian .

### b. Konsumsi Ikan

Konsumsi ikan adalah bagian dari diet manusia yang mencakup asupan ikan dan produk olahan ikan seperti tahu, tempe dan sushi. Ikan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, seperti mengandung asam lemak omega-3 yang berguna untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah, serta protein berkualitas tinggi yang sangat penting bagi pertumbuhan dan pemulihan.

Tabel 2.36

Konsumsi Ikan Tahun 2018-2023

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Konsumsi ikan	Persen	101.8	34.62	36.08	37.44	100.05	40.68

Sumber :Dinas Perikanan. 2022

Berdasarkan tabel 2.36 di atas Konsumsi di Kabupaten Tangerang pada tahun 2018 hingga 2021 selalu mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2018 sebanyak 101,8. lalu tahun 2019 mengalami penurunan yang signifikan sebanyak 34,62 kemudian di tahun 2020 mengalami kenaikan sebanyak 36,08. Lalu di tahun 2021 sebesar 37,44 dan tahun 2022 sebesar 100,05. Hal ini menunjukkan bahwa ada peningkatan yang signifikan di tahun 2022 untuk Konsumsi Ikan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan hasil produksi perikanan yang disertai dengan peningkatan daya beli masyarakat untuk mengkonsumsi ikan turut meningkat. Sehingga hubungan antara suplai dan permintaan akan ikan meningkat secara signifikan di tahun 2022.

c. Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Bina Kelompok Nelayan (BKN) adalah suatu upaya pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat untuk membantu dan memfasilitasi pengembangan kelompok-kelompok nelayan. seperti kelompok nelayan tradisional atau modern, dalam memperoleh manfaat dan memperkuat posisi mereka di pasar.

Tabel 2.37

Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan bina kelompok nelayan	Persen	38.47	37.5	24.07	28.35	29.17	17

Sumber : Dinas Perikanan, 2023

Berdasarkan tabel diatas cakupan bina kelompok nelayan di Kabupaten Tangerang pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mengalami kenaikan. posisi terakhir pada angka 29,17 persen, mengalami penurunan di tahun 2023 menjadi 17.

d. Produksi perikanan budidaya kelompok nelayan

Produksi perikanan budidaya adalah proses memelihara atau mengendalikan pertumbuhan spesies ikan dalam kondisi terkendali. seperti kolam. tambak. atau waduk. Dalam konteks kelompok nelayan. produksi perikanan budidaya bisa menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi para nelayan. yang biasanya berkolaborasi dengan ahli budidaya ikan untuk memelihara spesies ikan yang cocok untuk lingkungan setempat dan memenuhi permintaan pasar.

Tabel 2.38  
Produksi perikanan budidaya kelompok nelayan

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Produksi perikanan budidaya kelompok nelayan	Persen	23.47	5.56	7.18	21	21.00	11

Sumber: Dinas Perikanan, 2023

Berdasarkan grafik diatas Proporsi tangkapan ikan Produksi perikanan budidaya kelompok nelayan di Kabupaten Tangerang pada tahun 2018 hingga 2021 capaian fluktuatif, dimana pada tahun 2018 sebanyak 23,47, lalu tahun 2019 mengalami penurunan yang signifikan sebanyak 5.56 kemudian di tahun 2020 mengalami kenaikan sebanyak 7,18. Lalu di tahun 2021 sebanyak 4,398 dan tahun 2022 meningkat 21, turun ditahun 2023 menjadi 11%. Kondisi yang fluktuatif ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

- 1) Sistem produksi di nelayan dan pembudidaya masih tradisional;
- 2) Rendahnya nilai tambah produk perikanan yang disebabkan oleh kapasitas kelembagaan perikanan masih rendah dan pola pembinaan untuk peningkatan nilai tambah produk perikanan belum maksimal.
- 3) Belum adanya rantai pemasaran produk perikanan yang terintegrasi;
- 4) Kapasitas kelembagaan perikanan masih rendah;
- 5) Pengetahuan nelayan dan pembudidaya masih rendah;
- 6) Pembinaan dan fasilitasi dalam peningkatan konsumsi ikan belum maksimal.

e. Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman

Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman bervariasi tergantung pada jenis ikan dan daerah perikanan. Batasan biologis yang aman adalah tingkat tangkapan ikan yang dapat diterima secara biologis dan ekonomis. yang memastikan bahwa populasi ikan tetap stabil dan terpelihara dalam jangka panjang.

Tabel 2.39  
Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	Persen	99.78	95.29	96.73	97.73	98.71	98.71

Sumber: Dinas Perikanan, 2023

Berdasarkan grafik diatas Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman di Kabupaten Tangerang pada tahun 2018 hingga 2021 capaian fluktuatif, dimana pada tahun 2018 sebanyak 99,78, lalu tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak 95,29 kemudian di tahun 2020 mengalami kenaikan sebanyak 96.73, lalu di tahun 2021 sebanyak 97,73 dan tahun 2022-2023 sebanyak 98,71.

f. Nilai tukar nelayan

Nilai tukar nelayan adalah seberapa besar upah atau penghasilan yang diterima oleh seorang nelayan per satuan produksi ikan atau per satuan waktu. Nilai tukar nelayan yang rendah dapat menjadi indikasi bahwa sektor perikanan belum menjadi sumber penghasilan yang adil dan berkelanjutan bagi nelayan. Oleh karena itu, penting untuk memfokuskan pada upaya untuk meningkatkan nilai tukar nelayan melalui peningkatan akses ke pasar, peningkatan keterampilan dan teknologi dan peningkatan kualitas produk.

Tabel 2.40  
Nilai Tukar Nelayan

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai tukar nelayan	Persen	121.68	109.65	98.73	110.21	106.45	99.64

Sumber: Dinas Perikanan, 2023

Berdasarkan grafik diatas Nilai tukar nelayan di Kabupaten Tangerang pada tahun 2018 hingga 2021 capaian fluktuatif, dimana pada tahun 2018 sebanyak 121,68, lalu tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak 109,65 kemudian di tahun 2020 mengalami kenaikan sebanyak 98.73. Lalu di tahun 2021 mengalami kenaikan sebanyak 110,21, tahun 2023 nilai tukar nelayan (NTN) menjadi 99,64%.

2.1.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan Pembangunan

a. Dokumen Perencanaan Jangka Panjang dan Jangka Menengah

Tersedianya dokumen RPJPD dan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda merupakan hal yang penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Dokumen RPJPD dan RPJMD yang ditetapkan dengan Perda memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan cara yang terencana, sistematis dan berkesinambungan. Ini juga membantu pemerintah daerah dalam memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa RPJPD dan RPJMD tersebut tersedia bagi masyarakat dan mudah diakses. Ini membantu masyarakat dalam memahami visi dan misi pembangunan daerah dan memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

RPJPD 2025-2045 Kabupaten Tangerang akan berakhir tahun 2025, dalam rangka penyusunan RPJPD 2025-2045 berbagai langkah harus ditempuh mulai dari penyusunan Evaluasi RPJPD, KLHS RPJPD, tahapan penyusunan dokumen RPJPD yang akan di-Perdakan pada tahun 2024.

RPJMD Kabupaten Tangerang yang berakhir tahun 2023 akan ditetapkan menjadi Perda pada Tahun 2025 seiring dengan ditetapkannya Kepala Daerah melalui Pilkada Serentak tahun 2024.

b. Dokumen Perencanaan Tahunan

Tersedianya dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada adalah hal yang penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Kewajiban setiap daerah untuk menetapkan RKPD menjadi Peraturan Kepala Daerah. Dokumen ini menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD setiap

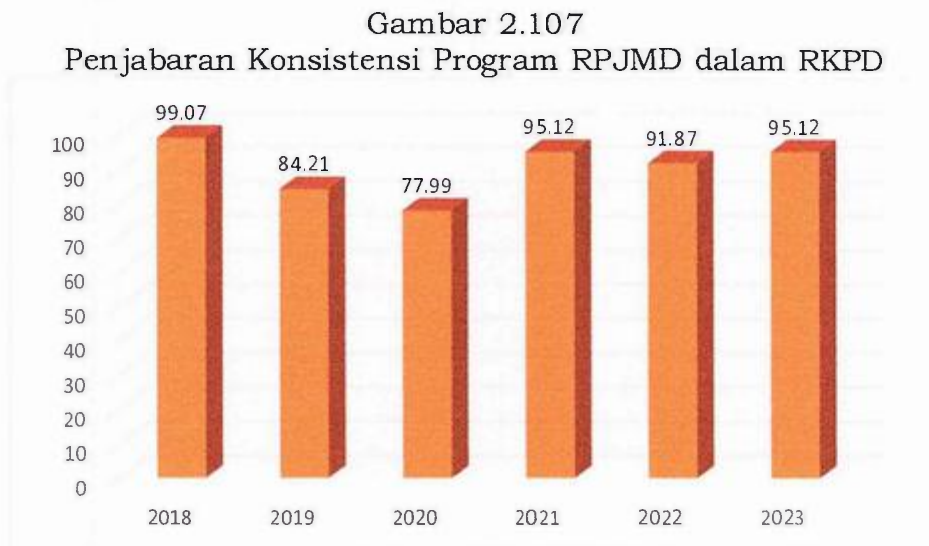
tahun. Setiap tahun disusun Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk perencanaan tahun yang akan datang dan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk perencanaan tahun berjalan

c. Dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah

Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA adalah hal yang penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Dokumen RTRW yang ditetapkan dengan Perda memastikan bahwa perencanaan pemanfaatan dan pengelolaan ruang wilayah dilakukan dengan cara yang terencana, sistematis dan berkesinambungan. Ini juga membantu pemerintah daerah dalam memastikan bahwa pemanfaatan dan pengelolaan ruang wilayah dipedomani dalam dokumen perencanaan jangka menengah. Dokumen RTRW telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031

d. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD dalam RKP

Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKP memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan dalam jangka pendek sesuai dengan arah dan tujuan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam jangka menengah. Ini juga membantu pemerintah daerah dalam memastikan bahwa pembangunan daerah berlangsung secara berkesinambungan dan sesuai dengan visi, misi dan tujuan RPJMD.



Sumber : Bappeda, 2024

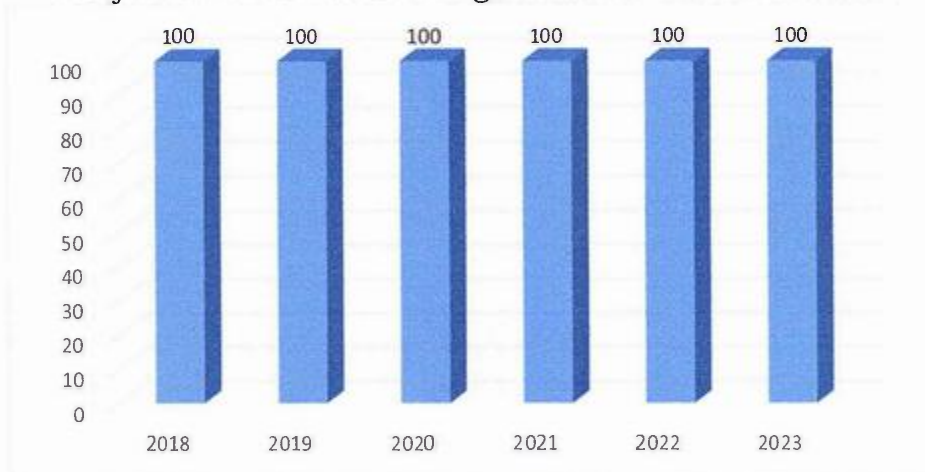
Berdasarkan grafik diatas Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKP di Kabupaten Tangerang pada tahun 2018 hingga 2023 capaian fluktuatif, akan tetapi capaiannya selalu diatas 90 persen,kecuali tahun 2019-2020 terjadinya perubahan kebijakan, dan ketidaksinkronan antara Program dalam RPJMD dan RKP terutama disebabkan karena terdapat kegiatan mandatori seperti DAK yang banyak menggunakan program diluar yang sudah dialokasikan pada RKP.

e. Penjabaran Konsistensi Program RKP ke dalam APBD

Konsistensi program antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat penting untuk memastikan bahwa perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah

dilakukan secara terintegrasi dan efektif. Konsistensi ini memastikan bahwa program yang dicanangkan dalam RKPD sejalan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD.

Gambar 2.108  
Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD



Sumber : Bappeda, 2024

Berdasarkan grafik diatas Penjabaran Konsistensi Program RKPD dengan APBD mencapai diatas 100 persen. Ketidaksiesuaian program dalam RKPD dan APBD disebabkan karena adanya kebijakan dalam penganggaran yang baru muncul pada saat terbitnya Pedoman Penyusunan APBD tahun bersangkutan dan terdapat kegiatan mandatori seperti DAK yang sudah ditentukan sub kegiatan, kegiatan dan programnya sehingga menyesuaikan dengan yang telah disusun dalam RKPD.

## 2. Keuangan

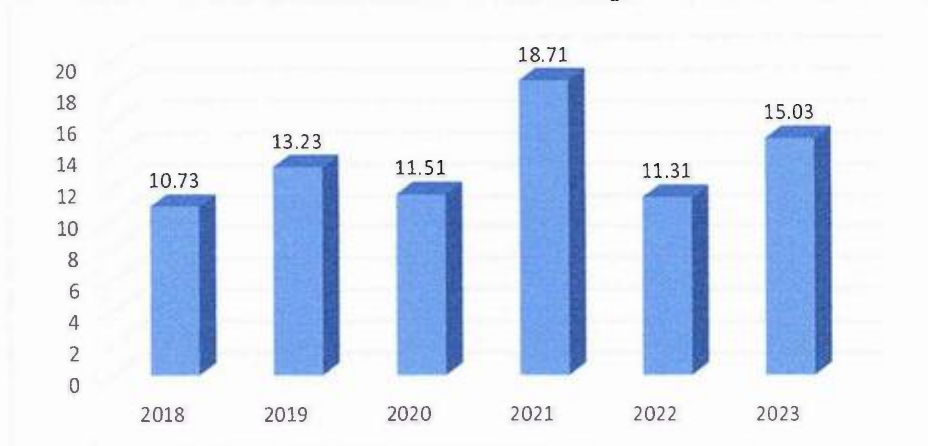
### a. Opini BPK terhadap laporan keuangan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran penting dalam menilai dan memberikan opini terhadap laporan keuangan pemerintah. BPK memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah akurat, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Opini BPK sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat, karena memberikan informasi tentang keandalan dan keakuratan laporan keuangan pemerintah. Opini BPK juga memberikan dasar bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem akuntansi dan memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Berdasarkan capaian indikator opini BPK terhadap laporan keuangan pada tahun 2018 hingga 2023 selalu WTP.

### b. Persentase SILPA terhadap APBD

SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) adalah selisih antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang tercantum dalam anggaran. Persentase SILPA terhadap APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah rasio antara SILPA dan APBD, yang menunjukkan seberapa besar sisa anggaran pemerintah setelah penerimaan dan pengeluaran dikurangi.

Gambar 2.109  
Persentase SILPA terhadap APBD



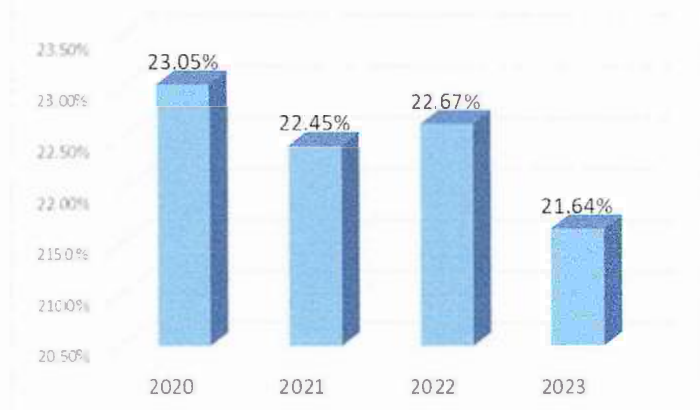
Sumber: BPKAD, 2023

Berdasarkan grafik diatas Persentase SILPA terhadap APBD di Kabupaten Tangerang pada tahun 2018 hingga 2022 capaian fluktuatif, Silpa terbesar terlihat pada tahun 2021 sebesar 18,7 persen, hal ini disebabkan makin membaiknya kondisi pasca pandemi sehingga terdapat kegiatan penanganan pandemi Covid-19 yang dari BTT yang tidak dimanfaatkan, besarnya Silpa juga disebabkan oleh pendapatan yang melebihi dari target. Silpa sebagian juga berasal dari Silpa BLUD terutama dari pelampauan target pendapatan BLUD RSUD, Puskesmas dan UPDB yang dapat dimanfaatkan kembali oleh BLUD. Besarnya silpa juga dapat memperlihatkan efektivitas dan efisiensi dalam penatausahaan keuangan.

c. Belanja pendidikan (20%)

Belanja pendidikan adalah pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Dalam hal ini, persentase belanja pendidikan sebesar 20% adalah rasio antara belanja pendidikan dan total belanja pemerintah. Angka ini menunjukkan seberapa besar prioritas pemerintah dalam mengelola pengeluaran untuk pendidikan. Semakin besar angka ini, menunjukkan bahwa pemerintah memberikan prioritas yang tinggi terhadap pendidikan dan memperhatikan peran pendidikan dalam pembangunan suatu daerah.

Gambar 2.110  
Proporsi Belanja Pendidikan



Sumber: BPKAD, 2024

Berdasarkan grafik diatas Belanja Pendidikan (20%) di Kabupaten Tangerang pada tahun 2020 hingga 2023 mengalami kenaikan-penurunan, dimana pada tahun 2020 sebanyak Rp. 1,323,212,548,404 atau sekitar 23,05% dari APBD, lalu tahun 2021 di angka Rp. 1,408,174,103,813 atau 22,45%, kemudian di tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi Rp. 1,647,409,950,763 atau sekitar 22,67% dan tahun 2023 belanja Pendidikan turun menjadi rp. 1,802,840,228,103 atau sekitar 21,64% dari APBD.

d. Belanja Kesehatan (10%)

Belanja kesehatan merupakan salah satu kategori belanja dalam APBD yang memiliki andil 10% dalam total belanja pemerintah. Belanja kesehatan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan kesehatan, seperti penyediaan pelayanan kesehatan. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan lain-lain.

Gambar 2.111  
Proporsi Belanja Kesehatan



Sumber: BPKAD. 2023

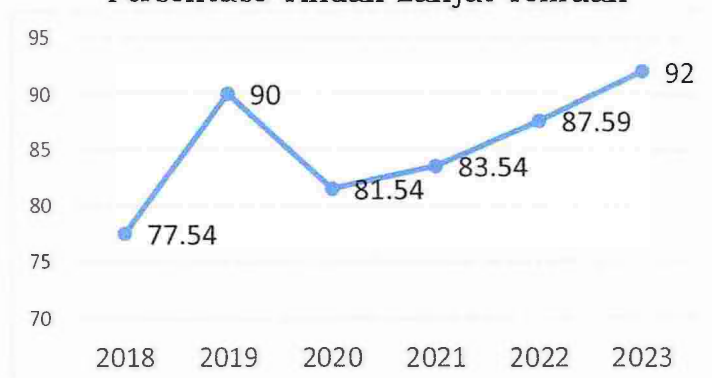
Berdasarkan grafik diatas Belanja Kesehatan di Kabupaten Tangerang pada tahun 2018 hingga 2023 cenderung naik, dimana pada tahun 2020 sebanyak 1,182,080,751,065. lalu tahun 2021 sebesar Rp. 1,324,262,725,729, dan tahun 2023 sebesar Rp. 1,960,504,033,188 atau sekitar 23,54% dari APBD.

4. Pengawasan

a. Persentase tindak lanjut temuan

Tindak lanjut temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) merupakan proses untuk mengatasi masalah yang ditemukan selama proses pemeriksaan. Tujuan utama tindak lanjut temuan BPK adalah untuk memastikan bahwa masalah yang ditemukan sudah teratasi dan pencegahan masalah serupa dapat dilakukan di masa yang akan datang.

Gambar 2.112  
Persentase Tindak Lanjut Temuan



Sumber: Inspektorat. 2023

Berdasarkan grafik diatas Persentase tindak lanjut temuan di kabupaten Tangerang pada tahun 2018 hingga 2021 capaian fluktuatif, dimana pada tahun 2018 sebanyak 77,54 lalu tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 90, kemudian di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 81,54, lalu di tahun 2021 mengalami kenaikan yang sebesar 83,54 dan di tahun 2022 naik 87,59, dan tahun 2023 temua yang telah ditindak lanjuti mencapai 92%. Hal tersebut dikarenakan peran APIP sudah optimal dalam menjalankan tugasnya.

## 5. Kepegawaian

Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah senantiasa ditingkatkan dalam sisi kualitas dan kuantitas. Gambaran kondisi pegawai Kabupaten Tangerang dapat diperlihatkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.41  
Jumlah Seluruh PNS Kabupaten Tangerang

No	Perangkat Daerah	Jumlah PNS			
		Jabatan Fungsional Tertentu	Jabatan Fungsional Umum	Jabatan Struktural	Grand Total
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	25	38	10	73
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		7	13	20
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12	71	6	89
4	Badan Pendapatan Daerah	10	129	26	165
5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	7	45	17	69
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	17	18	9	44
7	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	4	90	50	144
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	26	50	6	82
9	Dinas Kesehatan	2272	206	99	2577
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	29	19	8	56
11	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	10	15	9	34
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	14	37	31	82

No	Perangkat Daerah	Jumlah PNS			
		Jabatan Fungsional Tertentu	Jabatan Fungsional Umum	Jabatan Struktural	Grand Total
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	6	25	7	38
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8	15	8	31
15	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	5	25	8	38
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	21	41	9	71
17	Dinas Pendidikan	9210	111	15	9336
18	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12	18	10	40
19	Dinas Perhubungan	7	19	21	47
20	Dinas Perikanan	7	20	10	37
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	22	16	8	46
22	Dinas Perpustakaan dan Arsip	34	23	7	64
23	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	107	21	16	144
24	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman	8	40	13	61
25	Dinas Sosial	16	14	9	39
26	Dinas Tata Ruang dan Bangunan	18	55	13	86
27	Dinas Tenaga Kerja	19	9	9	37
28	Inspektorat	64	10	10	84
29	Kecamatan Balaraja	1	7	14	22
30	Kecamatan Cikupa	1	8	18	27
31	Kecamatan Cisauk	2	11	14	27
32	Kecamatan Cisoka	1	11	9	21
33	Kecamatan Curug	1	15	23	39

No	Perangkat Daerah	Jumlah PNS			
		Jabatan Fungsional Tertentu	Jabatan Fungsional Umum	Jabatan Struktural	Grand Total
34	Kecamatan Gunung Kaler	1	7	9	17
35	Kecamatan Jambe	2	15	9	26
36	Kecamatan Jayanti	1	7	9	17
37	Kecamatan Kelapa Dua	2	13	34	49
38	Kecamatan Kemiri	1	8	9	18
39	Kecamatan Kosambi	2	18	24	44
40	Kecamatan Kresek	1	12	8	21
41	Kecamatan Kronjo	1	14	9	24
42	Kecamatan Legok	1	14	14	29
43	Kecamatan Mauk	1	11	14	26
44	Kecamatan Mekar Baru	1	11	9	21
45	Kecamatan Pagedangan	1	19	14	34
46	Kecamatan Pakuhaji	1	12	14	27
47	Kecamatan Panongan	2	15	14	31
48	Kecamatan Pasar Kemis	1	15	29	45
49	Kecamatan Rajeg		10	13	23
50	Kecamatan Sepatan	1	14	14	29
51	Kecamatan Sepatan Timur	1	11	9	21
52	Kecamatan Sindang Jaya	1	7	9	17
53	Kecamatan Solear	2	9	9	20
54	Kecamatan Sukadiri	2	12	9	23
55	Kecamatan Sukamulya	2	7	8	17
56	Kecamatan Teluk Naga	1	18	9	28
57	Kecamatan Tigaraksa	1	17	19	37
58	Satuan Polisi Pamong Praja	14	37	17	68
59	Sekretariat Daerah	71	58	26	155
60	Sekretariat DPRD	6	33	11	50
61	Grand Total	12.117	1.663	907	14.687

Sumber : BKPSDM Kab. Tangerang, 2023.

Tabel 2.42  
 Jumlah PNS Fungsional Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi (Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan) Kabupaten Tangerang

No.	Perangkat Daerah	Jumlah PNS			
		Total	Bersertifikat	Belum Bersertifikat	%
1	Sekretariat Daerah	55	50	5	9
2	Sekretariat DPRD	2	2	0	
3	Inspektorat	68	47	21	31
4	Satuan Polisi Pamong Praja	14	4	10	71
5	Dinas Sosial	5	5	0	
6	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	1	0	
7	Dinas Pendidikan	52	52	0	
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3	2	1	33
9	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	1	1	0	
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	1	0	
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	1	1	0	
12	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	4	4	0	
13	Dinas Kesehatan	4	1	3	75
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	21	5	16	76
15	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	4	2	2	50
16	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	45	45	0	
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14	14	0	
18	Dinas Perhubungan	4	4	0	
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	3	3	0	
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12	12	0	
21	Dinas Perpustakaan dan Arsip	26	15	11	42
22	Dinas Tata Ruang dan Bangunan	10	9	1	10
23	Dinas Tenaga Kerja	12	12	0	
24	Dinas Perikanan	1	0	1	100
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5	5	0	

No.	Perangkat Daerah	Jumlah PNS			
		Total	Bersertifikat	Belum Bersertipikat	%
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4	4	0	
27	Badan Pendapatan Daerah	5	5	0	
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	14	8	6	43
29	Kecamatan Balaraja	1	1	0	
30	Kecamatan Cikupa	1	1	0	
31	Kecamatan Cisauk	2	2	0	
32	Kecamatan Cisoka	1	1	0	
33	Kecamatan Curug	1	1	0	
34	Kecamatan Gunung Kaler	1	1	0	
35	Kecamatan Jambe	2	2	0	
36	Kecamatan Jayanti	1	1	0	
37	Kecamatan Kelapa Dua	2	2	0	
38	Kecamatan Kemiri	1	1	0	
39	Kecamatan Kosambi	2	2	0	
40	Kecamatan Kresek	1	1	0	
41	Kecamatan Kronjo	1	1	0	
42	Kecamatan Legok	1	1	0	
43	Kecamatan Mauk	1	1	0	
44	Kecamatan Mekar Baru	1	1	0	
45	Kecamatan Pagedangan	1	1	0	
46	Kecamatan Pakuhaji	2	2	0	
47	Kecamatan Panongan	2	2	0	
48	Kecamatan Pasar Kemis	1	1	0	
49	Kecamatan Sepatan	1	1	0	
50	Kecamatan Sepatan Timur	1	1	0	
51	Kecamatan Sindang Jaya	1	1	0	
52	Kecamatan Solear	2	2	0	
53	Kecamatan Sukadiri	2	2	0	
54	Kecamatan Sukamulya	2	2	0	
55	Kecamatan Teluk Naga	1	1	0	
56	Kecamatan Tigaraksa	1	1	0	
	TOTAL	428	351	77	

Sumber : BKPSDM Kab. Tangerang, 2022.

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa jumlah PNS Fungsional Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi (Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan) Kabupaten Tangerang berjumlah 351 atau sekitar 82 persen, sedangkan pegawai yang belum bersertipikat sebanyak 77 pegawai atau sebanyak 17 persen.

Tabel 2.43  
Pemerintah Kabupaten Tangerang Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan  
(Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan)

Perangkat Daerah	Tingkat Pendidikan	Jumlah
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		73
	Diploma III/Akta III	9
	S1/Sarjana	38
	S2/Pasca Sarjana	13
	SMA/Sederajat	13
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		19
	S1/Sarjana	8
	S2/Pasca Sarjana	7
	SMA/Sederajat	4
Badan Penanggulangan Bencana Daerah		89
	S1/Sarjana	28
	S2/Pasca Sarjana	13
	SMA/Sederajat	48
Badan Pendapatan Daerah		165
	Diploma I/Akta I	1
	Diploma III/Akta III	47
	Diploma IV/Akta IV	2
	S1/Sarjana	55
	S2/Pasca Sarjana	23
	SMA/Sederajat	37
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		69
	Diploma III/Akta III	10
	S1/Sarjana	33
	S2/Pasca Sarjana	8
	SMA/Sederajat	18
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		44
	Diploma I/Akta I	1
	Diploma III/Akta III	2
	S1/Sarjana	15
	S2/Pasca Sarjana	19
	S-3/Doktor	1
	SMA/Sederajat	6
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air		144
	Diploma III/Akta III	10
	Diploma IV/Akta IV	1
	S1/Sarjana	90
	S2/Pasca Sarjana	19
	SMA/Sederajat	24
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		82
	Diploma III/Akta III	10
	Diploma IV/Akta IV	1
	S1/Sarjana	27

Perangkat Daerah	Tingkat Pendidikan	Jumlah
	S2/Pasca Sarjana	9
	SMA/Sederajat	34
	SMP/Sederajat	1
Dinas Kesehatan		1,439
	Diploma I/Akta I	19
	Diploma III/Akta III	727
	Diploma IV/Akta IV	133
	S1/Sarjana	392
	S2/Pasca Sarjana	107
	Sampai dengan SD	1
	SMA/Sederajat	59
	SMP/Sederajat	1
Dinas Komunikasi dan Informatika		56
	Diploma III/Akta III	5
	S1/Sarjana	36
	S2/Pasca Sarjana	9
	SMA/Sederajat	6
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		33
	S1/Sarjana	20
	S2/Pasca Sarjana	7
	SMA/Sederajat	6
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		82
	Diploma III/Akta III	6
	S1/Sarjana	33
	S2/Pasca Sarjana	23
	Sampai dengan SD	1
	SMA/Sederajat	19
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa		38
	Diploma IV/Akta IV	3
	S1/Sarjana	19
	S2/Pasca Sarjana	8
	SMA/Sederajat	8
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		31
	Diploma III/Akta III	4
	Diploma IV/Akta IV	3
	S1/Sarjana	11
	S2/Pasca Sarjana	6
	SMA/Sederajat	7
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata		38
	Diploma III/Akta III	3
	S1/Sarjana	17
	S2/Pasca Sarjana	9
	SMA/Sederajat	9
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		71
	Diploma III/Akta III	1
	Diploma IV/Akta IV	1

Perangkat Daerah	Tingkat Pendidikan	Jumlah
	S1/Sarjana	34
	S2/Pasca Sarjana	18
	SMA/Sederajat	15
	SMP/Sederajat	2
Dinas Pendidikan		4,974
	Diploma I/Akta I	8
	Diploma II/Akta II	296
	Diploma III/Akta III	12
	Diploma IV/Akta IV	3
	S1/Sarjana	4,185
	S2/Pasca Sarjana	300
	S-3/Doktor	3
	Sampai dengan SD	1
	SMA/Sederajat	158
	SMP/Sederajat	8
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		40
	Diploma I/Akta I	1
	Diploma III/Akta III	6
	Diploma IV/Akta IV	1
	S1/Sarjana	10
	S2/Pasca Sarjana	17
	SMA/Sederajat	5
Dinas Perhubungan		47
	Diploma II/Akta II	1
	Diploma III/Akta III	5
	Diploma IV/Akta IV	1
	S1/Sarjana	16
	S2/Pasca Sarjana	14
	SMA/Sederajat	10
Dinas Perikanan		37
	Diploma III/Akta III	3
	Diploma IV/Akta IV	1
	S1/Sarjana	13
	S2/Pasca Sarjana	13
	SMA/Sederajat	7
Dinas Perindustrian dan Perdagangan		46
	Diploma III/Akta III	2
	Diploma IV/Akta IV	1
	S1/Sarjana	26
	S2/Pasca Sarjana	12
	SMA/Sederajat	5
Dinas Perpustakaan dan Arsip		64
	Diploma III/Akta III	20
	S1/Sarjana	20
	S2/Pasca Sarjana	13
	SMA/Sederajat	11
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		94
	Diploma III/Akta III	7
	Diploma IV/Akta IV	1

Perangkat Daerah	Tingkat Pendidikan	Jumlah
	S1/Sarjana	53
	S2/Pasca Sarjana	17
	SMA/Sederajat	16
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman		60
	Diploma III/Akta III	1
	Diploma IV/Akta IV	1
	S1/Sarjana	32
	S2/Pasca Sarjana	10
	SMA/Sederajat	14
	SMP/Sederajat	2
Dinas Sosial		39
	Diploma III/Akta III	2
	Diploma IV/Akta IV	1
	S1/Sarjana	18
	S2/Pasca Sarjana	8
	S-3/Doktor	1
	SMA/Sederajat	9
Dinas Tata Ruang dan Bangunan		86
	Diploma III/Akta III	3
	S1/Sarjana	51
	S2/Pasca Sarjana	17
	SMA/Sederajat	14
	SMP/Sederajat	1
Dinas Tenaga Kerja		37
	Diploma III/Akta III	3
	S1/Sarjana	18
	S2/Pasca Sarjana	11
	S-3/Doktor	1
	SMA/Sederajat	4
Inspektorat		84
	Diploma III/Akta III	1
	Diploma IV/Akta IV	2
	S1/Sarjana	58
	S2/Pasca Sarjana	20
	SMA/Sederajat	3
Kecamatan Balaraja		22
	Diploma IV/Akta IV	1
	S1/Sarjana	12
	S2/Pasca Sarjana	7
	SMA/Sederajat	2
Kecamatan Cikupa		27
	Diploma III/Akta III	2
	Diploma IV/Akta IV	1
	S1/Sarjana	12
	S2/Pasca Sarjana	5
	SMA/Sederajat	7
Kecamatan Cisauk		27
	Diploma III/Akta III	2
	S1/Sarjana	10
	S2/Pasca Sarjana	6

Perangkat Daerah	Tingkat Pendidikan	Jumlah
	SMA/Sederajat	9
Kecamatan Cisoka		21
	Diploma III/Akta III	2
	Diploma IV/Akta IV	1
	S1/Sarjana	6
	S2/Pasca Sarjana	3
	SMA/Sederajat	9
Kecamatan Curug		38
	Diploma III/Akta III	1
	S1/Sarjana	20
	S2/Pasca Sarjana	10
	SMA/Sederajat	6
	SMP/Sederajat	1
Kecamatan Gunung Kaler		17
	S1/Sarjana	11
	S2/Pasca Sarjana	3
	SMA/Sederajat	3
Kecamatan Jambe		26
	Diploma III/Akta III	2
	Diploma IV/Akta IV	1
	S1/Sarjana	8
	S2/Pasca Sarjana	4
	SMA/Sederajat	11
Kecamatan Jayanti		17
	Diploma III/Akta III	1
	Diploma IV/Akta IV	1
	S1/Sarjana	11
	S2/Pasca Sarjana	2
	SMA/Sederajat	2
Kecamatan Kelapa Dua		49
	Diploma III/Akta III	2
	Diploma IV/Akta IV	2
	S1/Sarjana	35
	S2/Pasca Sarjana	6
	SMA/Sederajat	4
Kecamatan Kemiri		17
	Diploma IV/Akta IV	1
	S1/Sarjana	10
	S2/Pasca Sarjana	2
	SMA/Sederajat	3
	SMP/Sederajat	1
Kecamatan Kosambi		44
	Diploma II/Akta II	2
	Diploma III/Akta III	1
	Diploma IV/Akta IV	1
	S1/Sarjana	18
	S2/Pasca Sarjana	9
	SMA/Sederajat	12
	SMP/Sederajat	1
Kecamatan Kresek		21

Perangkat Daerah	Tingkat Pendidikan	Jumlah
	S1/Sarjana	15
	S2/Pasca Sarjana	5
	SMA/Sederajat	1
<b>Kecamatan Kronjo</b>		<b>24</b>
	Diploma III/Akta III	2
	S1/Sarjana	10
	S2/Pasca Sarjana	6
	SMA/Sederajat	5
	SMP/Sederajat	1
<b>Kecamatan Legok</b>		<b>29</b>
	S1/Sarjana	13
	S2/Pasca Sarjana	6
	SMA/Sederajat	10
<b>Kecamatan Mauk</b>		<b>26</b>
	Diploma III/Akta III	1
	Diploma IV/Akta IV	1
	S1/Sarjana	15
	S2/Pasca Sarjana	3
	SMA/Sederajat	6
<b>Kecamatan Mekar Baru</b>		<b>21</b>
	Diploma III/Akta III	2
	Diploma IV/Akta IV	1
	S1/Sarjana	9
	S2/Pasca Sarjana	4
	SMA/Sederajat	5
<b>Kecamatan Pagedangan</b>		<b>33</b>
	Diploma II/Akta II	1
	Diploma III/Akta III	2
	Diploma IV/Akta IV	2
	S1/Sarjana	11
	S2/Pasca Sarjana	6
	SMA/Sederajat	10
	SMP/Sederajat	1
<b>Kecamatan Pakuhaji</b>		<b>27</b>
	Diploma IV/Akta IV	1
	S1/Sarjana	11
	S2/Pasca Sarjana	7
	SMA/Sederajat	8
<b>Kecamatan Panongan</b>		<b>31</b>
	Diploma III/Akta III	2
	Diploma IV/Akta IV	1
	S1/Sarjana	16
	S2/Pasca Sarjana	3
	SMA/Sederajat	9
<b>Kecamatan Pasar Kemis</b>		<b>45</b>
	Diploma II/Akta II	1
	Diploma III/Akta III	3
	S1/Sarjana	18
	S2/Pasca Sarjana	11
	SMA/Sederajat	12

Perangkat Daerah	Tingkat Pendidikan	Jumlah
Kecamatan Rajeg		23
	Diploma III/Akta III	1
	S1/Sarjana	11
	S2/Pasca Sarjana	6
	SMA/Sederajat	5
Kecamatan Sepatan		29
	Diploma III/Akta III	1
	Diploma IV/Akta IV	1
	S1/Sarjana	10
	S2/Pasca Sarjana	7
	Sampai dengan SD	1
	SMA/Sederajat	9
Kecamatan Sepatan Timur		21
	Diploma IV/Akta IV	1
	S1/Sarjana	12
	S2/Pasca Sarjana	2
	SMA/Sederajat	6
Kecamatan Sindang Jaya		17
	Diploma III/Akta III	2
	S1/Sarjana	9
	S2/Pasca Sarjana	3
	SMA/Sederajat	3
Kecamatan Solear		20
	Diploma III/Akta III	2
	Diploma IV/Akta IV	1
	S1/Sarjana	8
	S2/Pasca Sarjana	3
	SMA/Sederajat	6
Kecamatan Sukadiri		23
	Diploma III/Akta III	1
	S1/Sarjana	9
	S2/Pasca Sarjana	6
	SMA/Sederajat	7
Kecamatan Sukamulya		17
	S1/Sarjana	10
	S2/Pasca Sarjana	3
	SMA/Sederajat	4
Kecamatan Teluk Naga		28
	Diploma III/Akta III	1
	Diploma IV/Akta IV	2
	S1/Sarjana	13
	S2/Pasca Sarjana	2
	SMA/Sederajat	9
	SMP/Sederajat	1
Kecamatan Tigaraksa		37
	Diploma III/Akta III	1
	Diploma IV/Akta IV	2
	S1/Sarjana	17
	S2/Pasca Sarjana	8
	SMA/Sederajat	9

Perangkat Daerah	Tingkat Pendidikan	Jumlah
Satuan Polisi Pamong Praja		68
	S1/Sarjana	29
	S2/Pasca Sarjana	10
	Sampai dengan SD	1
	SMA/Sederajat	28
Sekretariat Daerah		155
	Diploma III/Akta III	8
	Diploma IV/Akta IV	5
	S1/Sarjana	87
	S2/Pasca Sarjana	39
	SMA/Sederajat	16
Sekretariat DPRD		50
	Diploma II/Akta II	2
	Diploma III/Akta III	2
	S1/Sarjana	25
	S2/Pasca Sarjana	8
	SMA/Sederajat	13
UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja		304
	Diploma I/Akta I	1
	Diploma III/Akta III	183
	Diploma IV/Akta IV	8
	S1/Sarjana	75
	S2/Pasca Sarjana	36
	SMA/Sederajat	1
UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang		523
	Diploma III/Akta III	205
	Diploma IV/Akta IV	27
	S1/Sarjana	162
	S2/Pasca Sarjana	99
	S-3/Doktor	1
	Sampai dengan SD	3
	SMA/Sederajat	22
	SMP/Sederajat	4
UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji		114
	Diploma I/Akta I	2
	Diploma III/Akta III	42
	Diploma IV/Akta IV	10
	S1/Sarjana	34
	S2/Pasca Sarjana	23
	SMA/Sederajat	3
UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tigaraksa		10
	Diploma III/Akta III	1
	S1/Sarjana	3
	S2/Pasca Sarjana	4
	S-3/Doktor	1
	SMA/Sederajat	1
Total		10,082

Sumber : BKPSDM Kab. Tangerang, 2023.

Jumlah pegawai dengan Pendidikan DIV-S3 di Kabupaten Tangerang mencapai 69 persen atau sebanyak 7.494 pegawai, sedangkan yang belum mempunyai ijazah DIV/S1 sebanyak 2.588 pegawai.

## 6. Sekretariat Dewan

- a. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota

Penyediaan RKT ini penting untuk memastikan bahwa Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota memiliki perencanaan yang jelas dan terstruktur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. RKT juga akan membantu Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota dalam melakukan evaluasi kinerja dan memastikan bahwa tugas dan tanggung jawabnya dilaksanakan secara efektif dan efisien. Berdasarkan capaian pada tahun 2018 hingga 2022 adalah ada.

- b. Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)

Penyusunan dan integrasi program-program kerja DPRD dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) dan Rencana Tahunan (RKPD) merupakan hal yang penting agar program-program kerja DPRD memiliki perencanaan yang jelas dan terstruktur. RPJM dan RKPD membantu DPRD dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta memastikan bahwa program-program kerja DPRD dapat dilaksanakan secara terintegrasi dan efektif. Berdasarkan capaian pada tahun 2018 hingga 2022 adalah ada.

- c. Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD.

Dokumen perencanaan dan anggaran setwan DPRD membantu DPRD dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan memastikan bahwa program-program yang akan dilaksanakan sudah terintegrasi dan terukur. Hal ini akan membantu DPRD dalam melakukan evaluasi kinerja dan memastikan bahwa tugas dan tanggung jawabnya dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dalam hal adanya temuan bahwa program-program DPRD belum terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran setwan DPRD, maka hal tersebut dapat ditindak lanjuti dengan memastikan bahwa program-program DPRD sudah terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran setwan DPRD. Tindak lanjut ini akan membantu DPRD dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih baik dan bertanggung jawab.

### 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

#### 2.1.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Komponen pengeluaran konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Menurut BPS Kabupaten Tangerang (2022) seluruh nilai tambah bruto (PDRB)

yang diciptakan di Kabupaten Tangerang ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi konsumsi rumah tangga.

Periode tahun 2018-2022 pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi nominal (atas harga berlaku) maupun secara riil (atas harga konstan). Kenaikan jumlah Penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumahtangga. Kenaikan tersebut akan mendorong kenaikan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 2.44  
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga Kabupaten  
Tangerang Tahun 2018-2023

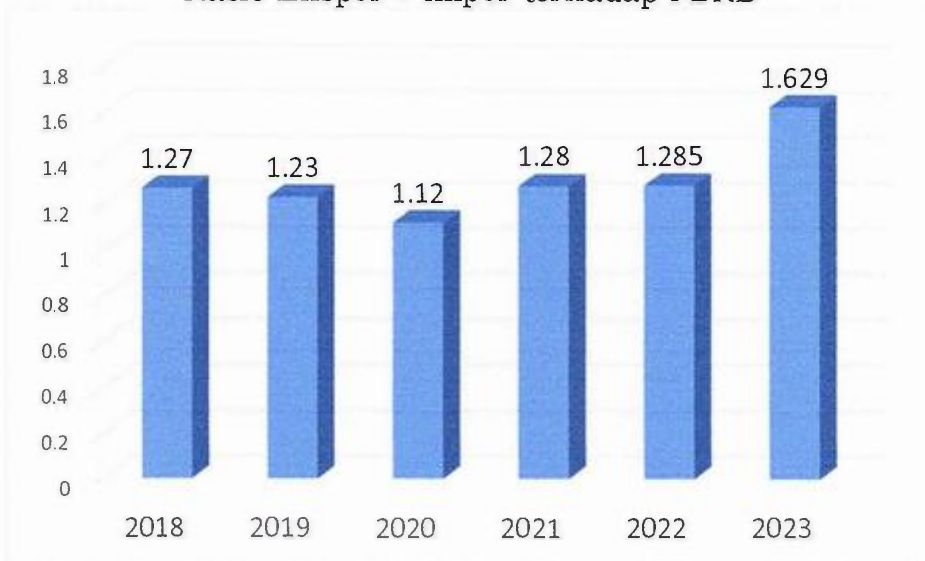
Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Total Konsumsi Rumah tangga: ADHB (miliar Rp.)	67.159,46	72.998,71	71.693,73	74.952,60	82.012,48	88.641,20
ADHB 2010 (Miliar Rp.)	52.000.,18	54.496,20	53.124,89	54.816,80	57.185,98	59.838,20
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	51,73	52,11	52,82	51,49	51,20	51,15
Rata-Rata konsumsi perkapita:						
ADHB (miliar Rp.)	18.187,12	19.787,85	22.165,56	22.166,56	24.690,27	26.360,87
ADHK (Miliar Rp.)	14.081,91	14.772,35	16.424,63	16.424,63	17.216,13	17.795,43
Pertumbuhan						
a. Total Konsumsi Rumahtangga	5,25	4,80	-2,52	3,18	4,32	4,64
b. Perkapita	2,17	4,90	11,18	1,76	3,00	3,36
Jumlah Penduduk	3.692.693	3.689.068	3.234.465	3.279.714	3.321.652	3.362.605

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2024.

## 2. Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDRB (indikator keterbukaan ekonomi)

Transaksi ekspor barang didefinisikan sebagai transaksi perpindahan kepemilikan ekonomi (baik berupa penjualan, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dari residen suatu wilayah Provinsi terhadap pelaku ekonomi luar negeri (non-resident). Sebaliknya, impor barang didefinisikan sebagai transaksi perpindahan kepemilikan ekonomi (mencakup pembelian, barter hadiah ataupun hibah) atas barang dari pelaku ekonomi luar negeri (non-resident) terhadap resident suatu wilayah.

Gambar 2.113  
Rasio Ekspor + Impor terhadap PDRB



Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2024 (diolah)

#### 2.1.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

##### 1. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

Tabel 2.45  
Rasio Panjang Jalan (Km) per Jumlah Kendaraan (Unit) di Kabupaten  
Tangerang Tahun 2020-2023

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023
1	Jalan Nasional	27.70	27.7	27.7	35.44
2	Jalan Provinsi	108.30	108.3	108.3	110.13
3	Jalan Kabupaten	992.61	992.61	992.61	992.61
	Total Panjang Jalan	1,128.61	1,128.61	1,128.61	1.138.18
4	Jumlah Kendaraan	1.496.366	1.447.189	1.445.061	1.583.175
5	Rasio	0.000754 234	0.000779 864	0.000781 012	0.000718 9

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2023

Dari 1.238,18 Km panjang jalan pada 2023, terdiri dari jalan negara/nasional 35,44 km, jalan provinsi 110.13 km, dan jalan kabupaten 992,61 km. Asumsi lebar jalan nasional (biasanya dua jalur enam lajur) 12 meter, lebar jalan provinsi (dua jalur dua lajur) 6 meter, dan lebar jalan kabupaten (dua jalur dua lajur) adalah 3 meter.

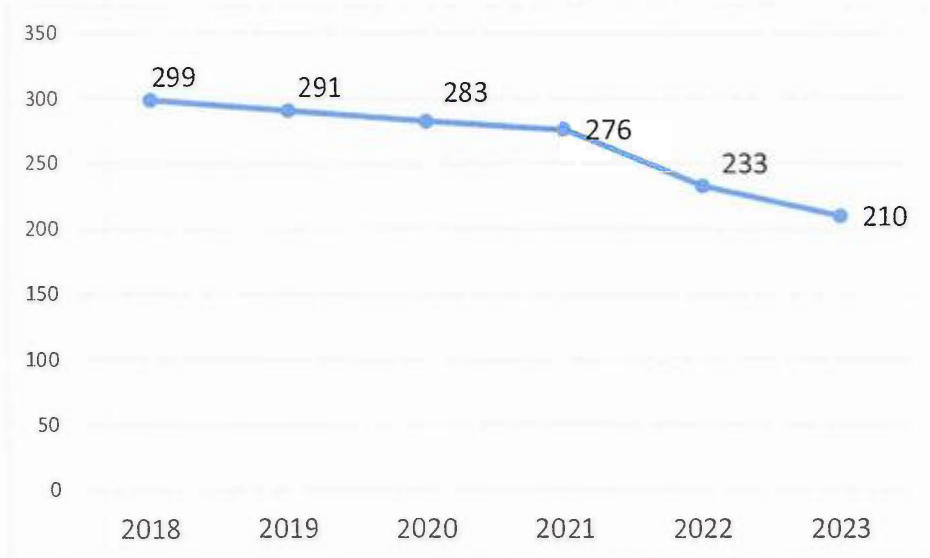
Dengan demikian, kapasitas jalan (M2) di Kabupaten Tangerang terdiri dari 332.400 meter persegi jalan nasional, 649.800 meter persegi jalan provinsi, dan 2.977.830 meter persegi jalan kabupaten. Total kapasitasnya adalah 3.960.030 meter persegi atau 3,96 kilometer persegi.

##### 2. Jenis dan jumlah bank dan cabang

Jumlah bank yang ada di Kabupaten Tangerang sampai tahun 2022 adalah sebanyak 233 unit bank umum. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.114

Jumlah Bank Umum di Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2022



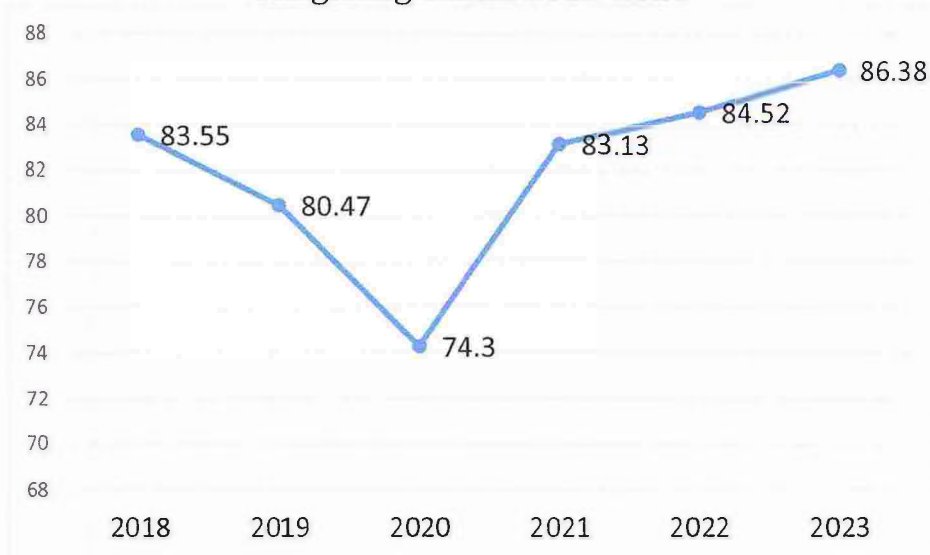
Sumber : BPS Provinsi Banten, tahun 2024 (diolah)

3. Persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih

Air bersih adalah air yang bersumber dari ledeng, air kemasan, pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung yang jarak ke tempat pembuangan limbah (tangki septik) >10 m. Persentase rumah tangga dengan akses air minum bersih pada tahun 2023 sekitar 86,38 persen dengan kondisi pada tahun 2020-2021 mengalami peningkatan, dengan adanya program pembangunan sarana air bersih (SAB) di Kabupaten Tangerang akses terhadap pemanfaatan air minum bersih oleh masyarakat diharapkan menggunakan air bersih sebagai sumber kehidupan rumah tangganya. Untuk lebih jelasnya lihat gambar.

Gambar 2.115

Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Bersih di Kabupaten Tangerang tahun 2018-2023



Sumber : BPS Provinsi Banten, tahun 2023 (diolah)

4. Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon.

Tolok ukur pembangunan yang sejahtera menurut BPS adalah penggunaan telepon atau telepon genggam oleh masyarakat. BPS Provinsi Banten meriilis data Persentase penggunaan HP/telepon khususnya di Kabupaten Tangerang tahun 2022 untuk jenis kelamin laki-laki sekitar 82,63 persen lebih besar dibandingkan perempuan yang sekitar 73,35 persen, rata-rata kepemilikan telepon/HP di Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 sebesar 78,08 persen cenderung menurun dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 79,46 persen.

Tabel 2.46

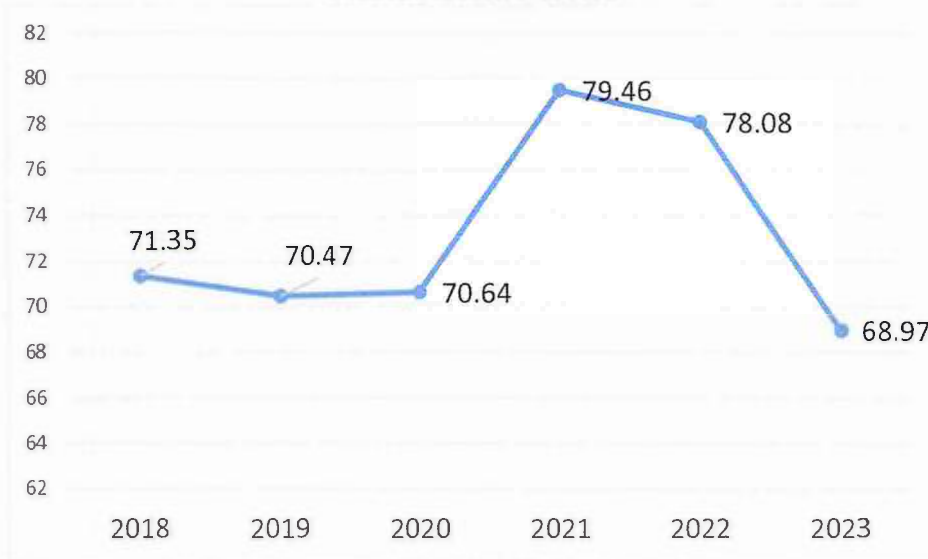
Persentase Penduduk yang menggunakan HP/Telepon di Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2023

No.	Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Rata-Rata
1	2018	76.51	65.95	71.35
2	2019	76.31	98.2	70.47
3	2020	77.27	63.67	70.64
4	2021	84.68	73.99	79.46
5	2022	82.63	73.35	78.08
6	2023	75.05	62,67	68,97

Sumber : BPS Provinsi Banten, 2023

Gambar 2.116

Persentase Penduduk yang menggunakan HP/Telepon di Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2023



Sumber: BPS Provinsi Banten, 2023. Diolah.

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

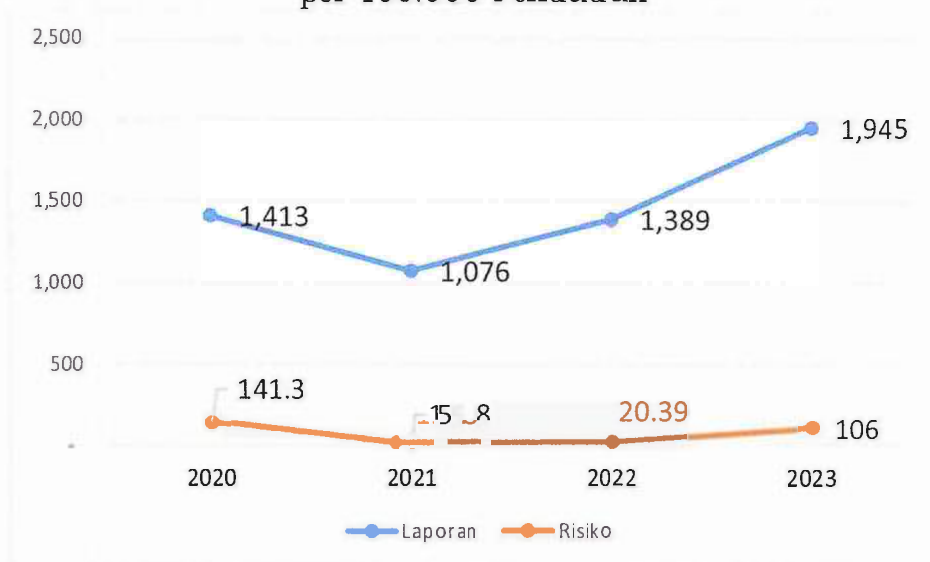
1. Angka Kriminalitas

Peningkatan investasi yang berdampak kepada naiknya pertumbuhan ekonomi suatu daerah tergantung situasi politik, hukum, ketentraman dan ketertiban umum suatu daerah, karena itu salah satu indikator kesejahteraan sosial suatu daerah salah satunya adalah menurunnya tingkat kriminalitas di suatu daerah. Sesuai data BPS Provinsi Banten tahun 2023, sepanjang tahun 2022 telah terjadi laporan kejahatan diwilayah kewenangan Polda Banten sebanyak 1.389 laporan, cenderung naik dari tahun 2021 yang sebesar 1.076

laporan. Seiring banyaknya laporan kejahatan yang dilaporkan diwilayah Polda Banten, tingkat risiko yang Penduduk pun cenderung berisiko mengalami tindak kejahatan. Dari data tahun 2022 risiko Penduduk per 100.000 penduduk angkanya mencapai 20,39, tahun 2021 sekitar 15,80, sedangkan tahun 2020 mencapai 141,30, perbedaan angka disebabkan jumlah Penduduk tahun 2020 yang menggunakan metode sensus yang berbeda, sehingga berdampak kepada nilai 100.000 penduduk dari jumlah Penduduk tahun 2020. Risiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk tahun 2023 mencapai 106.

Gambar 2.117

Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan dan Risiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk



Sumber: BPS Provinsi Banten, 2023, diolah.

## 2. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak daerah yang paling besar di Kabupaten Tangerang berasal dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sedangkan Retribusi daerah bersumber dari Persetujuan Bangunan Gedung/PBG yang dulu dikenal dengan IMB, dan Retribusi Parkir.

Tabel 2.47

Jenis dan Jumlah Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Tangerang

No.	Jenis dan Jumlah
	Pajak
1	Pajak Hotel
2	Pajak Motel
3	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
4	Pajak Restoran dan Sejenisnya
5	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
6	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
7	Pajak Kantin dan Sejenisnya
8	Pajak Jasa Boga/ Katering dan Sejenisnya
9	Pajak Tontonan Film
10	Pajak Pagelaran Kesenian / Musik / Tari / Busana
11	Pajak Pameran
12	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya
13	Pajak Sirkus / Akrobat / Sulap

No.	Jenis dan Jumlah
14	Pajak Permainan Biliar dan Bowling
15	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan
16	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap / Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center )
17	Pajak Pertandingan Olahraga
18	Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron / Megatron
19	Pajak Reklame Kain
20	Pajak Reklame Berjalan
21	Pajak Reklame Udara
22	Pajak Reklame Film / Slide
23	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri
24	Pajak Parkir
25	Pajak Air Tanah
26	BPHTB-Pemindahan Hak
	Retribusi
1	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan
2	Retribusi Pelayanan Penguburan / Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran / Pengabuan Mayat
3	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
5	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan / atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran
6	Retribusi Penyediaan Peta Foto
7	Retribusi Penyediaan Peta Teknis (Struktur)
8	Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus
9	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya
10	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
11	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan
12	Retribusi Pemakaian Laboratorium
13	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan
14	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
15	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
16	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)

Sumber : Bapenda Kab Tangerang, 2023.

#### 2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

##### 1. Kualitas tenaga kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)

Kualifikasi lulusan angkatan Kerja di Kabupaten Tangerang menggambarkan besaran jumlah serapan tenaga Kerja dengan kualifikasi Pendidikan tertentu. Data BPS Provinsi Banten menampilkan bahwa jumlah angkatan Kerja yang ada di kabupaten Tangerang didominasi oleh lulusan SMTA sebanyak 753.317 orang, kedua didominasi oleh lulusan SD sebanyak 365.255 orang, sedangkan lulusan Diploma sampai Sarjana sebanyak 23.041 orang, sehingga rasio lulusan S1-S3 terhadap angkatan Kerja (AK) sebesar 0,123. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 2.48.

Tabel 2.48  
Jumlah Lulusan Angkatan Kerja di Kabupaten Tangerang  
Tahun 2023

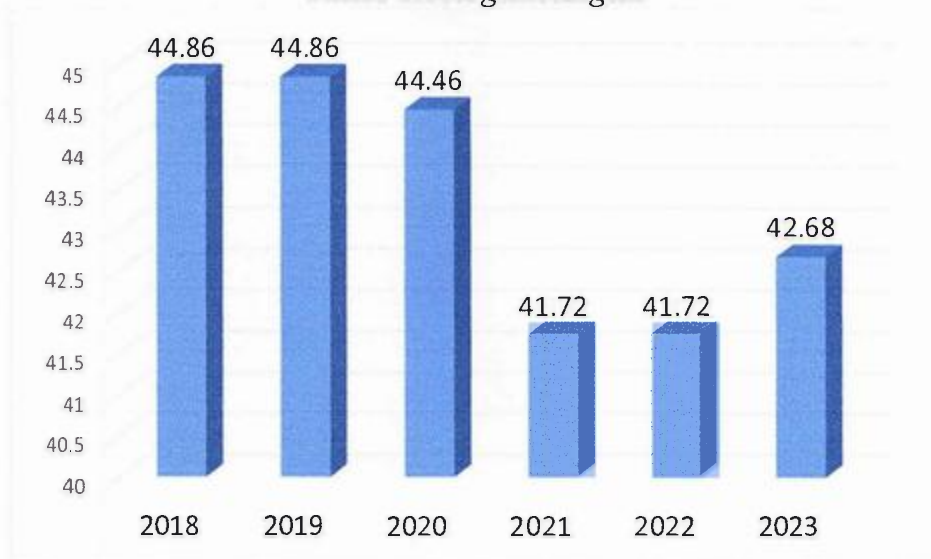
No.	Ijasah	Jumlah
1	Tidak punya ijasah	95.161
2	SD	341.055
3	SMP	311.030
4	SMA	768.371
5	Diploma/Universitas	175.400
	Total	1.691.017

Sumber : BPS Provinsi Banten, 2023, diolah.

### 2. Rasio ketergantungan (Dependency Ratio)

Rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan (depercency ratio) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk di bawah 15 tahun dan penduduk diatas 65 tahun) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15–64 tahun)

Gambar 2.118  
Rasio Ketergantungan



Sumber : BPS. 2023 (diolah)

Rasio ketergantungan dapat dilihat menurut usia yakni Rasio Ketergantungan Muda dan Rasio Ketergantungan Tua. Secara Keseluruhan Kabupaten Tangerang memiliki rasio ketergantungan di tahun 2023 sebesar 42,67% yang dapat diartikan setiap 100 penduduk Kabupaten Tangerang yang produktif memiliki tanggungan 42 orang penduduk yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

### 3. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan komitmen global dan nasional dalam pembangunan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup serta menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs mencakup 17 tujuan, yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5)

Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Upaya pencapaian target TPB menjadi prioritas pembangunan nasional, yang berkolaborasi dengan kebijakan perencanaan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Adapun capaian TPB di Kabupaten Tangerang pada tahun 2023, adalah sebagai berikut.

Tabel 2.49  
Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Tangerang  
Tahun 2023

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah Indikator	Tercapai	Akan Tercapai	Tidak Ada Target	Tidak Ada Data
1	Tanpa Kemiskinan	33	4	19	7	3
2	Tanpa Kelaparan	13	2	7	2	2
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	14	6	0	8	0
4	Pendidikan Berkualitas	10	9	0	1	0
5	Kesetaraan Gender	7	6	1		0
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	5	2	2	1	0
7	Energi Bersih dan Terjangkau	1	0	0	1	0
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	20	9	3	8	0
9	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	10	7	0	1	2
10	Berkurangnya Kesenjangan	5	1	2	2	0
11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	4	2	1	1	0
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	6	4	2		0
13	Penanganan Perubahan Iklim	2	0	0	2	0

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah Indikator	Tercapai	Akan Tercapai	Tidak Ada Target	Tidak Ada Data
14	Ekosistem Lautan	4	3	1		0
15	Ekosistem Daratan	2		1	1	0
16	Perdamaian, Keadilan, Kelembagaan yang Tangguh	3	1	1	1	0
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	3	3	0	0	0
	Total	142	59	40	36	7

Sumber : Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's) Tahun 2023

Mengacu tabel di atas, 142 indikator TPB RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 telah mencapai predikat Tercapai sebanyak 59 indikator atau sekitar 41,55%, dan Akan Tercapai sebanyak 40 indikator TPB atau sekitar 67,80%. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam mendukung pencapaian TPB melalui program pembangunan dan kegiatan prioritas utamanya di bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Ekonomi. Sebanyak 73 program Pemerintah Kabupaten Tangerang mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaksanaan TPB.

## 2.2. Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang.

### 2.2.1. Evaluasi Terhadap RPJMD Tahun 2019-2023

Indikator Makro dalam RPJMD Tahun 2019-2023 Kabupaten Tangerang menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam jangka menengah. Indikator makro pembangunan yang dimaksud meliputi Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Gini. Indikator tersebut merupakan indikator yang bersifat dampak (Impact) dari pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat lokal, regional dan nasional sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta pelaku pembangunan lainnya.

Tabel 2.49  
Capaian Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Tangerang  
Tahun 2019-2023

No.	Uraian Indikator Makro	Satuan	Capaian				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	LPE	Persen	5,45	-3,75	4,63	5,47	5,18
2	Inflasi	Persen	3,31	1,17	1,79	4,56	3,17
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,91	13,06	9,06	7,88	6,94
4	Kemiskinan	Persen	5,14	6,23	7,12	6,92	6,93
5	IPM	Nilai	71,93	71,92	72,92	72,97	75,56

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang yang menurun di tahun 2023 di sebabkan Ada dua (2) sub sektor PDRB yang mengalami penurunan dari tahun 2022 di tahun 2023 yaitu meliputi sektor Pengadaan Listrik dan Gas, dan Jasa Keuangan dan Asuransi, kondisi iklim investasi dan menurunnya pengangguran di Kabupaten Tangerang, sektor industri pengolahan tetap menjadi pilihan bagi investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Tangerang, dengan tumbuh positif ekonomi sektor industri pengolahan akan menyerap banyak tenaga kerja di Kabupaten Tangerang. Apabila dibandingkan dengan Provinsi Banten dan nasional, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang tahun 2016-2023, nilainya berkisar di atas angka 5,00% dan relatif masih berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten dan nasional dari tahun 2016-2023. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang mulai pulih dengan ditunjukkan dengan mulai tumbuh positif, pada tahun 2021-2022 Laju Pertumbuhan Ekonomi meningkat di angka 4,70% di tahun 2021, dan meningkat di tahun 2022 diangka 5,47%, dan tahun 2023 sebesar 5,18 persen.

Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat.

Berdasarkan pemantauan Badan Pusat Statistik terhadap 416 jenis barang dan jasa serta hasil Survei Biaya Hidup (SBH) di Kota Serang, Tangerang dan Cilegon baik secara mingguan, dua mingguan maupun bulanan.

Kota Tangerang mengalami inflasi year on year (yoy) kedua tertinggi diantara 3 kota IHK di Provinsi Banten, sebesar 3,17 persen. Komoditas yang memberikan andil inflasi di Kota Tangerang adalah cabai merah sebesar 0,51 persen, beras sebesar 0,42 persen, sewa rumah sebesar 0,29 persen, emas perhiasan sebesar 0,20 persen, angkutan antar kota dan daging ayam ras masing-masing sebesar 0,15 persen, upah asisten rumah tangga sebesar 0,13 persen, bawang putih sebesar 0,11 persen, rokok kretek filter sebesar 0,10 persen, dan rokok putih sebesar 0,07 persen.

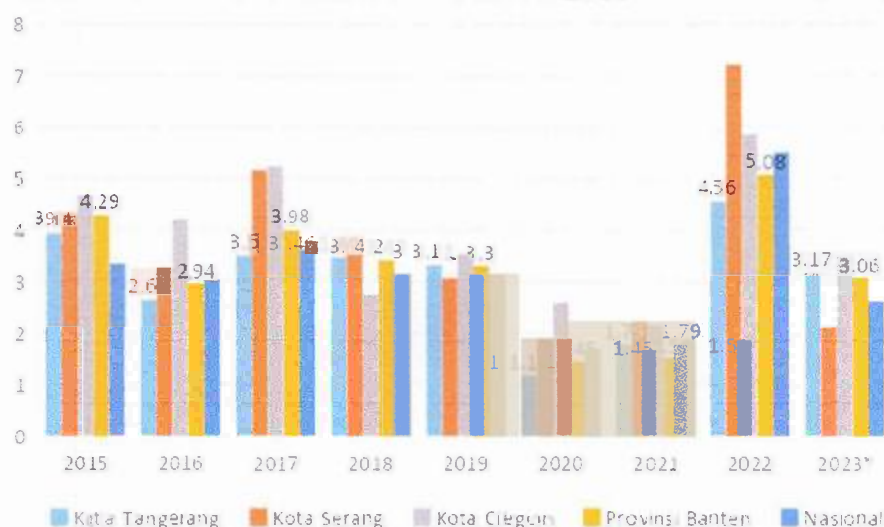
Sementara komoditas yang memberikan andil deflasi, yaitu telur ayam ras sebesar 0,07 persen, bensin sebesar 0,04 persen, sepatu anak, pepaya, dan udang basah masing-masing sebesar 0,03 persen.

Tabel 2.50  
Perkembangan Inflasi di Kota Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon, Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2016-2023 (yoy)

inflasi YoY (%)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Tangerang	2,65	3,50	3,46	3,31	1,17	1,81	4,56	3,17
Kota Serang	3,26	5,17	3,78	3,06	1,89	2,23	7,22	2,11
Kota Cilegon	4,22	5,24	2,73	3,54	2,59	2,19	5,86	3,50
Provinsi Banten	2,94	3,98	3,42	3,30	1,45	1,51	5,08	3,06
Nasional	3,02	3,61	3,13	3,13	1,68	1,87	5,51	2,61

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Tabel 2.51  
Perkembangan Inflasi di Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2016-2023 (yoy)



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023, Ket. \* Desember 2023

Perkembangan tingkat inflasi Tangerang, Kota Serang, dan Kota Cilegon dari tahun 2015-2023 relatif berfluktuasi. Inflasi Kabupaten Tangerang sampai saat ini masih mengacu pada Inflasi Kota Tangerang, hal tersebut karena Kabupaten Tangerang belum dipilih oleh BPS RI sebagai acuan penghitungan inflasi pada kota-kota di Indonesia. Pada periode tahun 2015-2023. Nilai inflasi Kota Tangerang adalah pada tahun 2023, yaitu sebesar 3,17%, sementara nilai inflasi pada tahun 2020 adalah yang terendah, yaitu sebesar 1,17%.

Sedangkan apabila dibandingkan dengan dengan nilai inflasi Provinsi Banten, nilai inflasi di Kota Tangerang pada tahun 2019 adalah sebesar 3,31% sama jika dibandingkan Provinsi Banten yang juga sebesar 3,30%, memasuki tahun 2023 inflasi kota Tangerang turun menjadi mencapai nilai 3,17% yang nilainya lebih tinggi dari inflasi Kota Cilegon sebesar 3,50%. Sementara itu, jika dibandingkan dengan tingkat inflasi nasional pada tahun 2019-2023, inflasi Kota Tangerang pada tahun 2019 mencatat nilai yang lebih tinggi yaitu 3,30% dibandingkan inflasi Nasional sebesar 2,72% dan tahun 2022 inflasi Kota Tangerang sebesar 4,56% tercatat lebih rendah daripada inflasi nasional tahun 2022 sebesar 5,51%.

Berdasarkan data yang telah dirilis oleh BPS, indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Tangerang tahun 2021 sekitar 1,21 dan tahun 2023 naik di angka 1,31. Sedangkan pada tahun 2021 indeks keparahan kemiskinan (P2) mencapai 0,29 dan tahun 2023 mencapai 0,39. Sementara itu, persentase penduduk miskin Kabupaten Tangerang tahun 2021 sekitar 7,12% atau sebanyak 272.350 orang, tahun 2022 turun menjadi 270.520 orang atau sekitar 6,92 persen, tahun 2023 jumlah penduduk miskin menjadi 276.330. Persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan pada tahun 2022 senilai Rp 576.122,-/kapita/bulan, sedangkan pada tahun 2023 sekitar 604,362 ,-/kapita/bulan.

Selain itu, persentase penduduk miskin Kabupaten Tangerang berfluktuasi nilainya, pada tahun 2018 mengalami penurunan mencapai nilai sebesar 5,18% kemudian persentase penduduk miskin tahun 2019 kembali menurun hingga mencapai 5,14%, tetapi kembali meningkat di tahun 2020-2021 hingga mencapai 6,23 - 7,12%, dan sampai Maret 2022 kembali turun diangka 6,92%, Upaya Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam mengentaskan kemiskinan dengan menjalankan beberapa program yang berasal dari pemerintah pusat, antara lain seperti program keluarga harapan (PKH) dan bantuan non tunai. Selain itu, juga untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di tahun 2023 dengan melakukan tiga strategi intervensi antara lain: mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, TPT mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran, angka TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan bagian dari angkatan kerja, menurut BPS Angkatan kerja adalah usia penduduk diatas 15 tahun, penduduk dengan usia kerja (15 tahun keatas) terbagi kedalam dua kelompok yaitu kelompok angkatan kerja dan kelompok bukan Angkatan kerja, Angkatan kerja meliputi penduduk yang aktif bekerja, dan penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau pengangguran. Kelompok bukan Angkatan terdiri atas mereka yang masih bersekolah, ibu rumah tangga, pensiunan dan lain-lain.

Tingkat Pengangguran Terbuka bersumber dari Survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2023, merupakan gambaran kondisi ketenagakerjaan periode Februari 2023, dan Agustus 2023.

Capaian angka IPM Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan ditahun 2022 sebesar 73,43 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021-2022 yang sekitar 72,29, dan 72,97. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bersumber dari indeks komposit IPM yang dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak . Pengetahuan diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, Standar hidup layak digambarkan oleh Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PKP), yang nilainya ditentukan dari pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (purchasing power parity), dan Umur panjang dan hidup sehat ini digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH). Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tangerang tahun 2023 sebesar 8,93 tahun, dengan harapan lama sekolah (HLS) tahun 2023 selama 12,87 tahun, dengan angka harapan hidup (AHH) selama 70,65 tahun.

Tabel 2.52  
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di Kabupaten Tangerang  
Tahun 2023

No	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase penanganan kasus ketentraman dan ketertiban	Persen	100	100	100
2	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	70,21	75,18	107,08
3	Prevalensi stunting	Tahun	14	26,4	53
4	Cakupan Jaminan Kesehatan (UHC)	Persen	88	115	130,68
5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persen	62,11	63,35	102
6	Rata-Rata Lama Sekolah (Dalam Tahun) (RLS)	Persen	8,49	8,93	105,18
7	Laju Pertumbuhan ekonomi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen	5,56	5,56	100
8	Penambahan Kunjungan wisatawan	persen	6	6	100
9	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	Persen	51,12	6,12	119,53
10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Indeks	70	80	114,29
11	Persentase koperasi aktif	Persen	60	60	100
12	Jumlah Industri kecil dan Menengah di Kabupaten	Jumlah	17366	17366	100
13	Nilai AKIP	Nilai	72,61	72,16	99,38
14	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	89	90	101,12
15	Survey Eksternal Persepsi Korupsi/Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	Skala	71.01	71.01	100
16	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3.25	3.25	100
17	Persentase infrastruktur wilayah dalam kondisi baik	Persen	95	95	100
18	Presentase Sumber Air Minum Rumah Tangga	Persen	60	60	100
19	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap	Indeks	82	82	100

No	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Layanan Sanitasi Layak				
20	IKA (Indeks Kualitas Air)	Indeks	57,5	60,21	104.71
21	Persentase timbulan sampah yang ditangani	Persen	26,13	57,53	220.17
22	Indeks Risiko Bencana	Indeks	125	125	100
23	Persentase inovasi yang diimplementasikan	Persentase	81	80	98.77

Sebagaimana terlihat di atas, pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 adalah sebagai berikut dari 23 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan yaitu :

- a) 9 (sembilan) Indikator melampaui/melebihi target
- b) 13 (tiga belas) Indikator mencapai target
- c) 1 (satu) Indikator yang tidak mencapai target

Laporan ini dibuat sebagaimana mestinya sebagai wujud pertanggungjawaban Kinerja Pemerintah Kabupaten Tangerang kepada publik selama satu tahun periode sekaligus menjadi bahan evaluasi perbaikan kinerja kedepannya dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi publik. Kami senantiasa menerima masukan konstruktif demi meningkatkan kualitas kinerja Pemerintah Kabupaten Tangerang di masa mendatang.

#### 2.2.2. Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan

Pencapaian target program yang telah tertuang dalam RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2023 telah dievaluasi sampai dengan tahun 2023 yang merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023. Secara umum target yang telah ditentukan telah tercapai, dan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.53  
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023

1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x100%		8=4+6		9 = 8/3 x100%		10	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kabupaten/kota Tahun (Akhir Periode RPJMD)	RPJMD pada 2023	Realisasi Kinerja Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota Lalu (n-2) 2022	Capaian RPJMD sampai dengan RPJMD Tahun	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN																	Urusan
1.01 URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN																	Urusan Bidang
PROGRAM PENGELAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	94.50	2,055,467,724,148	99.17	1,757,056,359,293	94.5	417,285,519,760	99.11	450,735,659,170	105	108%	99.11	2,207,792,018,463	105	107%	Dinas Pendidikan	



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota Lalu (n-2) 2022		Capaian RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPDP Kabupaten/kota Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPDP Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDP Kabupaten/kota Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPDP tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3		4		5		6		7 = 6 / 5 x100%		8 = 4+6		9 = 8 / 3 x100%		10		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	2,152,714,928,843	100	1,837,646,369,691	100	524,937,225,287	100	646,872,297,095	100	123%	100	2,484,518,666,786	100	135			Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100		100		100		100		100		100		100				Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Cakupan Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan	100		100		100		100		100		100		100				Dinas Kesehatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota Lalu (n-2) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		3		4		5		6		7 = 6 / 5 x100%		8 = 4 + 6		9 = 8 / 3 x100%			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
AN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan Sesuai Standar																
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100		100		100		100		100		100		100			Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Cakupan Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100		99		100		100		100		100		100			Dinas Kesehatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota Lalu (n-2) 2022		Capaian RPJMD sampai dengan RKPDP Kabupaten/kota Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPDP Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDP Kabupaten/kota Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPDP tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3		4		5		6		7 = 6 / 5 x100%		8 = 4+6		9 = 8 / 3 x100%		10		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
MASYARAKAT																		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100		98		100		100		100		100	100	-	100			Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100		99		100		100		100		100	100	-	100			Dinas Kesehatan

1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x100%		8 = 4+6		9 = 8/3 x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100		100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Cakupan Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100		100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Cakupan Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100		100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota Lalu (n-2) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDP Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDP Kabupaten/kota Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPDP tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3		4		5		6		7 = 6/5 x100%		8=4+6		9 = 8 / 3 x100%		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Sesuai Standar															
	Cakupan orang terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100		100		100		100		100		100	-	100		Dinas Kesehatan
	Cakupan Orang Beresiko terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100		100		100		100		100		100	-	100		Dinas Kesehatan
	Persentase Balita Stunting	100		97		20		13.5		13.5		13.5	-	13.5		Dinas Kesehatan
	Respon Time Kejadian Luar Biasa (KLB) < 24 jam	20		100		100		100		100		100	-	100		Dinas Kesehatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota Lalu (n-2) 2022		Capaian RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan Kabupaten/kota Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKP Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKP Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Kabupaten/kota Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x100%		8 = 4+6		9 = 8 / 3 x100%		10		
	Persentase Akses Sanitasi yang Layak	100		100		84		110.83		110.83		110.83	-	110.83				Dinas Kesehatan
	Persentase Masyarakat Memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	84		84.7		84		121.29		121.29		121.29	-	121.29				Dinas Kesehatan
	Persentase penerapan Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi dengan FKTP dan FKTL	84		100		100		100		100		100	-	100				Dinas Kesehatan
	Persentase Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas	100		100		100		100		100		100	-	100				Dinas Kesehatan
	Persentase Fasilitas Kesehatan pemerintah yang	100		100		70		100		100		100	-	100				Dinas Kesehatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota Lalu (n-2) 2022		Capaian RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan Kabupaten/kota Tahun (n-2) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKP Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKP Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Kabupaten/kota Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3		4		5		6		7 = 6/5 x100%		8 =4+6		9 = 8/3 x100%		10		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terakreditasi minimal utama di Kabupaten/ Kota																	
	Capaian Bed Occupancy Ratio (BOR) Rumah Sakit Pemerintah	70		31.9		80		83.9		83.9		83.9	-	120				Dinas Kesehatan
	Persentase RS Kelas C, D dan Fasilitas Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan sesuai izin operasional dalam kurun waktu satu tahun	80		59.73		100		100		100		100	-	100				Dinas Kesehatan
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	100		78.35		80		85.02		85.02		85.02	-	85.02				Dinas Kesehatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDP Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDP Kabupaten/kota Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPDP tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3		4		5		6		7 = 6/5 x100%		8 =4+6		9 = 8/3 x100%		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Persentase pelayanan rujukan melalui Call Center PSC 119	80		78		85		142.59		142.59		142.59	-	142.59		Dinas Kesehatan
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya</b>	100	37,722,093,800	100	8,071,684,632	100	2,102,972,600	100	2,847,387,562	100	135%	100	10,919,072,194	100	29%	Dinas Kesehatan
	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	100		100		100		100		100		100	-	100	29%	Dinas Kesehatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2) 2022		Capaian RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan Kabupaten/kota Tahun 2023 (Tahun Berjalan 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Kabupaten/kota Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3		4		5		6		7 = 6 / 5 x100%		8 =4+6		9 = 8 / 3 x100%		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	Persentase P-IRT yang sesuai standar	84	2,749,025,150	82	624,897,500	84	294,079,500	84	830,733,642	100	282%	84	1,455,631,142	100	53%	Dinas Kesehatan
	Persentase sarana kefarmasian yang sesuai standar	84		82		84		84		100		84	-	100	53%	Dinas Kesehatan
	Persentase TPM yang memenuhi syarat berdasarkan Inspeksi Kesehatan Lingkungan	84		82		84		89.4		106		89.4	-	100	53%	Dinas Kesehatan
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG</b>	Persentase Organisasi Kemitraan Bidang Kesehatan	65	17,955,004,200	65	21,733,304,900	65	4,064,480,000	100	9,351,263,422	154	230%	65	31,084,568,322	100	173%	Dinas Kesehatan

1	2	3		4		5		6		7 = 6 / 5 x100%		8=4+6		9 = 8 / 3 x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
<b>KESEHATAN</b>																
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Rumah Tangga	70		81		70		81		116	230%	81	-	116	173%	Dinas Kesehatan
	Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan institusi pendidikan	85		84		85		85		100	230%	85	-	100	173%	Dinas Kesehatan
	Persentase Posyandu yang berada pada Strata Purnama Mandiri	100		52		100		100		100	230%	100	-	100	173%	Dinas Kesehatan
<b>1.03 URUSAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PEKERJAAN UMUM</b>																<b>Urusan Bidang</b>

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota Lalu (n-2) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPDP Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDP Kabupaten/kota Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPDP tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		3		4		5		6		7 = 6/5 x100%		8=4+6		9 = 8/3 x100%			10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
DAN PENATAAN RUANG																	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Prosentase infrastruktur saluran pembuang terbangun	100%	412,727,941,868	93.56%	473,165,242,219	100%	107,794,421,003	160%	137,244,455,566	160%	127%	160%	610,409,697,785	160%	148%		DBMSDA
	Presentase Dacrah Irigasi LP2B terbangun	100%		100%		100%	-	100%		100%			-		100%		DBMSDA
	Peningkatan fitur sistem aplikasi sumberdaya air yang terintegrasi	100%		90%		100%		100%		100%					100%		DBMSDA
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDI	Cakupan Sarana Air bersih	46%	136,181,243,250	48.78%	143,055,197,100	46%	30,560,000,000	49%	57,277,042,148	107%	187%	49%	200,332,239,248	106.5	147%		Dinas Perumahan, Perumahan dan Pemukiman

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2) 2022		Capaian RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan Kabupaten/kota Tahun 2023 (Tahun Berjalan 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Kabupaten/kota Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3		4		5		6		7 = 6 / 5 x100%		8 = 4 + 6		9 = 8 / 3 x100%		10
<b>AAN AIR MINUM</b>																
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Prosentase Terpenuhinya Pelayanan Pendistribusian Air Bersih Bagi Masyarakat	100%	5,133,836,502	109.44%	6,973,188,407	100%	1,500,000,000	89.88	6,030,274,440	100	402	100	13,003,462,847	100	253%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	<b>Prosentase Pengelolaan Persampahan di TPA</b>	<b>100</b>	<b>24,000,000,000</b>	<b>100</b>	<b>21,264,442,900</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>21,264,442,900</b>	<b>100</b>	<b>89%</b>	<b>DLHK</b>
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN</b>	<b>Persentase meningkatnya sarana sanitasi bagi masyarakat miskin</b>	<b>81.38</b>	<b>19,781,469,688</b>	<b>96.35</b>	<b>42,994,537,688</b>	<b>81.38</b>	<b>5,500,000,000</b>	<b>96.71</b>	<b>24,472,073,000</b>	<b>119</b>	<b>445%</b>	<b>96.71</b>	<b>67,466,610,688</b>	<b>118.8</b>	<b>341%</b>	<b>Dinas Perumahan, Permukiman dan</b>

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2) 2022		Capaian RPJMD sampai dengan RKPDP Kabupaten/kota Tahun		Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPDP Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDP Kabupaten/kota Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPDP tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3		4		5		6		7 = 6/5 x100%		8 =4+6		9 = 8/3 x100%				
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
<b>BANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>																		Pemakaman
	Prosentase kapasitas lumpur tinja	44.45	23,043,383,676	39.46	9,351,554,379	44.45	4,000,000,000	60.76	4,931,841,109	136.77	12.3%	60.76	14,283,395,488	136.7	62%			Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>	Cakupan Layanan Kawasan Permukiman	41.22	192,507,684,976	25.88	224,341,287,565	6.78	36,000,000,000	6.78	75,184,660,567	100	20.9%	32.66	299,525,948,132	79.23	15.6%			Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
	Cakupan TPU yang memenuhi Standar	91.21	26,431,825,000	89.01	22,735,547,052	91.21	6,500,000,000	91.21	8,632,460,000	100.0	13.3%	91.21	31,368,007,052	100%	119%			Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman

1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x100%		8=4+6		9 = 8/3 x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Kinerja Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2) 2022 Capaian RPJMD sampai dengan RKPd Kabupaten/kota Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2023) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Kabupaten/kota Tahun 2023 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd tahun) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%) Peringkat Daerah Penanggung Jawab														
	Persentase sarana dan prasarana tpu yang terpelihara	100%	5,573,399,464	100%	9,077,600,612	100	1,800,000,000	100	1,553,036,524	100.0	86%	100	10,630,637,136	100%	191%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman
<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah yang dipelihara dan dibangun	100%	1,194,501,520,000	90	539,910,397,608	100%	245,390,000,000	100	281,092,532,744	100	115%	100	821,002,930,352	100	69%	<b>DTRB</b>
<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	Jumlah Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang disusun	35%	15,846,750,000	30	5,497,145,800	35	7,376,750,000	35	15,465,525,834	100	210%	35	20,962,671,634	100	132%	<b>DTRB</b>
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	Prosentase Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan	100%	945,025,122,850	114.90%	912,212,996,163	100%	238,062,894,996	193%	552,413,590,679	192.8	232%	153.85%	1,464,626,586,842	153.85	155%	<b>DBMSDA</b>



Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2) 2022		Capaian RPJMD sampai dengan RKPd Kabupaten/kota Tahun Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Kabupaten/kota Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3		4		5		6		7 = 6/5 x100%		8=4+6		9 = 8/3 x100%		10		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	Persentase Pemenuhan Pembinaan Pengelolaan Penyelenggaraan, pendataan dan Perencanaan Perumahan, rumah susun dan Apartemen	100%	5,118,767,500	100%	2,916,903,300	100	1,560,000,000	100	622,937,200	100.00	40%	100	3,539,840,500	100	69%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman		
	Persentase Pemenuhan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	100%	1,668,991,900	100%	1,188,751,154	100	600,000,000	100	300,000,000	100	50%	100	1,488,751,154	100	89%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman		
<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	Persentase Pemenuhan Perencanaan pengembangan kawasan Permukiman	100%	10,611,161,788	90.91%	8,106,491,850	100	2,500,000,000	100	2,430,610,000	100.00	97%	100	10,537,101,850	100	99%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman		



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2) 2022		Capaian RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan Kabupaten/kota Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x100%		8 =4+6		9 = 8/3 x100%		10		
PERLINDUNGAN MASYARAKAT																		
PROGRAM PENINGKATAN KETERTIBAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	100%	31,521,680,000	100%	8,894,420,576	100	6,240,000,000	100	5,241,106,350	100.00	84%	100	14,135,526,926	100	45%	Satpol PP		
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100	24,975,000,000	100%	12,045,171,823	100	5,400,000,000	100	1,910,793,324	100.00	35%	100	13,955,965,147	100	56%	BPBD		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota Lalu (n-2) 2022		Capaian RPJMD sampai RKPd Tahun		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Kabupaten/kota Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3		4		5		6		7 = 6/5 x100%		8 =4+6		9 = 8/3 x100%		10		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Jumlah desa dan kelurahan yang tanggap bencana	274		218		56		56		100		274	-	274				BPBD
	Persentase korban bencana yang mendapat layanan penyelamatan dan evakuasi	100		100%		100		100		100		100	-	100				BPBD
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase penanganan kebakaran dalam kurun waktu respon time 15 menit	90%	145,374,024,500	80	67,857,705,300	90	22,195,000,000	57.78	8,418,072,126	64.2	38%	57.78	76,275,777,426	90	52%			BPBD

1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x100%		8 = 4+6		9 = 8/3 x100%		10	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Kinerja Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2) 2022 Capaian RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKP Kabupaten/kota Tahun Target Kinerja dan Anggaran RKP Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RKP Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2023) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Kabupaten/kota Tahun 2023 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP tahun) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%) Peringkat Daerah Penanggung Jawab															
1.06	URUSAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG SOSIAL																Urusan Bidang
PROGRA M	Presentase PSKS yang dibina	67.99%	3,111,147,200	67.99%	2,416,923,700	67.99	605,000,000	100	592,637,454	147.0805	98%	67.99%	3,009,561,154	100%	97%	Dinsos	
PROGRA M	Presentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan	100%	50,000,000	-	0	50	25,000,000	28.57	3,348,150	57.14	13%	29%	3,348,150	29%	7%	Dinsos	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota Lalu (n-2) 2022		Capaian RPJMD Kabupaten/kota sampai RKPd Tahun		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Kabupaten/kota Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023(%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3		4		5		6		7 = 6/5 x100%		8 =4+6		9 = 8/3 x100%		10		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	Prosentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100.00%	14,630,871,083	78.05%	8,195,237,283	25.03	4,407,000,000	26%	2,711,202,262	104%	62%	104.02%	10,906,439,545	104.02%	75%			Dinsos
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	Prosentase terpenuhinya pelayanan jaminan sosial bagi PMKS Yang valid	100%	18,643,698,000	100%	56,179,186,298	100	5,474,700,000	100	20,701,950,122	100%	378%	100	76,881,136,420	100	412%			Dinsos



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota Lalu (n-2) 2022		Capaian RPJMD sampai dengan RKPDP Kabupaten/kota Tahun		Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPDP Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDP Kabupaten/kota Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPDP tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		3		4		5		6		7 = 6/5 x100%		8 = 4+6		9 = 8/3 x100%		10			
AN DASAR																			
2.07 URUSAN PEMERINTAH BIDANG TENAGA KERJA																			Urusan Bidang
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang dilatih	25%	2,072,669,000	36.22%	1,054,630,270	5%	950,000,000	11.58%	1,065,181,030	232%	112%	48%	2,119,811,300	191%	102%				Dinas Tenaga Kerja
	Persentase Lulusan Pelatihan BLK Yang Di Tempatkan	45%	21,372,102,200	43.53%	10,089,588,944	45%	10,920,000,000	47%	7,459,655,331	104%	68%	47%	17,549,244,275	104%	82%				Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM PENEMPATAN	Persentase penempatan tenaga kerja berdasarkan lowongan	93.5%	7,785,018,500	97.71%	5,270,018,500	93.5%	2,515,000,000	99.54%	3,829,099,040.00	106%	152%	99.54%	9,099,117,540	106.46%	117%				Dinas Tenaga Kerja

1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x100%		8 = 4+6		9 = 8/3 x100%		10	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
TENAGA KERJA	kerja terdaftar																
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Besaran kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	26%	8,799,518,000	23.15%	5,549,454,950	26%	3,400,000,000	33.50%	2,023,869,324	129%	60%	33.50%	7,573,324,274	128.85%	86%	Dinas Tenaga Kerja	
2.08 URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBINAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																	Urusan Bidang
PROGRAM PENGARUAN SUTAMAAN GENDER DAN PEMBINAAN	Prosentase Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	100%	9,167,301,600	100	5,812,615,300	100	2,700,000,000	100	1,954,473,886	100	72%	100	7,767,089,186	100	85%	DPPPA	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2) 2022		Capaian RPJMD sampai dengan RKPDP Kabupaten/kota Tahun		Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPDP Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDP Kabupaten/kota Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPDP tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3		4		5		6		7 = 6 / 5 x100%		8 =4+6		9 = 8 / 3 x100%		10		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
DAYAAN PEREMPUAN																		
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Prosentase Perlindungan Terhadap Perempuan	100%	2,638,001,400	100%	1,296,020,100	100	1,050,000,000	100	655,830,892	100	62%	100	1,951,850,992	100	74%			DPPPA
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Kelembagaan PUG yang Aktif	18.48%	1,940,277,700	18.48%	1,346,376,700	18.48	500,000,000	18.48	683,395,590	100	137%	100	2,029,772,290	100	105%			DPPPA
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Profil Gender dan Penyusunan Pedoman Pengumpulan Data Terpilah	100%	471,899,800	100%	371,899,700	100	100,000,000	100	32,784,300	100	33%	100	404,684,000	100	86%			DPPPA
PROGRAM PEMENUHAN HAK	Persentase klaster hak anak	100%	4,397,267,500	100%	2,589,795,990	100	1,675,000,000	100	1,407,912,277	100	84%	100	3,997,708,267	100	91%			DPPPA

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota Lalu (n-2) 2022		Capaian RPJMD sampai dengan RPJMD Tahun		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		3		4		5		6		7 = 6/5 x100%		8=4+6		9 = 8/3 x100%		10			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
ANAK (PHA)																			
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Prosentase Perlindungan Terhadap Anak	100%	2,554,118,100	100%	1,775,896,400	100	770,000,000	100	891,394,128	100	116%	100	2,667,290,528	100	104%				DPPPA
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN													-						Urusan Bidang
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	88%	5,321,536,150	84.40%	5,433,742,075	88%	1,050,000,000	88%	1,097,619,919	100%	105%	88%	6,531,361,994	100	123%				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Persentase Cadangan Pangan	100%		100%		100%		100%		100%	105%	100%	-	100%	123%				Dinas Pertanian dan Ketaha

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota Lalu (n-2) 2022		Capaian RPJMD sampai dengan RKPDP Kabupaten/kota Tahun 2023 (Tahun Berjalan 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPDP Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDP Kabupaten/kota Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPDP tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x100%		8 = 4+6		9 = 8/3 x100%		10	
																	nan Pangan
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Desa Rentan Pangan Yang Tertangani	60	1,634,119,000	47.28	1,075,785,800	12.73	485,000,000	12.73	91,122,500	100.00	19%	60.01	1,166,908,300	100.01	71%		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	88%	469,105,000	84.40%	316,632,700	88%	150,000,000	88%	137,556,342	88	92%	88	454,189,042	88	97%		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																	Urusan Bidang
PROGRAM PENATAAN TANAH	Prosentase Realisasi lahan yang direncanakan pertahun	100%	1,867,123,965,257	94.83%	1,176,563,577,317	100	214,518,850,000	100	239,291,840,770	100	112%	100	1,415,855,418,087	100	76%		Dinas Perumahan, Permukiman dan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota Lalu (n-2) 2022		Capaian RPJMD sampai dengan RKPDP Kabupaten/kota Tahun		Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPDP Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDP Kabupaten/kota Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPDP tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		3		4		5		6		7 = 6/5 x100%		8 =4+6		9 = 8/3 x100%		10			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																			Pemahaman
2.11 URUSAN PEMERINTAH TAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																			Urusan Bidang
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan	63.25	19,250,000,000	55	9,523,230,000	63.25	4,250,000,000	77.75	1,991,538,319	123	47%	67	11,514,768,319	105	60%			DLHK	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN	Persentase Pelaku usaha yang memiliki dokumen lingkungan hidup	0.85	6,650,000,000	0.97	7,537,692,040	0.85	1,900,000,000	0.85	3,312,204,970	100	174%	0.91	10,849,897,010	107	163%			DLHK	

1	2	3		4		5		6		7 = 6 / 5 x100%		8 = 4 + 6		9 = 8 / 3 x100%		10	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		<p>URUSAN/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan</p> <p>Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)</p> <p>Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)</p> <p>Realisasi Kinerja Kabupaten/kota dengan RPJMD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2) 2022</p> <p>Capaian RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun</p> <p>Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi</p> <p>Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2023)</p> <p>Capaian dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 (%)</p> <p>Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)</p> <p>Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)</p> <p>Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)</p> <p>Perangkat Daerah Penanggung Jawab</p>															
GAN HIDUP																	
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKA RAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH	0,30	61,500,000,000	0.26	35,163,531,531	0.30	14,000,000,000	0.28	15,376,848,891	93	110%	0.28	50,540,380,422	108	82%	DLHK	
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAHA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAHA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Prosentase tindak lanjut pengaduan pengelolaan LB3	100	1,150,000,000	99	748,400,000	100	400,000,000	100	289,734,000	100	72%	100	1,038,134,000	100	90%	DLHK	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota Lalu (n-2) 2022		Capaian RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan Kabupaten/kota Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3		4		5		6		7 = 6 / 5 x100%		8 =4+6		9 = 8 / 3 x100%		10		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Jumlah Pelaku usaha yang memiliki dokumen lingkungan hidup	350	1,750,000,000	340	1,182,337,000	350	560,899,162	350	558,372,650	100	100%	350	1,740,709,650	100	99%			DLHK
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN	Terfasilitasinya pembinaan dan pengelolaan lingkungan di Sekolah	90	450,000,000	90	375,808,400	-	-	-	-	90	375,808,400	100	84%			DLHK		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja Kabupaten/kota dengan RPJMD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2) 2022		Capaian RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 (Tahun Berjalan 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		3		4		5		6		7 = 6 / 5 x100%		8 = 4+6		9 = 8 / 3 x100%			10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
HIDUP UNTUK MASYARAKAT																	
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terfasilitasinya pembinaan kampung iklim	20	1,000,000,000	16	378,508,400	6	300,000,000	4	639,460,753	67	213%	20	1,017,969,153	100	102%	DLHK	
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100	1,000,000,000	100	978,240,000	100	250,000,000	100	487,884,145	100	195%	100	1,466,124,145	100	147%	DLHK	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase timbulan sampah terkelola	50	268,350,000,000	45	197,930,143,705	50	58,400,000,000	57.53	71,649,608,556	115	123%	57.53	269,579,752,261	115	100.5%	DLHK	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota Lalu (n-2) 2022		Capaian RPJMD Kabupaten/kota sampai Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x100%		8 =4+6		9 = 8/3 x100%		10		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUKUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																		Urusan Bidang
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Perekaman KTP-el	100%	20,012,098,700	99%	20,364,403,700	100	3,002,888,200	99.87	2,649,575,960.00	99.87	88%	99.87	23,013,979,660	99.87	115%		Disduk capil	
	Cakupan kepemilikan KIA	90%		40%		90		50.73		56.37%		90.73%		100.81%			Disduk capil	
	Persentase penduduk yang memiliki NIK	100%		88%		100		100		100		100		100			Disduk capil	
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran	98%	6,699,593,300	93.07%	6,085,602,600.00	98	1,379,760,000	95.03	1,488,263,770.00	96.97	108%	95.03	7,573,866,370	96.97	113%		Disduk capil	





Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja Kabupaten/kota dengan RPJMD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2) 2022		Capaian RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RPJMD Kabupaten/kota Tahun (n-1) yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKP Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKP Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Kabupaten/kota Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3		4		5		6		7 = 6/5 x100%		8=4+6		9 = 8/3 x100%		10		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
<b>A BERENCANA</b>																		
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	Persentase model solusi strategis pengendalian dampak kependudukan	100%	29,494,169,053	100%	23,292,578,493	100	10,439,347,382	100	1,613,001,776	100	84%	100	24,905,580,269	100	84%			DPPKB
	Presentase desa/kelurahan yang memiliki data dan informasi	100%		100%		100		100		100	84%	100	-	100	84%			DPPKB
																		DPPKB
<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	Presentase PPKBD mandiri	4%	29,494,169,053	4%	23,292,578,493	4%	6,201,590,560	4%	11,676,875,150	100	118%	4%	34,969,453,643	100	118%			DPPKB
	Persentase KB Baru	4%				4%		4%		100	118%	4%		100	118%			DPPKB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota Lalu (n-2) 2022		Capaian RPJMD Kabupaten/kota sampai RPKD Tahun		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Kabupaten/kota Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3		4		5		6		7 = 6 / 5 x100%		8 = 4 + 6		9 = 8 / 3 x100%		10		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																		DPPKB
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>Presentase Kelompok ketahanan yang aktif</b>	83,5%	1,405,375,000	83,5%	15,575,209,894	83,5%	311,775,000	86	14,907,398,775	#VALUE!	4781%	86%	30,482,608,669	#VALUE!	2169%		DPPKB	
<b>2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>																		Urusan Bidang
Program Manajemen Lalu Lintas	Prosentase Penanganan Kemacetan Lalu Lintas	18 Titik																Dinas Perhubungan
Program Keselamatan Lalu Lintas	Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas	335 Angka																Dinas Perhubungan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota Tahun (n-2) 2022		Capaian RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan Kabupaten/kota Tahun		Target Kinerja dan Anggaran RKP Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKP Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Kabupaten/kota Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3		4		5		6		7 = 6 / 5 x100%		8 = 4 + 6		9 = 8 / 3 x100%		10		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Program Pelayanan Angkutan Umum (SITRAM)	Pengembangan Jaringan dalam Trayek dan tidak dalam Trayek	7 Jaringan																Dinas Perhubungan
Program Pencerangan Jalan Umum (PJU)	Prosentase Ketersediaan PJU	10 Persen																Dinas Perhubungan
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>Persentase Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas</b>	<b>80%</b>	<b>41,357,620,000</b>	<b>70%</b>	<b>18,169,249,445</b>	<b>80%</b>	<b>26,900,000,000</b>	<b>80%</b>	<b>3,989,469,282</b>	<b>100</b>	<b>15%</b>	<b>80%</b>	<b>22,158,718,727</b>	<b>100</b>	<b>54%</b>			<b>Dinas Perhubungan</b>
	Persentase Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	81%	193,099,336,000	75%	127,802,514,044	81.25	57,140,000,000	81	70,070,694,628	99.7	12.3%	81%	197,873,208,672	100	102%			Dinas Perhubungan
	Persentase Jaringan Trayek dan Moda Transportasi	96.55%	6,616,000,000	96.55%	2,633,043,836	96.55	1,230,000,000	96.55	1,982,763,853	100.0	16.1%	96.55%	4,615,807,689	100	70%			Dinas Perhubungan

1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x100%		8=4+6		9 = 8/3 x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Persentase Penanganan Titik Kemacetan Lalu Lintas	100%	49,294,282,800	77.78%	29,411,244,935	100	17,727,500,000	100	11,251,524,791	100.0	63%	100%	40,662,769,726	100	82%	Dinas Perhubungan
<b>2.16</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>												-			<b>Urusan Bidang</b>
<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	Prosentase layanan keterbukaan Daftar informasi publik	100%	25,076,070,000	81%	15,594,566,862	100	8,150,000,000	100	8,012,275,421	100	98%	100	23,606,842,283	100	94%	Diskom info
<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	Prosentase penyediaan layanan internet	100.00	216,878,258,250	82	100,133,117,247	100	82,125,000,000	100	51,693,453,046	100	63%	100	151,826,570,293	100	70%	Diskom info

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKP Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKP Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Kabupaten/kota Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x100%		8=4+6		9 = 8/3 x100%		10
	Prosentase penyediaan layanan aplikasi	100.00		81		100		100		100	63 %	100		100	70 %	Diskom info
<b>2.17</b>																<b>Urusan Bidang</b>
<b>URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>																
<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	60	1,422,302,100	60	1,022,302,100	60	400,000,000	65.46	324,413,200	109	81 %	65.46	1,346,715,300	109.1	95 %	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP</b>	Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan penilaian	29,25	1,230,000,000	16.96	414,000,100	29,25	680,000,000	30.63	265,215,800	#VALUE!	39 %	30.63	679,215,900	#VALUE!	55 %	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota Tahun (Akhir Periode RPJMD)		Capaian Kinerja Kabupaten/kota dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3		4		5		6		7 = 6/5 x100%		8 =4+6		9 = 8/3 x100%		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
KOPERASI	dan pemeringkatan.															
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan Peningkatan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi.	13,29	1,915,249,701	17.85	1,430,257,700	13,29	1,000,000,000	15.02	1,238,929,200	#VALUE!	124%	15.02	2,669,186,900	#VALUE!	139%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UM KM)	Prosentase usaha yang terfasilitasi legalitas usaha	7.41	3,802,330,600	8.38	1,013,289,000	7,41	1,330,000,000	21.92	1,232,576,100	#VALUE!	93%	21.92	2,245,865,100	295.8	59%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2) 2022		Capaian RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan Kabupaten/kota Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3		4		5		6		7 = 6/5 x100%		8 =4+6		9 = 8/3 x100%		10		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah Koperasi dan Usaha Mikro yang terfasilitasi Dana Pemerintah melalui UPDB	14536	29,223,145,603	13,912	23,711,728,644	1500	5,350,000,000	3603	5,897,729,301	240	110%	17,515	29,609,457,945	35,030	101%			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																		Urusan Bidang
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase kemudahan berusaha	50	1,700,000,000	54.40	538,590,600	20	650,000,000	40.6	830,286,598	203	128%	95.00	1,368,877,198	190	81%			DPMPT SP
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN	Persentase peningkatan minat investor	100	2,145,000,000	70.68	953,373,500	20	550,000,000	39.22	691,996,662	196	126%	109.90	1,645,370,162	109.9	77%			DPMPT SP

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota Tahun (Akhir Periode RPJMD) 2023		Realisasi Kinerja Kabupaten/kota dengan RKPDP Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPDP Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDP Kabupaten/kota Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPDP tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		3		4		5		6		7 = 6/5 x100%		8 =4+6		9 = 8/3 x100%			10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
AN MODAL																	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	90	3,575,000,000	88.37	1,003,455,800	90	780,000,000	94.75	840,482,631	105	108%	94.75	1,843,938,431	105.3	52%		DPMPT SP
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Skor kepatuhan investor yang melaporkan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)	70	2,160,000,000	86.30	869,025,200	70	800,000,000	82.25	605,815,192	118	76%	84.28	1,474,840,392	120.4	68%		DPMPT SP
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAM	Persentase data perizinan yang diolah dan diinformasikan melalui sistem	70	1,935,000,000	86.15	607,656,000	70	300,000,000	94.23	251,176,092	135	84%	90.19	858,832,092	128.8	44%		DPMPT SP

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2) 2022		Capaian RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RPJMD Tahun (n-1) yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x100%		8=4+6		9 = 8/3 x100%		10			
AN MODAL	pelaporan online																		
2.19 URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																			Urusan Bidang
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda binaan	100	14,121,835,800	73	12,316,515,888	100	5,150,000,000	100	4,107,091,956	100	80%	100	16,423,607,844	100	116%			Disporabudpar	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING	Persentase atlet cabang olahraga binaan	37	22,477,885,200	80	58,075,723,980	37	3,800,000,000	37	33,286,764,400	100	876%	59	91,362,488,380	157	406%			Disporabudpar	



Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota Lalu (n-2) 2022		Capaian RPJMD sampai Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		3		4		5		6		7 = 6 / 5 x100%		8 = 4 + 6		9 = 8 / 3 x100%		10			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
TAHAN BIDANG PERSANDIAN																			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMATAN INFORMASI	Persentase layanan keamanan informasi	45%	6,930,000,000	45%	2,523,186,463	45	1,220,000,000	45	2,548,474,384	100	209%	45	5,071,660,847	100	73%			Diskom info	
2.22 URUSAN PEMERINTAH TAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																			Urusan Bidang
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Event kebudayaan yang dilaksanakan	50	4,419,900,000	40	4,348,185,800	10	850,000,000	10	1,547,222,107	100	182%	50	5,895,407,907	100	136%			Disporabudpar	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota Lalu (n-2) 2022		Capaian RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																		Urusan Bidang
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Perpustakaan	100%	7,354,217,000	100%	6,222,007,000	100	1,760,000,000	100	3,878,108,620	100	220%	100	10,100,115,620	100	137%			DISPERPUSIP
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																		Urusan Bidang
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase penerapan pengelolaan arsip secara baku, pemilahan arsip inaktif dan penyerahan arsip dari	100%	6,077,464,000	100%	5,794,835,300	100	1,930,000,000	100	2,642,063,349	100	137%	100	8,436,898,649	100	139%			DISPERPUSIP

1	2	3		4		5		6		7 = 6 / 5 x100%		8 = 4+6		9 = 8 / 3 x100%		10	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Kinerja Kabupaten/kota sampai dengan RKPDP Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2) 2022 Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPDP Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2023) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDP Kabupaten/kota Tahun 2023 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPDP tahun) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%) Peringkat Daerah Penanggung Jawab															
	SKPD/BUMD/Lembaga ke Disperpusip																
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																Urusan
	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																Urusan Bidang
	PROGRAM PENGELAAAN PERIKANAN TANGKAP	Laju Produksi Perikanan Tangkap	0.50%	7,900,000,000	0.5%	7,267,234,226.000	0.5	1,750,000,000	0.5	4,918,014,479.000	100.00%	281%	0.50%	12,185,248,705	100%	154%	DISKALAN
	PROGRAM PENGELAAAN BUDIDAYA	Produktivitas Perikanan Budidaya	5.4	20,905,230,000	5.1	17,332,356,123.0	5.4	3,850,000,000	5.4	6,188,629,700.0	100	161%	5.4	23,520,985,823	100	113%	DISKALAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota Lalu (n-2) 2022		Capaian RPJMD sampai dengan RKPDP Kabupaten/kota Tahun		Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPDP Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDP Kabupaten/kota Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPDP tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		3		4		5		6		7 = 6/5 x100%		8 =4+6		9 = 8 / 3 x100%		10			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
LAAN PERIKANAN BUDIDAYA																			
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat Konsumsi Ikan	40.45	3,960,000,000	38.42	3,834,989,825.0	40.45	800,000,000	40.68	4,459,622,434.0	100.57%	55.7%	40.68	8,294,612,259	105.88	20.9%			DISKANN	
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																			Urusan Bidang
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase peningkatan daya tarik pariwisata	33	14,000,000,000	10	374,393,900	23	7,000,000,000	18	884,309,392	78.26%	13%	28	1,258,703,292	84.85	9%			Disporabudpar	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2) 2022		Capaian RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan Kabupaten/kota Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKP Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKP Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Kabupaten/kota Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x100%		8 =4+6		9 = 8 / 3 x100%		10		
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dibangun	2	240,000,000	2	226,460,650	-							226,460,650	100	94%	Disporabudpar		
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																Urusan Bidang		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	1%	10,595,061,691	1%	5,259,415,407	1%	2,000,000,000	1%	3,901,100,597	100.00%	19.5%	1%	9,160,516,004	100%	86%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	1%	5,261,510,200	1%	4,665,575,510	1%	800,000,000	1%	888,379,000	100.00%	11.1%	1%	5,553,954,510	100%	10.6%	Dinas Pertanian dan Ketaha		



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota Lalu (n-2) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPDP Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDP Kabupaten/kota Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPDP tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3		4		5		6		7 = 6/5 x100%		8 = 4+6		9 = 8/3 x100%		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	1%	4,754,182,400	1%	3,600,683,800	1%	750,000,000	1%	715,740,158	100.00%	95%	1.0%	4,316,423,958	100%	91%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																Urusan Bidang
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Prosentase Pelaku Usaha Perdagangan dan IKM yang diawasi dalam memenuhi mekanisme dan prosedur ekspor	42.10%	480,445,000	42.1%	396,299,000	42.1	94,845,000	42.1	153,115,730	100	161%	42.1	549,414,730	100	114%	Disperindag
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan	93.10	2,867,525,000	69%	1,119,496,000	24	645,050,000	24	147,209,526	100	23%	93.1	1,266,705,526	100	44%	Disperindag

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPDP Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDP Kabupaten/kota Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPDP tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3		4		5		6		7 = 6/5 x100%		8 = 4+6		9 = 8/3 x100%		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SI PERDAGANGAN																
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Prosentase Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang Bersubsidi yang di Monitor/ di Pantau	156.53	1,526,430,000	120.82%	1,024,955,200	35.71%	283,725,000	35.71	447,340,246	100	158%	156.53%	1,472,295,446	100	96%	Disperindag
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Prosentase Pelaku Usaha yang memenuhi mekanisme dan prosedur ekspor	86.01%	5,881,700,000	69%	4,407,022,406	16.97	1,054,510,000	16.97	525,225,875	100	50%	86.01%	4,932,248,281	100	84%	Disperindag
PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN	Presentase Pelaku Usaha yang melaksanakan Pelayanan	66.76%	6,015,194,980	55.08%	9,151,894,600	11.68	991,229,500	51.5	3,163,039,668	441%	319%	107%	12,314,934,268	160%	205%	Disperindag

1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x100%		8=4+6		9 = 8/3 x100%		10	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Kinerja Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2) 2022 Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPDP Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2023) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDP Kabupaten/kota Tahun 2023 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPDP tahun) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab															
KONSUMEN	Tera/Tera UlangUTTP																
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																	Urusan Bidang
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Presentase Pelaku IKM yang Mendapatkan Pendampingan/Pembinaan dan Pelatihan	75%	1,991,350,000	59%	1,784,817,340	16.03	454,310,000	12.3%	1,500,686,746	769%	33.0%	182%	3,285,504,086	242%	16.5%	Disperindag	
PROGRAM PENGENDALIAN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Prosentase Pelaku Usaha IKM yang memiliki izin/legalitas yang diawasi	113.94%	817,572,500	80%	294,696,600	33.59	150,653,000	41%	300,682,256	123%	20.0%	122%	595,378,856	106.70%	73%	Disperindag	



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja Kabupaten/kota dengan RPJMD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3		4		5		6		7 = 6/5 x100%		8=4+6		9 = 8/3 x100%		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	Jumlah calon transmigran yang terseleksi	5	150,000,000	5	100,181,262	-						5	100,181,262	100	67%	Dinas Tenaga Kerja
<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH</b>																Urusan
4.01 SEKRETARIAT DAERAH																Urusan Bidang
<b>PROGRAM PEMERINTAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	Prosentase Penyelesaian Permasalahan dibidang Kesra	100%	13,962,292,650	100%	109,038,703,244	100	5,046,811,150	100	70,669,934,079	100	1400	100	179,708,637,323	100	1287%	SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PEMERINTAH DAN	Prosentase pemenuhan Administrasi	100%	6,981,146,325	100%	2,208,887,600	100	2,523,405,575	100	1,348,228,144	100	53%	100	3,557,115,744	100	51%	SEKRETARIAT DAERAH

1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x100%		8=4+6		9 = 8/3 x100%		10	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
KESEJAHERAAN RAKYAT	Pemerintahan																
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHERAAN RAKYAT	Prosentase Produk Hukum dan Penanganan Kasus/Perkara yang diselesaikan	100%	6,981,146,325	100%	5,000,098,200	100	2,523,405,575	100	2,458,916,935	100	97%	100	7,459,015,135	100	107%		SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase Rumusan Kebijakan ekonomi yang diimplementasikan	100%	3,182,777,000	100%	1,605,161,500	100	1,200,000,000	100	1,233,250,000	100	103%	100	2,838,411,500	100	89%		SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase Rumusan Kebijakan Pembangunan yang diimplementasikan	100%	2,455,959,000	100%	1,121,121,571	100	1,050,000,000	100	1,071,475,990	100	102%	100	2,192,597,561	100	89%		SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tercapainya Tingkat Kematangan UKPBJ	4	4,305,320,801	4	2,542,453,000	4	1,574,012,891	4	990,560,000	100	63%	4	3,533,013,000	100	82%		SEKRETARIAT DAERAH



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota Lalu (n-2) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPDP Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDP Kabupaten/kota Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPDP tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
PERENCANAAN																	Urusan Bidang
<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase Dokumen Pelaporan dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan</b>	100%	2,429,014,200	100%	2,304,454,200	100%	500,000,000	100%	641,496,583	100	128%	100	2,945,950,783	100	121%	Bappeda	
	Persentase Dokumen Pelaporan Tepat Waktu	100%	7,395,492,845	100%	5,642,930,105	100%	2,000,000,000	100%	2,096,293,220	100	105%	100	7,739,223,325	100	105%	Bappeda	
	Persentase Ketersediaan Data Pembangunan	80%	2,341,704,300	75%	2,003,186,300	80%	300,000,000	80%	249,108,100	100	83%	80	2,252,294,400	80	96%	Bappeda	
<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja dengan OPD sesuai target lingkup Bidang</b>	85	56,760,916,118	85	41,920,488,240	85	9,850,000,000	85	8,766,341,640	100	89%	85	50,686,829,880	85	89%	Bappeda	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota Lalu (n-2) 2022		Capaian RPJMD sampai dengan RKPDP Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPDP Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDP Kabupaten/kota Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPDP tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3		4		5		6		7 = 6/5 x100%		8 =4+6		9 = 8/3 x100%		10		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
<b>NAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Infrastruktur dan Kewilayahan</b>																	
	Persentase Capaian OPD dengan kinerja sesuai target lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	95		95		95		95		100		95		95				Bappeda
	Persentase Capaian OPD dengan kinerja sesuai target lingkup Bidang PPM	90		90		90		90		100		90		90				Bappeda
	Persentase hasil rekomendasi yang ditindaklanjuti dan diimplementasikan bidang Perencanaan	80				80		80		100		80	-	100				Bappeda

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota Lalu (n-2) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Kabupaten/kota Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3		4		5		6		7 = 6/5 x100%		8= 4+6		9 = 8/3 x100%		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Perekonomian dan SDA															
	Persentase hasil rekomendasi yang ditindaklanjuti dan diimplementasikan bidang Perencanaan Prasarana Wilayah	75				75		75		100		75	-	100		Bappeda
	Persentase hasil rekomendasi yang ditindaklanjuti dan diimplementasikan bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan	80				80		80		100		80	-	100		Bappeda

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota Lalu (n-2) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3		4		5		6		7 = 6/5 x100%		8 =4+6		9 = 8/3 x100%		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tingkat Kesesuaian dan Keselarasan dokumen perencanaan OPD lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100				100		100		100		100	-	100		Bappeda
	Tingkat Kesesuaian dan Keselarasan dokumen perencanaan OPD lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	100				100		100		100		100	-	100		Bappeda
	Tingkat Kesesuaian dan Keselarasan dokumen perencanaan OPD lingkup Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan	100				100		100		100		100	-	100		Bappeda

1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x100%		8 = 4+6		9 = 8/3 x100%		10	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Pemerintahan																
KEUANGAN																	Urusan Bidang
<b>PROGRAM PENGELAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>Persentase Tingkat Kepatuhan Penganggaran</b>	100%	8,017,027,661	100%	6,585,028,150	100%	1,506,153,451	100%	1,949,821,356	100%	129%	100%	8,534,849,506	100%	106%		<b>BPKAD</b>
	Persentase kinerja penyalangan Akuntansi	97%	6,532,208,551	96%	6,305,787,250	97%	1,213,872,453	100%	2,417,325,866	100%	100%	97%	8,723,113,116	100%	134%		BPKAD
	Persentase Ketepatan Penyelesaian Administrasi Keuangan Bendahara OPD	97%	3,519,180,926	95%	4,330,785,799	97%	726,772,109	100%	1,510,088,200	100%	100%	97%	5,840,873,999	100%	166%		BPKAD
<b>PROGRAM PENGELAAN</b>	<b>Persentase Kinerja</b>	97%	34,302,111,578	100%	19,522,074,055	97%	10,216,140,592	100%	10,745,620,360	100%	105%	100%	30,267,694,415	100%	88%		<b>BPKAD</b>

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota Tahun (n-2) 2022		Capaian RPJMD Kabupaten/kota sampai RKPd Kabupaten/kota Tahun		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Kabupaten/kota Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3		4		5		6		7 = 6/5 x100%		8=4+6		9 = 8/3 x100%		10		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Aset Daerah																	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah yang digunakannya	78%	3,560,454,948	80%	1,955,905,155	78%	869,810,282	80%	1,399,867,137	80%	161%	80%	3,355,772,292	80%	94%			BPKAD
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Kepatuhan wajib pajak	77%	2,931,622,500	75%	2,662,302,000	77%	525,000,000	77%	2,839,045,700	77%	541%	77%	5,501,347,700	77%	188%			BAPEN DA
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pemenuhan ketersediaan dokumen perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah	100%	4,116,510,500	100%	2,551,627,750	100%	711,490,000	100%	1,464,362,890	100%	206%	100%	4,015,990,640	100%	98%			BAPEN DA
PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase Capaian	100	19,717,194,102	100.00%	12,920,346,750	100	5,956,750,000	111.82	674,394,500	111.82	11%	111.82	13,594,741,250	111.82	69%			BAPEN DA

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDP Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDP Kabupaten/kota Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPDP tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x100%		8 =4+6		9 = 8/3 x100%		10
PENDAPATAN DAERAH	Target Pajak Daerah															
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Layanan dan Pelaporan Data Informasi Pendapatan Daerah	100%	5,421,671,000	100%	3,064,377,550	100	1,010,000,000	100	3,847,291,050	100	381%	100	6,911,668,600	100	127%	BAPENDA
KEPEGAWAIAN																
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pemenuhan pengadaan ASN, Pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	100%	7,285,437,472	100.00%	4,356,504,032	100%	3,384,000,000	100%	1,720,678,113	100%	51%	100%	6,077,182,145	100%	83%	BKPSDM
	Persentase pemenuhan fasilitasi layanan mutasi dan promosi ASN	100%	1,961,104,400	100.00%	1,272,171,200	100%	785,000,000	100%	1,161,206,431	100%	148%	100%	2,433,377,631	100%	124%	BKPSDM

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota Lalu (n-2) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Kabupaten/kota Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3		4		5		6		7 = 6/5 x100%		8 =4+6		9 = 8/3 x100%		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Persentase ASN yang tidak mendapatkan hukuman disiplin	99,6 %	2,283,549,600	99.79%	1,774,895,600	99,6 %	750,000,000	99.8%	745,229,000	99.8 %	99 %	99.8 %	2,520,124,600	99.8%	110 %	BKPSDM
	Persentase capaian pengembangan karir sesuai kompetensi ASN	100 %	5,373,228,950	85.32%	3,500,225,350	100 %	610,000,000	94.06 %	1,115,189,398	94.1 %	183 %	94.1 %	4,615,414,748	94.1%	86 %	BKPSDM
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																Urusan Bidang
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>Persentase aparatur yang mendapatkan pengembangan kompetensi Teknis, manajerial, fungsional dan latsar/prajabatan</b>	<b>100 %</b>	<b>27,745,782,571</b>	<b>100.00%</b>	<b>16,601,832,591</b>	<b>100%</b>	<b>8,592,765,000</b>	<b>100%</b>	<b>6,149,073,600</b>	<b>100 %</b>	<b>72 %</b>	<b>100 %</b>	<b>22,750,906,191</b>	<b>100%</b>	<b>82 %</b>	<b>BKPSDM</b>

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota Lalu (n-2) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3		4		5		6		7 = 6/5 x100%		8 = 4+6		9 = 8/3 x100%		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																Urusan Bidang
<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	Persentase Implementasi Kebijakan Hasil Litbang	100%	4,284,337,800	100%	3,950,018,200	100%	600,000,000	100%	1,211,888,657	100%	202%	100%	5,161,906,857	100%	120%	Bappeda
	Persentase Inovasi Daerah yang diimplementasikan	100%	2,815,567,500	100%	1,664,840,490	100%	1,100,000,000	100%	1,267,368,710	100%	115%	100%	2,932,209,200	100%	104%	Bappeda
<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>																Urusan
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	Menurunnya Jumlah temuan hasil pemeriksaan	95%	17,511,308,500	87.59%	8,453,959,500	95	4,859,830,000	100	5,608,008,890	105.26	115%	100	14,061,968,390	105.26	80%	Inspektorat

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota Lalu (n-2) 2022		Capaian RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan Kabupaten/kota Tahun (n-2) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3		4		5		6		7 = 6 / 5 x100%		8 = 4+6		9 = 8 / 3 x100%		10		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	31.808	4,693,341,000	31.522	845,405,000	31.808	2,208,211,000	3.16	2,052,509,946	31.81	93%	3.16	2,897,914,946	9.93	62%			Inspektorat
UNSUR KEWILAYAHAN																		Urusan
7.01 KECAMATAN																		Urusan Bidang
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Tigaraksa	100	10,075,800,000	88.62	7,424,188,679.00	100	2,300,000,000	100	2,194,557,563.00	100	95%	100	9,618,746,242	100	95%			Kec. Tigaraksa

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2) 2022		Capaian RPJMD sampai dengan RPJMD Kabupaten/kota Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3		4		5		6		7 = 6 / 5 x100%		8=4+6		9 = 8 / 3 x100%		10		
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Tigaraksa	96.2	19,247,700,000	93.6	20,072,161,000.00	96.2	4,100,000,000	96.2	12,293,854,600.00	100	300%	96.2	32,366,015,600	100	168%	Kec. Tigaraksa		
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Cikupa</b>	95.52	4,356,143,830	88.9	3,106,143,830	95.52	1,250,000,000	95.52	1,037,155,686	100	83%	95.52	4,143,299,516	100	95%	Kec. Cikupa		
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Cikupa	98	41,216,054,626	89	39,916,054,626	98	1,300,000,000	98	11,523,267,184	100	886%	98	51,439,321,810	100	125%	Kec. Cikupa		
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN</b>	<b>Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar</b>	100%	2,430,442,500	100%	1,771,692,500	100	355,000,000	100	319,358,467	100	90%	100	2,091,050,967	100	86%	Kec. Panongan		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota Lalu (n-2) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Kabupaten/kota Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		3		4		5		6		7 = 6/5 x100%		8= 4+6		9 = 8/3 x100%			10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
<b>PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Kecamatan Panongan</b>																
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Panongan	100%	24,235,325,876	100%	19,266,276,800	100	5,492,466,792	100	12,315,637,000	100	224%	100	31,581,913,800	100	130%		Kec. Panongan
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai standar Kecamatan Curug</b>	80.00	6,338,902,600	80	4,702,820,600	80	1,553,400,000	80	1,472,721,877	100	95%	80	6,175,542,477	100	97%		<b>Kec. CURUG</b>
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Curug	88.00	44,482,024,424	88	53,906,546,095	88	2,563,412,180	88	18,852,338,250	100	735%	88	72,758,884,345	100	164%		Kec. CURUG

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota Lalu (n-2) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Kabupaten/kota Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD tahun)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		3		4		5		6		7 = 6/5 x100%		8 =4+6		9 = 8/3 x100%			10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
DAN PELAYANAN PUBLIK																	
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar</b>	100%	1,452,667,000	99,36%	1,512,212,204	100	508,000,000	100	537,561,948	100	106%	100	2,049,774,152	100	141%		Kec. Legok
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	90%	15,603,759,168	99,40%	16,435,085,600	90	3,985,000,000	100	14,081,061,600	100	353%	100	30,516,147,200	100	196%		Kec. Legok
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERIN</b>	<b>Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai</b>	100%	6,175,608,188	95	5,419,491,688	100	515,000,000	100	229,036,368	100	44%	100	5,648,528,056	100	91%		Kec. Pasar Kemis

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota Lalu (n-2) 2022		Capaian RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RPKD Kabupaten/kota Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Kabupaten/kota Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD tahun)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3		4		5		6		7 = 6/5 x100%		8=4+6		9 = 8/3 x100%		10		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
<b>TAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	dengan standar																	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	90%	26,358,699,299	86	15,940,825,575	90	7,370,550,086	90	5,556,049,000	90	75%	90	21,496,874,575	90	82%			Kec. Pasar Kemis
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar</b>	100%	2,074,243,900	100	738,301,400	100	355,000,000	100	204,784,000	100	58%	100	943,085,400	100	45%			Kec. Balara ja
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	100%	19,599,344,684	89	41,471,083,900	100	3,682,000,000	100	9,102,765,800	100	247%	100	50,573,849,700	100	258%			Kec. Balara ja

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		3		4		5		6		7 = 6 / 5 x100%		8 = 4 + 6		9 = 8 / 3 x100%			10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	100	1,387,000,000	88.86%	652,464,000	100	275,000,000	100	197,912,540	100	72%	100	850,376,540	100	61%	Kec. Kresek	
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	100	13,434,295,100	88.86%	9,235,995,100	100	3,320,000,000	100	4,078,183,500	100	123%	100	13,314,178,600	100	99%	Kec. Kresek	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	95%	982,500,000	100	714,483,000	95	245,000,000	95	275,897,536	100	113%	95	990,380,536	100	101%	Kec. Kronjo	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	95%	43,196,587,546	80	35,155,080,300	95	7,500,000,000	95	6,438,371,650	100	86%	95	41,593,451,950	100	96%	Kec. Kronjo	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota Lalu (n-2) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDP Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDP Kabupaten/kota Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPDP tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		3		4		5		6		7 = 6/5 x100%		8 =4+6		9 = 8/3 x100%			10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
TAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																	
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH TAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar</b>	100%	2,408,467,000	100%	2,296,511,000	100	355,000,000	100	666,966,500	100	188%	100	2,963,477,500	100	123%	Kee. Mauk	
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	100%	20,655,759,514	100%	25,287,666,400	100	3,682,000,000	100	9,955,821,786	100	270%	100	35,243,488,186	100	171%	Kee. Mauk	
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH TAHAN DAN PELAYANAN</b>	<b>Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar</b>	100%	1,081,300,000	88.86%	583,141,250	100	352,100,000	100	179,200,000	100	51%	100	762,341,250	100	71%	Kee. Rajeg	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2) 2022		Capaian RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan Kabupaten/kota Tahun (n-2) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPDP Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDP Kabupaten/kota Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPDP tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
<b>AN PUBLIK</b>																		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	100%	19,086,469,427	88.86%	21,918,678,757	100	3,714,600,000	100	10,427,195,200	100	281%	100	32,345,873,957	100	169%			Kee. Rajeg
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar</b>	100%	1,327,877,000	100%	768,608,000	100	350,000,000	100	513,703,620	100	147%	100	1,282,311,620	100	97%			<b>Kee. SEPATAN</b>
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	90%	52,304,250,250	87%	35,663,554,600	90	10,231,100,000	90	7,882,052,000	90	77%	90	43,545,606,600	90	83%			Kee. SEPATAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota Lalu (n-2) 2022		Capaian RPJMD sampai dengan RKPDP Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPDP Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDP Kabupaten/kota Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPDP tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		3		4		5		6		7 = 6/5 x100%		8=4+6		9 = 8/3 x100%		10			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
PELAYANAN PUBLIK																			
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	100%	2,025,000,000	100%	1,288,399,800	100	500,000,000	100	185,166,700	100	37%	100	1,473,566,500	100	73%				Kec. Teluknaga
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	100%	2,025,000,000	100%	19,398,587,630	100	500,000,000	100	14,896,123,000	100	2979%	100	34,294,710,630	100	1694%				Kec. Teluknaga
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN</b>	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	100%	1,372,244,474	100	1,015,193,900	100	337,427,134	100	260,414,245	100	77%	100	1,275,608,145	100	93%				Kec. Cisoka

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2) 2022		Capaian RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan Kabupaten/kota Tahun (n-2) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x100%		8 = 4+6		9 = 8/3 x100%		10		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Cisoka																	
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Cisoka	100%	40,654,981,991	100	37,632,831,500	100	4,889,822,752	100	9,422,051,000	100	193%	100	47,054,882,500	100	116%			Kec. Cisoka
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	100%	853,255,000	100%	731,480,500	100	191,100,000	100	194,235,500	100	102%	100	925,716,000	100	108%			Kec. Pakuhaji
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	100%	31,494,913,245	100%	31,928,248,427	100	3,464,715,500	100	7,218,076,500	100	208%	100	39,146,324,927	100	124%			Kec. Pakuhaji

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota Lalu (n-2) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		3		4		5		6		7 = 6/5 x100%		8= 4+6		9 = 8/3 x100%			10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
AN PUBLIK																	
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar</b>	100%	1,216,444,400	100	1,006,291,800	100	250,000,000	100	224,803,769	100	90%	100	1,231,095,569	100	101%		Kee. Kosambi
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	100%	39,273,720,148	100	31,849,566,162	100	5,770,300,000	100	17,321,348,525	100	300%	100	49,170,914,687	100	125%		Kee. Kosambi
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar</b>	87.50%	856,855,000	85.00%	708,415,370	87.5	160,340,000	87.5	197,614,240	100.9	123%	87.5	906,029,610	100.9	106%		Kee. Cisauk

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2) 2022		Capaian RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan Kabupaten/kota Tahun (n-2) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3		4		5		6		7 = 6 / 5 x100%		8 =4+6		9 = 8 / 3 x100%		10		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	85%	37,111,582,614	82.50%	37,839,834,000	85	3,735,273,096	85	12,302,123,000	100	329%	85	50,141,957,000	100	135%	Kec. Cisauk		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	100%	890,335,000	100%	721,876,300	100	175,000,000	100	181,398,900	100	104%	100	903,275,200	100	101%	Kec. Gunung Kaler		
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	100%	34,640,618,800	100%	21,582,752,355	100	3,000,000,000	100	4,696,619,545	100	157%	100	26,279,371,900	100	76%	Kec. Gunung Kaler		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Jambe	100%	1,474,985,000	88.86%	1,209,501,700	100	370,100,000	100	256,498,398	100	69%	100	1,466,000,098	100	99%	Kec. Jambe		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota Lalu (n-2) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3		4		5		6		7 = 6 / 5 x100%		8 = 4+6		9 = 8 / 3 x100%		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
AN PUBLIK																
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Jambe	100%	18,591,328,540	88.86%	16,135,620,700	100	3,303,131,840	100	5,522,461,499	100	167%	100	21,658,082,199	100	116%	Kec. Jambe
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	73%	1,071,307,000	67.89%	808,638,200	72.5	256,131,200	72.5	193,003,088	100	75%	72.5	1,001,641,288	100	93%	Kec. Jayanti
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	85%	28,667,201,996	75.00%	24,238,199,561	85	4,765,983,000	85	4,689,441,000	100	98%	85	28,927,640,561	100	101%	Kec. Jayanti
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai	100%	2,408,467,000	84.00%	1,755,580,050	100	355,000,000	100	190,834,000	100	54%	100	1,946,414,050	100	81%	Kec. Kemiri

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2) 2022		Capaian RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan Kabupaten/kota Tahun 2023 (Tahun Berjalan 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Anggaran Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Kabupaten/kota Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x100%		8 =4+6		9 = 8/3 x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
TAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	dengan standar															
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	100%	20,655,759,514	90.00%	16,146,156,835	100	3,682,000,000	100	4,549,492,000	100	124%	100	20,695,648,835	100	100%	Kec. Kemiri
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	100%	2,164,370,500	100%	1,627,758,560	100	376,140,000	100	229,933,692	100	61%	100	1,857,692,252	100	86%	Kec. Mekar Baru
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	100%	19,356,797,471	100%	19,932,798,560	100	1,600,000,000	100	4,465,258,633	100	279%	100	24,398,057,193	100	126%	Kec. Mekar Baru

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota Lalu (n-2) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3		4		5		6		7 = 6/5 x100%		8=4+6		9 = 8/3 x100%		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	100%	18,826,212,354	100	35,116,534,777	100	1,841,656,580	100	7,935,318,855	100	431%	100	43,051,853,632	100	229%	Kec. PAGEDANGAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	90%		99,17		90		90		90		90		90		Kec. PAGEDANGAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	100%	1,201,368,285	100%	690,655,600	100	321,711,885	100	305,805,453	100	95%	100	996,461,053	100	83%	Kec. Sepatan Timur

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota Lalu (n-2) 2022		Capaian RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan Kabupaten/kota Tahun (n-2) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3		4		5		6		7 = 6 / 5 x100%		8 = 4+6		9 = 8 / 3 x100%		10			
AN PUBLIK																			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	100%	19,066,859,819	100%	19,383,216,612	100	2,134,978,205	100	6,641,229,000	100	311%	100	26,024,445,612	100	136%			Kec. Sepatan Timur	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	100%	1,261,328,600	88,86%	1,084,717,201	100	187,111,400	100	212,938,920	100	114%	100	1,297,656,121	100	103%			Kec. Sindang Jaya	
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	90%	43,187,079,366	86,00%	42,627,335,989	90	1,764,916,158	90	4,304,355,400	90	244%	90	46,931,691,389	90	109%			Kec. Sindang Jaya	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3		4		5		6		7 = 6 / 5 x100%		8 = 4+6		9 = 8 / 3 x100%		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Solcar	95%	982,500,000	80%	698,370,010	95	245,000,000	95	195,034,173	100	80%	95	893,404,183	100	91%	Kec. Solcar
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Solcar	95%	43,196,587,546	80%	33,658,010,308	95	7,500,000,000	95	7,964,307,914	100	106%	95	41,622,318,222	100	96%	Kec. Solcar
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	100%	1,550,000,000	100	849,739,800	100	350,000,000	100	188,967,698	100	54%	100	1,038,707,498	100	67%	Kec. Sukamulya
	Prosentase infrastruktur	100%	12,460,000,000	40	13,939,010,000	100	2,982,000,000	100	5,802,147,238	100	195%	100	19,741,157,238	100	158%	Kec. Sukamulya

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota Lalu (n-2) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		3		4		5		6		7 = 6 / 5 x100%		8 = 4 + 6		9 = 8 / 3 x100%			10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
	dasar dalam kondisi baik																
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar</b>	100%	2,085,000,000	89%	968,235,737	100	720,000,000	100	268,673,953	100	37%	100	1,236,909,690	100	59%		Kec. Sukadiri
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	90%	24,606,712,594	82%	26,828,589,561	90	800,000,000	90	4,144,020,406	100	518%	90	30,972,609,967	100	126%		Kec. Sukadiri
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kelapa Dua</b>	100.00	11,939,416,800	99.78	3,470,777,000	100	3,750,000,000	100	3,284,330,660	100	88%	100	6,755,107,660	100	57%		Kec. Kelapa Dua

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2) 2022		Capaian RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3		4		5		6		7 = 6/5 x100%		8 =4+6		9 = 8/3 x100%		10		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kelapa Dua	100.00	18,303,652,577	99.78	25,140,182,538	100	2,805,000,000	100	8,781,619,000	100	313%	100	33,921,801,538	100	185%		Kec. Kelapa Dua	
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan</b>	75%	9,751,000,000	70%	6,492,424,619.00	75	2,070,000,000	75	1,605,041,803.00	100	78%	75	8,097,466,422	100	83%		Kec. Tigaraksa	
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan</b>	75%	12,879,611,192	66%	9,674,611,192	75	3,205,000,000	75	2,690,162,543	100	84%	75	12,364,773,735	100	96%		Kec. Cikupa	
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/</b>	30	6,014,806,400	20%	5,297,674,029	30	1,103,961,400	30	2,518,788,226	100	228%	30	7,816,462,255	100	130%		Kec. Panongan	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2) 2022		Capaian RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan Kabupaten/kota Tahun (n-2) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Kabupaten/kota Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3		4		5		6		7 = 6/5 x100%		8=4+6		9 = 8/3 x100%		10		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
DESA DAN KELURAHAN	pemberdayaan																	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	78.00%	13,358,471,457	78	14,152,163,999	78	3,114,014,300	78	3,272,071,330	100	105%	78	17,424,235,329	100	130%			Kee. CURUG
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	85%	4,914,690,268	96,90%	5,136,182,800	85	635,000,000	85	1,845,150,709	100	291%	85	6,981,333,509	100	142%			Kee. Legok
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pembinaan/	85%	19,798,991,660	85%	31,616,925,604	85%	5,395,173,776	85%	20,705,066,710	85%	384%	85%	52,321,992,314	85%	264%			Kee. Pasar Kemis

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2) 2022		Capaian RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan Kabupaten/kota Tahun 2023 (Tahun Berjalan 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKP Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Kabupaten/kota Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x100%		8 =4+6		9 = 8/3 x100%		10
DAN KELURAHAN	pemberdayaan															
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	88	6,845,394,121	75	4,479,512,852	88	1,737,739,221	88	2,274,758,195	100	131%	88	6,754,271,047	100	99%	Kec. Balaraja
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	88	2,655,300,000	75%	1,973,659,600	88	750,000,000	88	756,844,140	100	101%	88	2,730,503,740	100	103%	Kec. Kresek
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	88	250,000,000	88	3,713,103,490	88	50,000,000	88	867,875,213	100	1736%	88	4,580,978,703	100	1832%	Kec. Kronjo

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja Kabupaten/kota dengan RPJMD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2) 2022		Capaian RPJMD sampai dengan RPJMD Kabupaten/kota Tahun		Target Kinerja dan Anggaran RKP Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKP Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Kabupaten/kota Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3		4		5		6		7 = 6/5 x100%		8 =4+6		9 = 8/3 x100%		10		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
DAN KELURAHAN	pemberdayaan																	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	88	7,309,744,300	100%	3,576,584,400	88	1,792,000,000	88	992,783,291	100	55%	88	4,569,367,691	100	63%			Kec. Mauk
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	100%	6,279,652,113	88.86%	5,932,715,195	88.86	1,864,600,000	100	4,020,852,487	100	21.6%	100	9,953,567,682	100	15.9%			Kec. Rajeg
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	85%	9,680,464,050	60%	7,619,495,759	85	2,423,600,000	85	1,972,642,779	85	81%	85	9,592,138,538	85	99%			Kec. SEPATAN